

# **SUMATERA SELATAN DIPANDANG DARI SUDUT GEOGRAFI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN**

Disusun oleh:

**TEAM PELAKSANA KEGIATAN**

**Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional  
Bidang Sejarah – Antropologi**

Direktorat  
layaan

5 981 6

ID

3

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional  
Direktorat Jenderal Kebudayaan  
1972.

# **SUMATERA SELATAN DIPANDANG DARI SUDUT GEOGRAFI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN**

Disusun oleh:

**TEAM PELAKSANA KEGIATAN  
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional  
Bidang Sejarah – Antropologi**

**Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional  
Direktorat Jenderal Kebudayaan  
1972.**

Team penyusun :

1. Drs. Djenen, M.Sc.
2. Drs. P. Wayong
3. Sutrisno, Kutoyo
4. Drs. Sunyoto K.
5. Sagimun Mulus Dumuadi
6. Darwis Saramat, B.A.

*Editor : Drs. Djenen, MSc.*

## Kata Pengantar

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional yang mulai dilaksanakan tahun 1972, bertujuan untuk menyelamatkan, memelihara dan mengembangkan warisan budaya. Kegiatan yang dilakukan adalah penggalian, penelitian, penerbitan dan pengembangan seni budaya, terutama yang sedang mengalami proses menghilang atau punah.

Sasaran yang hendak dicapai adalah penyusunan dokumentasi katalog naskah Melayu – Etnografi – Archaeologi – Museum Bali dan Numimastik, Monografi, Kepurbakalaan, Lagu Angklung, Angklung Petunjuk Praktis, Seni Karya dan Seni Tari – Musik.

Dengan telah selesainya penyusunan dokumentasi Monografi Propinsi Sumatera Selatan dengan judul: Sumatera Selatan dipandang dari Sudut Geografi, Sejarah dan Kebudayaan, oleh Team Pelaksana kegiatan proyek bidang Sejarah – Antropologi (LSA), pimpinan proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional mengucapkan terima kasih kepada Team dan semua pihak yang membantu penyusunan dokumentasi tersebut.

Mudah-mudahan dengan adanya dokumentasi ini dapat bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan seni budaya bangsa dalam rangka mempertebal kepribadian bangsa, kebanggaan nasional dan kesatuan nasional.

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi  
Kebudayaan Nasional, Direktorat Jen-  
dral Kebudayaan, Departemen P dan K.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	3
Pendahuluan .....	7
<b>BAGIAN PERTAMA : ASPEK GEOGRAFI</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB I. : SUMBER ALAM</b> .....	<b>11</b>
A. Letak dalam luas .....	11
B. Iklim .....	12
C. Raut muka tubuh bumi .....	27
D. Geologi .....	28
E. Tanah .....	28
F. Vegetasi .....	30
G. Sungai dan danau .....	32
H. Barang tambang .....	33
<b>BAB II. : SUMBER MANUSIA</b> .....	<b>36</b>
A. Perkembangan jumlah penduduk .....	36
B. Kepadatan penduduk .....	38
C. Susunan penduduk .....	41
D. Keluarga (rumah tangga) .....	45
E. Penduduk desa dan kota .....	48
F. Pendidikan .....	49
G. Transmigrasi .....	51
<b>BAB III. : MATA PENCAHARIAN</b> .....	<b>53</b>
A. Pertanian .....	53
B. Perindustrian .....	68
C. Perhubungan dan perdagangan .....	70
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>72</b>
<b>BAGIAN KEDUA : ASPEK SEJARAH</b> .....	<b>75</b>
<b>BAB IV : DARI ZAMAN PRASEJARAH HINGGA ZAMAN KESULTANAN PALEMBANG</b> .....	<b>77</b>
A. Prasejarah di Sumatera Selatan .....	77
B. Zaman Sriwijaya di Sumatera Selatan .....	78
<b>BAB V : DARI ZAMAN KESULTANAN PALEMBANG HINGGA RUNTUHNYA HINDIA BELANDA</b> .....	<b>86</b>
A. Pendahuluan .....	86
B. Peranan Aria Damar .....	88
C. Kyai Gede Sura .....	90

D.	Raja-raja sesudah Kyai Gede Sura sampai pemerintahan Pangeran Seding Kenayan . . . . .	93
E.	Pemerintahan Pangeran Seding Kenayan . . . . .	95
F.	Menjelang pemerintahan Sultan Abdurrakhman . . . . .	96
G.	Pemerintahan Sultan Abdurrakhman . . . . .	98
H.	Zaman pemerintahan Sultan Muhammad Mansur, Sultan Agung dan Sultan Anom . . . . .	102
I.	Pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin . . . . .	107
J.	Kehidupan sosial-ekonomi dan tata-negara di kesultanan Palembang . . . . .	111
K.	Pemerintahan Sultan Ratu Akhmad Najamuddin . . . . .	115
L.	Zaman pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin . . . . .	116
M.	Keadaan terakhir di kesultanan Palembang . . . . .	123
N.	Sumatera Selatan di bawah pemerintahan Hindia Belanda . . . . .	134
O.	Pergerakan Nasional . . . . .	138
<b>BAB VI</b>	<b>: ZAMAN JEPANG DAN REVOLUSI FISIK . . . . .</b>	<b>144</b>
A.	Zaman Jepang . . . . .	144
B.	Revolusi fisik . . . . .	147
	<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN . . . . .</b>	<b>156</b>
	<b>BAGIAN KETIGA : ASPEK ANTROPOLOGI . . . . .</b>	<b>161</b>
<b>BAB VII</b>	<b>: PEMERINTAHAN DAN SUSUNAN MASYARAKAT . . . . .</b>	<b>163</b>
A.	Undang Undang Simbur Cahaya . . . . .	163
B.	Sistim pemerintahan . . . . .	164
C.	Susunan masyarakat di Sumatera Selatan . . . . .	169
<b>BAB VIII</b>	<b>: DAUR HIDUP . . . . .</b>	<b>176</b>
A.	Kelahiran . . . . .	176
B.	Perkawinan . . . . .	182
C.	Kematian . . . . .	195
<b>BAB IX</b>	<b>: ADAT BUJANG GADIS DI DAERAH PALEMBANG . . . . .</b>	<b>197</b>
A.	Gelar dan tugas . . . . .	197
B.	Peraturan Bujang gadis . . . . .	199
	<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN . . . . .</b>	<b>205</b>

## PENDAHULUAN

Buku ini hanyalah suatu uraian tentang lingkungan alam, penduduk, sejarah, dan kebudayaan di propinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu bagian dari Indonesia. Tidak ada suatu masalah teoritis pun yang dikemukakan.

Sungguhpun aspek yang dibahas cukup luas, tidaklah berarti menggambarkan Sumatera Selatan secara lengkap dan mendalam. Lagi pula, keragaman aspek yang diuraikan tercermin dalam cara pendekatannya.

Aspek-aspek tersebut di atas disusun dalam tiga bagian. Bagian pertama lebih menggambarkan Sumatera Selatan pada masa sekarang. Propinsi ini dilihat sebagai suatu daerah atau wilayah yang mengandung sumber alam dan sumber manusia tertentu, serta hubungan antara keduanya. Kesemuanya didasarkan pada informasi statistik di sekitar tahun 1970-an dan diolah dengan beberapa teknik kuantitatif, seperti "Linear regression" dan "Location quotient", yang masing-masing menggambarkan perkembangan dan konsentrasi sesuatu hal atau kegiatan di seluruh Sumatera Selatan dan di bagian-bagiannya.

Bagian kedua lebih menggambarkan masa lampau Sumatera Selatan. Sebagaimana dengan wilayah Indonesia yang lain, data zaman Prasejarah Sumatera Selatan pun sangat kurang. "Ke maritim" dan penemuan sumber-sumber alam Sumatera Selatan tampak jelas sejak zaman sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat, sehingga masa lampau daerah ini tidak terbatas pada kehidupan politik saja, tetapi juga meliputi perkembangan sosial-ekonomi.

Disamping itu, uraian yang semakin mendekati masa sekarang jelas menunjukkan perjuangan penduduk Sumatera Selatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia.

Bagian ketiga dititik-beratkan kepada beberapa aspek kebudayaan penduduk Sumatera Selatan. Susunan masyarakat tradisional ternyata masih mempunyai nilai praktis terutama dalam organisasi pemerintahan lokal.

Berbagai adat-kebiasaan dalam kehidupan seseorang sebagai anggota masyarakat diuraikan pula dengan menggunakan pendekatan "life cycle".

Dengan uraian ketiga bagian tersebut di atas, tergambarlah wajah Sumatera Selatan baik di masa lampau maupun hasilnya yang terlihat di masa sekarang yang tentunya akan berlanjut ke masa datang.

**BAGIAN PERTAMA**

**ASPEK GEOGRAFI**



## Bab I

### SUMBER ALAM

#### A. LETAK DAN LUAS

Propinsi Sumatera Selatan dibatasi di sebelah utara oleh propinsi Jambi dan Laut Cina Selatan, di sebelah timur oleh Selat Karimata dan Laut Jawa, di sebelah selatan oleh Propinsi Lampung, dan disebelah barat oleh propinsi Bengkulu.

Menilik batas-batas tersebut diatas, maka nama *Sumatera Selatan* yang secara geografis mencakup seluruh bagian selatan pulau Suamtera, sudah tidak tepat karena tidak meliputi lagi Bengkulu dan terutama Lampung yang letaknya lebih ke selatan daripada Sumatera Selatan.

Wilayah Sumatera Selatan terletak pada beberapa jenis jalur geologis. Pulau Bangka, Biliton dan sedikit pesisir Sumatera Selatan terletak dalam *zone timah*. Sebagian besar Sumatera Selatan merupakan daerah yang ditandai dengan bahan-bahan pre-tercier. Lebih ke barat dari zone ini terdapat daerah yang disebut *Vor-Barisan* dan *Schiefer Barisan* (1, p. 664, 667). Daerah Vor-Barisan terdiri dari granit dan sedimen daratan, yang berasal dari zaman permo-karbon, sedangkan daerah Schiefer Barisan terdiri dari sedimen batial sampai neritis.

Propinsi ini terletak antara  $102^{\circ}$  dan  $108^{\circ}$  Bujur Timur (BT), serta antara  $1^{\circ}30'$  dan  $4^{\circ}$  Lintang Selatan (LS). Wilayah ini dilintasi oleh bujur timur  $105^{\circ}$ , yang menjadi dasar penentuan Waktu Indonesia Barat. Sedang letak lintangnya dekat benar dengan katulistiwa.

Luas propinsi Sumatera Selatan 103.268 km<sup>2</sup>. Berdasarkan luasnya, propinsi ini merupakan nomor dua di Sumatera sesudah Riau (124.084), serta menempati urutan keenam di Indonesia sesudah Irian Jaya (412.781), Kalimantan Timur (202.619), Kalimantan Barat (157.066), Kalimantan Tengah (156.522), dan Riau seperti tersebut diatas (4, p. 1).

Propinsi ini meliputi dua pulau yang tergolong pulau-pulau besar di Indonesia, yaitu Bangka (11.614 km<sup>2</sup>) dan Belitung (4.430 km<sup>2</sup>). Jika kota

Palembang dijadikan titik pusat suatu lingkaran, maka Belitung terletak pada ujung radius yang sama jauhnya dengan Telukbetung di Lampung, dan bahkan lebih jauh daripada kota Jambi.

## B. IKLIM

Berdasarkan angka *hujan rata-rata tahunan*, maka wilayah Sumatera Selatan memiliki dua jenis daerah hujan. Pertama, daerah yang mengalami curah hujan 3000 mm dan lebih, yaitu di daerah pegunungan dekat perbatasan propinsi Bengkulu, dan Bangka bagian utara, serta kedua, daerah yang mengalami curah hujan antara 2000 – 3000 mm yaitu di daerah selebihnya, terutama di daerah rendah.

Curah hujan terbesar terjadi dalam periode muson barat (Desember, Januari dan Pebruari), terutama dalam bulan Desember. *Hujan rata-rata* bulanan dalam bulan ini adalah 300 mm dan lebih, untuk seluruh Sumatera Selatan. Hal ini terutama disebabkan oleh muson barat laut yang merupakan belokan angin timur laut dari Samudera Pasifik, kedudukan *konvergensi antar tropis* yang melintasi Sumatera, dan oleh adanya daerah tekanan rendah (Low) yang berpusat di daerah Kroe.

Dalam musim pancaroba pertama (Maret, April dan Mei) angin diatas Sumatera Selatan berhembus dari arah baratdaya, karena daerah tekanan rendah berpusat di Selat Krimata. Untuk Sumatera Selatan, angin ini merupakan angin darat. Uap air dari Samudera Indonesia terhalang oleh Bukit Barisan sehingga daerah ini menjadi daerah bayangan hujan. Selama periode ini hanya dalam bulan Maret turun banyak hujan yaitu 200 – 300 mm, di daerah Ogan bagian hulu dan tengah. Dalam bulan April menurun, dan amat kurang dalam bulan Mei yaitu 150 – 200 mm.

Muson timur (Juni, Juli dan Agustus) merupakan periode yang terkurang hujannya di Sumatera Selatan. Dalam bulan Juni dan Agustus, *hujan rata-rata bulanan* 100 – 150 mm, sedangkan dalam bulan Juli terdapat hujan rata-rata 100 mm dan kurang di daerah hilir Lematang. Dalam periode ini bertiup angin tenggara dari daratan Australia.

Dalam musim pancaroba ke dua (September, Oktober dan Nopember) arah angin masilir seperti selama muson timur. Curah hujan berangsur bertambah, sehingga dalam bulan Nopember mencapai rata-rata 200 – 300 mm sebulan (5, p. 14, dan peta 1 – 13).

Dari Tabel I.I dapat dilihat daerah yang mengalami hujan rata-rata tahunan 3000 mm dan lebih, serta yang mengalami 2000 – 3000 mm. Daerah pertama meliputi kabupaten MURA, Lahat, OKU, dan bagian utara Bangka. Daerah kedua meliputi kabupaten OKI, kotamadya Palembang, LIOT, MUBA, kotamadya Pangkal Pinang, bagian selatan Bangka, dan Belitung.

Walaupun tidak lengkap, Lembaga Meteorologi dan Geofisika Pusat, mempunyai sejumlah data meteorologi yang diamati di Palembang, Pangkal Pinang,

TABEL I.I.

Tempat pengukuran hujan, jumlah hujan dan hari hujan setahun serta rata-ratanya, di propinsi Sumatera Selatan, menurut kabupaten tahun 1971

Kabupaten/ Kodya	Tempat pengukuran	Tinggi (m)	Jumlah hujan setahun (mm)	Jumlah hari hujan setahun	Rata-rata hujan sebulan (mm)	Rata-rata hari hujan sebulan
I. Kodya Palembang	1. Sekojo	—	2091	99	174,3	0,2
	2. Sukamaju	12	2770	152	230,8	12,7
	3. Lebak-berayun	—	2304	110	192	9,1
II. Kabupaten Ogan Komerling	4. Muarakuang	14	2303	135	191,9	11,2
	5. Tanjung Raja	8	2746	142	142	11,8
	6. Indralaya	5	2131	142	179,2	11,8
	7. Tanjung Batu	14	2033	102	169,4	8,5
	8. Tanjung Lubuk	10	2094	75	174,5	6,2
	9. Pedamaran	8	2549	107	212,4	8,9
	10. Kayu Agung	6	2639	147	219,9	12,2
	11. Sp. Padang	8	2808	153	234	12,7
	12. Pampangan	8	laporan tidak masuk			
	III. Kabupaten Ogan Komerling Ulu (OKU)	13. Baturaja	49	2888	149	197
14. Raksajiwa		75	2683	191	223,5	15,9
15. Pengadonan		300	rusak			
16. Peninjauan		38	2368	136	215,1	12,3
17. Martapura		87	2431	201	202,6	16,7
18. Buay Madang		67	2683	151	223,5	12,5

Kabupaten/ Kodya	Tempat pengukuran	Tinggi (m)	Jumlah hujan setahun (mm)	Jumlah hari hujan setahun	Rata-rata hujan sebulan (mm)	Rata-rata hari hujan sebulan
IV. Kabupaten Lahat	19. Cempaka	42	2332	113	233,2	11,5
	20. Belitang	51	3213	202	267,8	16,8
	21. Muaradua	117	2535	202	211,2	9
	22. Lahat	112	2299	111	191,5	9,2
	23. Pagar Alam	705	3140	171	262,3	14,2
	24. Tebing Tinggi	104	rusak,-			
	25. Tanjung Sakti	540	rusak.			
V. Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT)	26. Muara Pinang	405	1883	163	156,9	13,5
	27. Tanjung Tebat	374	2071	142	172,5	11,1
	28. Semenda	825	2362	155	196,8	13
	29. Tanjung Agung	200	laporan tidak lengkap.			
	30. Muara Enim	37	2818	101	234,9	8,4
	31. Gunung Meang	23	laporan tidak masuk.			
	32. Pendopo	40	3505	141	292	11,7
	33. Prabumulih	36	2983	148	248,5	12,3
VI. Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA)	34. Gelumbang	20	laporan tidak lengkap.			
	35. Sekayu	8	2224	167	185,3	13,9
	36. Babat	15	2442	159	203,5	13,2
	37. Bayung Lincir	rusak.				
	38. Sungai Lilin	7	2852	116	237,6	9,7
	39. Cinta Manis		1732	79	157,5	7,1
	40. Sungsang		1989	101	165	8,4
41. Pangkalan Balai	10	1997	111	166,4	9,2	

Kabupaten/ Kodya	Tempat pengukuran	Tinggi (m)	Jumlah hujan setahun (mm)	Jumlah hari hujan setahun	Rata-rata hujan sebulan (mm)	Rata-rata hari hujan sebulan
VII. Kabupaten Belitung	42. Tg. Pandan	—	2314	143	192,8	11,1
	43. Pegarum	—	2015	87	167,9	7,2
	44. Kelapa Kampit	—	4149	129	345,8	10,7
	45. Manggar	13	2215	136	184	11,3
	46. Gandung	—	2044	77	170,3	6,4
	47. Air Cengkoh	—	2679	163	223,2	13,6
VIII. Kabupaten Bangka	48. Pk. Pinang	20	2397	194	199,7	14,5
	49. S. Liat	10	2419	118	219,9	10,7
	50. Belinyu	15	2676	132	223	11
	51. Kelapa	20	2056	136	176,3	11,3
	52. Mentok	5	3288	115	274	9,8
	53. Toboali	16	2586	183	235	16,5
IX. Kodya Pk. Pinang	54. Payung	20	rusak.			
	55. Pk. Pinang	12	2038	119	164,8	9,9
X. Kabupaten Musi Rawas (MURA)	56. Lubuk Linggau	130	3517	164	293	13,6
	57. Tugu Mulyo	70	2647	136	290,5	11,3

Sumber: Dinas Pertanian Rakyat,  
Propinsi Sumatera Selatan, 1972,

Belitung dan Tanjung Tebat (Lahat) (3, p. 4–13). Data hasil pengamatan tersebut adalah sebagai berikut.

TABEL I.II.

Rata-rata suhu udara dalam derajat Celcius untuk beberapa tempat di Sumatera Selatan, per bulan, 1971

Bulan	T e m p a t			
	Belitung (48,31 m.)	Palembang (12 m)	Pangkal Pinang (12 m)	Tanjung Tebat
Januari	25,6	25,6	24,6	23,1
Pebruari	25,6	25,7	25	23,2
Maret	26	26,2	25,5	24
April	27,1	26,4	26	24,4
Mei	27,5	27,2	26,5	24
Juni	26,5	26,3	26,1	24,6
Juli	26,8	—	26,6	24,1
Agustus	26,4	—	25,6	24,6
September	26,8	—	—	25
Oktober	26,7	—	—	24,7
Nopember	26	—	—	—
Desember	25,8	—	—	—

TABEL I.III.

Suhu udara maksimum dan minimum rata-rata dalam derajat Celcius untuk beberapa tempat di Sumatera Selatan, per bulan, 1971.

B u l a n	T e m p a t							
	Belitung		Palembang		Pangkal Pinang		Tanjung Tebat	
	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.
Januari	29,8	22,1	31,1	22,7			29,2	21
Pebruari			31,5	22,8			29,2	19,8
Maret			32,2	22,1			29,9	21,1
April	32,1	22,5	33	23,3			30,9	20,5
Mei	32,5	22,6	33,2	23,4			30	19,8
Juni	31,7	21,8	32,4	22,7			30,6	19,8
Juli	32,5	21,5					30,7	19,7
Agustus	32,1	21,8					31,1	19,8
September	32,7	21,7					31,1	19,8
Oktober	32,9	22					30,8	19,4
Nopember	31,2	22						
Desember	30,7	21,9						

TABEL I.IV.

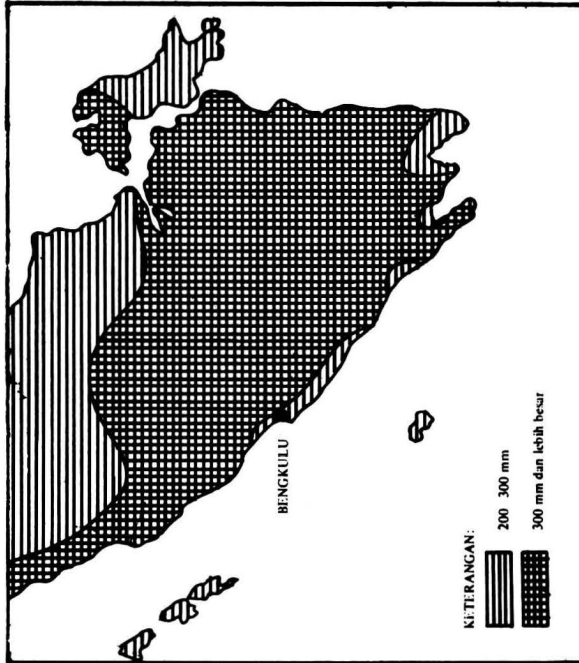
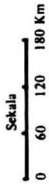
Curah hujan dalam mm (a) dan kelembaban dalam % (b) untuk beberapa tempat di Sumatera Selatan, per bulan 1971.

B u l a n	T e m p a t							
	Belitung		Palembang		Pangkal Pinang		Tanjung Tebat	
	a	b	a	b	a	b	a	b
Januari	271	88	350	86	267	89	267	86
Pebruari	307	87	178	86	147	89	151	83
Maret	294	86	233	83	222	83	152	85
April	378	84	281	84	226	83	379	85
Mei	209	81	162	83	136	84	58	79
Juni	99	81	121	84	174	84	99	77
Juli	51	78			67	77	154	76
Agustus	197	80			61	77	135	75
September	34	78					144	71
Oktober	290	79					233	75
Nopember	362	82						
Desember	656	84						



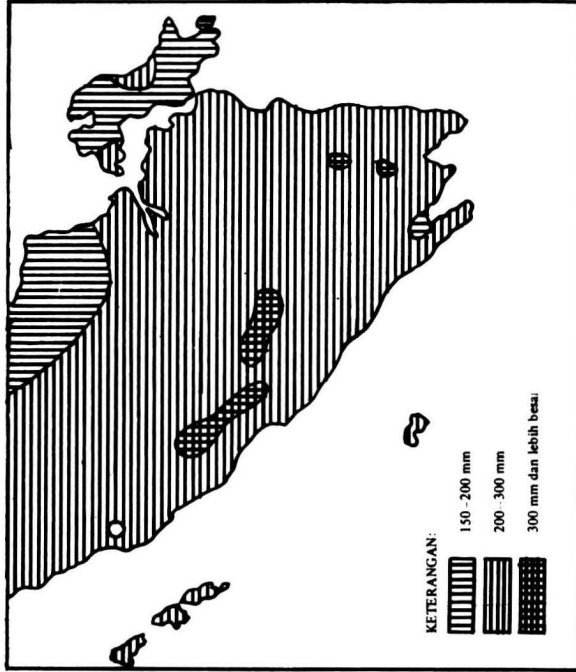
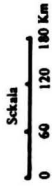


HUJAN RATA RATA BULANAN  
JANUARI



PETA 1.

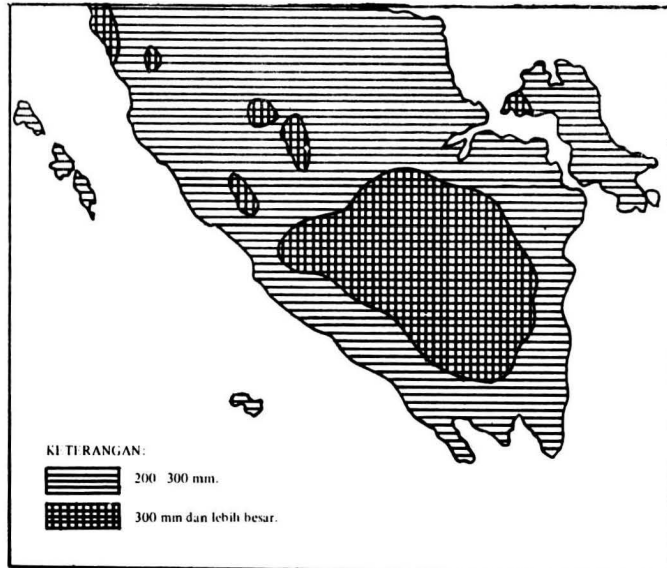
HUJAN RATA RATA BULANAN  
FEBRUARI



PETA 2.

HUJAN RATA RATA BULANAN  
MARET

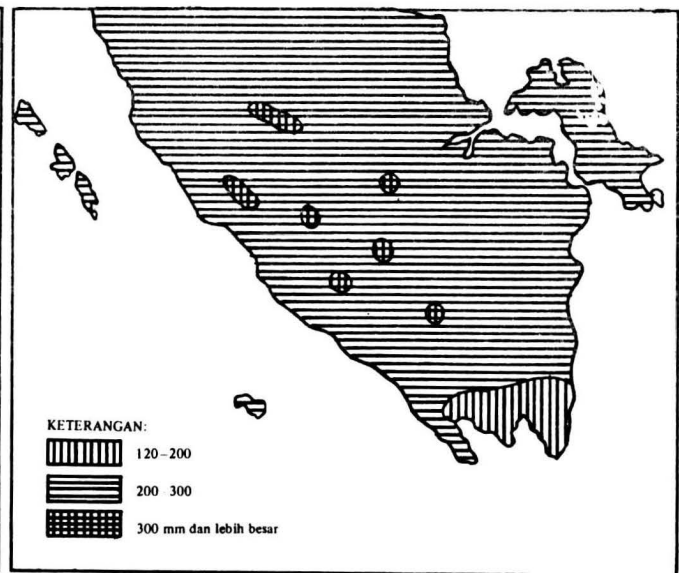
Skala  
0 60 120 180 Km.



PETA 3.

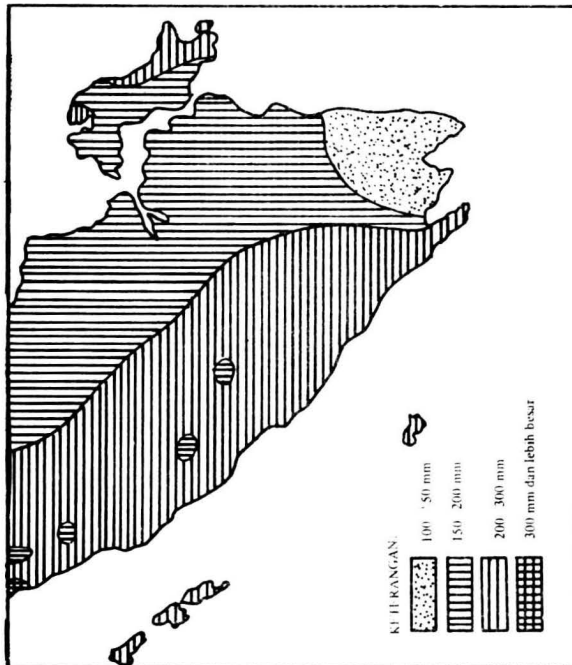
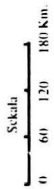
HUJAN RATA-RATA BULANAN  
APRIL

Skala  
0 60 120 180 Km.



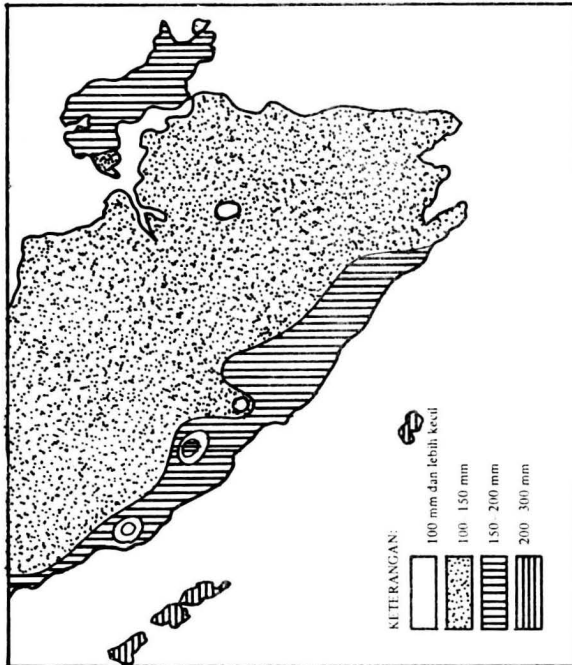
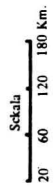
PETA 4.

HUJAN RATA RATA BULANAN  
MEI



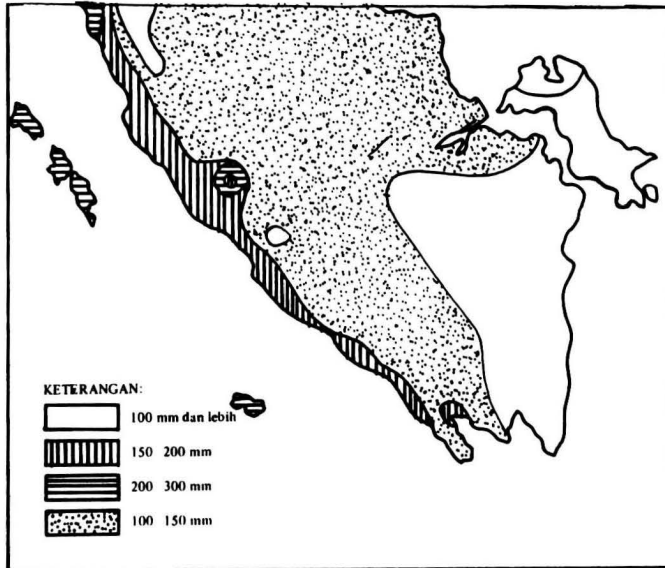
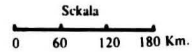
PETA 5.

HUJAN RATA RATA BULANAN  
JUNI



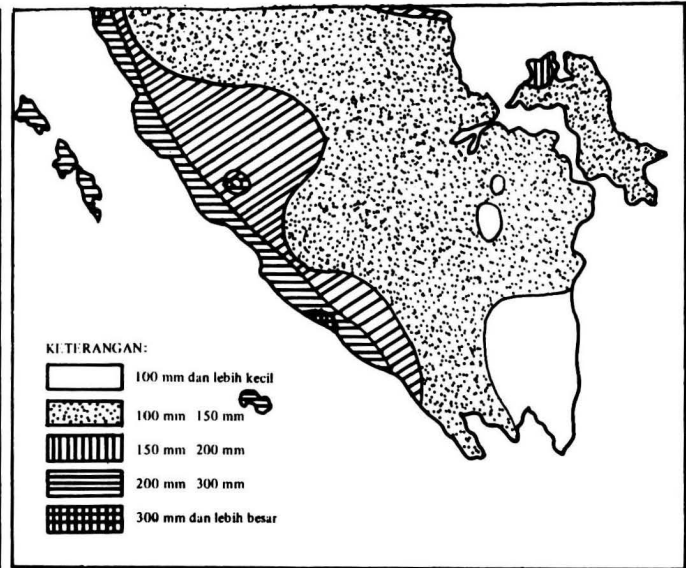
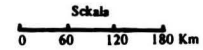
PETA 6.

HUJAN RATA RATA BULANAN  
JULI



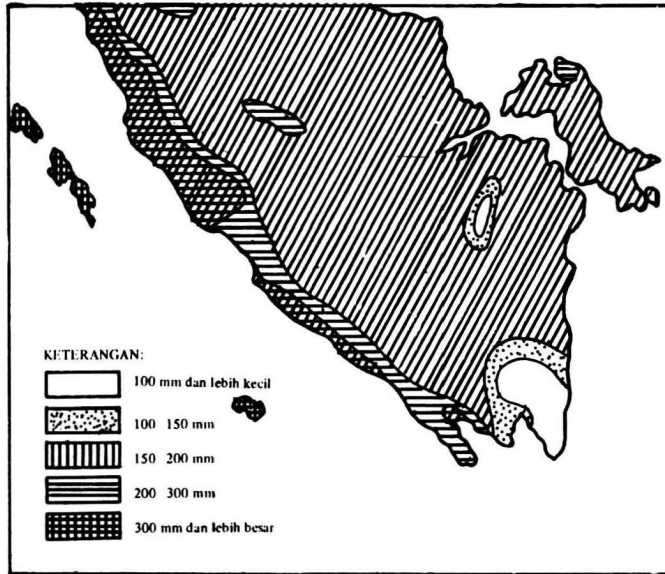
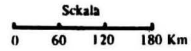
PETA 7.

HUJAN RATA-RATA BULANAN  
AGUSTUS



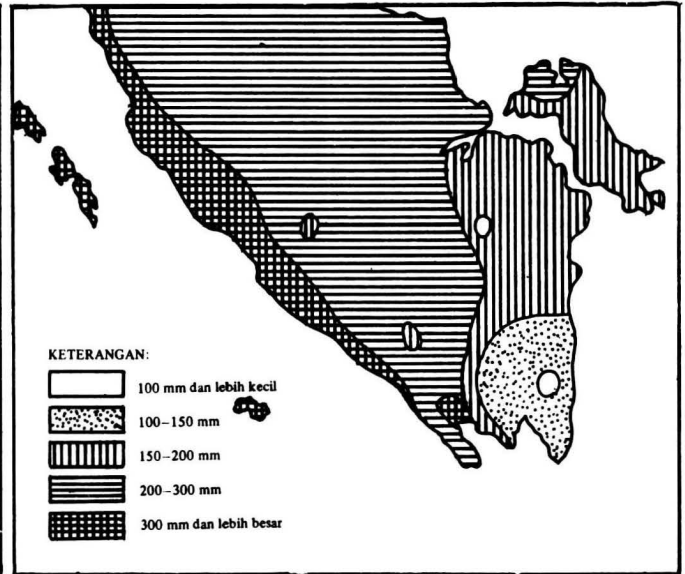
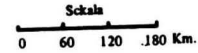
PETA 8.

HUJAN RATA-RATA BULANAN  
SEPTEMBER



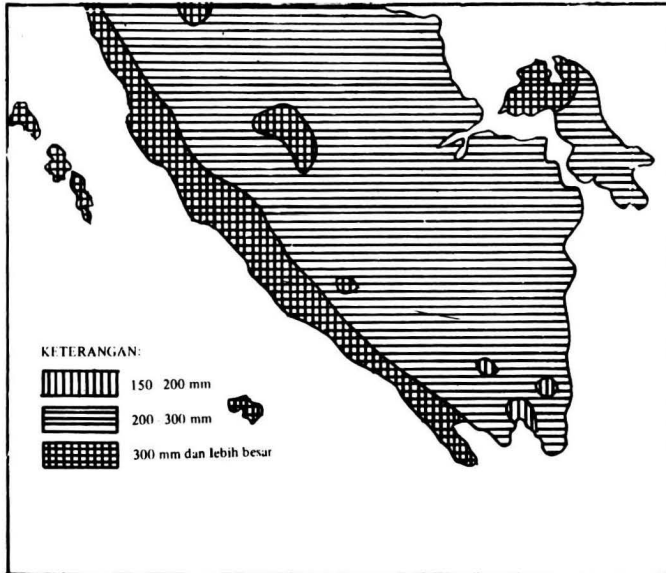
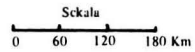
PETA 9.

HUJAN RATA-RATA BULANAN  
OKTOBER



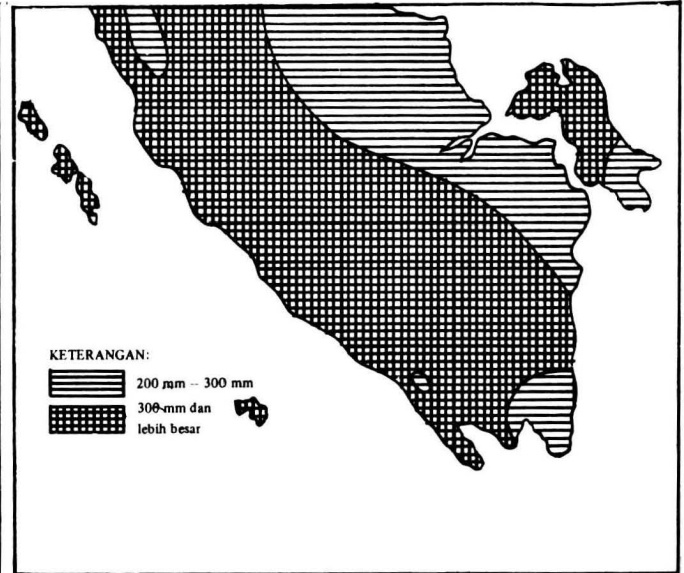
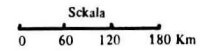
PETA 10.

HUJAN RATA RATA BULANAN  
NOPEMBER



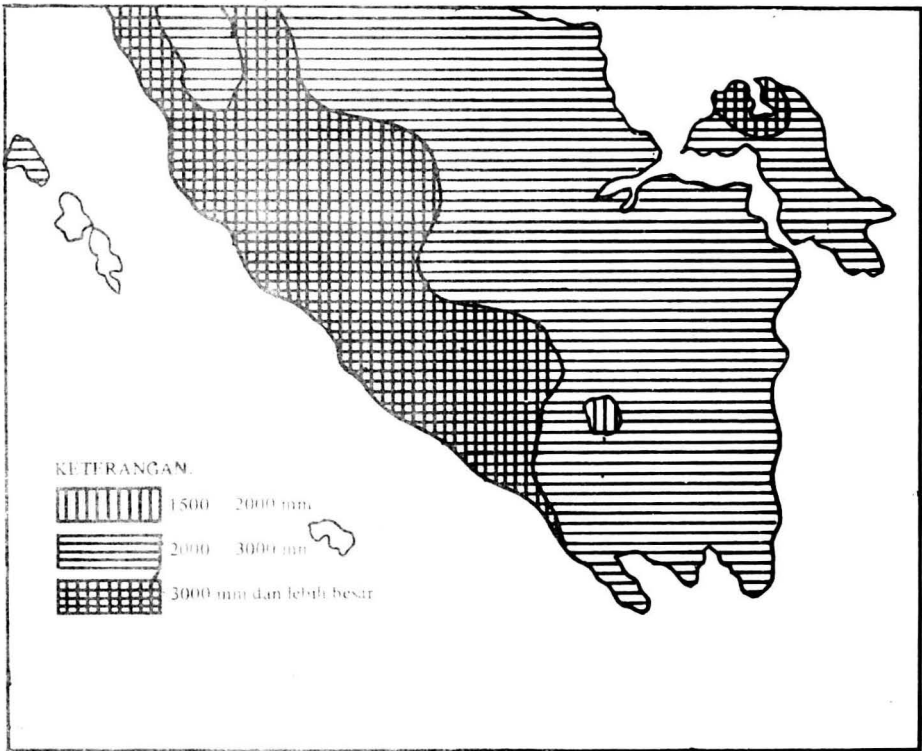
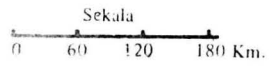
PETA 11.

HUJAN RATA RATA BULANAN  
DESEMBER

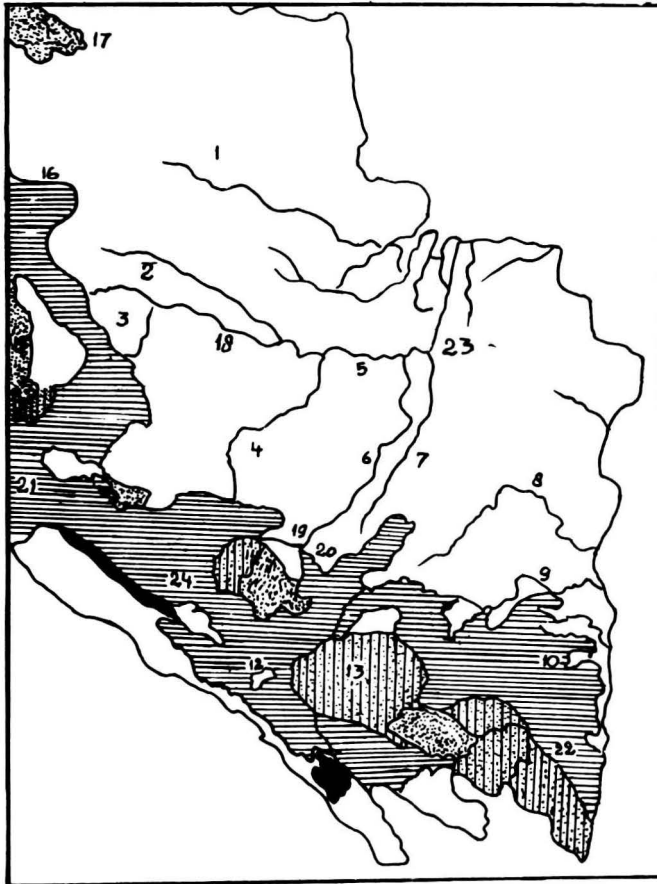


PETA 12.






# HUJAN RATA-RATA TAHUNAN



PETA 13.



**Keterangan:**

-  Neogen tanpa sedimen kwarter.
-  Daerah yang ditutupi ophiolit kwarter.
-  Massa kristalin.
-  Peg. tersier dan andesit tua.
-  Granit miosen akhir dan diorit.

- 1. A. Lalang
- 2. A. Rawas
- 3. A. Musi
- 4. A. Lematang
- 5. A. Musi

- 6. A. Ogan
- 7. A. Komering
- 8. A. Mesuji
- 9. W. Tulangbawang
- 10. W. Seputih
- 11. W. Semangko
- 12. D. Ranau

- 13. Massa kristalin di Lampung
- 14. Peg. Garba
- 15. Peg. Tembesi-Rawas
- 16. Peg. Duabelas
- 17. Peg. Tigapuluh
- 18. Bt. Pendopo.

- 19. Muaraenim
- 20. Batraja
- 21. Peng Gumai
- 22. W. Sekampung
- 23. Palembang
- 24. A. Enim



### C. RAUT MUKA TUBUH BUMI

Jika kita amenyusuri suatu penampang tegak yang melalui garis lurus dengan arah timurlaut-baratdaya, atau kira-kira arah Palembang-Pagaralam, maka akan dijumpai unsur-unsur morfologis sebagai berikut:

1. dataran aluvial pesisir timur,
2. daerah peneplain,
3. pegunungan volkanik muda,
4. sesaran Semangko (1, p. 24) (9, p. 6).

Dataran aluvial terbentuk oleh endapan hasil pengikisan batuan di daerah hulu. Daerah dataran aluvial ini tidak tinggi dari muka laut bahkan sebagian besar amat rendah sehingga merupakan rawa-rawa pantai yang pada beberapa tempat meluas sampai sejauh 100 km dari pantai.

Peneplain yang disebut juga *calon dataran* meliputi daerah yang cukup luas dan bergelombang-gelombang tetapi landai akibat pengikisan dan pengendapan setempat. Pengikisan, transportasi, dan sedimentasi di daerah peneplain dan di daerah dataran aluvial merupakan pekerjaan sungai-sungai besar dan anak-anaknya, antara lain Musi, Komering, Ogan, Lematang, Kelingi, Lakitan, Rupit dan Rawas.

Pegunungan volkanik muda di Sumatera Selatan merupakan barisan pegunungan timur Bukit Barisan. Barisan pegunungan timur dipisah dari barisan barat oleh sesaran Semangko.

Barisan pegunungan timur mempunyai tujuh puncak mulai dari G. Punggur (1677) di selatan sampai G. Kaba (1938) di utara, dan seluruhnya terletak di wilayah Sumatera Selatan. G. Bepagut (2732), G. Patah (2817), dan G. Dempo (3046) terletak pada barisan pegunungan barat, dan merupakan batas antara Sumatera Selatan dengan Bengkulu bagian selatan. G. Kaba, G. Ulu Musi (1995), G. Ulu Sulup (1989), dan G. Seblat (2383) yang merupakan kelanjutan barisan pegunungan timur, terletak pada batas antara Sumatera Selatan dengan Bengkulu bagian utara. Gunung Dempo yang terdapat di pegunungan Bungkok, masih merupakan gunung api aktip.

Sesaran Semangko merupakan lembah akibat retakan di sepanjang pegunungan Bukit Barisan. Bagian sesaran Semangko yang terletak di Sumatera Selatan adalah : lembah Ranau, tempat terdapat danau Ranau, lembah Kuala - Mekau.

Antara Pulauberingin dan Tanjungsakti lembah itu terputus oleh G. Bepagut dan G. Patah. Kemudian lembah itu timbul lagi sebagai lembah Mana Hulu, dan lembah Keruh (1, p. 24).

Lanjutan lembah Semangko yang terdiri atas lembah Musi Hulu dan Kapahiang terletak di propinsi Bengkulu, namun masih mempunyai hubungan dengan Sumatera Selatan karena daerah ini menjadi daerah aliran hulu sungai Musi.

Makin ke daerah pegunungan, kemiringan lereng makin besar. Dataran aluvial antara 0 sampai 5 %, daerah peneplain antara 5 sampai 10 %, sedangkan daerah pegunungan muda dan sesaran Semangko antara 10 sampai 25 % (9, peta p. 4).

#### D. GEOLOGI

Netherlands Indies Geological Survey, dalam tahun 1927-1933 mengadakan penelitian di Sumatera Selatan dan menghasilkan peta geologis berskala 1 : 200.000 mengenai Baturaja, Wiralaga, Prabumulih, dan Lahat. Penelitian geologis lebih detail pada basin minyak bumi Sumatera Selatan, terutama dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan asing.

Stratigrafi Sumatera Selatan menunjukkan adanya bahan-bahan dari masa Creta-Bawah, yang terdiri atas dua facies, yaitu :

1. facies batial, terdiri dari : lapisan serpih yang mengandung silikat, sejumlah lapisan tufa-batupasir, radiolorid, dan tanah liat.
2. facies vulkanik litoral yang terdiri atas breksi dan lava, yang diselangi selingi oleh lapisan tanah liat koral.

Facies batial yang disebut *Lapisan Lingsing*, terdapat di pegunungan Gumai, pegunungan Garba, dan di Teluk Ratai. Facies vulkanik litoral merupakan *Lapisan Saling*, dan *Lapisan Garba Ilir*. Lapisan Saling terdapat di pegunungan Gumai, sedangkan Lapisan Garba Ilir terdapat di pegunungan Garba (1, p.659,661).

#### E. T A N A H

Tanah di Sumatera Selatan terutama terdiri atas tanah yang tergolong pada :

1. Tanah daerah rendah, seperti :
  - a. Organosol dan Glei Humus,
  - b. Aluvial,
  - c. Hidromorf Kelabu,
  - d. Latosol,
  - e. Latosol dan Podzolik Merah-kuning,
  - f. Podzolik Merah-kuning.
2. Tanah daerah bukit dan pegunungan, seperti :
  - a. Podzol,
  - b. Andosol,
  - c. Andosol dan Regosol,
  - d. Latosol
  - e. Podzolik Merah-kuning,
  - f. Podzolik Merah-kuning dan Latosol,
  - g. Kompleks Podzolik Merah-kuning, Latosol, dan Litosol (6, p. 3), (7, p. 3-8), (8, peta tanah).

## **1. Organosol dan Glei Humus**

Golongan tanah ini tersusun dari bahan organik, atau campuran bahan mineral dan bahan organik. Tanah ini terbentuk di daerah yang mempunyai curah hujan tinggi. Sangat peka terhadap erosi. Terdapat di sepanjang pesisir timur selebar 50 sampai 100 km dari pantai, juga di Muararupit, di Muarakelingi, di sepanjang lembah S. Musi, serta daerah hilir sungai-sungai di pulau Bangka dan Belitung. Organosol berasosiasi dengan Aluvial dan Glei Humus.

## **2. Aluvial**

Golongan tanah Aluvial terdiri atas bahan-bahan endapan yang muda usianya dan masih lepas. Terutama terdapat di daerah lembah sungai seperti di sepanjang S. Komerling bagian tengah, S. Ogan, S. Lematang, S. Musi, dan di daerah Tanjung Raja.

## **3. Hidromorf Kelabu**

Jenis tanah ini sangat peka terhadap erosi. Terdapat antara Martapura dan Olakbuntar.

## **4. Latosol**

Tanah Latosol berwarna coklat sampai merah, gembur, agak asam, dan tahan erosi. Terdapat di daerah antara Lubuklinggau dan Tebingtinggi, di sekitar Pulaupanggung dan di sekitar Muaradua. Umumnya tanah ini dijumpai di daerah tanpa bulan kering.

## **5. Latosol dan Podzolik Merah-kuning**

Latosol berasosiasi antara lain dengan Andosol, dan Podzolik Merah-Kuning. Golongan tanah Latosol, dan Podzolik Merah-Kuning terdapat di daerah antara Muaradua dan Tenang.

## **6. Podzolik Merah-Kuning**

Golongan tanah ini berwarna merah hingga kuning, teguh, asam, dan sangat peka terhadap erosi. Umumnya jenis tanah ini dijumpai di daerah tanpa bulan kering. Di Sumatera Selatan golongan tanah ini merupakan yang terluas. Terdapat di daerah pedalaman Musi Banyuasin samapi Talangbetutu, antara Tebingtinggi sampai Baturaja, dan di daerah sebelah utara Lubuklinggau.

## **7. Podzol**

Golongan tanah ini termasuk tanah wilayah bukit dan pegunungan. Terutama terdapat di daerah pedalaman pulau Bangka dan Belitung.

## 8. Andosol

Tanah Andosol berwarna hitam hingga kelabu, bagian atas gembur dan kaya akan bahan organik, tetapi bagian bawahnya berwarna coklat kekuningan dan miskin bahan organik, sangat peka terhadap erosi. Terutama di daerah kerucut gunung api dan di sekitarnya. Umumnya di jumpai di wilayah dengan ketinggian lebih dari 1000 m dan beriklim sedang. Andosol berasosiasi dengan Latosol. Terdapat di daerah pegunungan dekat Pulauberingin.

## 9. Andosol dan Regosol

Selain dengan Latosol, Andosol berasosiasi pula dengan Regosol. Golongan tanah ini terutama terdapat di sekitar Pagaralam.

## 10. Latosol

Tanah Latosol wilayah bukit dan pegunungan terutama terdapat di daerah fan gunung api di pegunungan lipatan dan sesaran, seperti antara Talangpadang dan Tebingtinggi. Tanah Latosol berwarna coklat sampai merah, gembur, agak asam, dan tahan erosi. Umumnya terdapat di wilayah tanpa bulan kering.

## 11. Podzolik Merah-Kuning

Di wilayah pegunungan tanah ini berasosiasi dengan Latosol dan Litosol. Terutama terdapat di pegunungan lipatan seperti di sekitar Prabumulih dan Tebingbulan.

## 12. Podzolik Merah-Kuning dan Litosol

Terdapat di daerah sebelah utara Muaradua, dan tersebar pada beberapa tempat di pulau Bangka terutama di antara Belinyu dan Sungailiat, serta sekitar G. Sebuluh. Di pulau Belitung terutama di sekitar Tanjungpandan.

## 13. Kompleks Podzolik Merah-Kuning, Latosol dan Litosol

Jenis tanah ini terutama terdapat di daerah Pagarjati.

## F. VEGETASI

Vegetasi di Sumatera Selatan dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu *hutan primer* yang terdiri dari hutan lebat di daerah pegunungan, *hutan sekunder* yang terdiri dari sabana dan hutan bekas ladang di lereng-lereng, serta *hutan rawa* yang terdiri dari bakau dan rumbiah di daerah pantai.

Menurut fungsinya, hutan dapat digolongkan dalam *hutan lindung* dan *hutan produksi*. Karena hutan lindung berfungsi memelihara tata air atau ke-

adaan hidrologis tanah, maka hutan jenis ini terutama terdapat di daerah pegunungan Bukit Barisan, dan di daerah pegunungan Bangka. Luas seluruh hutan lindung 583.259 ha, yang terbesar di kabupaten Musi Rawas (224.935) ha. Lahat (145.495 ha), Ogan Komering Ulu (143.326 ha), Lematang Ilir Ogan Tengah (50.603 ha), dan Bangka (18.900 ha). Kabupaten-kabupaten tersebut memiliki daerah aliran sungai bagian hulu. Luas hutan lindung sebesar 5 % dari seluruh luas propinsi Sumatera Selatan.

Hutan produksi terdapat di daerah penepian di daratan Sumatera, di Bangka, dan di Belitung. Luas seluruhnya 878.067 ha, tersebar di kabupater Bangka (348.390 ha), Musi Rawas (138.055 ha), Belitung (97.753 ha), Musi Banyuasin (83.593 ha), Lematang Ilir Ogan Tengah (81.790 ha), Lahat (74.480 ha), Ogan Komering Ilir (28.000 ha), dan Ogan Komering Ulu (26.006 ha).

Luas hutan cadangan di seluruh propinsi 2 juta ha. Biasanya hutan cadangan dikelompokkan bersama hutan produksi. Dengan demikian luas hutan produksi dan hutan cadangan sebesar 27 % dari luas propinsi.

Luas padang alang-alang 2.012.515 ha atau 2½ kali luas hutan produksi. Padang alang-alang tersebar hampir merata di seluruh kabupaten seperti terlukis pada tabel berikut.

TABEL I. VI.

Luas padang alang-alang di propinsi Sumatera Selatan,  
per kabupaten/Kotamadya, 1969.

Kabupaten/Kotamadya	Padang alang-alang	
	Luas (ha)	Dibandingkan dengan luas kabupaten/propinsi dalam %
Lematang Ilir Ogan Tengah	373.500	13
Musi Rawas	370.800	13
Ogan Komering Ulu	364.100	34
Musi Banyuasin	354.700	36
Ogan Komering Ilir	275.000	36
Belitung	5.300	0,9
Kodya Palembang	12	0,2
Kodya Pk. Pinang	3	0,44
Sumatera Selatan	2.012.515	19

Luas padang alang-alang di kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Ogan Komering Ulu, cukup besar jika dibandingkan dengan luas kabupaten masing-masing.

Luas hutan termasuk padang alang-alang 52 % dari seluruh luas propinsi. Di tinjau dari sudut hidrologis, Sumatera Selatan mempunyai keadaan yang masih jauh dari kritis.

Sumatera Selatan kaya akan kayu bernilai ekspor seperti meranti, pulai, dan rajabunga. Selain itu terdapat pula hasil-hasil hutan seperti damar, rotan, kemenyan, arang, kemiri, getah, jelutung dan biga.

## G. SUNGAI DAN DANAU

Sumatera Selatan termasuk *dacrah sungai* di Indonesia. Dalam lambang propinsi Sumatera Selatan, atribut daerah sungai itu diungkapkan dengan *Batanghari Sembilan*. Nama-nama sebagian besar kabupaten didasarkan pada nama-nama sungai.

S. Musi (490 km) merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Sumatera. Sungai-sungai lainnya ialah S. Ogan (260 km), S. Komering (230 km), S. Lematang (220 km), S. Mesuji (210 km), S. Lalang (205 km), S. Rawas (170 km), S. Batanghari Leko (140 km), dan S. Calik (100 km). Sungai-sungai tersebut merupakan alat lalu lintas penting. Di bawah ini dinyatakan jarak pada sungai-sungai itu yang dapat dilayari dengan kapal motor atau longkang.

S. Mesuji terletak pada perbatasan Sumatera Selatan dengan Lampung dan bermuara di L. Jawa. Bagian sungai ini dari Ig. Tawar sampai Pagardewa sejauh 110 km. dapat dilayari.

S. Komering berhulu di pegunungan Bukit Barisan di sekitar D. Ranau yang terletak pada perbatasan propinsi Sumatera Selatan dengan Bengkulu dan Lampung. Bermuara pada S. Musi di Sungai Gerong. Bagian sungai ini antara Sungai Gerong Betung sejauh 120 km dapat dilayari.

S. Ogan berhulu pada barisan pegunungan timur Bukit Barisan, antara lain di Bt. Manti (1619). Sungai ini bermuara pada S. Musi di Palembang. Antara Palembang sampai Paninjauan sejauh 140 km. dapat dilayari.

S. Lematang yang bagian hulunya bernama A. Enim, berasal dari Bukit Barisan pada G. Bepagut, dan bermuara di S. Musi di Muara Lematang. Antara Muara Lematang sampai Muara Enim sejauh 120 km dapat dilayari. Sesungguhnya S. Musi merupakan aliran utama bagi S. Komering, Ogan, Lematang, Rawas, dan Batanghari Leko. S. Musi berasal dari C. Hempo dan Bt. Daun, antara Sungsang dan Muara Beliti sepanjang 330 km dapat dilayari.

S. Rawas bersatu dengan S. Musi di Muara Rawas. Antara Muara Rawas dan Muara Rupit sejauh 70 km dapat dilayari. Dari pertemuan itu ke arah hulu, S. Musi dan S. Rawas mempunyai amat banyak anak sungai.

S. Batanghari Leko berhulu di daerah Jambi, dan bermuara di Muara Leko pada S. Musi. Antara Muara Leko sampai Pangkalan Bulian sepanjang 70 km dapat dilayari.

S. Lalang pun berhulu di daerah Jambi. Bermuara di Banyuasin di Selat Bangka. Dari Muara Lalang sampai Banyulincir sejauh 150 km dapat dilayari.

Di antara S. Musi dan S. Lalang terdapat S. Teluk Tanggulang. Bagian hilir sungai ini bernama S. Senda dan S. Banyuasin. S. Teluk Tanggulang dan S. Lalang dihubungi oleh S. Cilik. Antara pertemuan S. Calik dengan S. Lalang sampai ke Bentayun sepanjang 90 km dapat dilayari.

## H. BARANG TAMBANG

Di Sumatera Selatan terdapat bermacam-macam barang tambang. Minyak bumi, gas alam, timah, batubara, dan lempung merupakan yang terpenting.

### 1. Minyak bumi dan gas alam

Sumatera Selatan merupakan sebagian dari *cekungan minyak bumi Sumatera Selatan dan Jambi*. Daerah minyak ini termasuk yang sudah banyak digarap seperti di Sumatera Utara dan Kalimantan Timur. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perusahaan-perusahaan asing sudah mengadakan eksploitasi di daerah tersebut.

Sekarang terdapat perusahaan pemerintah PERTAMINA Unit II, dan perusahaan asing STANVAC. Lapangan minyak PERTAMINA yang berproduksi terdapat di Talang Tiga, Talang Jimar, Prabumulih, Tanjung Miring, Limau, Karangan, Gunung Kemata, Belimbing, Kuang, Mangunjaya, Sungai Lilin, Kenali Asam, Tempino, dan Setiti. Lapangan minyak STANVAC yang berproduksi terdapat di Talang Akar, Pendopo, Benakat, Jirak, Raja, Betun, Abab, Loyak, Ibul, dan Bulu. (2, p. 59).

Bersama daerah Riau (193.928.000 barrel), dan Sumatera Utara (15.672.000 barrel), Sumatera Selatan dengan produksi sebesar 24.058.000 barrel, menjadi tiga besar di Indonesia, tahun 1971. Produksi minyak di daerah ini akan lebih besar lagi jika daerah cekungan minyak bumi Belitung di bagian selatan Laut Cina Selatan diusahakan. Penyulingan milik PERTAMINA terdapat di Plaju dan Sungai Gerong. Minyak mentah dari beberapa daerah tersebut di atas dialirkan melalui pipa ke penyulingan tersebut, dan ke pelabuhan.

Hasil lain penambangan minyak bumi adalah gas alam. Gas digunakan sebagai bahan mentah di pabrik pupuk Sriwijaya dan pabrik polipropilena di Plaju, serta dipakai sebagai pembangkit tenaga listrik pada PLTG Palembang.

## 2. Timah

Sampai saat ini Sumatera Selatan merupakan penghasil timah terpenting di Indonesia. Sejak permulaan abad 19 pertambangan timah di Bangka diusahakan. Kemudian dalam pertengahan abad itu diusahakan pula di Belitung dan Singkep (Riau).

Baru tahun 1958 perusahaan-perusahaan timah di daerah itu ditangani oleh pemerintah kita. Sekarang dipercayakan kepada PN Timah. PN. Timah terdiri atas empat unit, yaitu : *Unit Pertambangan Timah Bangka* yang meliputi wilayah produksi Sungailiat, Mentok, Pangkalpinang, Belinyu, Toboali, dan Pemali; *Unit Penambangan Timah Belitung*, yang meliputi wilayah produksi Tanjungpandan, Kelapakampit, Manggar, dan Lenggang; *Unit Penambangan Timah Singkep* (di Riau), yang meliputi wilayah produksi Singkep, dan Karimun-Kundur, serta *Unit Peleburan Timah* (Peltim) di Mentok (2, p. 18–20). Wilayah produksi timah meliputi pulau Bangka, Belitung dan daerah lepas pantai di sekitar pulau-pulau tersebut.

Sebagian bijih timah berupa endapan bijih timah aluvium atau *kaksa*. Bijih ini terdapat di lembah-lembah sebagai endapan hasil pengikisan atau proses denudasi. Lainnya berupa endapan bijih timah eluvium atau *kulit*, yang terdapat pada lereng bukit-bukit. Pengaruh genangan laut zaman Kwarter endapan-endapan timah sekunder tersebut terdapat di dekat pantai dan di lepas pantai. Penambangan terutama secara tambang terbuka di daerah endapan eluvium. Di Pemali usaha penambangan dijalankan secara tambang-terbuka-dalam terhadap endapan primer dan endapan eluvium.

Dari produksi timah Indonesia sebesar 19.765 ton tahun 1971, 18.369,4 ton dihasilkan oleh Bangka dan Belitung. Dalam tahun itu Peltim Mentok menghasilkan logam timah sebesar 9.216,9 ton.

## 3. Batubara

Tahun 1919 tambang batubara Bukit Asam dibuka. Sejak 1970 tambang batubara Bukit Asam bersama Ombilin dan Mahakam diusahakan oleh PN. Batubara.

Batubara Bukit Asam berasal dari Tersier Atas. Terdiri dari tiga lapisan yaitu Manggus, Suban, dan Petai. Jarak antara Manggus dan Suban 15 meter, dan antara Suban dan Petai 30 meter (2, p. 37–38).

Industri andesit menyebabkan batubara Bukit Asam bertambah tinggi mutunya menjadi bitumen, antrasit, dan menjadi kokas alam. Wilayah pertambangan seluas 3.018 ha. Penambangan dilakukan secara tambang terbuka. Diusahakan di Air Laya Timur, Baragan Suban, dan di Karang Timah. ∴

Produksi tahun 1971 sebanyak 108.526 ton atau hampir dua kali produksi Ombilin. Pemakai utamanya ialah Pertambangan Timah Bangka, dan PN. Kereta Api Sumatera Selatan.



#### **4. Lempung**

Diusahakan di Sungailiat (Bangka) dan di Pemulutan (Palembang). Lempung sebagai bahan baku yang diambil dari endapan aluvial di pantai dan dekat sungai, dibuat bata dan genteng.

#### **5. Kaolin dan pasir kwarsa**

Penghasil kaolin yang terkenal di Indonesia adalah pulau Belitung dan Bangka. Dari 19 Perusahaan kaolin yang tercatat tahun 1971, 16 buah terdapat di Tanjung Pandan (Belitung), tiga lainnya di Bangka. Penambangan diusahakan secara sederhana, tanpa mesin (2, p. 45).

Di Tanjung Pandan terdapat perusahaan keramik PT. Keramika Indonesia Asosiasi (KIA). Untuk menjamin kontinuitas kerja perusahaan ini selain memiliki penambangan kaolin, mengusahakan juga pasir kwarsa dan lempung yang banyak terdapat di Bangka dan Belitung.

## Bab II

### SUMBER MANUSIA

#### A. PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK

Sensus penduduk 1930, 1961, dan 1971 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Sumatera Selatan berturut-turut 2,5 %, 2,9 %, dan 2,9 % dari jumlah penduduk Indonesia (8, p.6; 3,p.4; 4,p.11; 5,p.3).

Angka-angka diatas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk Sumatera Selatan lebih cepat dari perkembangan jumlah keseluruhan penduduk Indonesia dari 1930–1961. Tetapi, perkembangan tersebut menjadi sama dari 1961–1971.

Dengan jumlah penduduk Sumatera Selatan pada 1930, 1961, dan 1971 berturut-turut sebesar 1.513.340, 2.773.464, dan 3.435.191, maka pertambahan penduduk rata-rata pertahun dalam jangka waktu 1930–1961 ialah 2,7 %, dan 2,4 % dalam jangka waktu 1961–1971. Pertambahan rata-rata demikian menunjukkan kenaikan yang melambat. Artinya, jumlah penduduk terus bertambah, tetapi dengan kecepatan yang berkurang.

Perhitungan diatas akan lebih teliti seandainya periode 1930–1961, dibagi atas tiga periode yang lebih pendek, yang lamanya masing-masing 10 tahun. Tetapi hal ini tidak mungkin dilakukan, karena sensus penduduk di Indonesia baru dilaksanakan pada tahun-tahun 1930, 1961 dan 1971.

Untuk mengetahui perkembangan penduduk bagian-bagian propinsi Sumatera Selatan dibawah ini disajikan data ditingkat kabupaten. Angka-angka yang merupakan tingkat pertumbuhan ini sebenarnya lebih tinggi dari yang sebenarnya karena perhitungannya hanya untuk rata-rata hitung, bukan rata-rata geometris (2,p.51-57, 60-63).

Dari Tabel II.I. ternyata bahwa dari periode 1930–1961 ke periode 1961–1971, Kodya Palembang, kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah, Lahat, dan Kodya Pangkal Pinang mengalami laju pertumbuhan yang menurun dengan terjal, sedangkan kabupaten Musi Rawas tidak selaju ke empat kabupaten yang terdahulu.

TABEL II-1.

Persentase rata-rata pertumbuhan penduduk  
propinsi Sumatera Selatan menurut kabupaten, pertahun  
(1930-1961, 1961-1971)

Kabupaten/Kodya	1930-1961		1961-1971	
	% pertambahan/thn.	% prop.-% kab.	% pertambahan/thn.	% prop.-% kab.
1. Kodya Palembang	10,9	- 8,2	2,2	+ 0,2
2. Musi Banyuasin	0,4	+ 2,3	2,8	- 0,4
3. Ogan Komering Ilir	1,5	+ 1,2	1,9	+ 0,5
4. Ogan Komering Ulu	2,7	0,0	4,2	- 1,8
5. Lematang Ilir Ogan Tengah	3,1	- 0,4	0,8	+ 1,6
6. Lahat	5,0	- 2,3	1,9	+ 0,5
7. Musi Rawas	4,4	- 1,7	3,7	- 1,3
8. Bangka	0,7	+ 2,0	2,0	+ 0,4
9. Kodya Pangkal Pinang	13,0	- 10,3	2,3	+ 0,1
10. Belitung	0,5	+ 2,2	2,6	- 0,2
Propinsi Sumatera Selatan	2,7	-	2,4	-

Sumber : Diolah dari Publikasi Kantoe Sensus & Statistik Propinsi Sumatera Selatan, No. 3, April 1972, p.6.

Sebaliknya laju pertumbuhan penduduk yang makin besar dialami oleh kelima kabupaten yang lain, tetapi tidak begitu cepat.

Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan penduduk antara kabupaten-kabupaten, maka masing-masingnya dibandingkan dengan propinsi.

Perbedaan laju pertumbuhan untuk masing-masing periode ditunjukkan oleh angka-angka dengan tanda plus dan minus pada tabel I. Angka-angka plus merupakan besarnya kelebihan dan yang minus merupakan besarnya kekurangan laju pertumbuhan propinsi dari kabupaten/kodya yang bersangkutan.

Ternyata, selama periode 1930-1961, propinsi melebihi empat tetapi kurang dari lima dan sama dengan satu kabupaten. Selama periode 1961-1971,

propinsi melebihi enam, tetapi kurang dari empat kabupaten. Dan selisih propinsi dan kabupaten menjadi lebih kecil.

Kodya Palembang dan Pangkal Pinang mengalami perubahan yang amat besar. Dari 8,2 dan 10,3 % di atas propinsi selama periode 1930–1961, menjadi 0,2 dan 0,1 % di bawah propinsi pada periode 1961–1971. Kecenderungan yang sama, tetapi tidak begitu besar terjadi pula untuk kabupaten-kabupaten Lematang Ilir, Ogan Tengah dan Lahat.

Sebaliknya kabupaten Musi Banyuasin dan Belitung berada di bawah propinsi pada periode 1930–1961, kemudian di atas propinsi pada periode 1961–1971.

Dalam pada itu kabupaten-kabupaten Ogan Komering Ilir dan Bangka selalu di atas propinsi, hanya mengecil pada periode 1961–1971.

Akhirnya kabupaten Musi Rawas selalu di atas propinsi tetapi juga mengecil pada periode 1961–1971. Sedang kabupaten Ogan Komering Ulu sama dengan propinsi pada periode 1930–1961, dan di atas propinsi pada periode 1961–1971.

Perbedaan laju pertumbuhan penduduk antara kabupaten/kodya selama 1930–1961, berkisar dari 10,3 % di atas sampai 2,3 % di bawah propinsi. Selanjutnya pada periode 1961–1971 hanya berkisar dari 1,8 % di atas dan 1,6 % di bawah propinsi. Jadi terlihat kecenderungan meratanya laju pertumbuhan penduduk pertahun antara berbagai kabupaten/kodya dalam propinsi Sumatera Selatan.

## B. KEPADATAN PENDUDUK

Laju pertumbuhan penduduk akan lebih mempunyai arti jika dikaitkan dengan laju atau perkembangan kepadatan penduduk. Sebab dalam angka kepadatan penduduk telah terkandung faktor jumlah penduduk (human resources) dan luas tanah (natural resources).

Perlu diingat bahwa jumlah penduduk hanyalah salah satu aspek sumber manusia. Mutu dan susunan sejumlah penduduk tertentu misalnya mempengaruhi potensi sumber manusia. Demikian pula luas tanah hanyalah salah satu aspek sumber alam. Potensi tanah yang tertentu luasnya dipengaruhi oleh "site" dan "situasi" tanah tersebut. Termasuk "site" antara lain ialah persediaan mineral drainage, suhu, dan struktur tanah. Termasuk "situasi" ialah lokasi tanah dalam hubungan dengan daerah sekitarnya (6, p. 30).

Di bawah ini disajikan tabel kepadatan penduduk tahun 1930, 1961 dan 1971, dengan anggapan bahwa luas kabupaten/kodya pada ketiga tahun itu tetap sama.

TABEL II-2.

Kepadatan penduduk propinsi Sumatera Selatan menurut kabupaten,  
1930, 1961, 1971.

Kabupaten/Kodya	Kepadatan penduduk/km <sup>2</sup>			
	LUAS (km <sup>2</sup> )	1931	1961	1971 *)
1. Kodya Palembang	224	483	2.120	2.589
2. Musi Banyuasin	25.664	10	10	15
3. Ogan Komering Ilir	21.658	10	11	21
4. Ogan Komering Ulu	10.408	20	37	52
5. Lematang Ilir				
Ogan Tengah	9.575	18	35	38
6. Lahat	4.034	30	77	91
7. Musi Rawas	21.513	4	9	12
8. Bangka	11.614	18	22	26
9. Kodya Pangkal Pinang	32	374	1.884	2.324
10. Belitung	4.532	20	23	28
Sumatera Selatan	109.254	14	25	31

Sumber : \*) Publikasi Kantor Sensus & Statistik Propinsi Sumatera Selatan No. 3, April 1972, p.24.

Laju pertambahan kepadatan tersebut dalam persen pertahun untuk periode 1931-1961, dan periode 1961-1971 disajikan pada tabel II-3. Serupa dengan angka laju pertumbuhan penduduk, angka inipun merupakan rata-rata hitung yang tentunya lebih besar dari angka yang sebenarnya yang merupakan rata-rata geometris.

Hal-hal yang tampak pada tabel II-3 adalah sebagai berikut.

1. Perbandingan kronologis menunjukkan kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ulu, Bangka dan Belitung mengalami laju pertambahan kepadatan yang makin cepat. Kabupaten/kodya selebihnya serta propinsi sendiri mengalami hal sebaliknya.

TABEL II-3.

Laju pertambahan kepadatan penduduk  
dalam persen pertahun, 1931-1961, 1961-1971.

Kabupaten/Kodya	Laju pertambahan kepadatan penduduk pertahun			
	1930-1961		1961-1971	
	%		%	
1. Kodya Palembang	10,9	2	2,2	6
2. Musi Banyuasin	0,0	10	5,0	2
3. Ogan Komering Ilir	0,3	9	9,1	1
4. Ogan Komering Ulu	2,7	6	4,1	3
5. Lematang Ilir Ogan Tengah	3,0	5	0,9	10
6. Lahat	5,0	3	1,8	9
7. Musi Rawas	4,0	4	3,3	4
8. Bangka	0,7	7	1,8	5
9. Kodya Pangkal Pinang	13,0	1	2,4	5
10. Belitung	0,5	8	2,2	7
Sumatera Selatan	2,5		2,4	

2. Selama periode 1930-1961, laju pertambahan kepadatan penduduk kabupaten-kabupaten tersebut diatas, kecuali Ogan Komering Ulu, lebih kecil dari propinsi Sumatera Selatan.

3. Selama periode 1961-1971, laju pertambahan kepadatan yang lebih kecil dari propinsi terlihat di kabupaten/kodya Palembang, Lematang Ilir Ogan Tengah, Lahat, Bangka dan Belitung. Sebaliknya laju pertambahan kepadatan yang lebih besar dari propinsi terlihat di kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, dan Musi Rawas, yang juga merupakan bagian-bagian Sumatera Selatan yang tergolong jarang penduduknya.

4. Kenyataan-kenyataan pada 2 dan 3 menunjukkan bahwa kabupaten/kodya ranking atas selama periode 1930-1961 menduduki ranking bawah selama periode 1961-1971.

Satu kesimpulan umum yang lain berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas ialah adanya kecenderungan melambatnya laju pertambahan kepadatan penduduk

yang berbarengan dengan makin besarnya angka kepadatan dan jumlah penduduk itu sendiri.

### C. SUSUNAN PENDUDUK

Susunan penduduk yang diuraikan dibawah ini ialah berdasarkan usia, jenis kelamin, dan susunan penduduk wanita menurut usia.

#### 1. Susunan penduduk menurut usia

Interval golongan usia disini ialah lima tahun, selanjutnya usia 0-4 tahun dianggap sebagai golongan bayi dan prasekolah.

Usia 5-19 tahun sebagai golongan sekolah.

Usia 20-54 tahun sebagai golongan produktif penuh.

Usia 55 tahun keatas sebagai golongan tua.

Jadi golongan 0-14, 5-19 dan 55 tahun atau lebih dianggap sebagai golongan belum dan tidak lagi produktif, sungguhpun pada umumnya mulai usia 10 tahun telah dihitung sebagai angkatan kerja.

Tabel II-4. merupakan distribusi frekwensi relatif golongan usia penduduk kabupaten/kodya di propinsi Sumatera Selatan, baik di propinsi maupun di setiap kabupaten/kodya frekwensi relatif penduduk menurun dengan baiknya bersamaan dengan naiknya usia.

Rata-rata hitung penduduk kabupaten/kodya :

- golongan usia 0-4 tahun ialah 17,5 %
- golongan usia 5-19 tahun ialah 39,1 %
- golongan usia 20-54 tahun ialah 37,6 %
- golongan usia 55 tahun atau lebih, sebanyak 6,0 %

Hal yang sama untuk propinsi berturut-turut adalah :

- golongan usia 0-4 tahun ialah 17,7 %
- golongan usia 5-19 tahun ialah 38,8 %
- golongan usia 20-54 tahun ialah 37,8 %
- golongan usia 55 tahun atau lebih, sebanyak 5,7 %

Sedangkan untuk Indonesia adalah sebagai berikut :

- golongan usia 0-4 tahun 16,2 %
- golongan usia 5-19 tahun ialah 47,5 %
- golongan usia 20-54 tahun ialah 40,1 %
- golongan usia 55 tahun atau lebih sebanyak 6,2 % (5, p. 3).

TABEL II - 4:  
 Persen penduduk Propinsi Sumatera Selatan,  
 menurut golongan umur, per kabupaten tahun 1971.

Go- longan usia (tahun)	Persen penduduk propinsi Sumatera Selatan kabupaten/Kodya										
	Prop. Sumsel.	Kodya Palembang	Musi Banyu- asin	Og. Ko- mering Ilir	Og. Ko- mering Ulu	Lematang Ilir Ogan Tengah	Musi Rawas	Bangka	Beli- tung	Lahat	Kodya Pangkal Pinang
0- 4	17,5	16,6	17,7	17,7	19,3	18,2	18,4	16,5	16,2	18,2	15,7
5 9	15,0	15,2	14,8	15,2	15,0	15,1	15,0	15,1	14,0	14,6	15,2
10 14	13,7	13,3	13,7	14,0	13,9	14,0	13,9	14,0	13,1	13,4	14,1
15 19	10,1	11,9	9,7	9,4	9,0	9,5	9,2	11,5	11,7	9,3	12,9
5 19	38,8	40,4	38,2	38,6	37,9	38,6	38,1	40,6	38,8	37,3	42,2
20 24	6,6	8,4	6,2	5,9	5,7	6,0	5,9	7,2	7,2	5,8	8,1
25 29	6,5	7,4	6,4	6,4	6,2	6,2	6,3	6,0	6,3	6,5	5,7
30 34	6,4	6,5	6,5	6,6	6,4	6,3	6,5	6,1	6,4	6,6	5,8
35 39	6,2	6,1	6,2	6,3	6,1	6,1	6,2	5,9	6,2	6,4	5,6
40-44	5,0	4,2	5,3	5,3	5,1	5,1	5,2	5,0	5,3	5,4	4,7
45 49	4,0	3,4	4,1	4,2	4,1	5,1	4,1	3,9	4,2	4,2	3,7
50-54	3,1	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,0	3,2	3,2	2,9
55 54	37,8	38,5	37,9	37,9	36,8	37,0	37,4	37,1	38,8	38,2	36,5
55 59	2,1	1,6	2,2	2,2	2,1	2,2	2,2	2,1	2,2	2,2	2,0
60 64	1,6	1,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	1,8	1,6
65 69	1,1	0,7	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,1
70 74	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
75	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	1,6	0,6	0,5
55-	5,7	4,5	6,2	6,2	6,0	6,2	6,2	5,8	7,2	6,3	5,6
0 -	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : Publikasi Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sumatera Selatan No. 3, April 1972, page 14.



Jika usia 20-54 tahun dapat dianggap sebagai golongan produktif penuh, maka lima tahun sesudah tahun 1971, golongan ini akan bertambah sebanyak 7,3%, yaitu selisih rata-rata hitung antara golongan usia 15-19 dan golongan usia 50-54 tahun penduduk kabupaten/kodya di Sumatera Selatan. Untuk propinsi tambahan ini sebesar 8,0 % dan untuk Indonesia sebesar 6,3 % (5,p.3).

Berdasarkan distribusi frekwensi golongan usia sekarang selisih tersebut makin besar untuk 10, 15 dan 20 tahun sesudah tahun 1971, baik untuk kabupaten kodya dalam propinsi Sumatera Selatan maupun untuk propinsi itu sendiri.

Dengan demikian, dengan tingkat kesejahteraan yang sama setidak-tidaknya sampai 20 tahun sesudah tahun 1971, diperlukan persediaan lapangan kerja yang makin besar.

Penyediaan fasilitas pendidikan yang makin besar diperlukan pula untuk lima tahun sesudah tahun 1971, karena golongan usia 0-4 tahun relatif lebih besar dari golongan usia 15-19 tahun yang akan memasuki golongan produktif penuh ditingkat kabupaten/kodya maupun ditingkat propinsi sendiri.

Jika kabupaten/kodya dibandingkan dengan propinsi, ternyata golongan usia 0-4 tahun lebih terkonsentrasi di kabupaten-kabupaten Ogan Komering Ulu, Lematang Ilir Ogan Tengah, Musi Rawas dan Lahat. Sementara itu golongan usia 5-19 tahun lebih terkonsentrasi di kodya Palembang, Pangkalpinang dan kabupaten Bangka. Selanjutnya golongan usia 20-54 tahun lebih terkonsentrasi di kabupaten/kodya Palembang, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir. Belitung dan Lahat. Akhirnya golongan usia 55 tahun dan lebih hanya kurang memusat di kodya Palembang dan Pangkalpinang; (7,p.5-32).

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut golongan umur ini dapat pula kita perhitungkan usia rata-rata hitung (2, p. 53) penduduk propinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten/kodya pada tahun 1971 sebagai berikut.

1. Kodya Palembang, usia rata-rata hitung 24,0 tahun.
2. Kabupaten Musi Banyuasin, 26 tahun.
3. Kabupaten Ogan Komering Ilir, 22 tahun.
4. Kabupaten Komering Ulu, 27,1 tahun.
5. Kabupaten Lahat, 25,1 tahun.
6. Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah, 21 tahun.
7. Kabupaten Musi Rawas, 26 tahun
8. Kabupaten Bangka, 21,5 tahun.
9. Kabupaten Belitung, 21,7 tahun.
10. Kodya Pangkal Pinang, 21,3 tahun.
11. Propinsi Sumatera Selatan, 21,5 tahun.

Dari angka-angka usia rata-rata hitung tersebut dapat kita baca bahwa penduduk di Sumatera Selatan baik ditingkat kabupaten/kodya maupun tingkat propinsinya mempunyai penduduk yang berusia rata-rata antara usia 21-27 tahun. Menurut pembagian golongan usia yang terdahulu maka usia rata-rata hitung tersebut termasuk golongan usia yang produktif kerja.

Berdasarkan Tabel II-4, golongan usia produktif kerja (20-54 tahun) untuk keseluruhan daerah-daerah di Sumatera Selatan meliputi 37,8 %, yang mana 13,1 % nya meliputi penduduk yang berusia antara 21-27 tahun.

Usia rata-rata yang tertinggi terdapat di daerah kabupaten Komerling Ulu (27,1 tahun) kemudian menyusul daerah kabupaten Musi Rawas, kabupaten Musi Banyuasin (26 tahun).

## **2. Susunan penduduk menurut jenis kelamin**

Pada tahun 1930 daerah yang mempunyai penduduk wanita lebih banyak bila dibandingkan penduduk laki-laki adalah kabupaten-kabupaten Ogan Komerling Ilir, Lematang Ilir Ogan Tengah, Lahat, Propinsi Sumatera Selatan. Daerah-daerah lainnya menunjukkan jumlah penduduk wanita lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Pada tahun 1961 daerah yang mempunyai penduduk wanita lebih banyak bila dibandingkan dengan penduduk laki-laki adalah kabupaten-kabupaten: Ogan Komerling Ilir dan Lematang Ilir Ogan Tengah sedangkan untuk kabupaten Lahat menunjukkan jumlah yang seimbang antara penduduk wanita dan penduduk laki-laki.

Rata-rata perkembangan dari tahun 1930 ke tahun 1961 (selama 10 tahun) menunjukkan pertambahan jumlah penduduk wanita, walaupun untuk propinsi Sumatera Selatan menunjukkan perkembangan yang menurun untuk jumlah penduduk wanita.

Pada tahun 1971 daerah yang mempunyai penduduk wanita lebih banyak bila di bandingkan dengan penduduk laki-laki adalah kabupaten-kabupaten: Ogan Komerling Ilir dan Lematang Ilir Ogan Tengah.

Dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1971, penduduk wanita mengalami pertambahan lebih cepat bila dibandingkan dengan pertambahan penduduk laki-laki. Hanya untuk kabupaten Lahat, pertambahan penduduk antara tahun-tahun 1930, 1961 dan 1971 menunjukkan pertambahan penduduk wanita lebih kecil bila dibandingkan dengan pertambahan penduduk laki-laki, sedangkan untuk daerah-daerah lainnya menunjukkan angka-angka yang menyatakan pertambahan penduduk wanita lebih besar bila dibandingkan dengan pertambahan penduduk laki-laki. Pertambahan penduduk tersebut pada masa yang akan datang akan memungkinkan jumlah penduduk wanita lebih besar dari pada jumlah penduduk laki-laki.

## **3. Susunan penduduk wanita menurut usia**

Penduduk wanita dapat dibedakan menjadi 3 golongan usia, yaitu :

0 – 14 : golongan usia penduduk wanita yang belum subur, walaupun sebenarnya usia 13–14 tahun telah termasuk usia subur.

15 – 44 : golongan usia penduduk wanita subur.

45 tahun keatas : golongan usia penduduk wanita yang sudah tidak subur.

Wanita yang subur meliputi kurang lebih 41,3% dari seluruh jumlah wanita yang tersebar di kodya/kabupaten propinsi Sumatera Selatan.

Jumlah penduduk wanita dalam golongan usia subur yang terbesar jumlahnya terdapat di kodya Palembang (44,02 %) kemudian menyusul kodya Pangkalpinang (43,6 %), sedangkan jumlah yang paling kecil terdapat di kabupaten Bangka, hanya mencapai 8,2 % dari keseluruhan jumlah penduduk wanita yang terdapat di seluruh kabupaten Bangka.

Untuk kabupaten-kabupaten lainnya rata-rata mempunyai jumlah penduduk wanita yang berusia subur, antara 25 % -- 41 % dari keseluruhan jumlah penduduk wanita yang terdapat di kabupaten masing-masing. Sedangkan untuk seluruh propinsi Sumatera Selatan penduduk wanita yang termasuk golongan wanita berusia subur meliputi 41,3%, hal ini akan mempengaruhi perkembangan penduduk pada masa yang akan datang.

Sementara itu prosentase penduduk wanita yang berusia dibawah 15 tahun meliputi 46,5 % berarti lebih besar dari pada prosentase penduduk wanita yang berusia subur.

Kabupaten terbesar jumlah penduduk yang berusia dibawah 15 tahun adalah kodya Palembang hampir mencapai 60 % dari seluruh jumlah penduduk wanita yang terdapat di kodya Palembang. Sebagian dari penduduk wanita yang berusia dibawah 15 tahun untuk beberapa tahun mendatang akan memasuki golongan usia subur pula. Golongan penduduk wanita usia 45 tahun ke atas meliputi 12,2%, yang mana golongan ini tidak akan mempengaruhi (dianggap tidak mempengaruhi) penambahan jumlah penduduk.

#### **D. KELUARGA (RUMAH TANGGA)**

Yang dimaksud dengan keluarga berdasarkan penjelasan sensus tahun 1971 mengenai data rumah tangga adalah sebagai berikut

Rumah tangga : adalah satu atau beberapa orang yang mendiami bersama-sama seluruh bangunan atau sebagian saja dan pada umumnya makan bersama dari satu dapur.

Rumah tangga dibedakan atas 2 yaitu :

1. Rumah tangga biasa yaitu seseorang atau satu keluarga dengan penumpang-penumpang dan pembantu-pembantunya yang mendiami sendiri seluruh atau sebagian dari bangunan tempat tinggal.

2. Rumah tangga khusus yaitu para penghuni hotel, losmen, pensiunan, asrama, mess, biasa, rumah sakit, sanatorium, tangsi, penjara dan sebagainya, yang terdapat dalam buku tamu, buku orang sakit dan sebagainya. Rumah tangga angkatan bersenjata yang bertempat tinggal dalam asrama, kesatrian atau kompleks yang tertutup untuk umum tidak termasuk dalam daftar ini.

Berdasarkan data dari sensus tahun 1961 untuk seluruh propinsi Sumatera Selatan terdapat 944.446 rumah tangga dengan penduduk yang berjumlah 4.847.224 jiwa, berarti setiap keluarga mempunyai rata-rata 5 orang anggota keluarga.

TABEL II-5.

Jumlah penduduk, rumah tangga dan anggota keluarga di Sumatera Selatan pada tahun 1971

Kabupaten/Kodya	Jumlah penduduk	Jumlah rumah tangga	Jumlah anggota keluarga
Kodya Palembang	582.961	96.568	5,7
Musi Banyuasin	370.753	66.649	5,7
Ogan Komering Ilir	445.788	69.660	6,3
Ogan Komering Ulu	542.631	93.688	5,7
Lematang Ilir Ogan Tengah	363.769	66.156	5,6
Musi Rawas	252.652	37.442	6,7
Bangka	303.804	54.939	5,5
Belitung	128.949	23.549	5,4
Lahat	371.709	70.274	5,2
Kodya Pangkal Pinang	74.733	9.477	7,8
Propinsi Sumatera Selatan	3.443.740	588.522	5,8

Sumber: 1) Sensus Penduduk 1971, Serie B. No.I  
Biro Pusat Statistik Jakarta 1972. halaman 131.

2) Sensus Penduduk 1971 Serie A. No.I halaman 22.

Berdasarkan tabel II 5, rata-rata setiap rumah tangga mempunyai jumlah anggota 5,9 atau 6 orang, bila dibandingkan dengan data tahun 1961 dapatlah dikatakan dalam jangka waktu 10 tahun jumlah anggota keluarga makin bertambah.

Pada tahun 1971, jumlah anggota keluarga yang besar terdapat di kodya Pangkal Pinang yaitu 7,8 (8) orang anggota, kabupaten Musi Rawas yaitu 6,7 (7) orang anggota.

Jumlah anggota keluarga memanglah harus disesuaikan dengan tujuan Keluarga Berencana yang sekarang sedang dirintis. Pengetrapan dari Keluarga Berencana hendaknya disesuaikan pula dengan keadaan dan situasi masing-masing tempat dengan mengingat pula bahwa data-data keluarga pada tabel II-5, menurut definisi keluarga pada halaman terdahulu jadi tidak ada perbedaan anggota keluarga batih (ibu-anak-anak) dan anggota keluarga pengikut (pembantu, anak famili yang ikut serta).

TABEL II-6

Jumlah penduduk desa dan kota menurut jenis kelamin dan kewarganegaraan di Sumatera Selatan pada tahun 1971.

Kabupaten/Kodya	D E S A					K O T A					Jumlah semua
	Indonesia		A s i n g		Jumlah	Indonesia		A s i n g		Jumlah	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		
1. Kodya Palembang	189.432	186.203	663	445	276.753	278.905	271.438	16.305	16.313	582.961	582.961
2. Musi Banyuasin	189.432	186.203	663	445	376.753	-	-	-	-	-	376.753
3. Ogan Komering Ilir	193.637	202.364	22	35	396.058	24.473	25.139	60	58	49.730	445.788
4. Ogan Komering Ulu	268.201	264.008	157	144	532.510	4.491	4.410	620	600	10.121	542.631
5. Lematang Ilir Ogan Tengah	133.186	135.927	43	23	269.179	46.611	47.328	285	366	94.590	363.769
6. Musi Rawas	118.829	113.712	29	31	232.601	9.589	9.041	740	681	20.051	252.652
7. B a n g k a	106.168	101.820	7.592	6.144	241.724	24.337	23.803	7.061	7.879	62.080	303.804
8. B e l i t u n g	30.910	28.961	1.769	1.418	63.058	27.728	25.889	6.320	5.954	65.891	128.949
9. L a h a t	165.208	165.369	63	39	330.679	20.851	19.297	457	425	41.030	371.709
10. Kodya Pangkal Pinang	-	-	-	-	-	29.913	29.374	7.849	7.597	74.733	74.733
11. Propinsi Sumatera Selatan	1.205.371	1.198.364	20.338	18.289	2.442.562	466.898	455.719	39.697	38.873	1.001.187	3.443.740

Sumber : Sensus Penduduk 1971, Serie B. No.1.  
Biro Pusat Statistik - Jakarta 1972, halaman 7.

Jika hanya keluarga batih saja yang diperhatikan maka kami kira pembatasan kelahiran untuk daerah ini belum perlu, tetapi kesejahteraan ibu perlu diperhatikan.

## E. PENDUDUK DESA DAN KOTA

Untuk tahun 1961, kita dapatkan data dari Sensus 1961 mengenai penduduk kota dan desa di seluruh pulau Sumatera sebagai berikut :

Penduduk kota terdiri dari :

1.223.405 laki-laki dan

1.151.695 perempuan,

keseluruhan berjumlah :

2.375.100

Penduduk desa terdiri dari :

6.719.429 laki-laki dan

6.644.834 perempuan,

Keseluruhan berjumlah :

13.364.263

Jadi kalau kita bandingkan antara penduduk kota dan desa sebagai 1 : 5 untuk keseluruhan penduduk pulau Sumatera. Jumlah penduduk pulau Sumatera pada Sensus tahun 1961 meliputi 15.739.363 jiwa, sedang penduduk Sumatera Selatan meliputi 4.847.244 jiwa. Jadi penduduk Sumatera Selatan kurang lebih 33 % dari keseluruhan jumlah penduduk pulau Sumatera.

Tahun 1971 untuk propinsi Sumatera Selatan penduduk desa meliputi 2.442.562 jiwa sedangkan penduduk kota meliputi 1.001.187 jiwa berarti penduduk kota berbanding penduduk desa kurang lebih sebagai 1 : 2 Untuk propinsi Sumatera Selatan penduduk desa dua kali lebih banyak dari pada penduduk kota.

Bila dibandingkan dengan keadaan pulau Sumatera tahun 1961 berarti penduduk kota selama 10 tahun (1961-1971) mengalami perkembangan.

Untuk kodya Palembang tidak terdapat penduduk desa (lihat tabel II-6) semua terdiri dari penduduk kota juga untuk kodya Pangkal Pinang tidak ada penduduk desa.

Tetapi di kabupaten Musi Banyuasin masih terdiri dari penduduk desa. Kabupaten-kabupaten lain penduduknya merupakan penduduk desa dan penduduk kota.

Sebetulnya untuk kodya Palembang dan Pangkal Pinang bukan berarti tidak mempunyai daerah pedesaan, sebetulnya tabel II-8 untuk kedua kodya tadi belum diketahui datanya. Sedangkan dari buku Statistik tahun 1970 dapat kita sajikan jumlah penduduk desa di kodya Palembang dan Pangkal Pinang sebagai berikut :

TABEL II-7

Rata-rata banyaknya penduduk desa per kabupaten, luas di propinsi Sumatera Selatan pada akhir tahun 1970

No.	Kabupaten/Kodya	Desa	Penduduk	Luas (km <sup>2</sup> )
1.	Propinsi Sumatera Selatan	430	3.400.233	103.390,23
2.	Kodya Palembang	53	575.598	224,00
3.	Ogan Komering Ilir	27	448.325	22.222,00
4.	Ogan Komering Ulu	38	524.267	12.475,00
5.	Lematang Ilir Ogan Tengah	29	358.102	9.575,00
6.	L a h a t	43	365.515	4.034,00
7.	Musi Rawas	22	249.289	15.090,00
8.	Musi Banyuasin	31	368.268	23.361,46
9.	Pangkal Pinang	6	70.481	32,00
10.	B a n g k a	130	314.363	11.576,17
11.	Belitung	51	125.625	4.800,60

Sumber : Buku Statistik tahun 1970.

## F. PENDIDIKAN

Pada tabel II-8 tertera jumlah gedung, sekolah, murid, guru, menurut tingkat sekolah per kabupaten/kodya di Sumatera Selatan pada tahun 1971. Dari tabel tersebut dapatlah kita baca bahwa untuk seluruh propinsi Sumatera Selatan mempunyai 531.219 murid dari tingkat sekolah Taman Kanak-kanak sampai dengan tingkat Sekolah Lanjutan Atas.

Untuk keseluruhan murid-murid tersebut mempergunakan 10.097 sekolah. Yang memakai 2541 gedung sekolah berarti 1 gedung dipakai oleh 4,8 (5) sekolah. Dari angka ini dapatlah kita simpulkan masih banyak sekolah-sekolah yang belum mempunyai gedung sendiri.

Bila kita ambil rata-rata ternyata setiap guru bertanggung jawab atas 33 orang murid, berarti untuk propinsi Sumatera Selatan, tenaga guru telah mencukupi.

Usia sekolah (5-19 tahun) terdapat 38,8 % dari seluruh jumlah penduduk yang berjumlah 3.443.740 jiwa berarti penduduk usia sekolah berjumlah 1.308.606 jiwa sedangkan jumlah murid dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan tingkat sekolah lanjutan Atas ada 531.219 murid. Dari angka-angka tersebut dapatlah kita simpulkan bahwa masih banyak

TABEL II-8  
Jumlah gedung, sekolah, murid, guru,  
menurut tingkat sekolah per kabupaten/kodya di Sumatera Selatan tahun 1971.

Kabupaten / Kodya	Taman Kanak-kanak				Sekolah Dasar				S. L. P.				S. L. T. A.			
	Gedung	Sekolah	Murid	Guru	Gedung	Sekolah	Murid	Guru	Gedung	Sekolah	Murid	Guru	Gedung	Sekolah	Murid	Guru
1. Kodya Palembang	60	94	3.052	143	191	992	87.228	1.895	33	435	18.084	837	25	328	12.027	880
2. Musi Banyuasin	5	12	221	11	246	768	41.127	1.108	6	38	728	42	2	8	106	27
3. Ogan Komering Ilir	4	6	181	9	331	1.098	62.379	1.588	7	58	1.940	111	5	27	557	80
4. Ogan Komering Ulu	6	14	271	15	293	1.109	57.052	1.461	17	108	3.392	160	4	40	917	90
5. Lematang Ilir Ogan Tengah	18	37	689	36	255	965	46.268	1.472	23	154	4.619	249	9	65	1.315	148
6. Lahat	11	14	487	23	261	941	57.532	1.377	18	126	4.766	257	7	86	2.476	235
7. Musi Rawas	8	14	257	18	180	536	32.448	817	9	63	2.026	117	3	20	568	70
8. Bangka	14	24	789	31	191	654	42.493	789	9	92	1.905	149	5	62	777	134
9. Belitung	15	23	935	37	127	365	17.975	508	10	76	2.021	134	3	29	1.042	105
10. Pangkal Pinang	8	15	675	20	113	481	14.269	302	10	70	3.622	216	6	50	2.003	204
11. Propinsi Sumatera Selatan	149	253	7.557	343	2.186	7.909	458.771	11.595	145	1.220	43.103	2.272	72	715	21.788	1.973

Sumber: Kepala Perwakilan Departemen P dan K., Propinsi Sumatera Selatan.



penduduk usia sekolah yang belum atau tidak bersekolah, berarti baru + 47 % dari jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah.

Dari tabel II-10 dapatlah dibaca keadaan sekolah pada tiap-tiap kabupaten/kodya. Kalau kita teliti lebih lanjut maka keadaan sekolah lanjutan Pertama dan sekolah lanjutan Atas rata-rata setiap gedung sekolah dipakai oleh 8 atau 9 gedung sekolah, jadi pemakaian ruang kelas sangat terbatas.

## G. TRANSMIGRASI

Tempat-tempat transmigrasi orang-orang Jawa di pulau-pulau luar Jawa sebelum perang (1,p.12), adalah sebagai berikut.

Sumatera Selatan :

Nama tempat	tahun pembukaan
1. Gedongtataan	1905
2. Wonosobo	1921
3. Sukadana	1932
4. Belitung	1930
5. Lubuklinggau	1937

Menurut J.N. Bhatta M.Sc., jumlah migran-migran keluarga antara tahun 1951 1955 yang ditunjukkan ke Sumatera Selatan : (1,p.19).

tahun	keluarga	anggota
1951	650	2.453
1952	1958	8.538
1953	1069	4.587
1954	117	471
1955	34	123
<b>Jumlah</b>	<b>3.828</b>	<b>16.172</b>

Besar keluarga rata-rata 4,8 jiwa.

Berdasarkan sumber dari Direktorat Transmigrasi Propinsi Sumatera Selatan, proyek-proyek penempatan transmigran di Sumatera Selatan meliputi:

1. Proyek Belitung
2. Proyek Mura/Lubuk Linggau
3. Proyek Pangkal Pinang/Bangka
4. Proyek Cintamanis/Muba.

Berdasarkan proyek-proyek tersebut dapatlah dibaca mengenai jumlah penduduk yang telah dipindahkan pada tabel II-9 sebagai berikut :

TABEL II-9

Angka-angka penempatan transmigrasi menurut proyek-proyek transmigrasi di propinsi Sumatera Selatan

TAHUN	Proyek Belitang		Proyek Muara/Lubuk Linggau		Proyek Pangkal Pinang/Bangka		Proyek Cintamanis/Muba		Jumlah Propinsi Sumatera Selatan	
	Kep. Keluarga	Jiwa	Kep. Keluarga	Jiwa	Kep. Keluarga	Jiwa	Kep. Keluarga	Jiwa	Kep. Keluarga	Jiwa
1950	7	13	20	63	--	--	--	--	27	76
1951	108	341	60	208	--	--	--	--	168	569
1952	770	3.352	230	898	--	--	--	--	1.000	4.250
1953	5.042	21.992	438	1.286	--	--	--	--	5.480	22.279
1954	2.632	10.851	620	2.284	--	--	--	--	3.252	13.135
1955	1.250	5.221	503	2.122	--	--	--	--	1.753	7.343
1956	758	3.015	1.164	4.960	--	--	--	--	1.922	7.985
1957	614	2.719	566	2.532	--	--	--	--	1.180	5.251
1958	1.110	5.543	200	640	--	--	--	--	1.310	6.183
1959	2.761	12.375	20	69	--	--	--	--	2.781	13.444
1960	--	--	1	3	--	--	--	--	1	3
1961	501	2.255	--	--	94	454	--	--	595	2.709
1962	--	--	--	--	106	530	--	--	106	530
1963	435	11.810	--	--	--	--	--	--	435	1.810
1964	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1965	2.541	10.000	--	--	--	--	--	--	2.541	10.000
1966	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1967	201	862	--	--	--	--	--	--	201	862
1968	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1969	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1970	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1971	712	2.676	--	--	--	--	--	--	829	3.495

Sumber : Monografi Perikanan Laut daerah Propinsi Sumatera Selatan 1972, hal. 82.

## Bab III

### MATA PENCAHARIAN

#### A. PERTANIAN

Uraian tentang *pertanian* disini meliputi *perkebunan rakyat, peternakan, perikanan dan kehutanan.*

##### 1. Perkebunan rakyat

Hasil perkebunan rakyat dan minyak bumi di daerah ini menempatkan Sumatera Selatan sebagai penghasil devisa terbesar di Indonesia dalam tahun 1960-an. Pertanian rakyat di daerah ini terutama karet, lada, dan kopi. Selain tanaman perdagangan, diusahakan pula tanaman bahan makanan seperti padi, buah-buahan, dan hortikultura.

Di bawah ini akan diuraikan mengenai diversitas tanaman di daerah ini dalam tahun 1971, berdasarkan *luas panen. Daerah kombinasi tanaman* (crop combination regions) sama dengan kabupaten.

TABEL III. 1.  
Luas panen (ha) tanaman perkebunan rakyat  
propinsi Sumatera Selatan, per kabupaten, 1961

TANAMAN	K A B U P A T E N								JUMLAH
	MUBA	MURA	OKI	OKU	LIOT	LAHAT	BANGKA	BELITUNG	
1. Karet	119.609	107.803	31.457	46.040	105.040	22.036	49.093	1.637	483.251
2. Kopi	30	564	83	34.988	4.524	26.806	115,5	38	67.148,5
3. Lada				285	39		6.438	48	6.810
4. Kelapa	1.655	1.683	777	2.771	812	873	11.656	2.190	22.417
5. Cengkeh	143	92	78,5	191	143	331	580	69,25	1.627,75
6. Kapuk					61,9	295			356,9
7. Tebu		50	25	100					175
8. Tembakau				120	55	277			452
Jumlah	121.437	110.192	32.420,5	85.031	110.674,9	50.618	67.882,5	3.982,25	582.238,15

Sumber : Dinas Perkebunan Rakyat, Propinsi Sumatera Selatan, Palembang, 1971.

**TABEL III-2.**  
 Prosentase luas panen tanaman perkebunan rakyat  
 propinsi Sumatera Selatan, per kabupaten, 1971

TANAMAN	K A B U P A T E N								
	MUBA	MURA	OKI	OKU	LIOT	LAHAT	BANGKA	BELITUNG	JUMLAH
1. Karet	98,50	97,84	97,03	54,78	95,00	43,54	72,50	41,10	83,00
2. Kopi	0,02	0,50	0,25	41,15	4,00	52,96	0,20	0,95	11,50
3. Lada	0	0	0	0,31	0,03	0	9,50	1,26	1,20
4. Kelapa	1,36	1,53	2,40	3,26	0,74	1,71	17,00	54,99	3,85
5. Cengkeh	0,12	0,08	0,24	0,23	0,13	0,66	0,80	1,70	0,30
6. Kapuk	0	0	0	0	0,05	0,58	0	0	0,05
7. Tebu	0	0,05	0,08	0,12	0	0	0	0	0,03
8. Tembakau	0	0	0	0,15	0,05	0,55	0	0	0,07
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**TABEL III-3.**

Prosentase luas panen akumulatip  
 untuk tanaman yang luas panennya 1% dan lebih menurut daerah kombinasi

Daerah Kombinasi	Jenis tanaman	Prosentase akumulatip
Musi Banyuasin	1. Karet	98,50
	2. Kelapa	99,86
Musi Rawas	1. Karet	97,84
	2. Kelapa	99,37
Ogan Komering Ilir	1. Karet	97,03
	2. Kelapa	99,43
Ogan Komering Ulu	1. Karet	54,78
	2. Kopi	95,93
	3. Kelapa	99,19
L a h a t	1. Kopi	52,96
	2. Karet	96,50
	3. Kelapa	98,21
B a n g k a	1. Karet	72,50
	2. Kelapa	89,50
	3. Lada	99,00
B e l i t u n g	1. Kelapa	54,99
	2. Karet	96,09
	3. Cengkeh	97,79
	4. Lada	99,05

Dari Tabel III.2 dan III.3, di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Tampak jelas adanya spesialisasi di bidang perkebunan rakyat di Sumatera Selatan. Sebanyak 83% luas panen tanaman perkebunan rakyat di daerah ini merupakan perkebunan karet. Tambahan pula setiap tanaman dalam urutan pertama sudah lebih dari 50% luas panen perkebunan rakyat pada masing-masing kabupaten. Misalnya MUBA : karet (98,50%); MURA : karet (97,84%); OKI : karet (97,03%); OKU : karet (54,78%); Lahat : kopi (52,96%); Bangka : karet (72,50%); Belitung : kelapa (54,99%);

b. Tiga kabupaten yaitu : MUBA, MURA, dan OKI, memiliki kombinasi tanaman yang sama, ialah karet dan kelapa. Kedua tanaman tersebut menempati lebih dari 99% luas panen perkebunan rakyat di daerah tersebut.

c. Lima kabupaten merupakan *daerah karet*, yaitu : MUBA, MURA, OKI, OKU, dan Bangka.

d. Kabupaten Belitung merupakan *daerah kelapa*.

e. Kabupaten Lahat merupakan *daerah kopi*.

f. Kabupaten Belitung mempunyai variasi tanaman lebih besar. Di daerah ini tanaman yang memiliki luas panen lebih dari 1% sebanyak empat jenis, yaitu : kelapa, karet, cengkeh, dan lada.

g. Tiga kabupaten mempunyai variasi tiga tanaman. OKU : karet, kopi, dan kelapa; Lahat : kopi, karet, dan kelapa; Bangka : karet, kelapa dan lada.

h. Tanaman kelapa terdapat pada semua daerah kombinasi atau kabupaten.

i. Walaupun kabupaten Bangka dan Belitung dikenal sebagai penghasil lada, tetapi luas panen lada hanya menempati urutan ketiga di Bangka, dan keempat di Belitung.

Tabel III.4. Location tanaman perkebunan rakyat di propinsi Sumatera Selatan, per kabupaten, 1969 dan 1971.

Kabupaten Tanaman	MUBA		MURA		OKI		OKU		LIOT		LAHAT		BANGKA		BELITUNG	
	1969	1971	1969	1971	1969	1971	1969	1971	1969	1971	1969	1971	1969	1971	1969	1971
1. Karet	1,14	1,18	1,2	1,17	1,23	1,16	0,72	0,66	1,19	1,14	0,6	0,52	0,8	0,87	0,37	0,5
2. Kopi	0,02	0,01	0,12	0,04	0,05	0,02	3,3	3,58	0,3	0,35	4	4,6	0,04	0,02	0,05	0,08
3. Lada	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	0,03	-	-	7,6	7,9	0,8	1
4. Kelapa	0,2	0,35	0,2	0,4	0,08	0,6	0,13	0,84	0,05	0,2	0,1	0,44	4	4,4	11,8	14
5. Cengkeh	0,85	0,4	0,64	0,26	0,2	0,8	0,85	0,76	0,3	0,43	0,3	2,2	3,8	2,66	6	5,7
6. Kapuk	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	11,6	-	-	-	-
7. Tebu	-	-	0,5	1,7	-	2,6	6,5	4	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Tembakau	-	-	-	-	-	-	3	2	0,3	0,7	5,3	8	-	-	-	-

Dari Tabel III.4, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Di seluruh Sumatera Selatan, tanaman karet dan cengkeh mengalami kemunduran, sedangkan kapuk, kelapa, tembakau, kopi, lada, dan tebu makin maju.
- b. Walaupun kemajuan di bidang karet terasa di kabupaten Belitung, Bangka, dan MUBA, tetapi tingkat kemunduran pada lima kabupaten lain melampauinya. Demikian pula keadaannya dengan cengkeh. Di kabupaten OKI dan LIOT luas panen cengkeh bertambah, tetapi tingkat pertambahan ini dilampai oleh kemunduran pada enam kabupaten lainnya.
- c. Jika dilihat jumlah kabupaten, maka tampaknya kopi tidak mengalami kemajuan ataupun kemunduran, karena empat kabupaten mengalami kemajuan dan empat lainnya mundur. Tetapi tingkat kemunduran di kabupaten MUBA, MURA, OKI, dan Bangka, dapat diimbangi oleh kemajuan pada kabupaten lainnya. Kemajuan besar terjadi di kabupaten Lahat.
- d. Lada yang hanya diusahakan pada empat kabupaten, mengalami kemajuan, terutama di kabupaten Bangka dan OKU.
- e. Kelapa mengalami kemajuan besar, terutama di kabupaten Belitung, OKU, Bangka, dan Lahat. Kemunduran terjadi di kabupaten MUBA dan OKI.
- f. Kapuk di kabupaten Lahat pesat majunya, sedangkan di kabupaten LIOT tetap saja.
- g. Tebu mengalami kemajuan di kabupaten MURA dan OKI; mundur di kabupaten OKU.
- h. Tembakau mengalami kemunduran di OKU, tetapi dapat diimbangi oleh tingkat kemajuan di kabupaten Lahat dan LIOT.

Terdapat juga perkebunan besar karet milik negara dan swasta di kabupaten MUBA : Musi Rawas, Tabenan, dan Melania; kabupaten MURA : Sungai Laru, dan Belalau; serta kabupaten Lahat : Tebat Gunung.

Selain tanaman tersebut di atas, masih banyak lagi tanaman perdagangan yang diusahakan oleh rakyat, misalnya palawija (jagung, ibukayu, kacang tanah, kacang kedele, dan kacang hijau).

Jagung, ubikayu dan ubijalar diusahakan pada semua kabupaten, Yang paling banyak menghasilkan jagung adalah kabupaten OKU, MUBA, Lahat, dan MURA, serta yang paling banyak menghasilkan ubikayu adalah OKU, OKI, MUBA, MURA, Lahat, dan Bangka. Penghasil ubikayu terbesar adalah kabupaten OKU. Kemudian menyusul Bangka, MURA, dan MUBA.

Sebagian besar kacang tanah dihasilkan oleh kabupaten OKU, dan Lahat, sedangkan kacang kedele dihasilkan oleh MURA dan Lahat.

Palawija tergolong pula sebagai tanaman bahan makanan, di samping padi. Padi di Sumatera Selatan diusahakan di sawah, dan di ladang. Cara ber-sawah yang khas Sumatera Selatan disebut lebak.

TABEL III-5

Produksi rata-rata (ton) padi rendengan tiap ha di Sumatera Selatan menurut Kabupaten, tahun 1964, 1965, 1966, 1967, 1968

Kabupaten/Kodya	T A H U N				
	1964	1965	1966	1967	1968
1. Palembang	—	—	—	—	—
2. MUBA	—	—	—	—	—
3. O K I	—	—	—	—	—
4. O K U	2,99	2,81	2,47	1,92	2,65
5. Muara Enim	3,14	3,02	2,97	2,79	2,77
6. L a h a t	3,31	4,02	4,26	3,74	3,71
7. M U R A	3,37	3,55	3,20	1,67	3,51
8. Pangkal Pinang	—	—	—	1,40	1,00
9. B a n g k a	1,27	1,34	2,73	1,50	1,39
10. Belitung	0,91	1,10	1,10	1,32	0,77
Sumatera Selatan	3,00	3,21	3,06	2,38	3,03

Sumber : Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Sumatera Selatan, 1970.

Gambaran yang diperoleh dari Tabel III.5 sampai Tabel III,9 ialah bahwa umumnya produksi rata-rata padi lebak, pasang surut, dan ladang selama 1964 sampai 1968 makin merosot. Hal ini lebih jelas tampak pada gambar-gambar (grafik) berikut.

Dari tabel-tabel tersebut dapat dilihat pula bahwa daerah-daerah seperti Lahat, MURA dan Muara Enim merupakan daerah pertanian yang subur. Hal ini tentu saja akan lebih teliti kebenarannya jika ditinjau pula pemakaian pupuk di seluruh Sumatera Selatan.

Pada Gambar 1 sampai Gambar 5 dapat dilihat trend produksi rata-rata per ha untuk padi rendengan, gadu, lebak, pasang surut, dan ladang selama lima tahun. Mungkin hanya dengan lima data (1964, 1965, 1966, 1967, 1968) belum cukup untuk dapat menyimpulkan suatu trend, namun dengan data tersebut tampaknya produksi rata-rata per ha menurun. Tahun 1968 merupakan tahun terendah produksinya.

TABEL III-6.

Produksi rata-rata (ton) padi gadu tiap ha di Sumatera Selatan menurut kabupaten, tahun 1964, 1965, 1966, 1967, 1968.

Kodya/Kabupaten	T A H U N				
	1964	1965	1966	1967	1968
1. Palembang					...
2. M U B A					...
3. O K I				--	...
4. O K U	1,50		2,45	--	2,00
5. Muara Enim	2,56	2,66	2,40	2,40	2,50
6. L a h a t	3,27	3,51	3,61	2,84	2,50
7. Musi Rāwās	3,32	3,44	3,55	3,86	3,30
8. Pangkal Pinang	--	--	--	--	...
9. B a n g k a	0,97	--	--	--	...
10. Belitung	1,50	--	--	--	...
Sumatera Selatan	3,22	3,43	3,51	3,16	2,90

Sumber : Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Sumatera Selatan, 1970.

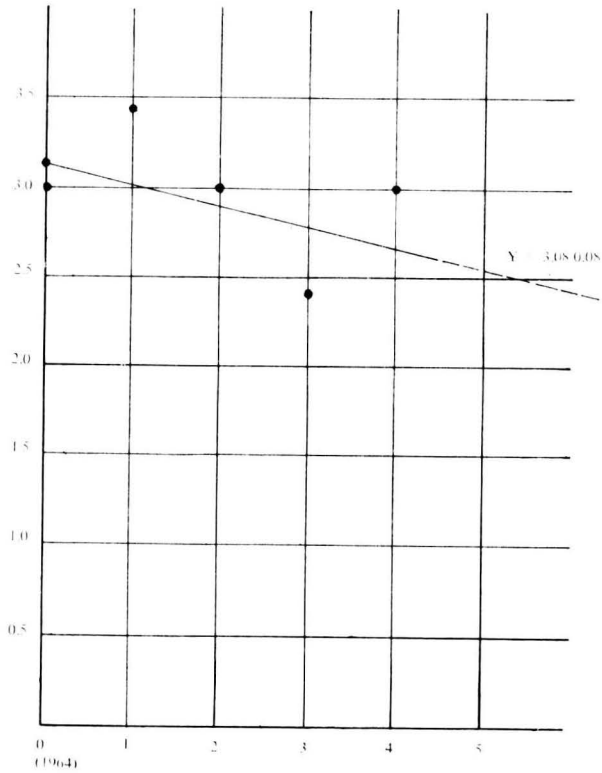
TABEL III-7.

Produksi rata-rata (ton) padi lebak tiap ha di Sumatera Selatan menurut kabupaten, tahun 1964, 1965, 1966, 1967, 1968.

Kodya/Kabupaten	T A H U N				
	1964	1965	1966	1967	1968
1. Palembang	2,41	2,34	2,06	2,40	3,00
2. M U B A	2,04	2,41	1,60	0,50	2,00
3. O K I	2,68	2,22	1,99	1,53	1,88
4. O K U	3,13	3,01	2,39	1,38	2,16
5. Muara Enim	3,32	3,50	3,47	3,00	3,20
6. L a h a t					...
7. M U R A	2,10	2,26	2,30	3,96	1,91
8. Pangkal Pinang					...
9. B a n g k a					...
10. B e l i t u n g					...
Sumatera Selatan	2,64	2,49	2,11	1,54	2,13

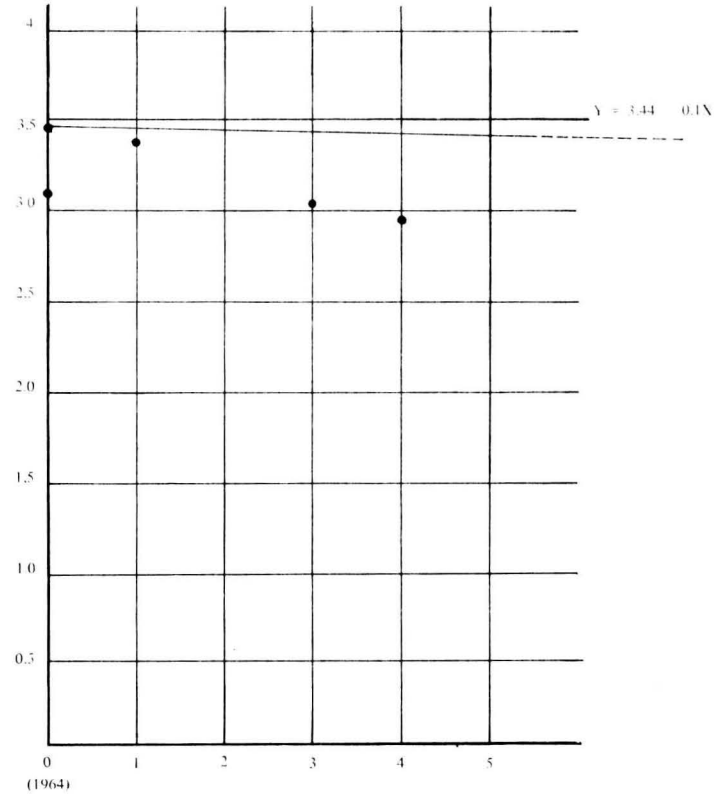
Sumber : Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Sumatera Selatan, 1970.





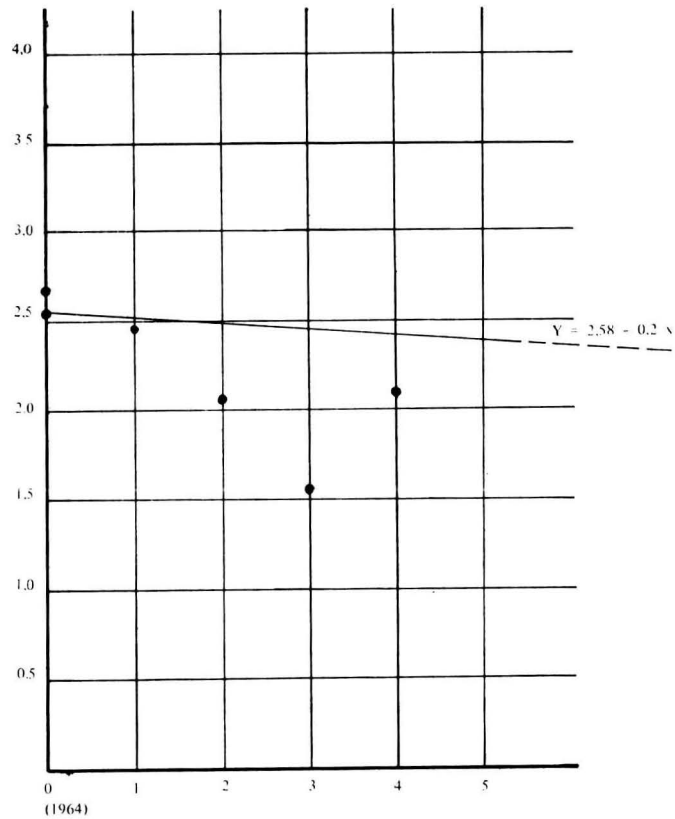
Gambar III.1.

Trend produksi rata-rata per ha padi rendengan menurut metode regresi linair di propinsi Sumatera Selatan.



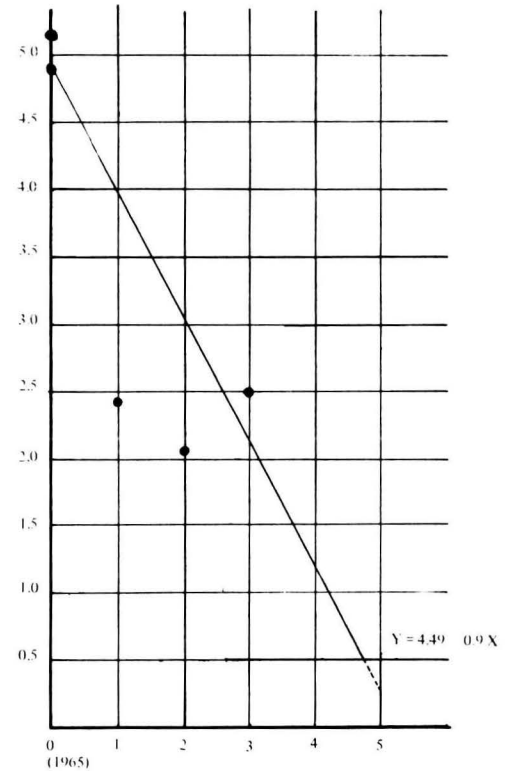
Gambar III.2.

Trend produksi rata-rata per ha padi gadu menurut metode regresi linair di propinsi Sumatera Selatan.



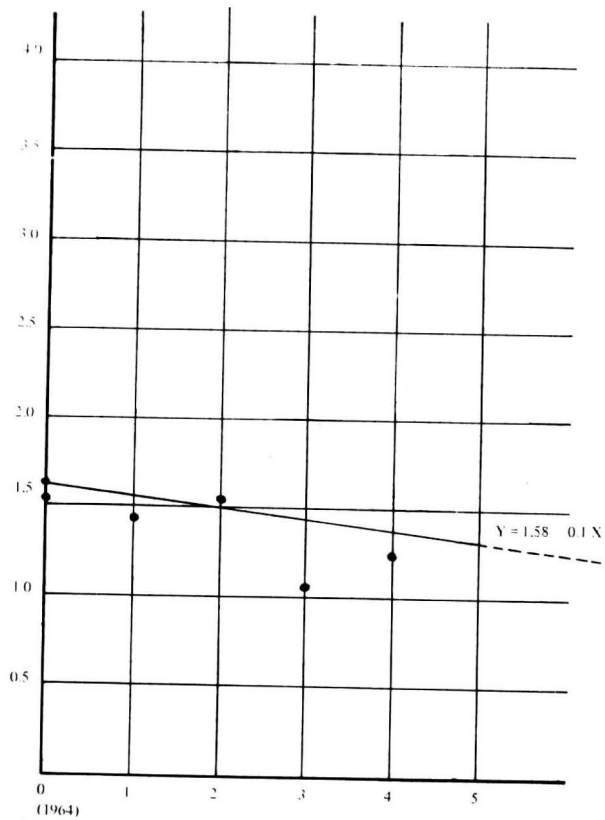
Gambar III.3.

Trend produksi rata-rata/ha padi lebak menurut metode regresi linair di propinsi Sumatera Selatan.



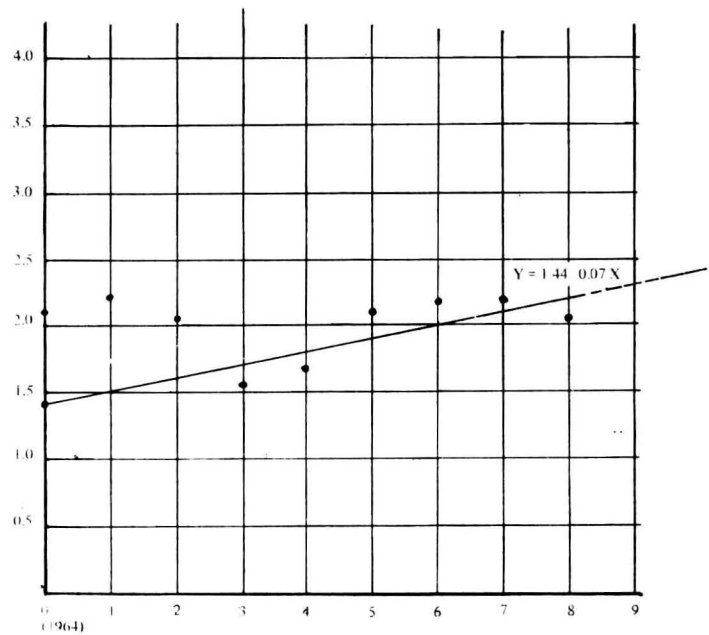
Gambar III.4.

Trend produksi rata-rata per ha padi pasang surut menurut metode regresi linair di propinsi Sumatera Selatan.



Gambar III.5..

Trend produksi rata-rata per ha padi ladang menurut metode regresi linair di propinsi Sumatera Selatan.



Gambar III.6.

Trend produksi rata-rata per ha padi menurut metode regresi linair di Sumatera Selatan.

TABEL III-8.

Produksi rata-rata (ton) padi pasang surut tiap ha di Sumatera Selatan menurut kabupaten, tahun 1964, 1965, 1966, 1967, 1968.

Kodya/Kabupaten	T A H U N				
	1964	1965	1966	1967	1968
1. Palembang	--	--	--	2,00	3,00
2. M U B A	--	5,42	2,42	2,24	2,50
Sumatera Selatan	--	5,42	2,24	2,24	2,50

Sumber : Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Selatan, 1970.

TABEL III-9.

Produksi rata-rata (ton) padi ladang diap ha di Sumatera Selatan menurut kabupaten, tahun 1964, 1965, 1966, 1967, 1968.

Kodya/Kabupaten	T A H U N				
	1964	1965	1966	1967	1968
1. Palembang	0,90	0,90	0,94	1,00	0,90
2. M U B A	1,22	1,46	1,20	1,45	1,22
3. O K Í	1,35	1,08	1,21	1,11	1,19
4. O K U	1,90	1,73	1,55	0,92	0,66
5. Muara Enim	1,17	1,15	1,25	1,08	1,03
6. L a h a t	2,32	2,62	2,75	2,21	2,13
7. M U R A	2,54	2,19	2,24	1,38	2,34
8. Pangkal Pinang	--	--	--	0,41	1,00
9. B a n g k a	0,50	0,49	0,48	0,50	0,46
10. Belitung	0,44	0,50	0,50	0,50	0,35
Sumatera Selatan	1,57	1,48	1,55	1,18	1,24

Sumber : Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Sumatera Selatan, 1970

**TABEL III-10**  
**Produksi padi rata-rata (ton) per ha**  
**di propinsi Sumatera Selatan, tahun 1964 sampai 1972**

TAHUN	PRODUKSI
1964	2,14
1965	2,20
1966	2,02
1967	1,56
1968	1,83
1969	2,06
1970	2,18
1971	2,19
1972	2,06

Sumber : Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Sumatera Selatan, 1972.

Gambaran yang diperoleh dari Tabel III,5 sampai Tabel III.9 ialah bahwa umumnya produksi rata-rata padi lebak, pasang surut, dan ladang selama 1964 sampai 1968 makin merosot. Hal ini lebih jelas tampak pada gambar-gambar (grafik) berikut.

Dari tabel-tabel tersebut dapat dilihat pula bahwa daerah-daerah seperti Lahat, MURA dan Muara Enim merupakan daerah pertanian yang subur. Hal ini tentu saja akan lebih teliti kebenarannya jika ditinjau pula pemakaian pupuk di seluruh Sumatera Selatan.

Pada Gambar 1 sampai Gambar 5 dapat dilihat trend produksi rata-rata per ha untuk padi rendengan, gadu, lebak, pasang surut, dan ladang selama lima tahun. Mungkin hanya dengan lima data (1964, 1965, 1966, 1967, 1968) belum cukup untuk dapat menyimpulkan suatu trend, namun dengan data tersebut tampaknya produksi rata-rata per ha menurun. Tahun 1967 merupakan tahun terendah produksinya.

Pada Gambar 6 dapat dibaca grafik produksi rata-rata per ha padi di seluruh Sumatera Selatan antara tahun 1964 sampai 1972. Walaupun tidak besar, tampak peningkatan produksi mulai tahun 1968. Peningkatan ini akan mempunyai nilai ekonomi bila dibandingkan dengan kecepatan pertumbuhan penduduk di daerah ini.

Peranan tanaman palawija makin penting artinya sebagai bahan ekspor, lebih-lebih setelah banyak permintaan akan jagung dan gapek dari luar negeri.

Apabila data Tabel III.11, dibuatkan grafik menurut regresi liniar maka akan terlihat bahwa trend produksi jagung, ubikayu, kacang tanah, kacang kedele, dan kacang hijau, menurun. Hanya ubikayu meningkat produksi rata-rata per ha selama 9 tahun (1964 - 1972).

TABEL III-11.

Produksi rata-rata (ton) per ha palawija  
di Sumatera Selatan, tahun 1964 sampai 1972

Tahun	Jagung	Ubikayu	Ubijalar	Kacang tanah	Kacang kedele	Kacang hijau
1964	0,85	8,03	6,62	0,96	0,81	0,58
1965	0,75	7,97	4,86	0,84	0,75	0,85
1966	0,70	7,31	3,43	0,77	1,02	0,69
1967	0,68	5,03	4,84	0,95	0,60	0,59
1968	0,77	6,43	5,54	1,04	0,63	0,62
1969	0,68	6,30	5,22	0,72	0,67	0,56
1970	0,74	5,67	5,39	0,75	0,63	0,62
1971	0,78	7,07	5,07	0,77	0,62	0,70
1972	0,78	6,92	5,11	0,92	0,66	0,70

Sumber : Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Sumatera Selatan, 1970 dan 1972.

TABEL III-12  
Location Quotient hewan ternak  
di Sumatera Selatan menurut kabupaten, 1971, 1972

Kabupaten	H E W A N													
	1		2		3		4		5		6		7	
	1971	1972	1971	1972	1971	1972	1971	1972	1971	1972	1971	1972	1971	1972
1. Palembang	0	0	0,31	0,18	0,07	0,09	9,67	0,74	3,77	2,66	1,07	1,11	0,93	0,85
2. M U B A	0	0	21,45	2,42	0,53	1,14	1,05	0,92	1,62	1,51	0,08	0,80	2,16	1,57
3. M U R A	0,05	0,06	0,57	0,41	2,53	1,31	1,05	1,64	0,17	0,09	0,95	14,26	1,06	
4. O K I	0	0	0,57	8,47	1,91	0,87	0,32	0,82	0	0,02	1,01	0,88	11,91	1,79
5. O K U	5,70	4,77	0,39	1,35	0,96	1,03	1,61	0,98	1,07	0,77	0,94	1,08	0,91	0,67
6. L a h a i	0,15	0	2,01	1,31	1,07	2,23	1,70	1,34	0,04	0,95	1,07	0,80		0,91
7. L I O T	0	0,13	1,48	1,83	2,03	0,77	1,50	1,80	0,13	0,09	1,02	0,89	0,88	1,48
8. Pk. Pinang	0	0	0,03	0,04	0	0	0,05	0,03	7,07	9,47	1,12	1,10	0,92	0,58
9. Bangka	0	0	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	26,33	42,98	1,24	1,29	0,51	0,94
10. Belitung	0	0	0,05	0,06	0,01	0,61	0,14	0,01	0,97	1,02	1,27	1,27	0,50	0,51

Sumber : Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Selatan, 15 Juli 1972

## 2. Peternakan

Sebagaimana di daerah lain di Indonesia, peternakan di Sumatera Selatan diusahakan oleh petani atau pedagang di samping pekerjaannya yang pokok. Pemerintah membantu permodalan, bibit, dan mengatur pasaran.

Di daerah ini dipelihara : (1) kuda, (2) sapi, (3) kerbau, (4) kambing dan domba, (5) babi, (6) ayam, dan (7) itik. Hasil-hasil peternakan meliputi hewan hidup, daging, susu, kulit, telur, dan tulang.

Jika ditilik jumlah hewan pada masing-masing Kotamadya/Kabupaten tahun 1971 dan 1972, maka akan terlihat :

- a. Di daerah Palembang, peternakan kerbau dan ayam makin maju, sedang lain-lainnya merosot lebih-lebih kambing dan domba.
- b. Di daerah MUBA, peternakan kerbau dan ayam mengalami kemajuan, sedang lain-lainnya merosot lebih-lebih sapi.
- c. Di daerah MURA, peternakan kuda, kambing dan domba, babi, dan ayam mengalami kemajuan. Kemunduran besar dialami oleh peternakan itik.
- d. Di daerah OKI, kemajuan pesat terjadi pada peternakan sapi. Peternakan kambing dan domba, serta babi mengalami kemajuan pula. Sangat merosot dalam peternakan itik.
- e. Di daerah OKU, peternakan sapi, kerbau, dan ayam mengalami kemajuan, sedang lain-lainnya merosot.
- f. Di daerah Lahat, hanya peternakan kerbau dan ayam yang mengalami kemajuan
- g. Di daerah LIOT, kemajuan dialami pada peternakan sapi, kambing dan domba, serta itik. Peternakan kerbau amat merosot.
- h. Peternakan babi di daerah Pangkal Pinang, Bangka, dan Belitung maju amat pesat.
- i. Walaupun menurun, daerah konsentrasi kuda masih di kabupaten OKU. Sapi bergeser dari daerah MUBA ke daerah OKI. Kerbau bergeser dari MURA ke Lahat. Daerah Bangka tetap merupakan daerah babi, bahkan makin maju. MURA dan OKI pada tahun 1972 tidak lagi sebagai daerah itik di Sumatera Selatan.

## 3. Perikanan

Propinsi Sumatera Selatan memiliki dua jenis perairan yang kaya akan ikan. kedua jenis perairan itu adalah wilayah laut dangkal di paparan Sunda, dan daerah muara sungai.

Daerah perikanan laut di Bangka dan Belitung merupakan wilayah laut dangkal yang mengelilingi pulau-pulau tersebut. Daerah perikanan Palembang yang meliputi kabupaten MUBA dan OKI terletak pada daerah muara sungai di Selat Bangka.

Muson mempengaruhi konsentrasi dan penangkapan ikan tertentu pada sesuatu perairan. Di Sumatera Selatan dapat ditangkap bermacam-macam ikan sepanjang tahun pada daerah perikanan yang berbeda-beda, seperti diuraikan di bawah ini (2, p. 55-56).

- a. Dalam bulan Januari sampai Mei bertiup *angin timurlaut*. Dapat ditangkap *udang* didaerah perairan Toboali-Kurau-Koba (Bangka).
- b. Dalam bulan April sampai Oktober bertiup *angin timur*. Dapat di tangkap :
  - 1) *Bawal* di perairan Sungsang-Laut Birik (Palembang).
  - 2) *Tenggiri* di Sungsang-Laut Birik (Palembang), di Pesaron - Belinyu Jebus (Bangka), dan di pulau-pulau sebelah timur Belitung (Belitung).
  - 3) *Udang* di perairan Tg. Latimó Bangko-Sungsang - Tg. Jabung (Palembang).
  - 4) *Kembung* di perairan Tg. Pandan Tg. Binga (Belitung).
- c. Dalam bulan Juni sampai Noperber bertiup *angin tenggara*. Dapat ditangkap :
  - 1) *Tenggiri* diperairan Koba-Pangkal Pingang - Sungai Liat (Bangka).
  - 2) *Udang* di Kemiri (Teluk Balok, Belitung).
  - 3) *Kembung* di perairan Koba-Kurau (Bangka).
  - 4) *Cumi-cumi* di perairan Mentok-Jebus (Bangka), di Pangkal Pinang-Koba-Kurau (Bangka), Tg. Binga - Tg. Pandan (Belitung), dan di Manggar (Belitung).
  - 5) *Senangin* di perairan Sungsang - Laut Birik (Palembang), dan di Sungai liat - Pangkal Pingang - Koba (Bangka).
- d. Dalam bulan Agustus sampai Desember bertiup *angin baratdaya*. Dapat ditangkap *udang* di perairan Belinyu (Teluk Kelabat, Bangka).
- e. Dalam bulan Nopember sampai Maret bertiup *angin barat*. Dapat ditangkap :
  - 1) *Bawal* di perairan Masapari - Sungai Lumpur - Mesuji (Palemngang), dan di Toboali Gunung Namak (Bangka).
  - 2) *Tenggiri* di perairan Masapari - Sungai Lumpur Mesuji (Palembang), dan di Seliu Tg. Kelumpang - Manggar (Belitung).
  - 3) *Tongkol* di perairan Lepar Longok - Kelapa (Bangka), di Kalang Bau Kalamar (Belitung), dan di Manggar (Belitung).
  - 4) *Udang* di perairan Sungsang Tg. Kait - Mesuji (Palembang), dan di Prapat - Mentigi (Belitung).
  - 5) *Kembung* di perairan Sungai Lumpur (Palembang), di Toboali (Bangka), dan di Manggar (Belitung).
  - 6) *Senangin* di perairan Masapari - Sungai Lumpur (Palembang), dan di Toboali - Gunung Namak (Bangka).

Alat-alat penangkapan ikan terdiri atas berjenis-jenis jaring, perangkap,



pancing, dan lain-lain. Jumlah masing-masing jenis itu tidak sama pada masing-masing daerah perikanan. Daerah Bangka memiliki jumlah terbesar untuk masing-masing jenis itu (2, p. 61).

Analisa location quotient dapat memberikan gambaran konsentrasi alat-alat itu di daerah perikanan tertentu. Konsentrasi jaring yang terbesar di daerah Bangka dan Palembang, perangkap di Palembang, pancing di Belitung, sedang alat-alat lainnya di Bangka.

Kendaraan air yang digunakan dalam penangkapan ikan terdiri atas perahu sebanyak 7.165 buah, dan kapal motor sebanyak 7.544 buah. Jumlah seluruh tonase sebesar 8.754,40 ton yang terdiri dari 3.914,70 ton perahu dan 4.839,70 ton kapal motor (2, p. 121).

Produksi ikan basah di Sumatera Selatan tahun 1971, 22.857.929 kg, seharga Rp. 990.851.875.-- Jumlah seluruh nelayan tahun itu 20. 989 orang. Jadi pendapatan rata-rata tiap nelayan Rp. 47.200.-- dan harga rata-rata ikan Rp. 43,32 dalam tahun itu.

Selain perikanan laut, terdapat juga usaha perikanan darat. Pemeliharaan ikan dilakukan di perairan umum dan sawah. Perairan umum meliputi sungai, kuala sungai, rawa lebak, danau, dan genangan.

#### 4. Kehutanan

Masalah yang dihadapi oleh kehutanan di Sumatera Selatan ialah bagaimana mencegah meluasnya padang rumput. Sekurang-kurangnya ada tiga cara pemecahannya yaitu mengatur perladangan, mencegah pembakaran hutan, dan reboisasi. Mungkin yang paling penting ialah mencegah pembakaran hutan, karena walaupun pengaturan perladangan dan reboisasi berhasil, tetapi kebiasaan membakar masih saja terus berlangsung, akan gagal usaha tersebut. Tambahan lagi debu dan asap dari pembakaran hutan itu menimbulkan polusi udara, dan mengganggu lalu lintas udara.

Hutan di daerah perladangan merupakan milik marga. Sebagian daerah padang rumput sebagai akibat ladang, diserahkan kepada pemerintah dalam rangka reboisasi. Daerah tersebut akan menjadi *hutan cadangan*. Hutan cadangan terdiri atas hutan produksi dan hutan *hidrologis*. Hutan hidrologis terutama di daerah pegunungan vulkanik muda, sedang hutan produksi terdapat daerah penepian.

Luas hutan cadangan di seluruh Sumatera Selatan 1.415.272 ha, yang terdiri atas hutan produksi 787.818 ha dan hutan hidrologi 627.454 ha. Penyebaran hutan produksi adalah di daratan Sumatera Selatan 370.850 ha, di Bangka 319.575 ha, dan di Belitung 97.393 ha. Hutan hidrologi hanya terdapat di daratan Sumatera Selatan 650.459 ha, dan di Bangka 21.995 ha. Belitung tidak mempunyai hutan hidrologi.

## B. PERINDUSTRIAN

Usaha perindustrian yang menonjol di propinsi Sumatera Selatan adalah penyulingan minyak, pabrik pupuk, dan peleburan timah. Penyulingan atau rafinasi minyak bumi di Plaju dan Sungai Gerong, pabrik pupuk "Sriwijaya" di Palembang, dan peleburan timah di Bangka Mentok, merupakan perusahaan yang tergolong besar dan milik pemerintah. Selain itu perusahaan pemerintah yang tergolong besar pula adalah bengkel gerbong kereta api di Lahat, dan tekstil di Palembang. Industri polipropilena yang terdapat di Palembang sekarang mulai menghasilkan.

Menurut pendaftaran industri tahun 1970 (3, p. 83), terdapat 683 buah industri di Sumatera Selatan, yang terdiri atas 32 buah industri besar dan 651 industri sedang.

Dari 32 industri besar, industri hasil karet 20 buah, makanan 3 buah, alat pengangkutan 3 buah, tekstil 2 buah, kimia 2 buah, percetakan 1 buah, dan porselin 1 buah.

Jumlah buruh pada industri besar dan industri sedang 13.705 orang, dengan perincian 6.825 pada industri besar, dan 6.880 pada industri sedang. Angka ini hanya meliputi buruh pada industri yang memberikan laporan lengkap. Pada industri besar hanya industri hasil karet dan alat pengangkutan yang memberikan laporan. Jumlah buruh pada masing-masingnya adalah 4.021 dan 237 orang.

TABEL III-13.

Jumlah buruh rata-rata pada setiap jenis industri sedang,  
tahun 1970.

J E N I S	Jumlah buruh rata-rata	Jumlah industri
1. Industri makanan . . . . .	7	144
2. Industri makanan yang tidak termasuk tidak termasuk golongan manapun . . . . .	9	74
3. Industri minuman . . . . .	10	13
4. Industri tekstil . . . . .	11	3
5. Industri kulit dan pengolahan barang dari kulit, dan penyamakan, kecuali untuk sepatu dan pakaian . . . . .	—	1
6. Industri barang-barang dari kayu . . . . .	8	209
7. Industri alat-alat rumah tangga . . . . .	9	3
8. Industri kertas dan barang-barang kertas . . . . .	—	1
9. Industri percetakan, penerbitan dan yang berhubungan dengan itu . . . . .	12	14
10. Industri kimia . . . . .	8	4

J E N I S	Jumlah buruh rata-rata	Jumlah industri
11. Industri kimia lainnya . . . . .	17	6
12. Industri hasil karet . . . . .	40	27
13. Industri barang plastik . . . . .	--	1
14. Industri porselin . . . . .	15	3
15. Industri gelas . . . . .	--	1
16. Industri barang galian bukan logam . . . . .	13	70
17. Industri hasil barang logam kecuali mesin . . . . .	8	38
18. Industri mesin, kecuali mesin listrik . . . . .	8	8
19. Industri mesin listrik . . . . .	--	--
20. Industri alat-alat pengangkutan . . . . .	15	30

TABEL III-14.

Konsentrasi industri menurut kabupaten dinyatakan dalam persen tahun 1970 (lebih dari 20 % jumlah industri propinsi)

Industri	K A B U P A T E N									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	32	57	--	--	--	--	--	--	--	--
2.	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.	54	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4.	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6.	38	--	25	--	--	--	--	--	--	--
7.	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8.	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9.	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10.	60	--	--	--	--	--	--	30	--	--
11.	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12.	22	--	--	--	--	--	--	48	--	--
13.	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14.	39	--	--	--	--	--	--	60	--	--
15.	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16.	2	--	--	--	--	--	--	33	--	21
17.	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18.	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19.	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20.	57	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Publikasi Kantor Sensus dan Statistik  
Propinsi Sumatera Selatan No. 3 April 1972.

**Keterangan :**

1. Kotamadya Palembang
2. Kabupaten Musibanyuasin
3. Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Kabupaten Ogan Komering Ulu
5. Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah
6. Kabupaten Lahat
7. Kabupaten Musi Rawas
8. Kabupaten Bangka
9. Kotamadya Pangkal Pinang
10. Kabupaten Belitung

### C. PERHUBUNGAN DAN PERDAGANGAN

Karena propinsi Sumatera Selatan terdiri dari bagian Sumatera daratan dan pulau-pulau, maka perhubungan darat dan laut amat penting artinya di propinsi ini. Mengingat bahwa jarak antara Palembang dan kota-kota lain sangat besar maka sewajarnya diintensipkan pula perhubungan udara di dalam daerah ini.

Perhubungan darat meliputi kereta api, jalan raya, dan sungai. Kereta api menghubungkan Palembang dan Tanjung Karang, serta Palembang dan Lubuk linggau. Jalan raya yang terdapat di Sumatera Selatan daratan menghubungkan Palembang dengan ibukota kabupaten, serta antara ibukota kabupaten sesamanya. Di Bangka dan Belitung jalan raya menghubungkan ibukota kabupaten dengan beberapa kota besar lainnya.

Panjang jalan kereta api 643 km: (3, p. 121) sedang jalan raya 5.983 km. (1, p. 1). Jalan raya terbagi dalam tiga jenis, yaitu jalan negara 662,2 km, jalan propinsi 2.616,5 km, dan jalan kabupaten 2.704 km.

TABEL III-15.

Prosentase panjang jalan tidak beraspal  
pada 8 kabupaten di Sumatera Selatan, menurut jenis, 1972.

Kabupaten	Negara	Propinsi	Kabupaten
M U R A	73,4	93	97
L a h a t	58	64,9	99
L I O T	12,8	100	96
M U B A	--	86	98
O K I	0	77	98
O K U	65,6	82	99
B a n g k a	--	46,6	83
B e l i t u n g	--	37	63,8

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum propinsi Sumatera Selatan, 1972.

Lalu lintas barang melalui kereta api di daerah Sumatera Selatan antara 1961 sampai 1969 mengalami kemunduran. Hal ini tampak pada banyaknya ton yang diangkut pada setiap km yang makin merosot (3, p. 122).

Palembang dan dua ibukota kabupaten di Bangka dan Belitung, dihubungkan oleh kapal motor. Beberapa palabuhan pada kedua pulau itu kerap kali disinggahi oleh kapal-kapal interinsuler yang menghubungkan Jakarta dengan Medan, atau Jakarta dengan Pontianak. Misalnya Mentok (di Bangka), dan Tanjung Pandan (di Bangka). Hal ini tentu mempunyai keuntungan bagi daerah-daerah tersebut, tetapi akan mendatangkan situasi kurang baik bagi Sumatera Selatan secara keseluruhan.

Jika dilihat nilai ekspor dan impor dari pelabuhan Palembang pada tiap-tiap tahun, maka kelihatan bahwa neraca perdagangan di daerah ini positif. Tetapi jika dilihat ekspor dan impor baik tonase maupun nilai rupiah selama 1963 sampai 1970, maka kelihatan merosotnya kegiatan perdagangan dari tahun ke tahun. Misalnya nilai rupiah pada tahun 1970 untuk impor dan ekspor di jadikan 1 (satu) maka akan kelihatan nilai untuk tahun-tahun sebelumnya pada Tabel III.16.

TABEL III-16  
Nilai ekspor dan impor di Sumatera Selatan  
sejak 1963 sampai 1970, jika nilai 1970, 1 (satu)

TAHUN	N I L A I	
	Ekspor	impor
1963	0,01	0,04
1964	0,07	0,05
1965	0,10	0,04
1966 x)	9,66	7,37
1967	10,33	8,48
1968	0,97	1,44
1969	1,10	1,50
1970	1	1

Sumber : Publikasi Kantor Sensus dan Statistik  
Propinsi Sumatera Selatan No. 3, April 1972.

x) Nilai uang berubah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BAB I

1. Bemmelen, R.W., *The Geology of Indonesia. vol. I.A. General Geology of Indonesia and Adjacent Archipelagoes*. Government Printing Office, The Hague, 1949.
2. *Buku Tahunan Pertambangan Indonesia 1971*. Departemen Pertambangan R.I. Jakarta, 1972.
3. Data Iklim 1971 di Indonesia, Lembaga Meteorologi dan Geofisika Dep. Perhubungan, Jakarta, 1972.
4. *Indonesia, Sensus Penduduk 1971, Penduduk Diperinci menurut Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya*. Seri B No. 1, Biro Pusat Statistik, Jakarta, 1972.
5. Moeljadi. Drs, *Distribusi Hujan dan Iklim menurut Koppen di pulau Sumatera*, Dinas Geografi Direktorat Topografi Angkatan Darat, Jakarta 1968.
6. *Monografi Perikanan Laut Daerah Propinsi Sumatera Selatan*, Dinas Perikanan Laut, Daerah Propinsi Sumatera Selatan, Palembang 1972.
7. *Naskah Peta Tanah Eksploitasi Jawa dan Madura*, Lembaga Penelitian Tanah, Departemen Pertanian, No. 5 Jakarta, 1969.
8. *Peta Tanah Eksploitasi Skala. : 1.000.000*, Lembaga Penelitian Tanah dan Pemupukan, Departemen Penelitian, Jakarta, 1964.
9. Verstappen, Dr. H. Th, *Dasar Fisiografis dan Transmigrasi di Sumatera Selatan* Kementrian Pertahan, Jawatan Topografi Angkatan Darat, Balai Geografi, Jakarta, 1956.

### BAB II

1. Bhatta, J.N., Msc., *Soal-soal Transmigrasi di Indonesia*, Balai Geografi, Direktorat Topografi Angkatan Darat Publikasi No. 7 Jakarta.
2. Boris Parl, *Basic Statistics*, Doubleday and Company Inc. New York, 1967.
3. BPS., *Statistik Indonesia 1968 & 1969*, Jakarta 1971.
4. BPS., *Statistical Pocketbook of Indonesia 1963*, Jakarta.
5. BPS., *Sensus Penduduk 1971*, Jakarta, 1972.
6. Broek. V.M., Jan, *Compass of Geography*, Charles E. Merrill Books, Inc., Col. Ohio 1966.
7. Irsad, Walter, *Methods of regional Analysis : an Introduction to Regional Science*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1972. p. 5-32.

8. *Kartor Sensus dan Statistik Propinsi Sumatera Selatan*, No. 3 Palembang, April 1972.

#### SAB III.

1. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Selatan, 1972.
2. Monografi Perikanan Laut Daerah Propinsi Sumatera Selatan, Dinas Perikanan Laut Prop. Sum. Sel, Palembang, 1972.
3. Publikasi Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sumatera Selatan, No. 3 Palembang 1972.

**BAGIAN KEDUA**

**ASPEK SEJARAH**



## B A B IV

### DARI ZAMAN PRASEJARAH HINGGA ZAMAN KESULTANAN PALEMBANG

#### A. Prasejarah di Sumatera Selatan

Penelitian prasejarah di Sumatera Selatan, walaupun sudah dimulai, tetapi hingga dewasa ini belum memberi gambaran yang menyeluruh. Dari penemuan yang ada dapat dicatat, bahwa alat-alat jenis flakes yang mewakili zaman palaeolithicum atau zaman batu tua, banyak dijumpai di sungai Kikin. Lahat (1, p. 42). Kemudian di Tanjungara, Pagaralam, terdapat peninggalan yang berasal dari zaman neolithicum atau zaman batu muda (1, p. 25).

Sebagaimana kita ketahui, pada zaman neolithicum, alat-alat yang diperbuat dari batu telah mulai diasah dan diupam, sehingga tampak halus dan indah. Oleh karena itu sering dikatakan, bahwa zaman ini membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, yaitu dari manusia pengumpul makanan menjadi manusia pembuat makanan. Pemeliharaan ternak dan bercocok tanam mulai dikenal. Kuburan batu (dolmen) mulai dibuat pula (11, p. 9).

Alat-alat perkakas yang terindah pada zaman ini kita dapati di Jawa Barat dan Sumatera Selatan, di mana perkakas-perkakas tersebut dibuat dari batu permata (11, p. 41).

Dalam zaman neolithicum ini pula sebenarnya muncul kebudayaan megalithicum, yang baru berkembang pada zaman logam. Di Sumatera peninggalan yang terpenting terdapat di dataran tinggi Pasemah. Di sana ada sekumpulan besar arca-arca, menhir, dolmen dan hasil-hasil kebudayaan megalithicum. Penyelidikan telah dilakukan oleh Dr. Van der Hoop dan Von Heine Geldern. Lebih-lebih kita mendapatkan kepastian oleh karena ada beberapa arca, seperti pada Batu Gajah di dekat Baturaja, terdapat gambar nekara. Di daerah Pasemah banyak didapati berbagai benda dari perunggu dan besi, sedangkan dari kuburan-kuburan banyak didapatkan manik-manik dan gelas (27, p. 66).

## B. Zaman Sriwijaya di Sumatera Selatan

### 1. Keadaan Umum

Sumatera Selatan pada masa kuno, mempunyai batas serta areal yang lebih luas, sebab Sumatera Selatan masa kuno, tidak dapat dilepaskan dari wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya.

Hal ini dapat kita ketahui dari hasil penemuan serta peninggalan-peninggalan yang didapatkan berupa *prasasti*. Pengaruh Sriwijaya sampai di daerah Jawa Barat pada abad X. Sedangkan di Jawa Timur berkuasa raja Dharmawangsa, yang mempunyai wilayah kekuasaan sampai Bali dan Jawa Tengah. Dalam perkembangan selanjutnya, Sriwijaya erat hubungannya dengan Jawa Timur, karena kaitan genealogis, yang dirintis oleh Bataputradewa. Kemudian diperkuat pada masa Singhasari, dengan adanya ekspedisi Pamalayu.

Hubungannya dengan India Selatan kelihatan karena adanya persamaan yang menarik, misalnya antara nama cabang marga di Sumatera, antara lain Sembiring, Coliya, Pandiya yang sesuai benar dengan di Tamil. Dan Meliyala tidak diragukan lagi sama dengan Malayalam di Malabar.

Selanjutnya ada hubungan Sriwijaya dengan Madagaskar, seperti yang dikatakan oleh Gabriel Ferrand, dalam bukunya "L'Empire Sumatranais Sriwijaya" tahun 1922 (33, p. 42).

Sumatera Selatan dengan ibukotanya Palembang mempunyai kekuatan perekonomian yang terletak pada air. Urat nadi kehidupan masyarakat terletak sebagian besar pada perdagangan laut lewat sungai. Hal ini dapat dilihat sampai sekarang, betapa besar arti sungai Musi untuk arus lalu lintas dagang. Pada zaman Sriwijaya, hasil rempah-rempah serta gading merupakan bahan ekspor.

Kota Palembang menurut ceritera rakyat, merupakan asal-usul, mengapa Sumatera terkenal dengan nama *Swarnadwipa* (*pulau Emas*), sebab kota Palembang berasal dari kata *limbang*, yaitu mencuci air sungai untuk mendapatkan emas urai dalam lumpur sungai (1, p. 41).

Sumatera juga terkenal dengan nama *Pulau Perca*, sesuai dengan daerahnya di mana banyak tumbuh pohon perca.

Sumber pemberitaan tentang Sriwijaya dapat dibagi menjadi dua kelompok.

a. *Sumber aseli* dari Indonesia, berupa prasasti, yang didapati di daerah Sumatera, Jawa dan sekitarnya; buku kakawin atau puja sastra, antara lain Nagarakertagama dan Pararaton; buku Kidung dan buku Babad. Juga peninggalan-peninggalan lain berujud bangunan, arca dan candi.

Adapun prasasti yang menyebutkan nama Sriwijaya ialah :

1) *Prasasti Kedukan Bukit, berangka tahun 605 Caka*. Prasasti ini berhuruf Pallawa dengan bahasa Melayu Kuno bercampur kata-kata Sansekerta, yang berbunyi : "Swasti Sri cakawarsatika 605 eka dapi suklapaksa wulan waigaka

dapunta hyam nayik disamwau manalap siddhayatra di saptami ꦏꦸꦭꦭꦏꦱꦏꦱ  
..... ꦑꦿꦶꦮꦶꦗꦶꦪꦶ ꦗꦪꦱꦶꦢꦲꦶꦲꦠꦂꦱꦸꦃꦶꦏꦱꦶ”.

*Artinya* : Selamat tahun Caka 605 tanggal 11 telah berjalan paro terang bulan Waicaka yang dipertuan Hyang di perahu mengambil perjalanan suci pada tanggal 7 paro terang Sriwijaya menang karena perjalanannya suci yang menyebabkan kemakmuran.

2) *Prasasti Kota Kapur*. Prasasti ini sekarang disimpan di Museum Pusat Jakarta dengan nomor kode D. 90. Bahannya dari batu karang, ditemukan di pulau Bangka. Menurut para ahli, kemungkinan besar dimasukkan dari luar daerah (20, p. 87). Kata Sriwijaya terdapat dalam baris kalimat yang kedua, ke empat dan ke sepuluh, yang bunyinya sebagai berikut :

Baris 2 :

”umenten bhaktiniulun haraki unia kita wawanakta dewata mahardhika sannidhana mamraksa yam kadatuan ꦑꦿꦶ ꦮꦶꦗꦶꦲ ꦏꦂꦠꦠꦸꦮꦶ ꦠꦢꦂꦸꦩ ꦭꦸꦲ ꦮꦤꦏꦠꦱꦺꦮꦠꦩꦭꦤꦶ ꦮꦩ ꦥꦱꦸꦩꦥꦲꦤ .....”

Baris 4 : ”marpadah, tida ya bhakti .....

niwunuh ya sumpah misuruh tapik ya mulam prawwanda datu ꦑꦿꦶꦮꦶꦗꦶꦲꦶ .....”

Baris 10 : ”yam mammam sumpah ini nipahat di welana yam wala ꦑꦿꦶꦮꦶꦗꦶꦲꦶ ꦏꦭꦶꦮꦠ ꦩꦤꦥꦶꦏ ꦮꦩ ꦧꦸꦩꦶ ꦗꦮꦠꦶꦏ ꦧꦲꦏꦠꦶ ꦏꦏꦑꦿꦶꦮꦶꦗꦶꦲꦶ” (23, p. 13–16).

Terjemahannya demikian :

..... wahai kami sekalian dewa-dewa yang mulia yang hadir menjaga istana Sriwijaya, kami sekalian dewa-dewa yang menjadi permulaan segala sumpah .....

tidak mengindahkan, tidak tunduk (taat) tidak setia akan daku dan akan dia yang kuberi kedudukan sebagai datu sangatlah jahat perbuatan orang itu, ia dibunuh oleh sumpah, disuruh pukul dia oleh datu Sriwijaya.

sapata ini dipahat di batas kekuasaan Sriwijaya, yang sangat berusaha menaklukkan tanah Jawa yang tidak tunduk kepada Sriwijaya.

Dari kedua prasasti tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa wilayah Sriwijaya sampai di daerah Bangka serta adanya rencana untuk perluasan daerah kekuasaan di Jawa. Maka dari itu sejak raja Airlangga telah terjadi perimbangan kekuasaan antara Kahuripan/Janggala dengan Sriwijaya.

b. *Sumber-sumber asing*, berupa berita dari India, yang menerangkan hubungan antara Sriwijaya dengan beberapa kerajaan di India, misalnya prasasti Nalanda (20, p. 47); Berita dari Malaka, Ceylon, Arab dan Parsi, seperti yang

dibukukan oleh Moens (17, p. 317): Kronik dinasti dari Cina, yang telah dibukukan oleh W.P. Groeneveldt, dengan judul "Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources" juga menyebut banyak tentang Sriwijaya.

1) Berdasarkan berita Arab, nama Sriwijaya terkenal dengan ucapan Sribuza. **Bozorg** dalam bukunya "Ajaib-al-Hind" tahun 935 A.D. mengatakan:

"The estuary of Sribuza penetrates for 50 parasangs ( $\pm$  200 km) into the island. It is a river far wider than the Tigris at Basra; its waters are fresh. There is no deeper bay i.e. penetrating so far inland in the whole island. Tidal influence makes itself felt at intervals of 12 hours. Some dwellings are built on shore, but the majority are floating houses, supported by rafts made of timbers, tied together" (17, p. 338).

Haraki, pada tahun 1132 membedakan kembali antara Zabag dari Kalah yang menghasilkan timah dan Sribuza menghasilkan kapur barus. Sedangkan Idrisi pada tahun 1153 mengingatkan Sribuza sebagai salah satu dari kepulauan Zabag. Yang menarik dari tulisan Idrisi ialah, Sriwijaya telah mengadakan perdagangan dengan Afrika Timur. Hal ini dikaitkan dengan adanya orang-orang Indonesia di Madagaskar (8, p. 156).

2) Berita-berita dari Cina yang ditulis dalam "History of the Sung Dynasty (960 – 1279)" menyebut nama Sriwijaya dengan San-bo-tsai, yang terletak antara Kamboja dan Jawa yang diperintah oleh para raja Sriwijaya kurang lebih meliputi 15 negeri (6, p. 62). Hasil bumi Sriwijaya adalah rotan, kino merah, ligaum, dan kelapa. Perdagangannya tidak mempergunakan mata uang tembaga, tetapi mata uang perak dan emas (6, p. 63).

Memang sumber terbanyak sejarah kerajaan Sriwijaya datangnya dari Cina. Menurut kronik dinasti Ming, San-bo-tsai dahulunya bernama Kendar yang pertama kali mengirim utusan dengan antaran berupa upeti pada masa kaisar Hsiau-wu (6, p. 68).

Dari apa yang diuraikan di atas dapatlah diketahui, bahwa kerajaan Sriwijaya benar-benar sangat terkenal.

## 2. Persoalan lokasi Sriwijaya

Prof. G. Goedes, adalah sarjana yang pertama kali mengungkapkan persoalan Sriwijaya pada tahun 1918 dalam bukunya berjudul "Le Rayoume de Sriwijaya". Ditegaskannya bahwa Sriwijaya bukanlah nama raja, melainkan nama kerajaan. Hal ini berdasarkan atas sejumlah prasasti yang terdapat di daerah Sumatera Selatan. Goedes menegaskan, bahwa pusat kerajaan Sriwijaya terletak di sekitar Palembang (BEFEO XVIII, 1918; juga: 17, p. 328).

Sedangkan F.D.K. Bosch dalam artikelnya "Verslag van een reis door Sumatra", antara lain mengatakan: "..... oudheidkundige overblijfselen geven steun aan de gangbare onderstelling, dat de hoofdstad Sriwijaya op de plaats

van het tegenwoordige kota Palembang gelegen was" (26, p. 245). Artinya kurang lebih : "..... penemuan-penemuan purbakala memperkuat pendapat, bahwa ibukota kerajaan Sriwijaya terletak di kota Palembang yang sekarang".

Majundar dalam bukunya "Cailendra Empire" dan "Les Rois Cailendra de Suvarnadwipa" yang termuat dalam BEFEO XXXIII setelah mengadakan penelitian inskripsi Ligor tahun 775 A.D. juga cenderung menyebut pusat Sriwijaya ada di Palembang (17, p. 347). Tetapi Majundar juga berkata hendaknya Sriwijaya dicari di Jawa atau Ligor, berdasarkan inskripsi Ligor itu (26, p. 245).

Nilakanta Sastri lebih tegas lagi, yaitu mempertahankan Palembang. Tetapi sebaliknya Quaritch Wales berpendapat, bahwa Sriwijaya terletak di daerah Chaya, India Selatan. Yzerman berpendapat, Sriwijaya pusatnya harus dicari antara aliran di sungai Kampar dan Muara Takus (17, p. 340).

Penelitian Team Dinas Purbakala pada tahun 1955, menyimpulkan bahwa lokalisasi kerajaan Sriwijaya terletak di daerah Jambi, berdasarkan pertimbangan adanya teluk yang menjorok sampai Muara Tembesi dan di situ terdapat nama Muara Sabak (26, p. 245).

Dari uraian di atas, masih dapat diambil suatu kesimpulan bahwa lokasi dan identifikasi Sriwijaya masih merupakan problematik. Hal ini disebabkan karena sumber pemberitaan serta interpretasi yang berbeda-beda (8, p. 49). Walaupun demikian, pendapat Prof. G. Goedes dan F.D.K. Bosch lebih mantap, yaitu bahwa Sriwijaya terletak di sekitar Palembang.

### **3. Peranan Sriwijaya dalam perdagangan**

Sriwijaya mempunyai faktor yang menguntungkan sebagai kerajaan maritim, perdagangan dan agama. Yang menjadi penyebabnya ialah : pelayaran dan perdagangan antara India dan Cina melalui Asia Tenggara. Sumatera Selatan terletak tepat di persimpangan jalan perdagangan, yang membawa akibat ramainya lalu lintas perdagangan (20, p. 34).

Bidang agamapun memberi pengaruh pada kerajaan Sriwijaya, karena musafir Cina yang pulang pergi dari India ke Cina, tentu singgah di Sriwijaya. Antara lain I-tsing yang mengatakan, ketika ia mengadakan perjalanan pada tahun 692 M. sebagai berikut: "Perjalanan dari barat ke timur, orang akan menemui pertama kali negeri Po-lau-che dari pada Malayu (Moloyeou). Sekarang kerajaan itu dikenal dengan nama Sriwijaya" (20, p. 34).

Kemudian I-tsing, Fa-hien dan Hwui-ning pernah bermukim di Sriwijaya selama 3 tahun (664 – 667), yang bersama-sama pula dengan pendeta Jnanabhadra menterjemahkan sebuah teks agama Buddha Hinayana tentang nirwana Buddha (20, p. 35).

Pelayaran waktu itu sepenuhnya masih tergantung pada keadaan angin, dan memakan waktu lama. Tentang jauhnya perjalanan ini, I-tsing dalam laporannya mengatakan, bahwa route perjalanan laut dari Tonkin ke Sriwijaya

selama 30 hari dan Sriwijaya ke Melayu 15 hari. Keterangan ini menunjukkan, bahwa antara Sriwijaya dan Melayu merupakan dua kerajaan yang terpisah (17, p. 332).

Selanjutnya I-tsing menerangkan, bahwa Sriwijaya merupakan suatu kerajaan maritim yang besar, hal ini disebabkan karena runtuhnya kerajaan Funan yang terletak di Indocina, dekat Saigon, pada pertengahan abad ke VI, yang memungkinkan perkembangan Sriwijaya. Sumatera Selatan terletak tepat di tengah-tengah jalur lintas perdagangan laut antara India dan Cina lewat Selat Malaka dan Sunda (20, p. 36). Semenanjung Malaka yang menjorok ke selatan justru menguntungkan pihak Sriwijaya. karena itu penguasaan daerah strategis ini memberikan kemungkinan bagi Sriwijaya memegang kunci urat nadi perdagangan di Asia Tenggara. Selanjutnya, merupakan unsur pendorong bagi Sriwijaya untuk mengembangkan armada lautnya. Dari kekuatan armada laut ini, Sriwijaya merajai lautan Indonesia bagian Barat serta memegang aktivitas perdagangan;

Soal aktivitas perdagangan masa kuno tidak dapat dipisahkan dengan penyebaran agama dan kebudayaan. Karena dari bidang perdagangan ini dipertemukan pelbagai unsur kebudayaan (14, p. 81).

Menurut Van Leur, perdagangan zaman kuno merupakan suatu sejarah yang tetap, artinya suatu faktor atau bagian dalam sejarah yang tidak pernah berubah. Perdagangan bangsa Indonesia telah tumbuh dan dikenal sejak zaman Sriwijaya, bahkan sebelumnya. Tetapi untuk Sriwijaya khususnya mengalami perkembangan sejak abad VII sampai XIV. Kunci pengertian perdagangan kuno di Indonesia terletak pada kedudukan raja-raja dan kepala-kepala negeri, karena dari merekalah politik perdagangan ditentukan (2, p. 14).

Lain dari itu perdagangan Asia zaman kuno umumnya disebabkan karena adanya dua golongan pedagang, yaitu :

a. *Golongan finansiir* yang memasukkan uang dalam suatu usaha perdagangan secara insidental, untuk suatu tujuan pemesanan. Jadi modal yang mereka tanam tidak bersifat kontinyu.

b. *Golongan saudagar keliling* (kelontong), yang jumlahnya sangat besar (14, p. 35). Golongan ini justru yang menentukan pola masyarakat masa itu, terutama dalam bidang perekonomiannya.

Mengapa bidang perdagangan Sriwijaya dapat maju dengan pesatnya?. Hal ini disebabkan karena adanya pelabuhan-pelabuhan yang strategis, disertai adanya kekuatan armada laut yang cukup besar menurut ukuran waktu itu. Di samping itu, penetranan politik bertetangga baik benar-benar dilaksanakan berdasarkan segi keuntungan perdagangan. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari prasasti Ligor (20, p. 46).

Bidang agama oleh I-tsing juga dikatakan, bahwa Sriwijaya atau Cheli-fu-che juga menjadi pusat pengetahuan agama Buddha. Lebih lanjut bacalah

buku karangan Tatakusu yang berjudul "A Record of the Buddhist Religion as practised in India and the Malay Archipelago", 1896. Berita mengenai agama Buddha ini dikisahkan oleh I-tsing, yang pada abad ke VII pernah mengunjungi serta bermukim di Sriwijaya. Menurut I-tsing, sebab musababnya Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha karena kerajaan Sriwijaya dan rakyatnya makmur dan kaya untuk memelihara biara dan sekolah yang bercorak agama Buddha yang menjadi pusat pengetahuan agama. Kemasyhuran Sriwijaya tidak hanya menarik bangsa Indonesia sendiri, tetapi para sarjana India juga mengunjunginya serta mengembangkannya (28, p. 5).

Di antara pendeta Buddha dari Sriwijaya yang ternama ialah Cakyakirti, yang menulis buku "Hasta dandaçstra" (20, p. 48). Sedang madzhab agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya ialah madzhab Mahayana sekte Mulasarwastiwada (8, p. 54). Hal ini dihubungkan dengan adanya kitab "Yogacaryabhumi çstra".

Selanjutnya I-tsing mengatakan, bahwa di Sriwijaya waktu itu ada seribu pendeta Buddha yang melaksanakan upacara agama secara murni seperti di India. Adapun pendeta yang paling aktif di Sriwijaya ialah Dharmapala (23, p. 16).

Selanjutnya agama Buddha di Sriwijaya mengalami perkembangan dalam bentuk Trantrisme, yang dapat diketahui dari prasasti Talangtuwo tahun 606, dengan adanya kata vajra çarira, yang merupakan lambang Vajrasattva, yaitu lambang Buddha tertinggi dalam Tantrayana. Agama Tantra ini timbul di India baru pada tahun 600 – 700 A.D., di daerah Benggala (23, p. 19). Di samping itu prasasti Talangtuwo juga membuktikan, bahwa peraturan di Sriwijaya sudah stabil (23, p. 16). Tokoh agama Buddha Tantrayana bernama Vajrabodhi dan Amoghavajra (20, p. 49).

Tetapi menurut Stutterheim, agama Tantrayana yang kemudian berkembang di Indonesia, disebabkan karena pengaruh dari Tibet pada masa kekuasaan Ku-bhilai-khan (32, p. 58).

Tetapi mengapa di daerah kekuasaan Sriwijaya tidak banyak ditemukan peninggalan-peninggalan kuno? Salah satu sebabnya ialah, bahwa Sriwijaya merupakan negara perdagangan di mana rakyatnya sebagian besar kaum pedagang yang berjiwa dinamis. Tetapi kemungkinan yang lain ialah karena hancur oleh peperangan maupun tertimbun tanah dalam hutan yang lebat, yang merajai kepulauan Sumatra itu (28, p. 6).

Betapa besar dan luasnya wilayah Sriwijaya dapat diketahui dari nama-nama Semenanjung Melayu, Palembang, Kampe, Lamuri atau Lambri dan Ceylon (8, p. 160).

#### **4. Hubungan Sriwijaya dengan Singhasari-Majapahit, Colamandala dan Madagaskar**

Antara Sumatera Selatan (Sriwijaya) dengan Jawa telah terjalin hubungan sejak zaman Rakai Pikatan, seperti terbukti pada prasasti Nalanda, yang me-

nyebutkan bahwa Balaputradewa, adik ipar Rakai Pikatan menjadi raja Sriwijaya dengan gelar Swarnadwipadhipamaharaja. Dalam prasasti itu disebutkan juga asal usul Balaputradewa, yaitu putera Samarattungga dengan puteri Tara keturunan Cailendra dan keluarga Sana (20, p. 79). Karena itu sering dikatakan, bahwa Sriwijaya diperintah oleh keturunan wangsa Cailendra.

Kemudian berdasarkan prasasti Leiden tahun 1004 A.D. dikatakan, bahwa pada tahun 1005 raja Marawijayottangawarman, putera raja Cudamaniwarmadewa dari wangsa Cailendra yang memerintah Kataha dan Sriwijaya telah menyuruh mendirikan sebuah vihara di Nagapadman di India Selatan dengan Nama Cudamaniwarmawihara.

Hubungan yang paling nyata antara Singhasari dengan Sriwijaya, ialah ketika raja Kartanegara memegang tampuk pemerintahan. Raja ini mengirimkan utusan berupa suatu ekspedisi yang terkenal dengan Ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Ekspedisi ini mempunyai tujuan politik untuk membentuk suatu persekutuan dalam menghadapi Ku-bhilai-khan, dan untuk mendapatkan titik tumpuan yang kuat, sebagai basis pertahanan. Sebab Kartanegara dianggapnya sebagai seorang raja yang ingin menyamai kekuasaan Kaisar Cina itu. Terutama dalam praktek keagamaan Buddha Tantrayana (12, p. 193). Pada tahun 1286 Kartanegara mengirimkan arca Amoghapaṇa sebagai hadiah kepada raja Malayu (31, p. 113).

Pasukan Singhasari pertama-tama menduduki daerah sekitar sungai Batanghari, serta daerah Minangkabau bagian Barat Laut (18, p. 126). Tentang pengiriman tentara Singhasari ke Melayu itu, juga termuat dalam Negarakertagama, Canto 41.

Hubungan antara Sriwijaya dan Majapahit makin akrab, karena pasukan Singhasari kembali dari Sumatera membawa dua orang puteri, yaitu Dara Petak dan Dara Jingga, yang diperisteri oleh raja Majapahit pertama, yaitu Raden Wijaya (31, p. 150). Selanjutnya Mahapatih mangkubumi Gajah Mada mempunyai program politik yang hakekatnya merupakan kelanjutan dari gagasan Kartanegara, yaitu persatuan Nusantara.

C.C. Berg dalam karangan yang berjudul "Geschiedenis van pril Majapahit" menegaskan, bahwa Gajah Mada secara konsekwen dengan sumpah Amukti Palapa menjalankan politik yang telah dirintis oleh Kertanegara. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata: "Na dit laatste herstellt Gajah Mada persoonlijk zoals hij ook op eigen verantwoordelijkheid het had afgekondigd, de politiek van Kertanegara" (12, p. 201).

Sumpah Palapa Gajah Mada lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa" (31, p. 189).



Hubungan antara Sriwijaya dengan Colamanda di India dengan sendirinya telah lama terpupuk, walaupun kemudian terjadi permusuhan. Seperti dikatakan di atas, Balaputradewa telah mendirikan wihara di Nagapadman. Hal ini dapat disimpulkan bahwa antara Sriwijaya dan India terdapat hubungan baik dan damai, yang waktu itu sedang menghadapi Jawa (20, p. 78). Menurut ceritera India Kuno yang bersifat Buddhistis, Mahajanaka Jataka, ada seorang anak raja pergi berlayar melalui pelabuhan Campa, kemudian bernama Bhagalpur di sungai Gangga. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya dia bersama beberapa orang saudagar menuju Suvarnabhumi. (24, p. 77).

Sriwijaya pernah diserang oleh raja Comandala, seperti disebut oleh prasasti Tanjore, tetapi tidak dapat hancur karena mempunyai daerah pangkalan yang terdiri dari bukit barisan dan pulau-pulau. Dari prasasti Nepal disebutkan adanya arca Lokanatha dari masa Sriwijaya tahun 1015 dalam ukuran kecil. (8, p. 128). Hal ini membuktikan pula, bahwa ada hubungan antara Sriwijaya dengan India.

Dalam karangan yang berjudul "L'Empire Sumatranais Sriwijaya" tahun 1922, Gabriel Ferrand dengan menggunakan tulisan-tulisan Idrisi, Ibnu Saud, Diogo de Couto dan lain-lain, telah mendapatkan kesimpulan, bahwa Madagaskar telah didatangi oleh orang-orang Indonesia bagian Barat yang beragama Hindu. Bahkan setelah meneliti prasasti Kota Kapur, ia menyimpulkan, bahwa bahasa Malagasi sangat banyak persamaannya dengan bahasa Sumatera.

Ferrand selanjutnya mengatakan, bahwa pelayaran mengarungi Samudera Hindia dari Indonesia ke Madagaskar memerlukan suatu pengetahuan yang mendalam mengenai laut dan dibutuhkan pelaut yang cakap. Mengingat adanya suatu kerajaan besar di Sumatera yang bernama Sriwijaya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nenek moyang bangsa Malagasi ialah keturunan orang-orang Sumatera pada zaman Sriwijaya (33, p. 42).

Jadi besar kemungkinan antara Sriwijaya dengan Madagaskar sudah pernah ada hubungan.

## B A B V

### DARI ZAMAN KESULTANAN PALEMBANG HINGGA RUNTUHNYA HINDIA BELANDA

#### A. Pendahuluan

Pada bagian ini dicoba untuk diungkapkan beberapa hal mengenai sejarah Palembang ataupun daerah Sumatera Selatan, dari zaman sejak beberapa abad sesudah Sriwijaya, terutama pada zaman Kesultanan Palembang yang kira-kira dimulai pada abad ke 16, hingga runtuhnya pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1942. Suatu zaman yang sungguh panjang dan beragam. Karena itu tidaklah mungkin di sini dibuat uraian yang terperinci.

Walaupun tulisan ini menghususkan pada zaman sejak dimulainya Kesultanan Palembang, tetapi tidak dapat dielakkan untuk membicarakan juga hal-hal yang terjadi sebelum abad ke 16. Gunanya untuk mendapatkan latar belakang yang lebih luas dan supaya cerita sejarahnya dapat lebih urut.

Dari mana asal nama Palembang itu, tidak diketahui dengan pasti. Suatu pendapat mengatakan, dari *Pa* dan *Lemba*, yang berarti tanah yang didamparkan. Akhirnya diucapkan sebagai Pa-lemba(ng). Tetapi pendapat ini rupanya tidak hanya berlaku untuk Palembang, sebab nama Lampung, juga berasal dari tanah yang didamparkan. Bagi daerah Sumatera Selatan, memang tanah di daratan dekat pantai itu terdiri dari endapan aluvial. Dahulu kota Palembang terletak di tepi pantai, dan tidak menjorok ke dalam seperti dewasa ini.

Ada lagi yang mengatakan, bahwa Palembang berasal dari kata *limbang*, artinya memisahkan dan mencuci dalam air untuk mencari sesuatu, yaitu mencari emas urai dari lumpur sungai. Karena menurut cerita, dahulu mata pencaharian penduduk di sekitar sungai Musi terutama di Muara Ogan Kertapati ialah *melimbang* emas. Tempat itu kemudian disebut Palimbang yang akhirnya berubah menjadi Palembang (1, p. 44).

Daerah Palembang juga disebut *Bukit Seguntang*. Suatu mitologi mengisahkan, bahwa dahulu di Bukit Seguntang memerintah seorang raja bernama Nur Alam. Kemudian datanglah rombongan saudaranya, yang sudah lama tidak saling bertemu, yaitu Bagenda. Mungkin yang dimaksud dengan Bagenda ialah rombongan dari Singasripada abad ke 13. Diceriterakan, bahwa Nur Alam kemudian pergi ke Minangkabau dan Bagenda menjadi raja di Bukit Seguntang.

Bagenda kemudian meluaskan daerahnya. Raja Nila Pahlawan yang berkuasa di seberang Bukit Meru dibujuk supaya mengakui kekuasaannya. Dewa Brama Cakrawala dipaksanya untuk menyerahkan gadisnya Sandangbiduk dan mengakui kekuasaan Bagenda. Yang dimaksud dengan gadis Sandangbiduk itu ialah istilah samaran yang berarti suatu kewajiban untuk mengatur jalannya perhubungan pelayaran. Dewa Brama lalu pindah ke Pasemah-lebar dan daerah Komerling.

Dari mitologi tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Di daerah Palembang, antara zaman kemunduran Sriwijaya hingga berkuasanya Majapahit, terdapat beberapa negara kecil, dengan raja-raja lokal yang antara lain secara mitologis dinamakan: Nur Alam, Raja Nila Pahlawan, Dewa Brama Cakrawala dan lain-lain.
2. Negara-negara itu hidup dari pertanian (agraris) dan perdagangan melalui pelayaran sungai.
3. Kemudian datang Bagenda dan rombongan dari Singasari (Jawa) yang lalu berkuasa, mungkin pada abad ke 12 atau ke 13. Siapa sebenarnya Bagenda itu tidak diketahui. Demikian pula apakah ada hubungannya dengan kedatangan armada Dharmawangsa pada abad ke 10. Seperti diketahui pernah kapal Dharmawangsa pada zaman Sriwijaya menguasai muara sungai di Palembang, sehingga duta Sriwijaya tidak dapat pulang dari negeri Cina untuk beberapa waktu lamanya.

Pada zaman Majapahit, Palembang termasuk salah satu wilayahnya. Hal itu dapat dibaca di kitab Negarakertagama pada pupuh 13 dan 14, antara lain berbunyi sebagai berikut :

”Lwir ning nusa pra nusa pramuka sakehawat ksoni Malayu, ning Jambi mwang Palembang karitang i tēba len Dharmmacraya tumut”. (24, p. 49).

Artinya kira-kira: Daerah Malayu, Jambi dan Palembang seluruhnya termasuk kekuasaan Dharmmacraya.

Mengapa Palembang menjadi wilayah Majapahit, Raffles mengatakan bahwa dalam masa raja Majapahit ke 6, Palembang dengan kemauan sendiri berlindung pada Majapahit (31, p. 20).

Menurut Crawford, kekuasaan Jawa di pantai timur pulau Sumatera harus terjadi pada zaman raja Majapahit yang ke 4 atau ke 5, yaitu dimulai dengan pendudukan Indragiri. Kemudian kira-kira pada tahun 1380, daerah ini diserahkan kepada raja Malaka sebagai hadiah perkawinan, karena raja Malaka ini menikah dengan putri Jawa (5, p. 468).

Pada zaman Majapahit, antara Palembang dan Jawa sudah terdapat hubungan. Karena itu di Palembang terasa sekali adanya pengaruh Jawa, terutama dalam bahasa, dan susunan pemerintahan. Bahasa yang dipakai oleh golongan menengah dan atasan di Palembang dan sekitarnya, banyak mengandung unsur bahasa Jawa yang halus.

Pada masa itu (abad ke 15) bahasa Jawa menjadi bahasa keraton di daerah Palembang. Palembang dan Jambi merupakan suatu daerah di mana terasa sekali adanya pengaruh kebudayaan Majapahit pada pakaian, nama tempat, bahasa dan gelar bangsawan (20, p. 312).

Pengaruh Majapahit juga kelihatan pada cabang-cabang kebudayaan lainnya seperti wayang dan gamelan. Hingga dewasa ini penduduk asli kota Palembang masih memakai bahasa Palembang yang tercampur dengan bahasa Jawa zaman Majapahit. Juga kini masih terdapat buku tua tentang permainan wayang kulit yang ditulis dengan huruf Arab dalam bahasa Melayu Jawa, yang berisi kisah perang antara "Pandawa dan Kurawa". Buku itu bernama "Cinde Tegade" atau Selendang Tergadai (1, p. 48).

### **B. Peranan Aria Damar**

Di kota Palembang yang sekarang, yaitu di jalan kilometer 4 arah ke pelabuhan udara Talangbetutu, terdapat makam Aria Damar atau Aria Dilah. Di dekatnya terdapat makam Panglima Aria Wicareng. Pada tahun 1972, keadaan kedua makam itu kelihatan terpelihara dengan baik. Pemerintah kota Palembang memasang papan nama pada kedua makam itu. Aria Damar itu adalah Panembahan Palembang dan penguasa Majapahit di Palembang dan mungkin memerintah antara tahun 1415-1447 (49).

Menurut suatu sumber, Raja Majapahit bernama Brawijaya, pada akhir abad ke 14 atau permulaan abad ke 15, mengangkat anaknya, yaitu Aria Damar sebagai penguasa atau Adipati di Palembang. Aria Damar berangkat ke Palembang bersama banyak pengiring. Rombongan itu mungkin terdiri dari petani dan tentara, karena selain bermotif politik, juga ekonomi. Pasukan pilihan Aria Damar itu berjumlah 300 orang.

Aria Damar rupanya berangkat ke Palembang pada zaman raja Majapahit yang terakhir. Aria Damar adalah salah seorang anak raja Brawijaya. Ia diangkat menjadi Adipati Palembang karena jasanya dalam perang Bali. Selain itu Aria Damar juga berjasa menundukkan binatang-binatang buas di hutan-hutan Majapahit yang telah banyak menimbulkan kerusakan (9, p. 17).

Perlu dijelaskan, bahwa dalam rombongan Aria Damar itu ikut pula seorang Putri Campa, istri raja Majapahit, yang diserahkan kepada Aria Damar. Putri Campa tadi melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian terkenal sebagai Raden Fatah, Sultan Demak yang pertama. Dan dari pernikahan antara Aria Damar dengan puteri Cina itu, lahir pula seorang putera bernama Raden Usen.

Sesudah Aria Damar berada di Palembang untuk beberapa tahun, datanglah seorang mubalik Islam, bernama Raden Rakhmat di Palembang yang terkenal sebagai Sunan Ngampel. Beliau sedang berjalan dari Aceh ke Majapahit.

Aria Damar ingin memeluk agama Islam, tetapi rupanya waktunya belum

dipandang tepat. Jadi masih ada keraguan dalam hati. Raden Rakhmat bermukim di Palembang selama dua tahun, kemudian pergi ke Majapahit. (49)

Pada usia 20 tahun Raden Fatah pergi ke Jawa, menggabungkan diri pada Raden Rakhmat. Sesudah Raden Rakhmat wafat, Raden Fatah melanjutkan perjuangan menyebarkan Islam dan melawan ayahnya yang sebenarnya, yaitu Raja Majapahit. Sedangkan Raden Usen memihak Majapahit. Aria Damar sendiri kemudian memeluk Islam. Raden Usen atau Dipati Terung menderita kekalahan dan pada tahun 1447, kerajaan Majapahit runtuh.

Kesimpulannya: (1) Bahwa Aria Damar adalah pendiri dan cikal bakal dari sultan-sultan yang berkuasa di Palembang. (2) Sejak semula sudah ada hubungan yang erat antara Jawa dan Palembang. (3) Agama Islam sudah tersiar di Palembang pada zaman pemerintahan Aria Damar.

Selanjutnya P. de Roo de Faille menceritakan bahwa Aria Damar kemudian hanya mau mengikuti kemauannya sendiri dan bersifat sewenang-wenang. Ia lalu pulang ke Jawa dan meninggal di Cirebon. Apakah itu berarti, bahwa makam Aria Damar juga terdapat di Cirebon, tidak dapat diketahui dengan pasti.

Sedangkan Dr. R.D. Asikin Wijaya kusuma mengatakan, bahwa makam Aria Damar atau Jaka Dilah terdapat di Kampung Dilah di dalam kota Palembang (39, p. 13).

Menurut Budenani dan Djavid, Adipati Aria Damar itu adalah saudara Raja Brawijaya dari Majapahit. Sedangkan nama Aria Dilah itu berasal dari Aria Abdi'llah, dan itu menunjukkan Aria Damar sudah masuk Islam. Dikatakan pula, bahwa sebelum Aria Damar datang di Palembang, agama Islam memang sudah masuk ke sana.

Mengenai letak makam, ada kecocokan dengan pendapat Dr. R. D. Asikin Wijayakusuma, yaitu terletak di Palembang, di jalan Aria Dilah, berseberangan jalan dengan Taman Makam Pahlawan Palembang, di tepi jalan Jenderal Sudirman yang sekarang.

Selanjutnya ada pula versi lain yang mengatakan, bahwa Aria Damar dengan Aria Dilah itu berlainan, jadi bukan satu orang. Pendapat itu mengatakan, bahwa di Palembang memang mula-mula terdapat tiga bersaudara sebagai Wakil Raja Majapahit, yaitu Aria Damar, Aria Carang dan Aria Dilah. (1, p. 46).

Rupanya terjadi perselisihan antara Aria Damar dengan Aria Carang, karena Aria Carang tidak mau meninggalkan kepercayaannya yang dibawanya dari Majapahit, yaitu agama Hindu. Terjadilah peperangan dan Aria Carang beserta istrinya (Dayang Rindu atau Puteri Rambut Panjang yang makamnya ada di Kayuagung), terpaksa bersembunyi dan bertahan di daerah Sungai Keramasan. Dalam peperangan itu Aria Carang menjadi pihak yang kalah. (1, p. 47).

Mengenai Aria Dilah tidak diperoleh keterangan. Apakah Aria Dilah itu tidak sama dengan Aria Damar juga tidak diketahui dengan pasti. Pendapat umum seka-

rang mengatakan Aria Damar itu sama dengan Aria Dilah. Lagi pula dalam bahasa Jawa damar juga berarti *dilah* atau *lampu*.

Di samping itu terdapat pendirian lain tentang asal-usul berdirinya negara Palembang, yaitu bahwa Palembang sudah didirikan oleh orang-orang Melayu di pedalaman Sumatera sendiri, sejak waktu yang tidak diketahui lagi (54, p. 28 ; 8, p. 251).

Pendapat ini adalah wajar. Tentu di Palembang sejak dulu sudah terdapat masyarakat tertentu, entah bercorak agraris maupun masyarakat pedagang-nelayan sebagai lanjutan dari negara Sriwijaya. Dalam hubungannya ini Aria Damar lebih tepat dianggap sebagai pendiri suatu urutan penguasa-penguasa di bidang politik di Palembang, yang juga merupakan Dipati dari kerajaan Majapahit.

### C. Kyai Gede Sura

Aria Damar dapat dipandang sebagai seorang tokoh historis yang menjadi pendiri dari suatu urutan penguasa-penguasa di Palembang, tetapi apakah garis urutan itu terus bersambung hingga abad-abad berikutnya, tidak dapat dipastikan. Mungkin sekali pemerintahan Mangkubumi Aria Damar itu tidak lama.

Dalam sejarah Palembang ada juga diberitakan, tentang seorang penguasa Majapahit (mungkin juga sudah masuk zaman Demak-Bintoro) di Palembang bernama Dipati Karangwidara. Melihat hasil pekerjaannya, tentu Dipati ini seorang yang baik, dan banyak bekerja. Ternyata ia telah menyelesaikan: pembangunan 100 desa di daerah uluan, dan pemeliharaan sungai-sungai Lematang, Ogan dan Komerang.

Memang di daerah Ogan dan Lematang banyak terdapat nama kota yang berasal dari kota Jawa. Ini mengingatkan terjadinya perpindahan penduduk ataupun pembentukan desa pada abad ke 15. Penduduk sepanjang sungai Blidah, di sebelah barat daya kota, berasal dan berketurunan dari Jawa (20, p. 312). Apakah tidak mungkin kejadian ini berlangsung pada zaman pemerintahan Dipati Karangwidara? Tetapi tidak ada keterangan bagaimana hubungannya antara Dipati Karangwidara itu dengan Aria Damar, maupun penguasa-penguasa sesudahnya, seperti Kyai Gede Sura.

#### 1. Kyai Gede Sura datang ke Palembang

Menurut suatu catatan lain, Kyai Gede Ing Sura dengan rombongannya datang ke Palembang sebagai penguasa Mataram pada tahun 1656 (49). Rupanya sesudah pemerintahan Aria Damar dan Dipati Karangwidara, di Palembang terdapat suatu kekosongan pemerintahan. Walaupun demikian tradisi hubungan antara Palembang dengan Jawa tetap terpelihara dan berjalan dengan baik.

Pada abad ke 16, sangaji atau adipati Palembang masih setia memberikan upeti kepada raja-raja Jawa. Upeti itu biasanya berupa bahan hasil bumi, ataupun binatang yang ajaib dan adakalanya puteri.

Kejadian politik di Jawa biasanya membawa akibat pula di Palembang. Biasanya Palembang selalu setia atau condong pada penguasa yang lama. Hal ini mudah dimengerti, karena tradisi tidak mudah diganti begitu saja. Tetapi Palembang juga cepat menyesuaikan dengan keadaan baru. Misalnya, ketika terjadi kemelut politik pada permulaan abad ke 16 di Jawa. Pada Umumnya Palembang tetap setia kepada kesultanan Bintoro-Demak (Trenggono) dan kemudian juga lebih setia pada Pajang (Adiwijaya). Kejadian perubahan politik di Jawa, mula-mula pergolakan antara Demak melawan Pajang dan menyusul munculnya Mataram yang berlangsung ¼ abad itu, mengakibatkan kejadian bersejarah pula di Palembang. Dalam Koloniale Bibliothek (handschrift No. 414). disebutkan bahwa ada seseorang bernama Kyai Geding Sura (maksudnya: Kyai Gede Sura) datang di Palembang. Ada yang mengatakan Kyai Gede Sura itu datang dari Surabaya. Lain berita mengatakan, ia lari ke Palembang, ketika Demak dikalahkan Pajang (Koloniale Bibliothek h.s. No. 31). Mungkin sekali yang dimaksudkan dengan Demak, yaitu Demak pada zaman Pangeran, yaitu ketika Senapati Mataram bersama Pangeran Banawa mengadakan penyerangan († 1587-1588).

## 2. Kyai Gede Punggawa Demak

Ada lagi berita Belanda lainnya dari tahun 1596 yang mengatakan, bahwa Kyai Gede Sura adalah perajurit/punggawa dari Demak. Di Palembang Kyai Gede Sura mempertahankan kota dari serangan Banten.

Pada tahun 981 H. atau 1603M., orang Banten memang menyerang Palembang. Serangan itu tidak berhasil. Bahkan Sultan Muhamad dari Banten gugur. Dan pada tahun 981 H. (1603 M.) itu Kyai Gede Sura menjadi raja Palembang. Timbulah masalah :

- a. Apakah pengangkatan Kyai Gede Sura sebagai raja Palembang itu terjadi sebelum datangnya serangan dari Banten?
- b. Apakah justeru Kyai Gede Sura diangkat sebagai raja, karena adanya bayangan bahaya Banten yang mau menyerang?
- c. Atankah Kyai Gede Sura diangkat menjadi raja itu, karena berjasa mempertahankan Palembang?

Sejauh itu tidak didapat kepastian. Biasanya orang diangkat menjadi pemimpin karena telah menunjukkan suatu perbuatan besar yang positif.

Serangan Banten itu mempunyai motif meluaskan agama Islam. Mungkin sekali pada abad ke 16 atau permulaan abad ke 17 itu, agama Islam belum tersebar luas di Palembang. Agama Islam berkembang betul di Palembang pada masa pemerintahan Sultan Abdurakhman (1662-1706).

## 3. Kyai Gede keturunan Panembahan Palembang

Pendapat lain mengatakan, bahwa Kyai Gede Sura adalah keturunan

Panembahan Palembang. Ia mempunyai darah berasal dari Sunan Ampel Dento, Panembahan Prawoto, Panembahan Kediri, dan Surabaya. Jadi :

a. Apakah Ki Gede Sura itu datang ke Palembang, pada saat terjadi kekosongan pemerintahan ?

b. Ataukah Kyai Gede Sura sudah lama ada di Palembang atau berasal dari Palembang sendiri yang tampil ke depan karena adanya kejadian besar ?

Kyai Gede Sura mempunyai seorang anak perempuan dan tujuh anak laki-laki. Juga diberitakan, bahwa pada tahun 999 H. (1621 M.) ada 24 orang anak raja dari Jawa datang ke Palembang. Apa keperluannya, motifnya dan latar belakangnya, tidak diketahui. Juga pada tahun 1623, raja Palembang mengirim saudaranya ke Jambi dengan maksud meminang puteri Jambi untuk dikawinkan dengan puteranya. Tapi tidak dapat diketahui bagaimana kabar selanjutnya. Timbul pertanyaan : apakah kedua kejadian itu terjadi pada zaman pemerintahan Kyai Gede Sura ?

Kalau demikian halnya, maka Kyai Gede Sura mengadakan hubungan dengan Jawa dan Jambi. Hubungannya itu tentunya lebih bersifat perdagangan.

#### **4. Meninggalnya Kyai Gede Sura**

Mengenai tahun meninggalnya Kyai Gede Sura terdapat beberapa pendapat.

a. Pada tahun 998 H. (1620 M.) Kyai Gede Sura meninggal dunia lalu digantikan anaknya bernama Ki Mas Dipati (998 - 1003 H. atau 1620 - 1625 M.).

b. Pada tahun 1627, Raja Palembang meninggal. Mungkinkah raja ini adalah Kyai Gede Sura ? Sebab dikatakan, bahwa satu-satunya keturunan yang berhak menjadi raja ialah seorang puteri, yang telah kawin dengan putera raja Jambi pada tahun 1624.

c. Ada catatan lain yang mengatakan, bahwa Kyai Gede Sura wafat pada tahun 1582 di Palembang dan digantikan oleh keponakannya bernama Kyai Gede Ing Sura Muda atau Adipati Ing Sura Kyai Mas Anom yang juga menjabat sebagai penguasa Kerajaan Mataram di Palembang (49).

Ibu dari Kyai Gede Ing Sura Muda adalah saudara perempuan dari Kyai Gede Sura bernama Nyai Geding Ilir. Sedangkan Nyai Geding Ilir ini beresamikan seorang priyayi dari Surabaya yang bergelar Kyai Gede Ing Ilir (49). Masih banyak hal-hal yang belum jelas tentang Kyai Gede Sura. Bagaimanapun juga, tokoh ini perlu diteliti lebih lanjut.

Dalam daftar pangeran-pangeran dan sultan-sultan yang memerintah Palembang sejak abad ke 16, yang dibuat oleh A. Hallema, Kyai Gede Sura memang dicantumkan sebagai urutan yang pertama. Tetapi tahunnya berlainan, yaitu tahun 1539 - 1572. Sebagai raja kedua disebut Pangeran Kyai Geding Sura Muda (Ilir), yaitu anak kemanakan Kyai Gede Sura yang pertama, memerintah dari tahun 1572 - 1589 (12).



Boleh jadi terdapat banyak raja yang memerintah sejak pertengahan abad ke 16 di Palembang, yang kesemuanya dinamakan Kyai Gede Sura. Mungkin Kyai Gede Sura itu suatu gelar, seperti Adipati, dan sebagainya.

#### **D. Raja-raja sesudah Kyai Gede Sura sampai pemerintahan Pangeran Seding Kenayan**

Zaman ini meliputi jangka waktu setengah abad, yaitu kira-kira dari tahun 1582 sampai 1633. Walaupun demikian kejadian-kejadian pada waktu itu cukup banyak. Lagi pula, mengenai zaman itu terdapat pendapat yang berbeda, baik mengenai urutan raja-raja maupun mengenai kejadian-kejadiannya.

Sesudah Kyai Gede Sura meninggal dunia, rupanya di Palembang terjadi perebutan kekuasaan. Putera tertua raja Jambi yang menikah dengan puteri raja Palembang, jadi putera menantu, mencoba untuk berkuasa di Palembang, berdasarkan hukum warisan garis ibu atau isteri.

Tetapi usaha ini ditentang oleh kedua adik sultan yang wafat. Jadi paman dari puteri raja Palembang yang telah menikah dengan putera raja Jambi. Tetapi yang kemudian berkuasa ialah keponakan Kyai Gede Sura, bergelar Kyai Gede Ing Sura Muda atau Adipati Ing Sura Kyai Mas Anom, yang bertindak sebagai penguasa Mataram di Palembang pada tahun 1582. (49)

i. Menurut catatan A. Hallema urutan raja-raja Palembang sesudah itu ialah :

a. Raja ketiga bernama Kimas Dipati, yaitu putera kedua dari Kyai Gede Ing Sura Muda Ilir yang memerintah dari tahun 1589 - 1594.

b. Raja keempat bernama Madi Angsuka, ialah saudara dari Kimas Dipati, yang memerintah dari tahun 1594 - 1629.

c. Raja kelima bernama Madi Alit, yaitu saudara dari Kimas Dipati dan Madi Angsuka, yang memerintah dari tahun 1629 - 1630.

d. Raja keenam bernama Pangeran Seding Pura, yaitu saudara dari raja-raja Kimas Dipati, Madi Angsuka dan Madi Alit, yang memerintah dari tahun 1630 - 1640. (12) Makam Pangeran Seding Pura terdapat di dusun Indralaya, Kabupaten Komerang Ilir (O.K.I.). (49).)

Dari daftar itu dapat kita tarik beberapa hal.

Pertama, ternyata sesudah pemerintahan Kyai Gede Sura, pengganti-penggantinya hingga empat kali, semuanya adalah kakak-beradik. Jadi kesemuanya anak-anak dari Kyai Gede Sura. Hal ini agak mendekati keterangan di atas, bahwa Kyai Gede Sura mempunyai seorang perempuan dan tujuh anak laki-laki.

Kedua, menarik juga, bahwa dalam masa kira-kira 50 tahun (1589 -- 1640), pemerintahan di Palembang dipegang oleh empat orang bersaudara ganti-berganti.

2. Catatan A. Hallema itu mendekati catatan yang dibuat oleh R.M. Husin bin R.D.M. Hasir, sebagai berikut.

a. Tahun 1587, Kyai Gede Ing Sura Muda wafat di Palembang digantikan oleh ayahnya bergelar Kyai Gede Ing Ilir berasal dari daerah Surabaya dan menikah dengan adik perempuan Kyai Gede Sura.

b. Kyai Gede Ing Ilir digantikan oleh puteranya bernama Pangeran Madi Angsuka dengan gelar Yangeran Ratu Sultan Jamaluddin Amangkurat I pada tahun 1587.

c. Pada tahun 1622 Pangeran Madi Angsuka wafat dan digantikan oleh saudaranya bernama Pangeran Madi Alit bergelar Pangeran Ratu Jamaluddin Amangkurat II.

d. Pada tahun 1623 Pangeran Madi Alit wafat, dan digantikan oleh saudaranya bernama Pangeran Seding Pura dengan bergelar Pangeran Ratu Sultan Jamaluddin Amangkurat III.

e. Pada tahun 1633 Pangeran Seding Pura wafat dan digantikan oleh keponakannya, bernama Pangeran Seding Kenayan bergelar Pangeran Ratu Sultan Jamaluddin Amangkurat IV. Pangeran Seding Kenayan adalah putera Ki Mas Adipati ibnu Kyai Gede Ing Suro Mudo. Istri Pangeran Seding Kenayan ialah Ratu Sinuhun. (49).

3. Nyatalah, bahwa kedua catatan tersebut tidak terlalu jauh bedanya. Dan sebagai tambahan kita kutip pula urutan raja-raja sebagaimana yang terdapat pada "Buku Petunjuk Kota Palembang" (1971) sebagai berikut : Kyai Gedeng Sura Tua, Kyai Gedeng Sura Muda, Ki Mas Adipati, Pangeran Madi Angsuka, Pangeran Madi Alit, Pangeran Seding Pura, Pangeran Seding Kenayan, dan seterusnya.

Zaman antara tahun 1580 - 1640 itu, bagi tanah air kita secara keseluruhan merupakan zaman yang penuh gejolak dan pancaroba. Di Jawa terjadi perobahan besar-besaran dari pemerintahan Demak Bintara yang terletak di pantai, melalui Pajang ke pemerintahan Mataram yang terletak di daerah pedalaman. Sultan Agung Hanyakrakusuma, Sultan Mataram yang terbesar juga hidup pada kurun zaman itu. Bagi Kerajaan Banten, zaman itu merupakan zaman antara pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin (± 1550 - 1670) hingga menjelang pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1651 - 1682). (10, p. 482 - 483). Di Aceh pada zaman itu ditandai dengan semaraknya kerajaan di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1609 - 1636). Sedangkan orang-orang Belanda pada zaman itu pula mulai masuk ke Indonesia, dan bahkan dapat berkuasa di Batavia (1619).

Sudah barang tentu secara timbal balik, kejadian-kejadian di Mataram, Banten, Aceh, Jambi dan Batavia (V.O.C.) mempunyai pengaruh bagi sejarah Palembang dalam kurun zaman antara tahun 1580 - 1640 itu.

### E. Pemerintahan Pangeran Seding Kenayan

Dalam buku P. de Roo de Faille disebut, bahwa Pangeran Seding Kenayan memerintah dari tahun 1629 - 1636. Menurut Schetsen, tahun pemerintahannya ialah dari 1616 - 1628 dan disebut Pangeran Sindang Kenayan (53, p. 281 - 376). Sedang catatan lain menyebut tahun 1633 - 1645. (49). Pangeran Seding Kenayan ini adalah raja yang kreatif. Lagi pula pada zamannya, V.O.C. (Belanda) mulai muncul. Diceriterakan, bahwa Pangeran Seding Kenayan ini menikah dengan keponakannya sendiri, yaitu Ratu Sinuhun.

Ratu Sinuhun seorang wanita Palembang, telah mengadakan aturan tentang tanaman lada, yang terkenal sebagai *Piagam Ratu Sinuhun*, atau *Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya*.

Mungkin sekali Ratu Sinuhun ini anak perempuan Nyai Gede Pembayun. Sedangkan Nyai Gede Pembayun ini adalah anak perempuan Kyai Gede Sura. Makam Ratu Sinuhun terletak di Sabakingking, Palembang Lama. Pangeran Seding Ing Kenayan sendiri juga terkenal sebagai pengatur adat dan hukum di daerah Uluan. Orang Uluan sangat menghormati Pangeran Seding Kenayan sehingga makamnya mendapat penghormatan yang khusus.

Pada zaman Pangeran Seding Kenayan itu pula, untuk pertama kalinya V.O.C. mendirikan loji (factory) di Palembang. Waktu itu Gubernur Jenderal V.O.C. ialah Jacob Spex (1629 - 1632). Tetapi tidak dapat diketahui dengan pasti kapan V.O.C. mendirikan lojinya di Palembang. Ada yang menyebut, bahwa pada tahun 1630 V.O.C. sudah mendirikan loji di Batu Ampar. Mungkin sekali barulah pada tahun 1662 V.O.C. mempunyai loji yang sebenarnya di Palembang. Tahun 1686, loji V.O.C. itu diperbagus dan diperkuat (55, p. 323).

Sumber lain menyatakan, bahwa pada tahun 1620, sudah ada pedagang yang menetap di Palembang (21, p. 54-59). Lekkerkerker bahkan menyatakan bahwa pada tahun 1617, V.O.C. sudah mendirikan kantor di Palembang. Karena menderita kerugian, pada tahun 1621 kantor Palembang itu ditinggalkan. Dalam transaksi dagang itu, kapal-kapal Palembang sendiri yang membawa barang-barang ke Betawi. Pada tahun 1640, rupanya sudah ada perjanjian dagang antara V.O.C. dengan Palembang (20, p. 316).

Pada zaman pemerintahan Raja Pangeran Seding Kenayan, Jambi kembali berusaha berkuasa, tetapi dapat digagalkan. Hal yang penting lainnya ialah kedatangan armada Mataram di Palembang. Pangeran Seding Kenayan meninggal tahun 1636. Menurut daftar A. Hallema tahun 1652, penggantinya adalah Pangeran Seding Pesariyan (1652 - 1653), yaitu saudara dari Pangeran Seding Kenayan. Menurut catatan lain, Pangeran Seding Kenayan digantikan oleh iparnya yaitu adik Ratu Sinuhun yang bernama Pangeran Sida Ing Pasarean dengan gelar Pangeran Ratu Sultan Jamaluddin Amgngkurat V. (49).

## F. Menjelang pemerintahan Sultan Abdurrakhman

Zaman ini meliputi jangka waktu kira-kira antara tahun 1640 sampai tahun 1662. Di Palembang pada waktu itu terjadi hal-hal yang besar, yaitu makin besarnya kekuasaan V.O.C masuk di sana dan hubungan yang makin longgar dengan Mataram (Jawa).

Menurut A. Hallema, sesudah Pangeran Seding Kenayan (1640 - 1652) wafat, lalu digantikan oleh Pangeran Seding Pesariyan (1652 - 1653), yaitu saudara dari raja yang meninggal itu. Lalu diganti lagi oleh Pangeran Seding Rajak (1652 - 1660), yaitu anak dari Pangeran Seding Pesariyan. Dari tahun 1660 - 1662 terdapat dua raja :

Pertama ialah Bupati (Regent) Raden Dipati, sebagai wali dari anak Pangeran Seding Rajak yang masih kecil, bernama Dipakusuma (1660 - 1662).

Kedua ialah Raden Tumenggung, yaitu saudara sepupu Pangeran Seding Rajak (1660 - 1662). Raden Tumenggung ini, sesudah Bupati Raden Dipati meninggal dunia, lalu memerintah sendirian dan pada tahun 1666, mengambil gelar Sultan Abdurrakhman.

Menurut "Schetsen van Palembang", yang terdapat dalam Tijdschrift van Nederlandsch-Indië, deel III, Jaargang 8, 1846, dikatakan bahwa pada tahun 1630, pemerintahan di Palembang dipegang oleh Pangeran Sindang Raja. Yang dimaksud tentulah Pangeran Seding Rajak, sedangkan dalam "Buku Pedoman", disebut Pangeran Sidang Rajak (45, p. 47).

Tahun 1630 seperti yang disebut Schetsen itu juga tidak tepat. Sebagaimana kita ketahui, Schetsen memang memuat uraian tentang raja-raja Palembang sejak tahun 1544, tetapi kronologinya banyak yang salah.

Dari catatan lain, dikatakan bahwa pada tahun 1646, Pangeran Sida Ing Pasarean wafat lalu digantikan oleh puteranya bernama Pangeran Sideng Rajek, bergelar Pangeran Ratu Sultan Jamaluddin Amangkurat VI. Pangeran ini adalah penguasa Mataram yang terakhir di Palembang dan sebelumnya bernama Pangeran Ratu Abdul Rakhman.

Pangeran Seding Rajak, sebelum wafat telah menyerahkan kekuasaan kepada adiknya bernama Mas Endi Pangeran Ario Kesumo Abdul Rohim. Beliau bermukim di dusun Saka Tiga (Ogan Komering Ilir) hingga wafatnya. Jadi makam Pangeran Sido Ing Rajek terdapat di dusun Saka Tiga (49).

Pada zaman Pangeran Seding Rajak berkuasa, Belanda sudah berhubungan dagang dengan Palembang. Bahkan V.O.C. sudah mendirikan loji di Batu Ampar.

Pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Pangeran Seding Rajak, di Palembang terjadi huru-hara. Biang keladinya ialah perbuatan pegawai Kompeni bernama Jonker. Loji V.O.C. itu diserbu dan kira-kira separoh orang-orang V.O.C. mati dibunuh. Sisanya lari naik kapal meninggalkan Palembang.

Setahun kemudian V.O.C. datang lagi untuk membalas dendam. Armada V.O.C. dipimpin oleh Van der Laan. Mereka menyerang dengan membawa 25 kapal. Kejadian ini mungkin jatuh pada tahun 1658 – 1659. Valentijn juga mengatakan, bahwa pada tahun 1660 kota Palembang diserbu dan dibakar oleh V.O.C., untuk membalas dendam terhadap pembunuhan awak kapal Belanda pada tahun 1658 (37, p. 11-13).

Sultan Pangeran Seding Rajak bertahan di muara Plaju dan di pulau Kembara. Pertempuran hebat sekali dan Belanda berhasil merebut kota. Pangeran Seding Rajak beserta keluarga berhasil menyingkir. Senopati Palembang beserta putera-puteranya telah gugur. Belanda terus maju dan merebut kota yang diberi pagar tinggi.

Terjadilah perkelahian frontal satu lawan satu. Belanda lalu membakar kota. Orang Palembang terpaksa mengundurkan diri. Tawanan orang V.O.C. yang ditangkap pada tahun 1658 (rupanya dalam penyerbuhan loji V.O.C. dulu, terdapat juga tawanan) dibunuh semua. Kota menjadi sepi. Pangeran Seding Raja mengungsi ke Indralaya di tepi sungai Ogan.

Keadaan tak menentu ini berlangsung agak lama. Penduduk menjadi gelisah. Mereka juga banyak yang mengungsi dan bersembunyi di sungai-sungai. Dalam keadaan kekosongan pemerintahan ini tampil tokoh baru yaitu Kimas Hindi, adik Pangeran Seding Rajak (juga disebut Mas Endi). Rupanya Kimas Hindi mempunyai wibawa yang besar; sehingga mampu mengatasi kemelut politik di Palembang waktu itu, dan berhasil menenteramkan keadaan, sehingga Kompeni Belanda berpaling kepadanya.

Kimas Hindi berusaha menghubungi kakaknya, yaitu Pangeran Seding Rajak di pengungsian, untuk kembali ke kota, tetapi tidak berhasil. Pangeran Seding Rajak tidak mau kembali. Ia rupanya mengambil kebijaksanaan.

Pertama, mengangkat anaknya yang masih kecil yaitu Dipokusumo, dengan wali Bupati Raden Dipati (166 – 1662).

Kedua, mengangkat saudaranya, Ki Mas Hindi, juga terkenal sebagai Raden Tumenggung untuk memerintah (1660 – 1662).

Jadi antara tahun 1660 – 1662 terdapat dua raja, seperti yang disebut oleh A. Hallema. Sedang Pangeran Seding Rajak tetap bermukim di daerah Ogan Komerling, hingga wafat di sana.

Dalam abad ke 17, hubungan antara Palembang dengan Mataram masih kelihatan berjalan baik. Diberitakan, bahwa armada Mataram datang ke Palembang. Seperti diketahui, pada tahun 1621 Sultan Agung Hanyakrakusuma dari Mataram sudah menguasai Sukadana di Kalimantan. Palembang mengakui kekuasaan Mataram dan mengirim duta-dutanya. Ketika duta Palembang itu pulang, tiga kapal kesultanan telah diserang dan ditembaki oleh V.O.C. sehingga sebuah di antaranya terbakar.

Pada tahun 1642, juga ada armada Mataram terdiri dari 60 sampai 70 kapal yang sedang mengiringi Sultan Palembang yang pulang dari Jawa, juga telah ditembaki oleh V.O.C.

Hubungan antara Palembang dengan Mataram memang akrab, seperti halnya dalam kehidupan keluarga besar. Pada tahun 1664, Palembang masih mengirim utusan ke Mataram, pada zaman Sunan Amangkurat I. Pada tahun 1668, Palembang mengirim bermacam-macam barang dan hewan seperti gajah, dan kain yang bagus-bagus. Mungkin sekali empat buah guci air atau kong (encek) yang terdapat di Makam raja-raja Imogiri (Pesarean Imogiri) juga berasal dari zaman ini. Menurut Bupati Juru Kunci Kedaton Mataram, K.R.T. Reksokusumo, dikatakan, menurut Babad Nitik/Riwayat Sultan Agengan/Sultan Ageng/Sultan Mataram, di Pasarean Imogiri, 17 km sebelah tenggara kota Yogyakarta, terdapat empat buah kong atau encek, tanda mata dari Sultan Palembang untuk Sultan Mataram, guna sesuci, karena Sultan Mataram beragama Islam. Menurut ceritera orang-orang tua, kong itu malahan hadiah dari raja-raja Aceh, Palembang, Rum (Turki) dan Siam (Muang Thai) (58, p. 3-12).

Dengan makin kuatnya kedudukan V.O.C. di Indonesia, terlebih-lebih di perairan kita, tentu saja hubungan antara Palembang dan Mataram menjadi kurang. Sejak pemerintahan Ki Mas Hindi yang bergelar Sultan Abdurrakhman, hubungan antara Palembang dan Mataram terputus, karena Kompeni bertindak sebagai baji yang menghalangi hubungan kekeluargaan antara raja-raja kita.

### **G. Pemerintahan Sultan Abdurrakhman**

A. Hallema mengatakan, bahwa Ki Mas Hindi atau Raden Tumenggung, yaitu saudara sepupu Pangeran Seding Rajak (1653-1660), bersama Bupati (Regent) Raden Dipati memerintah Palembang selama 2 tahun, yaitu dari 1660-1662. Kedua penguasa itu bertindak mendampingi dan menjadi wali putera raja Seding Rajak yang masih kecil, bernama Dipokusumo.

Sesudah Raden Dipati meninggal dunia, Raden Tumenggung memerintah sendiri. Pada tahun 1666, ia mengambil gelar Sultan Abdurrakhman. Menurut P. de Roo de Faille, Ki Mas Hindi barulah tahun 1675 mendapatkan gelar Sultan dan pada tahun 1681, ia disebut Sultan Jamaluddin. Dalam surat kontrak dengan V.O.C., pada tahun 1690, beliau disebut sebagai Sultan Ratu Abdurrakhman. Pada tahun 1701, Sultan Abdurrakhman memakai sebutan Susuhunan, Di kalangan rakyat ia terkenal dengan sebutan Sunan Cindeh Balang atau Candi Walang.

Pada tahun 1704, Sunan Abdurrakhman menyerahkan kekuasaan kepada puteranya, yaitu Sultan Muhamad Jimil Mansur atau Sultan Kebon Gede, yang juga terkenal sebagai Sultan Muhammad Mangsar. Sunan Adurrakhman wafat pada tanggal 10 Desember 1706.

Dari suatu catatan lain dikatakan, bahwa pada tahun 1653, Palembang dinya-

takan berdiri sendiri dan menjadi Kesultanan di bawah pimpinan Sultan Mas Endi Alias Pangeran Ario Kesumo Abdul Rohim dengan gelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidil Iman.

Pada tahun 1698, Sultan Abdurrahman mengangkat putera baginda Pangeran Jayalago menjadi raja dengan gelar Sultan Muhammad Mansur, dan dengan pengangkatan ini, Sultan Abdurrahman menjadi bergelar Susuhunan. Pada tahun 1703, Susuhunan Abdurrahman wafat dan dinakamkan di Candi Walang. (49).

Jadi dari catatan di atas itu, ternyata bahwa Pangeran Seding Rajak langsung menyerahkan kekuasaan kepada Kimas Hindi, yang kemudian menjadi Sultan Abdurrahman, sesudah Belanda menyerbu Palembang pada tahun 1659.

Sekarang marilah kita lihat, apa yang diceriterakan dalam "Schetsen". Ternyata uraian dalam "Schetsen van Palembang" agak berlainan. Diberitakan, bahwa kapal-kapal V.O.C. sejumlah 25 buah datang menyerang Palembang pada tahun 1649. Maksudnya untuk membalas dendam, karena setahun sebelumnya Pangeran Seding Raja menyerbu loji V.O.C. dan membunuh kira-kira separoh orang-orang V.O.C. di Palembang itu.

Pangeran Seding Raja terdesak dalam perang itu dan mengungsi ke pedalaman. Kepala armada V.O.C. lalu berunding dengan saudara raja yang tetap tinggal di kota, yaitu Kemas Indie (Ki Mas Hindi). Setelah keadaan tentram, Pangeran Seding Rajak tidak mau kembali ke Palembang. Ia menyerahkan pimpinan kesultanan kepada Kemas Indie. V.O.C. mengakuinya sebagai Sultan dan bergelar Sultan Abdurrahman, yang memerintah dari tahun 1649-1694. (9). Armada V.O.C. meninggalkan Palembang sesudah mendirikan loji kembali dan mengangkat seorang kepala (13, p. 359).

Perbedaan versi A. Hallema dengan "Schetsen" terletak pada dua hal:

1. Cara penyerahan kekuasaan dari Pangeran Seding Rajak (Sindang Raja) kepada Kimas Hindi. Menurut A. Hallema terdapat masa peralihan, yaitu dari 1660-1662 dengan mengenal dua penguasa (raja) atas nama Sultan kecil (Dipokusumo).

2. Tahun-tahunnya tidak sama. Menurut Schetsen, armada V.O.C. menyerang Palembang pada tahun 1649. Sedangkan P.J. Veth menyebut tahun 1658-1659, dan ia membenarkan A. Hallema bahwa Sultan Abdurrahman mulai memerintah pada tahun sekitar 1660, Rupanya kesalahan tahun pada Schetsen ini disebabkan oleh perhitungan, ketika orang mengubah dari tahun Hijriah ke tahun Masehi.

Bukti lainnya yang memperkuat pendapat, bahwa tahun penyerangan V.O.C. ke Palembang terjadi pada tahun 1659, ialah kepala armada V.O.C. yang bernama admiraal Johan Van der Leeuw. Ia memang meninggalkan Batavia pada tahun 1659.

Kontrak pertama secara tertulis antara V.O.C. dan Palembang terjadi pada tahun 1662, yaitu pada jaman Sultan Abdurrahman. Dasar kontrak ini, walaupun selalu diubah-ubah, tetap berlaku hingga tahun 1811. Untuk pertama kalinya pula Belanda menyebut penguasa di Palembang dengan sebutan Sultan. Sebelumnya V.O.C. selalu menyebut Pangeran yaitu sejajar dengan prins, menurut adat Jawa. Barangkali hal ini disebabkan, Palembang sudah lepas dari pengaruh Mataram, yang sejak adanya perjanjian dengan V.O.C. pada tahun 1646 dan 1678, Mataram sendiri sudah menjadi negara yang tidak bebas.

Sultan Abdurrahman memerintah dengan baik. Pemerintahannya dipuji. Rakyat mencintainya. Pertanian mendapat perhatian yang besar, sehingga negara makmur.

Sultan Abdurrahman juga terkenal menyusun Undang-Undang, dan berlaku hingga tahun 1818. Undang-Undang ini juga dijalankan di daerah Uluu (44, p. 691).

Pada zaman Sultan Abdurrahman dimulai hubungan antara V.O.C. dengan Palembang mengenai Bangka dan Belitung. Veth mengatakan, dalam suatu buku kontrak V.O.C. yang tergolong tua disebutkan, bahwa pada bulan 10 Juli 1668, sudah ada kontrak antara penguasa Bangka dan Belitung dengan V.O.C. Penguasa itu mengakui V.O.C. sebagai pelindungnya dan berjanji tidak akan berhubungan dengan bangsa-bangsa lain (13, p. 360).

Dalam "Repertorium der Oost-Indische Compagnie" disebutkan, bahwa pada tahun 1685, V.O.C. menempatkan 60 orang militer dan 12 orang lainnya di paggar pulau Bangka. Jadi Belanda sudah berkuasa di Bangka berdasarkan kontrak tahun 1668 dan hal ini juga disebabkan, hubungannya yang baik dengan Palembang pada waktu itu.

Tetapi untuk menganggap, bahwa hubungan antara V.O.C. dengan Sultan Abdurrahman selalu bersahabat, sebagaimana digambarkan oleh banyak penulis, tentu tidak tepat pula. Pada zaman Sultan Abdurrahman V.O.C. mendirikan loji di muka keraton di tepi sebelah kanan sungai Aur.

Pada zaman Sultan Abdurrahman hubungan antara Palembang dengan Mataram masih tetap baik. Tetapi, karena kekuatan V.O.C. di lautan makin besar, hubungan itu menjadi terhalang. Pada tahun 1664, Palembang mengirim utusan kepada Susuhunan Amangkurat I di Mataram. Tahun 1668 Sultan mengirim gajah dan pakaian yang bagus-bagus. Jadi meskipun dihalangi oleh V.O.C., tetapi hubungan Palembang dengan Mataram masih berlangsung juga, sebagaimana halnya hubungan antar-keluarga. Bahkan ketika terjadi pemberontakan Tarunajaya, pada tahun 1677 Sultan Abdurrahman (Jamaluddin) membantu dengan mengirimkan 10 kapal perang kepada Mataram.

Pemerintah Sultan Jamaluddin atau Abdurrahman memang baik. Organisasinya teratur. Rupanya anak yang kedua Sultan Abdurrahman, yaitu Raden Aria adalah seorang pangeran yang suka kepada kegiatan. Ketika di Tulang Ba-  
100



wang (Lampung), rakyat memberontak terhadap Sultan Banten, maka Raden Aria ikut campur dan membantu rakyat Lampung. Tetapi Sultan Abdurrahman melarangnya. Apa sebabnya, tentu perlu diteliti. Sebaliknya Raden Aria diidzinkan oleh ayahnya untuk membereskan persoalan Jambi, yang selama itu selalu merupakan daerah bergolak bagi Palembang. Raden Aria dalam melakukan ekspedisinya itu, ditemani oleh Daeng Mangika, seorang Makasar yang terdesak dari Jawa dengan pasukan yang memakai baju besi.

Menurut Schetsen, ekspedisi ke Jambi itu terjadi pada tahun 1690, dan atas permintaan Jambi sendiri, karena menghadapi banyak kesukaran-kesukaran di negerinya. Ekspedisi Palembang ke Jambi ini memang dipimpin oleh Putra Sultan Abdurrahman yang kedua, karena putera tertua (ke I) telah menolaknya.

Sedangkan menurut catatan lain, Sultan Abdurrahman mengirimkan balabantuan kepada raja Jambi yang sedang berperang melawan raja Batu. Pimpinan pasukan Palembang berada di bawah putera Sultan sendiri bernama Pangeran Jayolago (49).

Di kawasan Sumatera, kekuatan-kekuatan pada abad ke 17, yang perlu diperhitungkan adalah: Jambi, Minangkabau, Aceh, Johor, Palembang, V.O.C., dan Siam. Adakalanya Jambi berperang melawan Johor, misalnya pada tahun 1673. Sering pula terjadi persekutuan antara Jambi dengan Johor yang berlawanan dengan Palembang untuk memperebutkan daerah sungai Batanghari. Jambi kadangkadangkang mengakui sebagai vazal dari Siam, dengan maksud mendapatkan mesiu dan senjata.

Penyerangan Raden Aria atau Pangeran Jayolago ke Jambi rupanya tidak begitu menguntungkan dan ia terdesak (1681). Kemudian V.O.C. ikut campur dan mengirimkan Kapten Tack dan Jonker untuk membantu (pada zaman Gubernur Jenderal Rijcklof van Goens). Raden Aria lalu dapat berkuasa di Jambi.

Pada waktu itu keadaan di Sumatera Tengah juga belum tenang. Keadaan masih bergejolak. Orang-orang dari bekas kerajaan Pagarruyung banyak mendirikan kerajaan-kerajaan pantai dan mereka bekerja sama dengan Jambi. Sering pula pertentangan antara gabungan kerajaan-kerajaan pantai ini bersama Jambi, melawan Palembang. Pada zaman ini pula, yaitu pada abad ke 17, cerita roman Cindur Mato menjadi terkenal. Pada tahun 1688 Raden Aria atau Pangeran Jayolago pulang ke Palembang. Tiga tahun kemudian, kakaknya meninggal dunia (1691).

Raden Aria mendapat gelar Pangeran Ratu Senapati Ing Ngalogo. Sejak tahun 1701, Sultan Abdurrahman mulai sedikit demi sedikit mengundurkan diri dari pemerintahan.

Sebagai kepala kerajaan, Sultan Abdurrahman gemar berpergian meninjau daerah kekuasaannya. Pada tahun 1691 ia masih berpergian untuk tugas menarik pajak ke daerah-daerah di Pasemah. Para pasirah di situ mengakui Palembang sebagai pelindungnya dan Sultan Palembang menguasai perdagangan garam, katun dan opium. Sewaktu-waktu sebagai tradisi, pasirah-pasirah di Pasemah milirse-

ba (audientie) ke Palembang dan bersumpah-setia di Bukit Seguntang, yang pada waktu itu dianggap sebagai kota keramat dari Sekandar Alam.

Sultan Jamaluddin Abdurrahman meninggalkan piagam dari perak kepada Pangeran Purbabawana di Pasemah, dusun Tanjungkurung. Dalam zaman pemerintahan Sultan Abdurrahman tidak semua daerah harus membayar pajak. Daerah-daerah hulu seperti Rawas, Rupit, Lakitan, Bliti dan Klingi biasanya bebas, tetapi mereka bertanggung jawab terhadap keamanan di daerahnya sendiri.

Rakyat di daerah Uluan, pada zaman Sultan Abdurrahman memang sudah juga diwajibkan mengerjakan matagawe (dienst plicht) (17). Kemudian karena sudah berusia tinggi Sultan Abdurrahman pada tahun 1694 menyerahkan pemerintahan kepada Raden Aria (putera ke II), yang mengambil gelar Sultan Muhammad Mansur.

Pada tahun 1706, Sultan Abdurrahman wafat (9). Menurut Thomas Horsfield, tahun 1710. Bagi bangsa kita, terutama di Palembang, nama Sultan Abdurrahman yang juga terkenal sebagai Sultan Candi Walang, mendapat tempat yang tinggi dan harum. Namanya selalu dikenang sebagai Susuhunan yang besar dan agung.

Menurut suatu keterangan (49). Susuhunan Abdurrahman mempunyai banyak putera, antara lain Pangeran Adi Kusuma Ningrat. Dikatakan, bahwa putera ini yang paling menonjol kepintarannya. Mungkinkah ini putera Sunan yang ke II yang pernah melakukan ekspedisi ke Jambi?

Makam Pangeran Adi Kusuma Ningrat itu terdapat dekat makam Sunan Abdurrahman di Candi Walang. Di kompleks itu juga terdapat makam Nyayu Nilam Sukma (Nyayu Sakti), yang merupakan isteri Pangeran Adi Kusuma Ningrat. Juga masih terdapat makam anak Sunan Abdurrahman bernama Pangeran Akhmad Sayuti.

Keadaan makam Candi Walang pada bulan September 1972, memang kelihatan biasa saja. Dahulu letaknya memang di luar kota, tetapi daerah itu pada tahun 1972 sudah benar-benar menjadi kota. Di dekat makam itu bahkan sudah dibangun pasar Candi Walang yang bagus dan bertingkat. Pangeran Adi Kusuma Ningrat itu mempunyai 9 nama, antara lain Jatayu.

Di dalam kompleks makam Sunan Abdurrahman (yang terletak dalam sebuah bangunan tertutup), terdapat makam-makam Sayid Mustofa Alaydrus (Imam) dan Ratu Marjam Zanariah (permaisuri). Juga terdapat makam Seri Ratu Saadah yaitu ibu tiri Sunan Abdurrahman yang mengasuhnya sejak kecil. Rupanya ibu kandungnya sudah wafat terlebih dulu (50).

#### **H. Zaman Pemerintahan Sultan Muhammad Mansur, Sultan Agung dan Sultan Anom.**

Zaman ini kira-kira berlangsung antara tahun 1704 sampai 1724. Peristiwa

politik banyak terjadi dalam kurun waktu itu. Raja-raja yang memerintah selama itu ialah Sultan Muhammad Mansur, Sultan Agung, dan Sultan Anom (45, p. 47).

Sudah tersebut di depan, bahwa semasa Sultan Abdurrahman masih hidup, pemerintahan sudah diserahkan kepada puteranya, Sultan Muhammad Mansur (Mangsar). Tempat kediamannya ialah Kebon Gede, karena itu juga terkenal sebagai Sultan Kebon Gede. Sedangkan adiknya Komaruddin, yang kemudian menjadi Sultan Agung tetap berdiam di Palembang Lama. Kemudian hari, tempat kediaman sultan dan penduduk dipindahkan agak ke udik. A. Hallema dan Thomas Horsfield mengatakan, bahwa Sultan Mansur dan Sultan Agung adalah putera-putera Sunan Abdurrahman.

Menurut A. Hallema, Sultan Muhammad Jimil Mansur atau Sultan Muhammad Mangsar, atau Sultan Kebon Gede, memerintah dari tahun 1704-1714 dan wafat pada tanggal 7-9-1714. Selanjutnya Sultan Kamaruddin, putera Sultan Abdurrahman dan saudara Sultan Muhammad Mangsar, memerintah dari tahun 1714-1724 dan wafat pada tanggal 11-3-1724.

Menurut "Schetsen", Kamaruddin adalah putera Muhammad Mansur. Muhammad Mansur memerintah dari 1694-1706, dan digantikan oleh Kamaruddin (1706-1716). Pada tahun 1716, terjadilah perubahan pemerintahan. V.O.C. ikut campur, yang kemudian menyebabkan diangkatnya Sultan Mahmud Badaruddin di atas takhta. Tetapi Valentijn dan Thomas Horsfield menyebut tahun 1722. Perlu ditegaskan lagi, bahwa catatan tahun dalam "Schetsen" banyak salah.

Menurut catatan R. Muhammad Husin, pada tahun 1698, Sultan Abdurrahman mengangkat puteranya, Pangeran Jayolago menjadi raja dengan gelar Sultan Muhammad Mansur. Dengan pengangkatan ini Sultan Abdurrahman bergelar Susuhunan. Pada tahun 1703 ia wafat, dan sejak itu Sultan Mansur memerintah sebagai Sultan penuh. Tahun 1703, Sultan Muhammad Mansur mengangkat puteranya, Raden Abubakar, menjadi calon pengganti Sultan dengan gelar Pangeran Purbaya. Pangeran ini meninggal karena dianiaya (49).

P. de Roo de Faille mengatakan bahwa pada zaman pemerintahan Sultan Ratu Mansur, terjadi keruwetan, karena putera-puteranya saling berselisih paham. Puteranya yang bernama Pangeran Purbaya tewas secara misterieus, sehingga Sultan Muhammad Mansur memutuskan untuk tidak menyerahkan takhta pemerintahan kepada putera-puteranya.

Menurut "Schetsen", putera-putera Sultan Mansur adalah Pangeran Purbaya, Pangeran Dipati atau Sultan Anom, dan Pangeran Jayakrama (yang lebih muda). Menurut Thomas Horsfield, Jayakrama ini juga bersama Raden Lambu.

Sedangkan menurut R. Muhammad Husin, Pangeran Dipati itu adalah Pangeran Mangkubumi Muhammad Ali yang kelak (1720) dinobatkan sebagai Sultan Anom Muhammad Alinuddin. Pangeran Jayakrama adalah Pangeran Jayawikrama yang pada tahun 1720 menjadi Pangeran Ratu dan setahun kemudian (1721), karena memenangkan sayembara, dinobatkan menjadi Sultan Palembang dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama (1721-1756).

Sesuai dengan keterangan di atas, Sultan Muhammad Mansur yang berpendirian tidak mewariskan takhta kepada putera-puteranya, telah memberikan wasiat supaya beliau digantikan oleh adiknya, Kimas Uju yang kemudian bergelar Sultan Agung Kamaruddin Sri Truno (1711-1721). Sultan Mansur sendiri wafat pada tahun 1711.

Pengangkatan Sultan Agung Kamaruddin Sri Truno mengecewakan putera-putera Sultan yang baru wafat tersebut. Diberitakan bahwa pada tahun 1715, putera-putera almarhum Sultan Mansur, yaitu Pangeran Mangkubumi Muhammad Ali dan adiknya Pangeran Jayawikrama (Raden Lambu) meninggalkan Palembang dan berkelana sampai ke Johor, Trengganu, Kelantan, Siam dan Makasar (49). Bagaimana sebenarnya kejadian di Palembang sekitar tahun 1711 atau 1714 itu masih perlu diteliti lebih lanjut.

Menurut "Schetsen", sesudah Sultan Mansur wafat, putera-putera Sultan, yaitu Pangeran Dipati beserta adiknya, Jayakrama telah memberontak. Mungkin tidak secara fisik, melainkan hanyalah pembangkangan terhadap pengangkatan Sultan Agung Kamaruddin.

Rupanya pembangkangan ini mengakibatkan kedua pangeran itu harus berkelana keluar Palembang. Disinipun timbul berbagai pertanyaan. Misalnya: apakah keduanya selalu bersama-sama selama masa pengembaraan, berapa lama, dan apa yang terjadi selama itu bagi pribadi mereka berdua. Hal-hal tersebut tentu dapat diteliti lebih lanjut. Jadi jelaslah, bahwa sekitar tahun 1715 keadaan politik di Palembang agak mengalami kegoncangan.

Tetapi kronik-kronik Melayu tidak ada menyebut-nyebut perselisihan antar-saudara di Palembang. Hanya disinggung bahwa ada seorang Arab bernama Syekh Abu Bakar Baspato, yang bertindak sebagai pendamai. Missi Syekh tersebut berhasil, walaupun sementara. Kedua Pangeran diperbolehkan pulang ke Palembang. Tetapi tahunnya tidak diketahui.

Menurut "Schetsen", Pangeran Jayowikrama memang pernah diidzinkan kembali ke Palembang dari Muntok, karena istrinya yang tinggal di Palembang meninggal. Pada waktu itu yang menjadi Sultan adalah Sultan Kamaruddin atau Sultan Agung. Hubungan antara Jayawikrama dengan Sultan Agung belum baik. Buktinya, Sultan Agung menyuruhnya segera meninggalkan Palembang. Bagaimanapun juga sikap Sultan Agung Kamaruddin terhadap Pangeran Jayawikrama adalah terpuji, yaitu tidak meninggalkan adat hubungan keluarga dengan mengidzinkan masuk Palembang ketika Pangeran Jayawikrama ditimpa musibah karena meninggalnya istrinya.

Thomas Horsfield berpendapat, bahwa hubungan antara Sultan Agung dengan Pangeran Jayawikrama tidak terlalu buruk, karena akhirnya terbukti Sultan Agung menjadi mertua Pangeran Jayawikrama.

Pangeran Jayawikrama rupanya segera meninggalkan Palembang. Ia menikah di Siantan, dan kemudian menetap di Bangka, dan mendirikan kota Muntok. Siantan itu sebuah pulau di sebelah Selatan kepulauan Anambas Utara dan termasuk kekuasaan Johor.

Tetapi rupanya perselisihan antara Sultan Agung Kamaruddin dengan keponakan-keponakannya menjadi reda. Kedua Pangeran itu pada tahun 1720 pulang kembali ke Palembang. Bahkan Pangeran Mangkubumi Muhammad Ali dinobatkan menjadi Sultan Anom dengan gelar Sultan Anom Muhammad Alimuddin, dan berkedudukan di Kebon Gede. Sedangkan Pangeran Jayawikrama diangkat menjadi Pangeran Ratu. Sultan Agung Kamaruddin tetap pula memerintah dan berkedudukan di Palembang Lama. Setahun kemudian diadakan sayembara menduduki takhta dan ternyata dimenangkan oleh Pangeran Jayawikrama. Ia dinobatkan sebagai Sultan Palembang dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin (1721-1756) (49).

Sesudah Sultan Agung Kamaruddin wafat (tahun 1721 atau 1724), Pangeran Jayawikrama menggantikan kedudukan paman atau mertuanya, sebagai Sultan di Palembang Lama. Beliau juga bergelar Sultan Agung dan Sultan Mahmud Badaruddin. Situasi demikian, yakni adanya dua sultan pada suatu zaman di Palembang, yaitu Sultan Anom Muhammad Alimuddin di Kebon Gede dan Sultan Agung di Palembang Lama, tidaklah menguntungkan. Dapat dimengerti, kalau situasi berubah menjadi serba dualistis. Lebih-lebih lagi pada abad ke 18 itu, situasi umum di tanah air kita sudah berlainan dari keadaan seabad yang lampau.

Kompeni sudah mempunyai tempat berpijak di berbagai tempat di Indonesia. Kompeni bahkan sudah mengikat raja-raja kita dengan perjanjian, dan seringkali ikut campur tangan dengan urusan dalam negeri kerajaan-kerajaan kita. Apalagi bila ada pertentangan di dalam kerajaan-kerajaan kita itu, seperti yang terjadi di Banten, Makasar dan Mataram.

Demikian pula halnya dengan kesultanan Palembang. Pertentangan antara Sultan Anom dengan Sultan Ratu (yaitu sebutan V.O.C. terhadap Sultan Agung Jayawikrama) mengundang ikut campurnya pihak kompeni Belanda.

Menurut "Schetsen", baik Sultan Anom maupun Sultan Ratu meminta bantuan V.O.C. dalam perselisihan ini, tetapi ternyata Belanda memihak Sultan Agung. Sedangkan Sultan Anom tidak mengetahui hal itu. Diberitakan, ketika kapal-kapal V.O.C. datang di daerahnya, Sultan Anom bermaksud menyambutnya dengan tembakan kehormatan. Tetapi ternyata meriam-meriamnya tidak bisa berbunyi. Rupanya Sultan Anom sudah ditipu. Keratonnya diserbu, dan Sultan beserta keluarganya menyingkir ke luar. Belau kemudian tewas di daerah Palembang, melalui suatu tipu muslihat, seakan-akan Sultan Anom mendapat pengampunan Kompeni.

Menurut Thomas Horsfield, V.O.C. memang memihak Sultan Ratu. V.O.C.

mendatangkan kapal-kapal dari Batavia, dan pura-pura mau berkunjung ke istana Kebon Gede secara bersahabat. Tetapi sekonyong-konyong istana ditembak. Kapal-kapal dari Palembang Lama ikut menembak. Istana juga diserang dari daratan. Sultan Anom terpaksa melarikan diri, mula-mula ke Jambi, lalu menetap di Bangka, sambil menyusun kekuatan.

Perlu dijelaskan, bahwa Sultan Anom selama di Bangka mempunyai pasukan yang terdiri dari orang-orang Bugis. Seluruh Bangka dikuasai oleh Sultan Anom, kecuali daerah Muntok. Orang-orang Bugis berkuasa di ujung barat (Tanjung Ular) dan di bagian utara dengan perahu-perahunya. Ia mendirikan benteng di Koba (di pantai timur), sedangkan puteranya, Raden Klip berkuasa di pedalaman (Pako), daerah pantai Bangkakota hingga Toboali.

Pada tahun 1732 orang-orang Belanda dari Baravia menyerang Sultan Anom di Bangka. Belanda berusaha untuk : (1) Menghancurkan orang-orang Bugis di Tanjung Ular, (2) Membuat hubungan (komunikasi) antara Bangkakota dengan Pako, jadi memotong Pulau Bangka, dan (3) Menyerang benteng Koba.

Tetapi karena rakyat membantu Sultan Anom, maka ia berhasil meloloskan diri dan menuju ke Belitung. Bentengnya hancur dan pulau Bangka dikuasai Belanda. Sultan Anom merasa patah semangat. Ia pulang ke Palembang, kemudian menemui ajalnya. Raden Klip sendiri mula-mula dapat lolos ke Madura, tetapi akhirnya tewas juga.

Masih ada lagi catatan lain, yang mengatakan bahwa sesudah Pangeran Jayawikrama atau Pangeran Ratu dinobatkan menjadi Sultan Mahmud Badaruddin pada tahun 1721, maka Sultan Anom Muhammad Alimuddin menyingkir ke pedalaman pada tahun 1725. Kemudian Sultan Anom dima'zulkan pada tahun 1733, disebabkan adanya salah faham. Salah seorang puteri Sultan Anom bernama Raden Ayu Banderang telah menikah dengan Raja Jambi, yaitu Sultan Ahmad Zainuddin. Dengan pernikahannya itu, Raden Ayu Banderang mendapat sebutan Ratu Ibu. (49).

Juga disebut, bahwa pada tahun 1730, putera-putera Pangeran Purbaya yang telah wafat, dikepalai oleh Raden Muhammad Akib (kemudian bergelar sebagai Pangeran Natadiraja), telah meminta hak-hak mereka dalam kerajaan, dan timbul lagi perselisihan yang akhirnya dapat diatasi dan dicapai perdamaian.

Pada tahun 1735, Raden Kelid (Thomas Horsfield menyebutnya Raden Klip), putera Sultan Anom Muhammad Alimuddin menagih pula haknya dalam kerajaan. Akhirnya Raden Kelid menemui ajalnya di Batavia, dan timbullah syair "Bujuk Melayu Tipu Palembang" (49).

Dari uraian-uraian dalam "Schetsen", Thomas Horsfield dan catatan lain, meskipun di sana-sini terdapat perbedaan-perbedaan, tetapi secara garis besarnya terdapat kesamaan.

1. Zaman antara pemerintahan Sultan Muhammad Mansur, sehingga pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin, yaitu kira-kira antara tahun 1704-1725, merupakan zaman yang penuh gejolak dan periode yang menentukan.

2. Zaman penuh gejolak ini pada hakekatnya merupakan suatu perselisihan atau pertentangan paham antara fihak-fihak keluarga yang menjadi pewaris dari pemerintahan Susuhunan Abdurrahman yang besar itu.

3. Dari zaman gejolak ini akhirnya muncul seorang penguasa tunggal yang kuat dan berwibawa dalam ujud tokoh besar, yaitu Sultan Mahmud Badaruddin.

### **I. Pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin**

Sultan Badaruddin alias Jayawikrama dan kelak disebut Sultan Lemabang (Lemah Abang), adalah putera Sultan Muhammad Jimil Mansur, dan menantu Sultan Kamaruddin. Ia memerintah dari tahun 1724 - 1757. Demikian menurut catatan A. Hallema.

Menurut Thomas Horsfield, ia memerintah mulai tahun 1722 dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin. Isterinya bernama Ratu Rangdan Pangeran Ario Kusumo atau Puteri Cengek. Istananya berada di Kuta Cilancangan yang terletak di 17 Ilir, kampung Talang Jawa Lama. Jadi pada fase pertama, di Palembang terdapat tiga zone pemerintahan.

Pertama, wilayah Pangeran Mangkubumi Ali yang kemudian menjadi Sultan Anom, terletak di sebelah barat sungai Tengkuruk.

Kedua, wilayah Pangeran Ratu Jayawikrama yang kemudian menjadi Sultan Mahmud Badaruddin, terletak di sebelah timur sungai Tengkuruk.

Ketiga, wilayah Sultan Agung Kamaruddin terletak di ibukota Palembang.

Sesudah Sultan Agung Kamaruddin wafat, wilayahnya masuk ke dalam kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin. Kemudian sesudah terjadi konflik pada tahun 1722, ia memerintah sendirian. Tetapi sudah barang tentu situasi dan kondisi politik belum stabil benar di Palembang.

Selama zaman itu ada disebut-sebut tentang: (1) usaha perebutan kekuasaan terhadap Sultan Badaruddin oleh ketiga putera Pangeran Purbaya pada tahun 1738. (49), tetapi dapat segera didamaikan; (2) adanya huru-hara dan pemberontakan orang-orang Bali yang mengakibatkan tewasnya putera Badaruddin yang tertua, bernama Pangeran Ratu Kamuk atau Raden Jailani. Kejadian mungkin pada tahun 1755. (49). Dengan demikian peristiwa pembunuhan terhadap Putera Mahkota itu terjadi pada bagian akhir pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin.

Bagaimanakah hubungan Palembang dengan V.O.C. pada zaman itu? Badaruddin membuat kontrak dengan V.O.C. yang berisi penyerahan hasil-hasil yang penting seperti timah dan lada dari Palembang dan Bangka kepada

Belanda (Batavia). Satu tahun kemudian (1723), kontrak ini diperkuat dan ditanda tangani di Betawi. Wakil Belanda dalam kontrak ini adalah Abraham Patras.

Perlu juga diingatkan, komandan Belanda yang memimpin armada V.O.C. untuk menyerang Sultan Anom di Kebon Gede, bernama Willem Daams. Ekspedisi Belanda ini terdiri dari enam kapal perang yang masing-masing membawa 400 – 500 orang serdadu (37, p. 42).

Akibatnya Badaruddin diikat dengan perjanjian yang berbunyi, antara lain : tidak boleh ada bangsa lain yang masuk pelabuhan, kecuali orang Belanda; semua hasil Palembang seperti timah dan lada supaya diserahkan kepada Belanda (monopoli); tiap tahun Sultan Badaruddin harus mengirim utusan ke Batavia (30, p. 88); Ongkos perang V.O.C. ditanggung oleh Sultan Badaruddin; demikian pula biaya pendudukan V.O.C. di loji. Dengan adanya perjanjian yang dipaksakan itu, maka V.O.C. menguasai perdagangan Palembang.

Huysers mengatakan, bahwa V.O.C. dibolehkan mendirikan loji tempat berdiam residen dengan anak buah sebanyak 50-60 orang, dengan syarat tidak boleh ditambah tanpa izin dari Sultan Badaruddin; kapal-kapal V.O.C. boleh berlabuh di pantai untuk menjaga agar jangan ada penyelundupan timah dan merica (14, p. 56).

Hasil timah dan merica Palembang langsung diangkut ke Betawi dan disimpan di gudang pulau Onrust. Pada tahun 1770, benteng V.O.C. yang sudah tua diperbaiki dengan bentuk segi lima.

Pada zaman Sultan Badaruddin juga sering terjadi pertentangan dengan Belanda, akibat sistim perdagangan monopoli. Kapal V.O.C. selalu menjaga agar kapal-kapal berkebangsaan lain tidak datang di Palembang, misalnya kapal Cina, India dan Malaka (15, p. 57, 164).

Pemerintahan Sultan Badaruddin didahului oleh dua kejadian penting, yaitu penemuan timah di Bangka, dan berdirinya kota Muntok.

Menurut Thomas Horsfield, penemuan timah itu terjadi ketika penduduk sedang membuka hutan untuk dijadikan ladang dan sawah. Timah itu menjadi metal, karena panas api hutan yang dibakar. Penduduk melaporkan pada Susuhunan Ratu Candiwalang (Sultan Abdurrahman), mungkin pada tahun 1711. Penulis-penulis lainnya mengatakan penemuan timah itu pada tahun 1710 (Marsden, Crawford, Dr. Erp, De Sturler, Terminck dan Siebold). Marsden mengatakan, bahwa penemuan timah itu terjadi, ketika ada rumah yang terbakar (1710) (23, p. 172). Cara mengolah timah itu, sebelum kedatangan orang-orang Cina, masih berlangsung secara sederhana.

Crawford mengemukakan suatu ceritera yang didengarnya dari seorang kapten kapal Inggris bernama Hamilton, bahwa di Bangka pada tahun 1710 memerintah seorang anak Sultan Palembang. Pada suatu hari di sebuah desa terjadi kebakaran rumah dan tatkala dipadamkan, ternyata di antara puing



itu terdapat logam timah. Tambang timah ini membawa kekayaan bagi Sultan (4, p. 314).

Ada lagi kisah lain, bahwa tambang timah itu mula-mula dikerjakan di distrik Marawang, sebagai akibat diketemukannya tambang timah di daerah Depak, kampung Kalin (tahun 1709), karena orang membakar hutan untuk ladang (51, p. 4). Dan hampir bersamaan waktunya, di daerah Cimporak juga diketemukan tambang timah, ketika orang sedang mengeduk sungai Mabab, dekat Mawarang.

Berdirinya kota Muntok bertali-temali dengan penemuan timah di Bangka. Muntok pernah menjadi tempat kediaman Pangeran Jayawikrama (Sultan Badaruddin), dengan isteri dan kerabatnya. Sudah disebut, bahwa isteri Pangeran Jayawikrama berasal dari pulau Siantan, dan termasuk kekuasaan Johor.

Kerabat isteri Pangeran Jayawikrama itu merupakan kolonis-kolonis pertama di Muntok. Mereka berdarah Cina, tetapi sudah lama memeluk agama Islam. Walaupun demikian, asimilasi dengan orang Melayu atau pribumi sekitarnya belum terjadi. Sultan Najamudin (1812) yang diangkat pada zaman Raffles juga menikah dengan gadis Muntok.

Muntok berasal dari kata-kata yang keluar dari mulut isteri Pangeran Jayawikrama yang berasal dari Siantan. Isteri sultan merasa kurang senang tinggal di Palembang, lalu pergi mencari tempat kediaman yang baru. Ketika rombongan sampai di muara sungai Musi, isteri Sultan itu melihat sebuah tanjung, lalu berkata sambil menunjuk: "entok" (artinya "itu"; dalam bahasa Siantan). Di situlah mereka berdiam. Tanjung tadi dinamakan Tanjung Kalian. **Kalian** artinya kelihatan (18, p. 791).

Menurut Thomas Horsfield, Muntok itu dibangun di wilayah yang dimiliki oleh kepala daerah pribumi bernama Pa-mento. Karena itu kota tersebut dinamakan Muntok. Tetapi Horsfield sendiri lebih senang menamakannya **Minto**. (Barangkali ia teringat pada nama Lord Minto.) (3, p. 138).

Sudah kita ketahui, bahwa Sultan Anom ketika berselisih dengan Sultan Badaruddin lalu meninggalkan Palembang dan pergi ke Bangka. Sesudah diserang Belanda dan pindah ke Belitung, Bangka makin ramai. Banyak orang dari Minangkabau, Pontianak, Jawa, daerah sekitar Johor dan Lingga datang ke Bangka. Orang Muntok mula-mula mengerjakan tambang timah dan mengolahnnya. Sesudah Sultan Anom terdesak dari Bangka (1732), barulah penambangannya secara besar-besaran. Orang Cina banyak datang ke Muntok, dan menetap di tepi kali di sekitar Teluk Rumbia.

Belo, di sebelah utara Muntok menjadi pangkalan timah. Pada tahun 1814, jarak Belo-Muntok ditempuh dalam waktu 8 jam. Derah Belo ini dibuka oleh seorang Cina. Salah seorang keturunannya, yaitu Assing malahan diangkat menjadi Kapten Cina. Ia banyak mendatangkan tenaga kerja dari Cina dan Kalimantan, dan membuat alat baru.

Dari Belo kegiatan menambang timah itu meluas ke daerah sekitar Teluk Klabat, yang dahulu merupakan pangkalan pelayaran kita. Tempat-tempat tambang timah itu misalnya : Lumut (orang Inggeris sering mengubah huruf L dengan S, sehingga berbunyi "Sumut"), Blinyu, Layang (Sayang), Panji, Klabat Lama, Antan, Nampang, Tinga, Klabat Baru, Jebus, Sungailiat, Tanjung Berikat, Lepar (Separ), Pangkal-pinang, Marawang, Koba, dan Tampelang.

Sultan Badaruddin telah mengambil tindakan untuk menguasai dan menertibkan keadaan tambang timah di Bangka, yang sebelumnya tidak jelas statusnya, karena dikuasai oleh banyak orang.

Produksi timah ini mendatangkan kemakmuran bagi penduduk orang Cina, dan raja-raja Palembang, sehingga tahun ± 1750 - 1800 merupakan zaman makmur bagi Palembang.

Daerah pedalaman antara Pangkalpinang dengan Koba, didiami oleh penduduk pribumi yang dinamakan Pako. Mereka adalah ahli dalam mengerjakan besi. Daerah-daerah Toboali, Nyeri, Olim, Permisang, Bangkakota, dan Kotawaringin, tetap dikuasai oleh penduduk asli.

Dalam suatu laporan yang dikirim dari Batavia pada tahun 1755, terdapat hasil timah yang dikirimkan dari Palembang ke Batavia sejak tahun 1731 - 1754. Hasil itu menunjukkan angka naik, dari 70.000 kg. hingga 1.000.000 kg. Hasil tertinggi dicapai pada tahun 1751 dengan lebih dari 1 juta kg.

Selanjutnya dalam hal perjanjian perdagangan monopoli V.O.C. mengenai timah dan lada, Sultan Badaruddin bersikap teguh. Hal ini dibuktikan, ketika seorang puteranya, atas kemauan sendiri, membeli lada di pedalaman dan membawanya ke Palembang. Ternyata kapal yang memuat lada itu disuruh bakar di depan loji Belanda.

Penyelundupan memang sering terjadi pada zaman itu. Bahkan pejabat-pejabat V.O.C. sering terlibat. Biasanya gaji Reseden V.O.C. di Palembang itu kecil. Hanya 60 rupiah (gulden) sebulan. Karena itu sering mengadakan penyelewengan, misalnya dalam hal : (1) pembuatan surat pas, (2) perdagangan selundup dengan orang Cina (lada, timah), dan (3) intrik-intrik di keraton oleh Residen V.O.C.

Sikap Residen V.O.C. itu menjengkelkan para petani, sehingga mereka mengancam akan merusakkan kebun-kebun ladanya dan tidak mau lagi membawa lada ke Palembang, melainkan membawanya ke Krui dan Bengkulu.

Menurut "Schetsen", pemerintahan Sultan Badaruddin mendatangkan kemakmuran, memberi semangat kepada penduduk, dan menghalangi tindakan yang tidak baik.

Pada zaman Sultan Badaruddin (1736) dibangunlah keraton di sebelah barat keraton Kota Lama, yaitu di tepi sungai Tengkuruk, dengan nama Kraton Kota Besar. Keraton itu hancur dalam perang melawan Belanda pada tahun

1821. Sultan Badaruddin juga membangun Mesjid Sultan atau Mesjid Agung Palembang pada tahun 1747. Hingga sekarang (1973), Mesjid Agung itu tetap berdiri dengan megahnya, bahkan pada tahun 1970 -- 1971 telah dipugar, dan didirikan menara setinggi 45 m. (45, p. 10).

Pada tahun 1754, Sultan Mahmud Badaruddin membangun kompleks Pemakaman atau Pasarean dengan nama Lemah Abang dekat Boom Baru. Arsiteknya ialah Ki Ranggo Wirosentiko ibnu Kyai Temenggung Yudo Pati. Ki Ranggo ialah Hulubalang atau Menteri dalam Kesultanan, dan besan Sultan Badaruddin (49). Karena Sultan Badaruddin dimakamkan di sana, maka beliau hidup di ingatan rakyat sebagai Sultan Lemabang.

Beliau wafat pada tahun 1757, dan digantikan oleh puteranya bernama Pangeran Adikusumo, yaitu adik Pangeran Ratu Kamuk, dengan gelar Sultan Akhmad Najamuddin.

## **J. Kehidupan sosial-ekonomi dan tata-negara di Kesultanan Palembang**

### **1. Kehidupan sosial-ekonomi**

Sejak zaman dahulu Palembang merupakan bandar, sehingga kehidupan sosial-ekonominya bertopang pada kegiatan perdagangan. Raja-raja Palembang biasanya mengangkat seorang syahbandar di bandar Palembang, dengan tugas khusus, yaitu (1) memajukan perdagangan, (2) memungut bea masuk dan bea keluar, dan (3) menjaga agar pedagang-pedagang asing tidak mendapat kesulitan dari orang-orang yang tidak bertanggung-jawab.

Tugas sebenarnya bukan hanya urusan bea-cukai dan perdagangan, tetapi mirip urusan menteri luar negeri. Misalnya syahbandar itu berkewajiban mengantarkan tamu/pedagang asing untuk menghadap raja. Seorang syahbandar harus mahir berbahasa asing. Hal itu sudah terjadi pada tahun 1345, ketika syahbandar kerajaan Samudera Pasai menerima Ibnu Battutah, dan mengizinkannya mendarat dalam perjalannya dari India (Delhi) ke Negeri Cina.

Di tanah air kita, lembaga syahbandar terdapat di mana-mana, seperti di Banten, Cirebon, Banjarmasin, Malaka, Palembang, Makasar, dan Kotawaringin.

Pada zaman Majapahit, syahbandar disebut Mantri-bandar atau juru-bandar. Orang-orang Portugis menyebutnya sabannara. Demikian pula sebutan di Makasar. Dari kitab Undang-Undang lama tentang perdagangan dan perkapalan dari Amana Gappa (Makasar), dapat diketahui bahwa Sabannara bersama To'matowa menjalankan pekerjaan syahbandar (48, p. 400 - 403). Di kerajaan Gowa, ada tokoh yang bernama Jawa Anakoda Bonang yang mengatur kehidupan pedagang-pedagang asing yang datang dari Pahang, Patani, Campa, Minangkabau dan Johor (2, p. 42).

Uraian tentang syahbandar ini dimaksudkan, bahwa di pelabuhan-pelabuhan lain di tanah air kita juga ada lembaga syahbandar. Dan betapa pentingnya kedudukan dan peranan syahbandar itu.

Di bandar Palembang banyak berdiam pedagang asing, misalnya dari India dan Cina. Tetapi sejak adanya perjanjian tahun 1681 dan 1722 dengan V.O.C., maka pedagang-pedagang asing itu di bawah yurisdiksi Belanda dan hal ini mengurangi kewenangan syahbandar dan mengurangi pemasukan keuangan bagi kesultanan Palembang.

Di Palembang sejak dahulu ada suatu lembaga yang istimewa sifatnya, yang disebut saudagar-raja atau "fexo". "Fexo" ialah seorang yang kaya, tokoh khusus. "Fexo" itu diberi tugas istimewa, yaitu sebagai kasir kesultanan dan berkewajiban menambah khazanah keuangan raja. "Fexo" mendapat titel kebangsawanan dan tanah.

Perihal keadaan rakyat, sistem pemerintahan sultan-sultan Palembang adalah baik dan pantas (redelijk); pada umumnya rakyat mengatur peri kehidupannya sendiri.

Menurut P. de Roo de Faille, Sultan Palembang memerintah dengan cakap. Kompeni selalu mensupply senjata dan pada tahun 1732, membantu menyerang Sultan Anom di Bangka. Perdagangan maju, karena hasil timah banyak. Uang perdagangan dipergunakan untuk membangun keraton dan kota Palembang. Pada pertengahan kedua abad 18, kota Palembang sebagai ibukota dan kota dagang memberi harapan untuk maju.

Susunan masyarakat diatur dengan baik. Rakyat menganggap raja sebagai pemilik tanah; jadi rakyat sebenarnya hanyalah *Tunggu Tanah Raja*. Secara keseluruhan rakyat diatur dalam sistem marga, yang terdiri atas: (1) Mata gawe raja, yaitu yang dikenakan kewajiban bekerja, dan (2) Mata gawe rajeg, yaitu yang diwajibkan membayar pajak tanah. Raja sendiri mempunyai hak atas beberapa hal dan benda (kagungan dalem atau barang larangan), seperti rotan semambu yang bagus, badak, kucing candramawa, dan gajah.

Pada waktu diperlukan, orang-orang mata gawe ratusan banyaknya dan berkumpul di ibukota. Mereka harus mengurus diri sendiri, karena dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Raja hanya menyediakan bahan bangunan. Jenis-jenis mata gawe ialah: mengumpulkan kayu bakar, membakar arang, mengumpulkan kayu untuk bangunan rumah, dan sebagainya. Banyak rakyat kehilangan kebebasan karena kebanyakan hutang.

Masyarakat Palembang pada zaman Kesultanan, terbagi dalam empat golongan, yaitu: (1) Raja dengan keluarga dan lingkungannya yang terdekat; (2) Kaum priyayi, yaitu yang berasal dari keturunan raja, (3) Mantri, yaitu semua pegawai Kesultanan yang disertai mengurus kekayaan kesultanan dan (4) Rakyat biasa.

Rakyat biasa dibagi dalam golongan orang-orang *Miji* dan *Senan*. Mereka itu bukan budak dan mempunyai kebebasan. Orang Miji mempunyai tugas berperang, dan mengerjakan kerajinan dan seni pada para pangeran. Tiap orang miji adalah anggota dari suatu keluarga yang besar yang keanggotaannya ti-

dak harus terdiri dari orang-orang miji. Orang Senan atau senouw mempunyai tugas membikin betul perahu-perahu kesultanan, memperbaiki rumah-rumah raja, dan mendayung kapal raja. Sebagaimana orang miji, orang Senan juga terdiri dari keluarga besar.

P. de Roo de Faille mengatakan, bahwa barangkali yang dimaksud dengan orang Senan itu adalah orang Sinau, yaitu orang biasa, dan belajar (sinau dalam bahasa Jawa). Kedudukan orang Senan di bawah orang Miji.

Sudah disebut di depan, bahwa raja berkuasa atas tanah dalam kerajaan Palembang. Petugas yang mengurusnya disebut Jenang. Di dalam kota Palembang pekerjaan Jenang meliputi pengurusan kraton, mesjid, makam raja-raja dan bangunan sakral lainnya. Bangunan-bangunan itu semuanya terbuat dari batu.

Perlu diketahui, bahwa di Bengkulu dan Lampung juga terdapat jenang yang mewakili Sultan Banten. Tetapi tugasnya adalah (1) melaksanakan dan mengawasi tata tertib perdagangan lada, dan (2) mengadili perkara yang kecil, seperti hutang-piutang.

Perkataan Jenang ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu jejeneng atau mantri jejeneng, kira-kira sama dengan sinder kopi di Priangan pada zaman Tanam Paksa (29, p. 68). Pada abad ke 18, Palembang mendatangkan beras yang berkualitas tinggi dari pulau Jawa.

Keuangan Kesultanan Palembang didapat dengan dua jalan.

Pertama *pajak*. Diberitakan bahwa pada umumnya pajak yang dipungut dari daerah Banyuasin, Musi Ilir, Lematang, Lakitan, dapat mencapai 5089 real Sepanyol. Sistem pajak ini kelak diteruskan oleh Belanda pada abad ke 19. jadi menyerupai bentuk *land-rent* yang sederhana.

Kedua *tiban-tukon*. Sistem ini merupakan bentuk perdagangan monopoli yang sederhana. Rasionale sistem ini ialah, bahwa raja karena kedudukannya, mempunyai hak membeli barang-barang dengan harga murah. Sistem *tiban-tukon* mirip dengan kebiasaan beli-belian di Natal, atau *tiban* di Jawa. Misalnya pada suatu waktu, seperti pada saat memasuki bulan Puasa, raja atau kepala daerah menentukan kenaikan harga barang menjadi dua kali lipat atau lebih kepada bawahannya, dengan maksud menambah khazanah kerajaan.

Di Palembang, pengertian *tiban* ialah tukar-menukar antara barang/hasil dalam negeri (Kasultanan Palembang), dengan barang/hasil dari luar. Sedangkan *tukon* berarti tukar-menukar antara barang/hasil dalam negeri dengan uang; jadi menjual barang untuk memperoleh uang. Daerah-daerah Sindang, Pajag dan desa-desa Sikep, dinyatakan bebas dari *tiban-tukon*, karena sudah ditugaskan raja mengatur pengangkutan barang-barang sultan lewat sungai.

Ketiga *adat perdagangan-serah*. Di Kesultanan Palembang terdapat ke-laziman, bahwa raja memegang monopoli penjualan beberapa jenis barang seperti besi untuk keperluan membuat alat-alat, bahan pakaian yang kasar, dan garam. Harganya ditentukan oleh raja. Keuntungan dari sektor ini pernah mencapai jumlah 21.578 real Sepanyol.

Keempat *monopoli lada dan timah*. Tiap tahun Palembang harus menyerahkan lada kepada Kompeni Belanda sebanyak 20.000 pikul dengan harga 7 mat Sepanyol tiap pikul. (Satu mat Sepanyol sama dengan f. 2.20). Sedangkan raja membeli dari petani dengan harga satu mat Sepanyol tiap pikul.

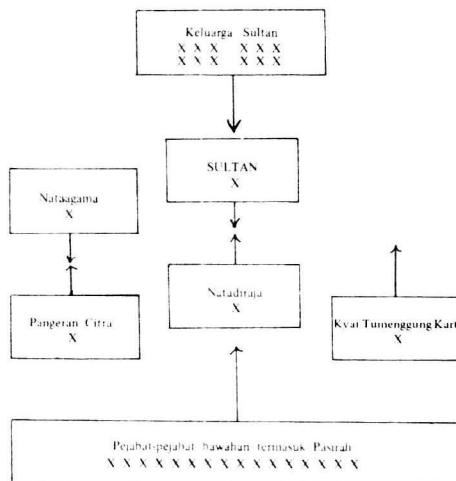
Menurut perjanjian pada tahun 1763, pada zaman Sultan Najamuddin, V.O.C. diberi izin mengangkut timah Bangka sejumlah maksimal 30.000 pikul per tahun. Perdagangan timah ini membawa kemakmuran bagi kesultanan Palembang dalam periode 1750 -- 1800.

## 2. Sistem tata-negara Kesultanan Palembang

P. de Roo de Faille mengatakan sistem tata-negara Kesultanan Palembang masih dipengaruhi Majaphit, yang mempunyai patokan *Pancalang Lima*, yaitu (1) Susuhunan, (2) Adipati, (3) Papatih, (4) Guru dan (5) Jaksanegara.

Sultan Palembang yang juga disebut Syahing Palembang, adalah orang pertama. Pangeran Natanegara, yang juga disebut Kyai Tumenggung Natadipraja memegang urusan pengaturan Negara, merupakan orang kedua. Sedangkan Pangeran Nataagama, mengurus keagamaan. Jadi terdapat "trilogi" Sultan, Natanegara, Nataagama, yang merupakan simbol Kerajaan, Pemerintahan dan Agama. Sistem ini dapat disebut Trias Politika Melayu-Jawa.

Pada tahun 1822, susunan Pemerintahan Palembang berdasarkan *Empat Mancanegara*, yang terdiri dari (1) Sultan, (2) Nataagama, (3) Natadiraja, (4) Kyai Tumenggung Karta dan Pangeran Citra. Tugas ketiga kedudukan yang pertama sama dengan di atas. Sedangkan Kyai Tumenggung Karta adalah tangan kanan Natadiraja, dan Pangeran Citra adalah kepala Pengalasan, yaitu kepala Kepolisian atau Kejaksanaan yang bertugas menjalankan hukuman mati. Dibawah ini terdapat bagan protokol dalam sidang-sidang yang menggambarkan susunan pemerintahan di Kesultanan Palembang.



Dalam seminggu Raja mengadakan paling sedikit dua kali sidang atau *seba*. Dalam sidang itu, Sultan mengenakan pakaian biasa. Di belakang dan disampingnya berdiri beberapa perajurit membawa tombak, pedang dan perisai. Ada pula wanita-wanita yang membawa sirih.

Kesultanan Palembang mempunyai sistem hukum yang mirip dengan hukum yang berlaku di Jawa, yaitu Hukum Nataagama dan Natapraja. Juga ada kesamaannya dengan hukum di Cirebon yang terpengaruh sistem Hukum Mataram, yaitu Hukum Dirgama dan Hukum Agama.

### K. Pemerintahan Sultan Ratu Akhmad Najamuddin

**Sultan Ratu Akhmad Najamuddin ialah putera Sultan Mahmud Badaruddin** yang wafat pada tahun 1756. Ia memerintah pada tahun 1756 dan wafat pada tanggal 16 Desember 1776. Pada Agustus 1774, Sultan memakai gelar Susuhunan.

Zaman pemerintahan Sultan Akhmad Najamuddin adalah masa aman bagi Palembang dan Bangka. Penghasilan timah amat memuaskan. Kompeni Belanda membeli 25.000 pikul setahunnya dengan harga seringgit tiap pikul. (14, p. 57).

Pada tahun 1763 antara Sultan Akhmad Najamuddin dengan Kompeni Belanda diadakan perjanjian baru, yang lebih menguntungkan V.O.C. Residen Belanda di Palembang waktu itu ialah Cokman dan kemudian digantikan oleh Jan de Heere. Pembantunya (Residen II) bernama Johannes Berkhout. Dalam kontrak baru itu, Palembang diharuskan menyerahkan 30.000 pikul timah dan 20.000 pikul lada tiap tahun. Harga timah ditetapkan 10 real per pikul di Palembang dan 11¼ real per pikul di Batavia. Harga lada tiap pikul 3 real 3 suku di Palembang dan 4¼ real di Batavia.

Sultan Akhmad Najamuddin banyak beramal untuk keperluan keagamaan. Beliau banyak memberi sedekah dan pertolongan.

Pada tahun 1775, Sultan Akhmad Najamuddin mengangkat salah seorang puteranya menjadi raja dengan gelar Sultan Muhammad Badaruddin atau Sultan Meruhum. Setahun kemudian, Susuhunan Akhmad Najamuddin wafat dan dimakamkan di Pasarean Lemahabang.

Sebagaimana sudah disebut di depan, suatu aspek penting kemakmuran zaman pemerintahan Sultan Akhmad Najamuddin, ialah penghasilan timah. Eksploitasi secara besar-besaran mulai sejak zaman Sultan Makhmud Badaruddin. Di bawah ini diuraikan cara pengelolaan tambang-tambang timah.

Sultan menunjuk 5 sampai 7 orang pengatur yang disebut *tiko*. Tiko itu berdiam di Palembang dan hanya sekali-sekali meninjau tambang-tambang di Bangka. Mereka itu biasanya peranakan Cina (ayahnya Cina dan ibunya Melayu), tetapi beragama Islam, dan mahir berbahasa Cina dan Melayu. Sebenarnya antara tiko

dan pekerja masih terdapat penghubung, yaitu *kongsi*. Mereka inilah yang langsung mengatur pekerjaan dan tetap tinggal di Bangka. Kongsi mendapat gaji tetap dari Tiko.

Antara Sultan dengan Tiko terdapat kontrak tersendiri. Sultan memberikan persekot sebanyak 5.000 - 10.000 dollar, tergantung pada luas tambang. Tiko berkewajiban menjual timah kepada Sultan dengan harga 8 dollar per pikul (1 pikul = 150 kati). Tiko sendiri membayar timah seharga 6 dollar per pikul (1 pikul = 160 kati; jadi ukuran pikul itu tidak tetap).

Dua pertiga harga yang diserahkan oleh tiko dalam bentuk natura, seperti bahan pangan dan sandang; sepertiga dalam bentuk mata uang timah (*picis*) yang hanya berlaku dalam wilayah kekuasaan tiko itu sendiri. Pada umumnya para pekerja hidup susah, karena harus membeli beras dari kongsi dengan harga mahal. Harga beras waktu itu tiga kali harga di Jawa. Pada zaman pemerintahan Inggris, kedudukan Tiko dan kongsi merosot.

Penduduk asli mengerjakan tambang-tambang timahnya sendiri. Mereka dikepalai oleh *Demang* yang diangkat oleh Sultan Palembang dan berkedudukan di Kotawaringin. Mereka itu berkewajiban menyerahkan timah langsung kepada Sultan Palembang dengan harga 3 dollar per pikul kecil (100 kati).

Sebelum Bangka mengalami pertumbuhan penduduk dan diserbu oleh perompak-perompak pada akhir abad ke 18, tiap tahun Sultan Palembang menerima 15.000 pikul timah bumiputera seharga 45.000 dollar dan dari kongsi-kongsi Cina sejumlah hampir 80.000 dollar. Kesemuanya berjumlah 125.000 dollar dan dijual kepada Kompeni Belanda dengan harga 300.000 dollar. Jadi keuntungan Sultan tiap tahun 175.000 dollar.

#### **L. Zaman Pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin**

Sultan Muhammad Bahauddin atau Sultan Meruhum adalah putera Sultan Akhmad Najamuddin, yang menjadi Sultan Palembang dari tahun 1776 sampai 1803. Beliau terkenal sebagai raja yang pintar dan kaya (49).

Dengan Sultan Bahauddin, Kompeni Belanda juga mengadakan kontrak baru pada tahun 1777. Jatah timah yang harus diserahkan kepada V.O.C. dinaikkan menjadi 30.000 pikul setahun.

Menurut Mayoer M.H. Court, bekas Residen Inggris di Palembang, jumlah itu diubah lagi melebihi 30.000 pikul. Belanda menghendaki semua hasil timah hanya dijual kepada V.O.C. Hal ini menunjukkan adanya peminat-peminat lain terhadap timah Bangka, seperti Inggris, Amerika Serikat dan pedagang Cina. Memang pada akhir abad 18 pengaruh Inggris makin terasa di perairan pantai timur Sumatera.

Sultan Bahauddin menggunakan situasi ini, sehingga khazanah kesultanan, walaupun dihalang-halangi oleh Belanda, dapat juga bertambah-tambah.



1. Pada tahun 1791, diadakan perjanjian baru dengan Kompeni yang diwakili oleh Kapten Antonie Hendrik Staringh dan Reseden Walbeek, yang menguntungkan Sultan.

- a. Jatah berjumlah 20.000 pikul dihargai 13½ ringgit atau 10 dollar Sepanyol per pikul di Palembang dan 15 ringgit di Batavia.
- b. Tiap 1.000 pikul berikutnya dihargai 15 ringgit per pikul di Palembang dan 17 ringgit di Batavia.
- c. Kalau Sultan dapat menyerahkan 35.000 pikul atau lebih, maka tiap pikulnya akan dibayar 15 ringgit di Palembang dan 17 ringgit bila diserahkan di Batavia.
- d. Sebaliknya apabila hasil timah kurang dari 20.000 pikul, maka harganya dikurangi dengan seringggit untuk tiap pikulnya.

2. Sejak tahun 1785 hasil timah Bangka mulai turun. Perahu-perahu penuh timah dan lada sering dirompak dan V.O.C. sendiri sudah lemah. Antara Sultan Palembang dan Belanda sering timbul percekcoakan. Sultan memang dipaksa menyerahkan semua timah dan lada kepada Belanda. Tetapi Sultan Muhammad Bahauddin berhasil pula menjual hasil buminya kepada bangsa-bangsa lain. Belanda sendiri mengakui, bahwa penyelundupan itu disebabkan harga yang ditetapkan V.O.C. merugikan penduduk, dan segala peraturan tidak akan berhasil tanpa menaikkan harga.

Sultan Bahauddin sering berhasil menjual timah kepada Inggeris sedangkan Residen Belanda di Palembang pura-pura tidak tahu. Sikap Residen Belanda itu menguntungkan dirinya. Bahkan komandan-komandan kapal perang Belanda di pulau Bangka, mudah sekali disuap orang-orang Inggeris, sehingga pedagang-pedagang Inggeris itu leluasa menjalankan transaksi dagang timah dengan Datuk di Muntok. Setiap tahun 40.000 pikul timah diselundupkan keluar Bangka. Tetapi Veth mengatakan jumlah itu terlalu dilebih-lebihkan, karena hasil timah sendiri tidak sebanyak itu, apalagi sejak tahun 1785 mulai merosot. Orang-orang Inggeris dan Amerika Serikat ikut pula dalam penyelundupan timah (23, p. 172).

Penyelundupan ini mungkin disebabkan beberapa hal.

- a. Perubahan perjanjian antara Belanda dengan Sultan tidak ada manfaatnya.
- b. Para Penyelundup luar biasa beraninya.
- c. Pasukan Kompeni Belanda sudah tidak berdaya.
- d. Penghasil timah merasa lebih untung bila menjualnya kepada bangsa lain, berdasarkan jual-beli yang lebih bebas.

Karena itu, maka D. Van Hoogendorp tidak menyetujui sistim dagang monopoli, dan memilih cara liberal.

Sejak tahun 1792, gerakan pelaut Lanun dan Rayat makin menjadi-jadi. Belanda menganggap mereka sebagai perompak. Mungkin sekali mereka itu adalah

pelaut-pelaut bangsa kita yang terdesak dan terpaksa bertualang di lautan. Pelaut Lanun dan Rayat memang diminta bantuannya oleh raja-raja Riau yang berperang melawan Belanda. Mereka adalah keturunan raja-raja Melayu dari Johor yang meninggalkan negerinya pada tahun 1606 dan menetap di pulau-pulau Bintang dan Lingga. Yang tertinggi pangkatnya bergelar Yang Dipertuan Raja. Beliau berperang dengan Belanda pada akhir abad 18.

Kelak keraton Yang Dipertuan Raja dipindahkan ke Lingga dan Riau dikepalai oleh wakilnya dengan gelar Raja Muda. Raja-raja Riau inilah yang seringkali bersekutu dengan pelaut-pelaut Lanun dan Rayat. Pelaut-pelaut Lanun atau Illanons sebenarnya adalah penduduk yang mendiami teluk Illanons, di sebelah selatan pulau Mindano. Sedangkan Orang Rayat atau Laut adalah penduduk Johor, Lingga, Riau dan sekitarnya. Ada pula yang berdiam di Bangka dan Belitung. Dalam kegiatan-kegiatan di lautan itu, mereka mendapat dukungan dari Sultan Sulu, walaupun tidak secara terang-terangan. Di samping Lanun dan Rayat, juga dikenal pelaut-pelaut Bajouw yang langsung di bawah perintah Sultan Sulu dan berkedudukan di pulau Balangini, di sebelah timur Sulu.

Sebenarnya pelaut-pelaut ini merupakan suatu armada yang kuat juga, karena kapalnya besar-besar, buatan Sulu sendiri, dan dipersenjatai dengan meriam besar di buritannya. Awak kapalnya bersenjatakan bedil, tombak; saligi, kelewang, dan keris. Tiap kapal berisi sekitar 60 orang, termasuk tawanan dan budak-budak. Yang benar-benar bertempur hanya sekitar 20 orang. Kekuatan mereka mampu memusingkan panglima-panglima armada Kompeni Belanda.

Sekedar ilustrasi, pada tahun 1787, Raja Muda Riau bersama pelaut Lingga dan Lanun berhasil mengusir Belanda dari pulau Bintang. Orang-orang Belanda pergi ke Malaka. Kemudian datang armada Inggris dan pada tahun 1795 menguasai Malaka. Pulau Bintang dibiarkan saja dikuasai sampai 1818 oleh Belanda.

Armada Belanda selalu mengejar pelaut-pelaut itu. Sebaliknya pelaut-pelaut itu menyerang Bangka dengan maksud menghambat hasil timah. Pada tahun 1789, mereka menyerang Klabat-Lama bersama pelaut-pelaut Siak. Pada waktu itu (1780), Siak diperintah oleh Raja Ismail yang menurut Radermacher, seorang raja laut yang besar. Para penyerang Klabat-Lama (Klabat-Laut) itu merampas banyak timah. Beberapa tahun kemudian pelaut-pelaut Lanun ikut menyerang. Penduduk banyak mengungsi dan mendirikan kota Klabat-Baru.

Pada tahun 1792, orang-orang Lanun menyerang Sungai Liat. Mula-mula menang, tetapi kemudian kalah, setelah lawannya mendapat bantuan saudagar-saudagar Arab.

Perdagangan dan pelayaran saudagar-saudagar Arab, yang disebut golongan Moor oleh Belanda, masih bertahan sampai zaman Daendels di abad ke 19. Kapal-kapal Arab termasuk Gujarat memegang peranan penting di Indonesia, dengan usahanya memperlengkapi perdagangan di sepanjang pantai (27, p. 15).

Pada tahun 1795 pelaut-pelaut Lanun menyerang lagi. Mereka memutuskan hubungan dagang antara Bangka dengan Palembang. Mereka memblokir Klabat-

Lama dan menghancurkannya, tetapi tidak berhasil menguasainya, karena perlawanan penduduk sangat kuat. Pantai Selatan juga diserang, lalu mendarat di muara sungai Kapo dan merembes ke Toboali. Banyak penduduk ditangkap dan kepala-kepalanya (batin) dibunuh. Penduduk meninggalkan daerah Olin, Nyeri, Bangka-Kota, dan menetap di Muntok, Belo dan Planas.

Orang-orang Lanun itu membangun pertahanan di pantai Barat dan Selatan yaitu di Bangka-Kota dan Kapo. Mereka terus menyerang daerah Utara, dan menguasai muara-muara Koba, Kurouw, Pangkal, dan Pako. Penduduk banyak yang melarikan diri ke Pangkalpinang, Depak, Tirak, Marawang dan Sungai Liat. Dipati Pako mati terbunuh dalam serangan itu.

Orang-orang Rayat di bawah pimpinan Panglima Raman juga ikut menyerang Bangka. Beliau kelahiran Lingga. Ayahnya orang Bugis, dan ibunya wanita Rayat. Semasa muda, Panglima Raman tinggal di istana Raja Muda di Lingga.

Pelaut-pelaut Panglima Raman pernah beroperasi di sepanjang pantai Jawa. Mereka juga menyerang kapal-kapal Belanda dan Eropah lainnya di muara sungai Musi, menyerang Riau, Semenanjung Malaka, dan menghancurkan Pangkalpinang yang termasuk jurisdiksi Palembang. Tumenggung Pacinan di Pangkalpinang dapat dikalahkannya.

Sultan Bahauddin berusaha merebut Pangkalpinang kembali dengan menugaskan seorang Arab bernama Abdullah Jalil. Dibantu oleh orang-orang Layang dan Marawang, Jalil membangun benteng dan akhirnya berhasil mendesak keluar pasukan Panglima Raman. Dalam pelayaran mundur itu Panglima Raman masih sempat menghancurkan benteng Tanjung Berikat dekat Sungai Liat, tetapi mereka dihancurkan oleh pasukan Cina.

Pada waktu yang bersamaan, pelaut-pelaut Lanun juga menyerang Marawang, tetapi dapat didesak oleh penduduk. Kemudian mengganas di desa-desa Dipati Barin hingga tepi gunung Maros, menangkapi penduduk dan dijadikan budak. Mereka kapun menyerang Teluk Klabat, tetapi di Blinju mendapat perlawanan Demang Seco Taruno dari Palembang.

Kadang-kadang pelaut-pelaut itu juga berani menyerang tambang-tambang Lampar, Katta dan Layang, Mapur dan Numiang. Penduduk membuat benteng dan hingga tahun 1840, masih terkenal sebagai Benteng Bhakti.

3. Penyerangan terhadap Bangka menyulitkan Palembang, karena Kapal-kapalnya sendiri sering dirugikan. Tetapi Palembang tetap dapat menguasai keadaan, karena ternyata para penyerang jarang sekali menyerang daerah Muntok, seperti Kotawaringin dan Tempelang. Salah seorang pemimpin perlawanan terhadap pelaut-pelaut itu ialah Demang Singa Yuda. Banyak juga orang-orang Rayat memihak Sultan Palembang, seperti Demang Surontaka, dan Demang Minyak yang menjaga benteng Sungai Buli dekat Jebus.

Daerah Muntok jarang diserang, karena (1) banyaknya hubungan keluarga antara penduduk Muntok dan orang-orang Johor yang kemudian pindah ke Lingga.

dan (2) penduduk melawan dengan keras. Tetapi pada akhir abad ke 18 Muntok menderita karena sebab-sebab lain, yaitu :

a. Peristiwa Abang Tawi (1792). Ia adalah keluarga ternama di Muntok, yang dituduh berbuat kesalahan, dan dijatuhi hukuman mati. Akibatnya banyak anggota keluarganya yang pindah ke Lingga.

b. Peristiwa Raden Jafar (1797-1804). Raden Jafar adalah keluarga Sultan Palembang, yang berbuat salah dan akan dihukum. Tetapi ia lari dan mencari suaka di Lingga (1797). Antara Sultan Lingga dengan Palembang memang sudah ada perselisihan. Oleh Sultan Lingga, Raden Jafar digabungkan dengan Panglima Rahman di Koba (Bangka). Mereka dapat memblokir pantai Barat pulau Bangka, menyerang kapal-kapal yang lewat di sana, dan yang keluar-masuk sungai Musi, serta menyerang benteng Jebus dan mengambil timah.

Tetapi kemudian terjadi perpecahan. Raden Jafar menetap di Kedah (Semenanjung Malaka), dan kemudian pindah ke Muntok. Hubungannya dengan Sultan Bahauddin tetap tidak baik. Raden Jafar menduduki Benteng Saribu dan memerintah di Muntok dengan keras, untuk menguasai timah, dan banyak penduduk yang menjadi korban.

Dengan adanya Raden Jafar di Bangka, maka Batavia ikut rugi, karena Palembang terhalang untuk mengirim timah secara teratur. Tetapi Belanda tidak berdaya. Barulah pada tahun 1802, sesudah keadaan politik di Eropah agak tenang, Belanda mengirimkan komisi ke Palembang dan Bangka dan mendesak Sultan Bahauddin supaya terus mengirim timah ke Batavia. Komisi itu terdiri dari Van den Bogaard dan Kapten Laut Lombar. Raden Jafar mengundurkan diri dari Muntok dan menetap di Bangka-Kota. Pada tahun 1804 ia berniat naik Haji, tetapi sebelum kesampaian telah meninggal dunia.

Sultan Bahauddin menerima komisi Belanda dengan baik, tetapi Sultan bersikap waspada. Sultan mengirim instruksi rahasia ke Bangka untuk merahasiakan produksi timah yang sebenarnya.

Menurut Campagne, hasil timah pada akhir abad ke 18, setahunnya mencapai 18 @ 20.000 pikul. Tetapi hasil sebenarnya jauh lebih besar. Thomas Horsfield menyebut angka 100.000 pikul. Sedangkan Crawford mengatakan bahwa hasil timah antara 1799-1811, hanya 10.000 pikul setahunnya. Angka ini mungkin tepat untuk tahun 1811, tetapi sebelumnya lebih besar (4, p. 323).

Menurut taksiran Komisi 1802 itu, hasil timah hanya 18 atau 20.000 pikul. Pada zaman pendudukan Inggeris di Bangka hasilnya kira-kira hanya 10.000 pikul. Bahkan pada tahun 1813, hanya mencapai 7,300 pikul setahun. Tetapi empat tahun kemudian, ada kenaikan sampai 4 kali, karena administrasinya menjadi baik.

Kesukaran-kesukaran lain yang dialami Bangka, ialah masalah masyarakat. Tiap kali ada penyerangan, maka petani-petani tidak dapat mengerjakan sawah-ladangnya dan ini menyebabkan bahaya kelaparan, wabah penyakit dan ke-

kacauan. Ternyata bahwa pada akhir abad ke 18, Bangka sebagai akibat merosotnya produksi timah dan keadaan internasional yang tidak stabil (Revolusi Perancis, Perang Napoleon), ikut merasakan kegoncangan.

Pada tahun 1804, keadaan di Bangka sudah mulai tenteram, karena serbuan pelaut-pelaut Lanun dan lain-lainnya sudah jauh berkurang.

Sumber-sumber Belanda jarang membicarakan penyerangan pelaut-pelaut-perampok terhadap Bangka pada akhir abad ke 18. Sebaliknya Thomas Horsfield menyebut dengan panjang lebar.

D. Van Hoogendorp hanya menyatakan, bahwa daerah kekuasaan Sultan Palembang yang paling kaya adalah Bangka, Tetapi pertahanan pulau Bangka tidak kuat. Karena itu mudah diserang perompak. Mereka merampas kapal dan perahu penuh muatan timah yang sedang dibawa ke Palembang, sekalipun dilindungi oleh kapal Belanda.

Campagne mengatakan bahwa pelaut-perompak itu mendapat dukungan Inggris. Pendapat tersebut dibenarkan oleh M.H. Court, yang mengatakan, bahwa perompakan dan penyelundupan makin menjadi-jadi sejak pecah perang antara Republik Bataaf (Belanda) dengan Inggris pada tahun 1795. Mungkin sekali penyelundupan dan perompakan terhadap timah Bangka itu diatur di Pulo Pinang, yaitu tempat kedudukan Inggris.

Sejak abad ke 18 sejarah Bangka banyak sangkut-pautnya dengan sejarah Palembang, karena itu di bawah ini ada baiknya untuk secara khusus diuraikan tentang Bangka. Sumber-sumber tentang Bangka cukup banyak. Laporan Thomas Horsfield aslinya dimuat dalam "The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia", 1848. Beliau seorang ahli penyelidik ilmu alam. Pada tahun 1812, ia mengunjungi Batavia dan oleh Sir Thomas Stamford Raffles, diberi tugas untuk meneliti pulau Bangka. Lapornya diselesaikan pada tahun 1814, dan penyelidikannya sendiri memakan waktu 9 bulan. Laporan itu bersifat banyak segi, antara lain ethnografi, geografi, mineralogi dan sejarah.

Selama tahun 1700 -- 1750 pulau Bangka seringkali menjadi tempat berlindung orang-orang Palembang. Kemudian Bangka menjadi medan perang antara dua keluarga raja di Palembang yang sedang bertentangan. Antara tahun 1760--1780, Bangka mengalami masa yang tenang. Sesudah diketemukan tambang timah, maka banyak orang berdatangan, terutama sekali orang Cina; pertanian dan perdagangan mulai berkembang, dan banyak hutan yang ditebangi.

Harga timah Bangka dalam setahun selama 1760 -- 1780 kira-kira sama dengan harga perak di Meksiko.

Nama Bangka dahulunya dipakai untuk menyebut daerah-daerah lainnya di pulau Sumatra bagian selatan. Bangka-Palembang adalah sebutan buat kerajaan Palembang bagian pantai Timur, yang melebar hingga Bangka-Hulu di pantai barat, yang sekarang bernama Bengkulu. Sedangkan letak Bangka-Musa, tidak dapat diketahui lagi. Tetapi nama Bangka sekarang hanya melekat pada

pulau Bangka. Dalam peta Van Linschoten, pulau Bangka disebut Chinabata. Van Wacrwijck menyebutnya Sinapate. Sedangkan orang-orang Inggeris ketika menguasai pulau Bangka, menyebutnya sebagai "Duke of York's Island".

Selama abad 17 dan permulaan abad 18 bangsa Eropah belum tertarik kepada Bangka. Pulau Bangka masih ditutupi rimba. Hasilnya yang dapat dimanfaatkan, menurut Valentijn, hanyalah kayuambalu, lilin, madu, damar hitam, dan damar putih. Kayu ambalu agak kekuning-kuningan, keras dan seratnya berombak. Timah Bangka belum diketahui. Pada waktu itu timah diambil dari Tanah Malaya.

Jadi, jelaslah bahwa sebelum abad ke 18, Bangka belum memainkan peranan yang penting. Bangka masih berada di bawah kekuasaan Jawa. Penduduk yang berasal dari Jawa menghuni daerah pantai Barat, yaitu di sekitar muara sungai Kotawaringin, Mundo, Selan dan Bangka-Kota. Hingga permulaan abad ke 19, Bangka-Kota masih merupakan pusat kerajaan.

Dalam babad-babad Jawa juga disebut tentang Bangka. Mungkin sekali masyarakat penduduk dari Jawa di Bangka itu berasal dari zaman Majapahit, tetapi sesudah kerajaan itu runtuh, lalu merupakan pemerintahan atau negara yang berdiri sendiri. Dalam kitab Negarakretagama, pupuh 13 dan 14, ada disebut tentang daerah: Paka dan Kutawaringin, yang merupakan tempat-tempat di pulau Bangka (24, p. 47 - 49).

Kemudian Bangka termasuk wilayah kesultanan Palembang. Mengenai hal ini terdapat bermacam-macam pandangan. Antara lain (1) mungkin sekali daerah Bangka diserahkan oleh raja-raja Jawa kepada Palembang; (2) mungkin juga penduduk Bangka dengan kemauan sendiri mencari perlindungan pada Kesultanan Palembang; dan (3) mungkin pula, daerah di depan muara sungai Musi sudah terpengaruh oleh Palembang sejak zaman dahulu.

Dalam hal ini De Sturler mengatakan, bahwa Bangka dan Belitung, pada tahun 1668 diperintah oleh raja, yang karena tidak tahan menderita serangan dari raja lain, lalu minta bantuan Kompeni Belanda. Ketika raja ini wafat, daerah Bangka dikuasai oleh isterinya. Kemudian raja Palembang menikah dengan janda tersebut, dan karena itu Bangka lalu masuk dalam kekuasaan Palembang.

4. Masa pemerintahan Sultan Bahauddin merupakan zaman yang sukar. Beliau harus menghadapi Belanda, Inggeris, dan perompak-pelaut. Dalam keadaan demikian maka dari Sultan Bahauddin dituntut kecakapan untuk memimpin negaranya. P.J. Veth tidak begitu memuji, lebih-lebih dalam hal kebijaksanaan politik-ekonominya terhadap Bangka dan hubungannya dengan Kompeni Belanda. Van Hoogendorp dengan nada sinis menyatakan Sultan Bahauddin memperoleh hasil yang besar dari penjualan timah kepada Belanda, dan (diselundupkan, menurut Belanda) kepada fihak-fihak lain. Hasil penjualan timah itu berupa uang (piaster) yang ditaruhnya dalam jamban-jamban timah dan

disimpan dalam kelder. Tetapi Sultan Bahauddin tidak *meng-ekonomi-kan* uang itu, kecuali kadang-kadang diperiksa saja.

Pendapat kedua penulis Belanda itu dapat dimengerti, karena Belanda memang merasa jengkel terhadap kebijaksanaan Sultan Bahauddin. Dalam hal ini ternyata Sultan Bahauddin lebih cerdas dan berhasil dari pada Belanda. Sultan Bahauddin juga membangun keraton baru dari hasil timah itu yang sampai tahun 1814 masih digunakan sebagai benteng oleh pasukan Belanda yang menduduki Palembang. Sebaliknya De Struler memuji-muji kebijaksanaan Sultan Bahauddin, sebagai seorang pemimpin yang memajukan penduduk.

Pada tanggal 2 April 1804, Sultan Muhammad Bahauddin wafat dan digantikan oleh puteranya, Raden Hassan dengan bergelar Sultan Mahmud Badaruddin II, yang kemudian terkenal sebagai Sultan Mahmud Badaruddin Ternate.

#### M. Keadaan terakhir di Kesultanan Palembang

1. Masa ini berlangsung selama 21 tahun, yaitu antara 1804 sampai 1825, dan penuh gejolak karena Belanda, Perancis dan Inggeris berpengaruh langsung pada kehidupan kenegaraan di Palembang. Gejolak yang dapat dirasakan berupa (1) bergantinya sultan-sultan dalam jangka waktu yang pendek, (2) sering bergantinya kekuasaan asing yang datang di Palembang, (3) banyaknya peperangan dan (4) mundurnya kehidupan ekonomi.

Urutan raja yang memerintah menurut daftar A. Hallema dalam 21 tahun itu menunjukkan pergantian sampai tujuh kali.

- a. Sultan Mahmud Badaruddin II dari tahun 1804 – 1812.
- b. Sultan Akhmad Najamuddin (saudara Sultan Mahmud Badaruddin II) dari tanggal 17 Mei 1812 sampai 29 Juni 1813.
- c. Sultan Makhmud Badaruddin II dari tanggal 29 Juni 1813 sampai 13 Agustus 1813.
- d. Sultan Akhmad Najamuddin dari tanggal 13 Agustus 1813 sampai 23 Juni 1818.
- e. Sultan Mkhmud Badaruddin II memerintah bersama-sama dengan Sultan Akhmad Najamuddin dari tanggal 23 Juni 1818 sampai 15 Nopember 1818.
- f. Sultan Mahmud Badaruddin dari tanggal 15 Nopember 1818 sampai tahun 1821.
- g. Sultan Akhmad Najamuddin Pangeran Ratu memerintah dari tanggal 28 April 1821 sampai 18 Agustus 1823.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan politik di Palembang tidak stabil, dan tentu mempunyai akibat yang kompleks bagi segi-segi kehidupan lainnya.

2. Kekuasaan Belanda di Indonesia pada permulaan abad ke 19, memang sudah merosot, dan hanya berkuasa di Jawa, Maluku serta mempunyai pos yang kurang berarti di Makasar, Banjarmasin dan Palembang (10, p. 361).

Sementara itu pada tanggal 1 Januari 1808, Gubernur Jenderal H.W. Daendels mendarat di Anyer dan mulai memerintah mewakili Negara Belanda-Perancis. Dalam politiknya terhadap Palembang, Daendels berkata pada tanggal 25 Agustus 1809, sebagai berikut :

a. Palembang harus lebih menghormati pemerintah Hindia-Belanda (Perancis) dari pada V.O.C. sebagai Persekutuan Dagang.

b. Palembang bukanlah tempat yang menguntungkan bagi Belanda dan bahkan menjadi beban.

c. Karena itu di Palembang perlu diadakan penghematan dan pengurangan personil.

d. J.H. Rabinel, sebagai "opperhoofd" harus tetap tinggal di Palembang bersama "assistent-schrijver" (21, p. 54 - 59).

Palembang pada zaman Daendels memang merupakan daerah yang tidak menguntungkan. Belanda tidak mungkin lagi melaksanakan politik dagang monopoli. Karena itu Daendels menjalankan politik penghematan, tanpa menyerahkan hak-hak Belanda di sana (11, p. 36).

Daendels berkeinginan supaya Sultan Palembang menghormati pemerintah Belanda. Kenyataan menunjukkan, bahwa Daendels tetap bertahan di Palembang, walaupun personilnya sedikit. Hanya 24 orang Belanda dan 63 orang bangsa kita yang bekerja untuk Belanda. Resminya Sultan Mahmud Badaruddin juga masih harus menyerahkan timah dan lada.

3. Sungguh menarik, bahwa Raffles yang ada di pulau Pinang, tidak mengambil kesempatan dari kelemahan Belanda di Palembang. Barangkali Raffles menyangka pendudukan Belanda di Palembang itu kuat. Raffles ada juga berhubungan surat dengan Sultan Badaruddin, malahan mengirimkan senjata. Tetapi mungkin Sultan Badaruddin lebih merasa mantap berhadapan dengan Belanda yang lemah dari pada dengan Inggris yang kuat (21, p. 54 - 59).

Pada masa itu, Inggris dan Belanda-Perancis sedang berperang di Eropa. Napoleon Bonaparte telah memasukkan Negeri Belanda ke dalam kerajaan Perancis. Menurut anggapannya, semua jajahan Belanda termasuk Indonesia dengan sendirinya jatuh ke tangan Napoleon.

Pada waktu itu perang Inggris-Perancis justeru sedang berkobar dengan hebatnya. Daendels sendiri merasa khawatir akan penyerbuan orang Inggris, karena itu ia giat memperkuat pertahanan. Itulah yang menyebabkan mengapa Inggris terutama sekali Lord Minto, Gubernur Jenderal Inggris di Calcutta merasa perlu untuk menyerang Indonesia.

Sesungguhnya beberapa pembesar Inggris tidak setuju menyerbu Indonesia karena secara ekonomis dipandanginya tidak menguntungkan. Tetapi berhubungan arti strategi militer yang terkandung di dalamnya, maka penyerbuan itu dilaksa-



nakan juga dengan dalih ekspedisi untuk menghukum Belanda di Indonesia (34, p. 125 - 126).

Sebagai persiapan Lord Minto mengumpulkan mereka yang mengetahui adat-istiadat, bahasa, dan sejarah Indonesia. Salah seorang di antaranya adalah Dr. John C. Leyden, seorang pendeta, dokter, ahli bahasa, penyair, dan banyak pengetahuannya tentang Indonesia. Ia mengenal kapasitas Thomas Raffles, dan atas anjurannya, Raffles dijadikan pembantu Lord Minto. Raffles ditugaskan mengambil tindakan diplomatis berhubung dengan ekspedisi itu.

Ia diinstruksikan menyelidiki sikap penduduk Indonesia terhadap Inggris. Dalam usahanya ini, ia menggunakan pedagang Indonesia sebagai perantara. Karena itu ia dapat berkirim surat dengan Sultan Palembang, Raja Bali, Sunan Surakarta, serta Sultan Yogyakarta.

Menurut Raffles, sebagian besar penduduk Indonesia menaruh dendam kepada Belanda dan senang kepada Inggris. Bahwa bangsa kita senang kepada Inggris, tidak benar. Raja-raja Jawa memang tidak suka kepada Belanda, apalagi karena tindakan Daendels yang kasar. Tetapi raja-raja Jawa pun tidak senang kepada Inggris, bahkan khawatir kalau-kalau Inggris mengembalikan turunan Sunan Mas dari Sailan dan mendudukkannya di atas takhta. Raja-raja Jawa bersikap menunggu (25, p. 21). Demikian pula Sultan Badaruddin (43, p. 313).

Persiapan menyerbu Indonesia cocok benar dengan aspirasi Raffles. Ia sudah bertahun-tahun berusaha agar Inggris merebut Indonesia dari tangan Belanda. Dari tempat kedudukannya di pulau Pinang yang dikuasai Inggris sejak 1786, Raffles mengirim surat kepada Sultan Badaruddin tertanggal 2 Maret 1810, Surat itu berbahasa Melayu, antara lain tertulis agar Sultan Badaruddin lekas bertindak untuk "buwang menghabiskan sekali-kali orang Belanda". Raffles juga mengirim 4 peti berisi 80 senapan. Sultan Palembang menerima kiriman senjata, tetapi tidak memenuhi anjuran Raffles itu. Hal ini menyebabkan Raffles tidak senang kepada Sultan Badaruddin.

Sementara itu pada tanggal 3 Agustus 1811 angkatan perang Inggris, terdiri dari 100 kapal dengan 12.000 orang tentara, menyerang dan mendarat di pantai Cilincing Jakarta (Batavia). Angkatan perang itu dikepalai oleh Lord Minto dan membawa serta Thomas Raffles. Waktu itu pemerintah jajahan Belanda dikepalai oleh Janssens, pengganti Daendels.

Peperangan ini berlangsung selama enam minggu dan Belanda menyerah di Tuntang, Jawa Tengah pada tanggal 18 September 1811 (7, p. 5).

4. Tetapi empat hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 September 1811, jam 09.00, pos Belanda di Palembang diserbu. Waktu itu datang Tumenggung Lanang Sura Nindita bersama 4 orang Mantri ke Benteng Belanda untuk berbicara dengan residen Belanda Jacob Groenhoff van Woortman. Mereka membawa pesan Badaruddin, agar Belanda meninggalkan Palembang secara tertib

dan damai. Sebabnya, Batavia dan pulau Jawa sudah jatuh ke tangan Inggeris, dan bila orang Belanda tetap di Palembang, Inggeris akan menyerang.

Residen Belanda menjawab bahwa pulau Jawa belum menyerah secara resmi. Ia tidak mau meninggalkan Palembang sebelum ada perintah dari Batavia.

Karena itu utusan Sultan pulang, dan sementara itu datanglah kira-kira 160 orang bersenjata yang bersiap mengelilingi benteng Belanda. Sekira jam 13.00, Tumenggung Lanang datang lagi ke benteng bersama pasukan sejumlah 600 orang. Tiada berapa lama datang pula Pangeran Nata, lengkap dengan barisan bersenjata. Iapun membawa surat yang berisi desakan, agar Belanda segera meninggalkan benteng, karena Batavia dan pulau Jawa sudah dikuasai Inggeris. Juga diberi jaminan, kalau Belanda mau lagi boleh kembali ke Palembang. Tetapi Residen Groenhoff van Woortman tetap menolak. Kemudian Pangeran Nata meninggalkan benteng dan digantikan oleh Pangeran Natadiraja bersama Demang Usman.

Residen dan wakilnya Haavlegter bersama komandan pasukan Belanda diminta datang ke Pinarakan Jobo (pendopo keraton), untuk berbicara sendiri dengan Sultan Mahmud Badaruddin. Mereka itu tidak pulang lagi ke benteng.

Pasukan Palembang segera menyerbu benteng dan melucuti senjata pasukan Belanda. Tawanan itu diikat dan dimasukkan ke dalam kapal-kapal yang akan dipulangkan ke Batavia. Di Muara Sungsang mereka menemui ajalnya. Semuanya berjumlah 24 orang Belanda dan 63 bangsa kita yang bekerja pada Belanda (7, p. 10). Bentengnya sendiri dihancurkan.

Peristiwa di Palembang tersebut lama dibicarakan di kalangan ahli sejarah Belanda kemudian. Berbagai keterangan dikemukakan. Antara lain adalah (1) Raffles berperanan, karena ia mengirim surat-surat dan senjata; (2) antipati penduduk Palembang terhadap pemeluk-pemeluk agama Nasrani; dan (3) dendam salah seorang Pangeran Palembang yang pernah disakiti hatinya oleh Residen Belanda. Sementara itu ada pendapat, bahwa Raffles sendiri tidak bersalah (7, p. 2). Tetapi alasan yang sebenarnya ditinjau dari sudut Palembang, ialah keinginan Palembang untuk merdeka (10, p. 375).

5. Sesudah Sir Thomas Stamford Raffles berkuasa di Batavia, maka pada tahun 1812 dikirimlah sebuah komisi ke Palembang dengan maksud mendudukkan Letnan Jackson sebagai Residen Inggeris di sana. Ternyata Sultan Badaruddin menolaknya. Karena itu Raffles menggunakan peristiwa 14 September 1811 sebagai alasan menyerang Palembang.

Pada tahun 1812, pasukan Inggeris di bawah Gillespie menyerang Palembang dan menduduki keraton. Sultan Makhmud Badaruddin hijrah ke daerah Rawas dan mendudukkan adik beliau, Raden Husin Pangeran Adipati sebagai Sultan Akhmad Najamuddin (kemudian bergelar Husin Dia'uddin) (49). Sultan Akhmad Najamuddin masih muda. Inggeris mengadakan perjanjian baru dengannya pada tanggal 17 Mei 1812, mengakuinya sebagai Sultan, tetapi dipaksa menyerahkan Bangka dan daerah sekitarnya kepada Inggeris.

Sesudah itu Gillespie kembali ke Batavia, dan Kapten Macres diserahkan tugas menjaga keamanan di Palembang. Dalam suatu ekspedisi ia terluka, dan kemudian meninggal dunia. Gentingnya ialah Mayor Robinson. Hal ini membuktikan, bahwa di luar kota pasukan Sultan Makhmud Badaruddin masih kuat.

Mayor Robinson menjalankan politik yang unik dan berani. Pada tanggal 29 Juni 1813, Sultan Akhmad Najamuddin turun takhta dan Sultan Makhmud Badaruddin kembali menjadi Sultan Palembang. Pada tanggal 13 Juli 1813, ia kembali ke kota Palembang. Dalam perjanjian antara Sultan Makhmud Badaruddin dan Mayor Robinson, tertulis, bahwa Sultan Makhmud Badaruddin diharuskan membayar 400.000 piaster (kira-kira 1 milyar gulden) sebagai ganti kerugian biaya ekspedisi.

Raffles tidak menyetujui cara Mayor Robinson ini, dan terdengar suaranya, bahwa Mayor itu telah makan suap (17). Bagaimana keadaan yang sebenarnya tidak diketahui. Mungkin Mayor Robinson dapat lebih jelas melihat kenyataan, bahwa pada hakekatnya yang mempunyai kekuatan riil di Palembang adalah Sultan Makhmud Badaruddin. Pada tanggal 13 Agustus 1813, ada lagi ekspedisi Inggris dengan hasil :

- a. Sultan Makhmud Badaruddin, yang berkuasa selama 45 hari itu, diturunkan lagi.
- b. Sultan Akhmad Najamuddin diangkat lagi.
- c. Mayor Robinson dipecat.

Mayor Robinson tidak menerima. Ia mengadu kepada Lord minto di Calcutta dan bahkan sampai ke Pemerintah Pusat di London. Raffles dituduhnya bersikap plin-plan dalam persoalan pembunuhan orang Belanda pada tanggal 14 September 1811.

6. Kedudukan Mayor Robinson digantikan oleh Mayor M. Court. pada tanggal 21 Agustus 1813. Sultan Akhmad Najamuddin mengadakan perjanjian dengan Inggris, antara lain berisi :

- a. Sultan Akhmad Najamuddin diharuskan membuat jalan raya ke Bengkulu dan Lampung, apabila pemerintah Inggris memandang perlu.
- b. Sultan Akhmad Najamuddin harus menyerahkan hasil Palembang kepada Inggris (timah, lada dan lain-lain) dengan harga yang pantas.
- c. Sultan Akhmad Najamuddin juga harus membantu penghidupan kakaknya, Sultan Makhmud Badaruddin, dengan 20 koyang beras tiap bulan, dan menyediakan 100 - 200 tenaga pendayung.

Rupanya Sultan Badaruddin tetap berada di kota Palembang di Keraton Muda, berstatus bebas tetapi masgul, sedangkan Sultan Akhmad Najamuddin ada di Keraton Sultan. Kedua keraton itu berada di tepi kiri, sedangkan benteng Belanda/Inggris berada di tepi kanan sungai Musi. Keadaan ini berlangsung selama 5 tahun. Sultan Akhmad Najamuddin dengan Inggris, rakyatnya, dan Sultan Badaruddin, seringkali berselisih.

7. Sementara itu peperangan di Eropa selesai, dan membawa perubahan bagi Indonesia. Negara-negara yang menang mengadakan Konvensi London pada tanggal 13 Agustus 1814, untuk mengatur pengembalian daerah-daerah jajahan yang dikuasai Inggris, termasuk Indonesia, kepada Belanda. Tetapi pelaksanaannya terlambat, karena Napoleon lepas dari Elba dan mengadakan perang lagi.

Barulah pada tanggal 19 Agustus 1816 John Fendall yang menggantikan Raffles, menyerahkan kekuasaan kepada Komisaris Jenderal Belanda yang terdiri dari Laksamana Buyskes, Van der Capellen dan Elout di Jakarta (10, p. 383). Sedangkan kekuasaan Inggris di Palembang baru diserahkan oleh Residen Court kepada Residen Belanda Klaas Heynis pada tanggal 10 Desember 1816 di Muntok.

Sebelum terjadi serah-terima, pada tanggal 12 Maret 1816 Sultan Makhmud Badaruddin (ex Sultan) mengirim surat dengan utusan kepada Komisaris Jenderal di Jakarta, yang isinya antara lain tentang kejadian di Palembang pada tahun 1811. Sementara itu Sultan Akhmad Najamuddin juga mengirim utusan ke Jakarta.

Barulah pada tanggal 16 Desember 1816 Residen Heynis tiba di Palembang. Keesokan harinya, diadakan audientie umum dan hari berikutnya, bertemu dengan Sultan Akhmad Najamuddin yang berlangsung selama tiga jam. Pembunuhan orang-orang Belanda tahun 1811, dan bahwa Sultan Najamuddin ikut dalam peristiwa itu disinggung pula. Ketika dirasakan reaksi Sultan kurang menyenangkan, maka Heynis berkata, bahwa penyelidikannya itu hanya untuk kepentingan pribadi. (17).

Sultan Akhmad Najamuddin minta, supaya Belanda tetap mengakui semua perjanjian yang dibuat pada zaman Inggris. Dari pembicaraan-pembicaraan itu, Residen Heynis dapat melihat, bahwa Sultan Akhmad Najamuddin dan Sultan Makhmud Badaruddin (Ex Sultan) berbeda pandangan. Hal ini digunakan sebaik-baiknya oleh pihak Belanda, antara lain untuk maksud menaklukkan Lampung dengan bantuan Sultan Badaruddin (ex Sultan). Tanggal 14 Juni 1817, Sultan Akhmad Najamuddin mengirimkan utusan ke Jakarta dengan penegasan, supaya Belanda tetap memegang teguh semua perjanjian yang dibuat pada zaman Inggris. Dari surat-surat itu kelihatan, bahwa Sultan Najamuddin merasa kedudukannya tidak stabil.

Sementara itu, Residen Heynis terlibat dalam korupsi, terutama terhadap hasil timah Bangka. Ia dengan Koopman H. Brown menariki pajak semauanya sendiri. Karena itu Batavia memanggilnya kembali pada tanggal 15 Juni 1817, dan kedudukannya diganti oleh suatu Komisi yang terdiri dari R. Coop a. Groen dan J. du Pay. Sementara itu R. Coop a Groen tetap tinggal mengurus Palembang dan berkedudukan di Muntok, sesudah pekerjaan Komisinya selesai.

Menurut P.H. Van der Kemp, sebenarnya Sultan Akhmad Najamuddin dinyatakan bersalah sebelum diselidiki dengan teliti. Kalaupun ada kesalahannya

hanyalah karena Sultan Najamuddin diakui dan diangkat pada zaman pemerintahan Inggris. (17, p. 43.)

Karena sikap Sultan Najamuddin tidak memuaskan Belanda, maka Elout berpendapat supaya Palembang dihajar dengan suatu ekspedisi. Sebenarnya yang terlebih dahulu dan sangat keras kemauannya untuk mengirim ekspedisi ialah Mr. H.W. Muntinghe. Maksudnya ialah mendukung perundingan dengan cara *menunjukkan* kekuatan, bukannya menggunakan kekuatan.

Kapal perang "Eendracht" menjalankan ekspedisi dan pada tanggal 23 Januari 1818 sampai di Muntok, dibawah Kapten-Letnan Taco Bakker. Rupanya R. Coop a Groen tidak tahu-menahu tentang akan datangnya ekspedisi. Di kalangan pemerintah Hindia Belanda di Batavia, pada waktu itu terasa adanya ketakutan terhadap bahaya Inggris yang akan menduduki Indonesia.

Pada tahun 1817 itu, Bengkulu dikuasai Inggris di bawah Residen Siddons. Sedangkan Thomas Raffles, barulah pada 1818 sampai di Bengkulu sebagai Letnan Gubernur Jenderal.

Dalam pada itu H.W. Muntinghe dipandang sebagai orang yang mampu menghadapi ambisi Raffles yang ingin tetap menguasai Indonesia. Muntinghe adalah orang segala zaman. Pada zaman Daendels ia adalah Sekretaris Jenderal; pada zaman Raffles ia terpakai sebagai anggota Raad van Indie; pada zaman Komisaris Jenderal, ia diangkat sebagai President der Adviserende Commissie dan President van de Raad van Financien; dan kemudian diangkat sebagai Commissaris van Palembang en Bangka, untuk menghadapi move Raffles. Dalam besluitnya tercantum dua tugas, (1) menjamin hak-hak Belanda atas Sumatera, dan (2) mendamaikan Sultan Akhmad Najamuddin dengan Sultan Badaruddin (ex Sultan). Ia tiba di Muntok tanggal 20 April 1818.

Yang ditakuti Muntinghe, kalau-kalau Sultan Najamuddin pergi ke Bengkulu meminta bantuan Raffles, yang sudah berada di Bengkulu. Karena itu Muntinghe segera (21 April 1818) mengutus Kyai Demang Usman kembali kepada Sultan Makhmud Badaruddin (ex Sultan) untuk menghalangi Sultan Akhmad Najamuddin pergi ke Bengkulu. Rupanya apa yang dikawatirkan Belanda itu hanyalah desas-desus, setidak-tidaknya sampai tanggal 21 April 1818. Memang, Muntinghe menjalankan politik pecah-belah yang terkenal di Palembang.

Ternyata, Sultan Badaruddin tidak bersedia memenuhi permintaan Muntinghe. Sultan Badaruddin tidak mudah dipecah-belah begitu saja.

8. Sementara itu kapal perang "Eendracht" yang sudah lama ada di Muntok, mulai bergerak ke Palembang. Ketika kapal itu sampai di Sungsang, maka Sultan Najamuddin benar-benar mengirim surat kepada Raffles di Bengkulu. Esoknya pada tanggal 4 Juni 1818 H.W. Muntinghe mendarat di Palembang. Ia diterima oleh Sultan Akhmad Najamuddin. Pada tanggal 6 Juni 1818 surat-surat resmi dari Komisaris Jenderal diserahkan kepadanya. Pada tanggal 7 Juni 1818 diadakan perundingan selama 3 jam dan kepada Sultan Najamuddin diberitahukan,

bahwa: (1) Sultan Akhmad Najamuddin di-non-aktifkan, dan (2) Sultan Makhmud Badaruddin diangkat kembali sebagai Sultan Palembang. Sultan Akhmad Najamuddin minta waktu, dan sementara itu menulis surat kedua kepada Raffles.

Sementara itu, pada tanggal 20 Juli 1818 Sultan Makhmud Badaruddin yang sudah kembali menjadi Sultan Palembang sejak 23 Juni 1818, dan resminya memerintah bersama-sama dengan Sultan Akhmad Najamuddin sebagai Sultan Muda, menanda-tangani kontrak dengan pihak Belanda yang berbunyi antara lain :

- a. Pemerintah Belanda memaafkan Sultan Makhmud Badaruddin dalam peristiwa pembunuhan orang-orang Belanda pada tahun 1811.
- b. Sultan Makhmud Badaruddin diangkat/diakui kembali sebagai Sultan dengan kekuasaan yang terbatas (umpamanya: pemungutan pajak, herendienst, leveransi, dan sebagainya).
- c. Monopoli terhadap garam dan opium dipegang Belanda.
- d. Pengadilan tradisional boleh terus dijalankan Sultan tetapi dalam hal keputusan hukuman mati, harus ada wakil pemerintahan Belanda dalam persidangan.
- e. Sultan Badaruddin akan kembali ke keraton Sultan, sedangkan Sultan (Muda) Akhmad Najamuddin akan mendapat ganti kerugian.
- f. Sultan Badaruddin menyerahkan beberapa daerah kepada Belanda.
- g. Sultan Badaruddin akan membantu f. 100.000,- untuk membangun benteng dan loji Belanda sebagai ganti yang dirusak pada tahun 1811.
- h. Pemilihan Pangeran Adipati dan Putera Mahkota ditentukan dengan musyawarah antara Sultan dengan pemerintah Belanda.
- i. Urusan bea-cukai dalam kesultanan Palembang dipegang Belanda (17, p. 43).

9. Sedangkan Sultan Najamuddin melalui Sekretaris dan juru tulisnya, diberi surat keputusan berisi alasan-alasan pencabutan kekuasaan, beserta kontrak yang harus ditanda-tangani dalam waktu 24 jam (23 Juni 1818), sbb :

- a. 1) Rakyat Palembang mengeluh, karena pemerintah Sultan Najamuddin tidak memuaskan dan keamanan tidak terjamin.
- 2) Sultan Najamuddin bersalah dalam peristiwa 14 September 1811.
- 3) Pengangkatannya sebagai Sultan Palembang pada zaman Inggris adalah keliru.
- 4) Sultan Najamuddin bersalah telah menyerang daerah Lampung yang berada di bawah kekuasaan Belanda.
- 5) Sultan Najamuddin bertanggung jawab terhadap kekacauan-kekacauan di daerah Bengkulu.

- 6) Sultan Najamuddin bersalah tidak mau patuh pada kemauan Komisaris Jenderal, seperti dalam hal bantuan beras, dan tenaga pendayung untuk Sultan Badaruddin.

Kalau dilihat alasan-alasan dalam surat keputusan itu, maka pendapat Kemp banyak benarnya. Sedangkan iklim politik pada tahun 1818, justeru menunjukkan adanya kekhawatiran Belanda terhadap semangat ekspansi Inggris yang tercermin pada sepak-terjang Thomas Raffles.

b. Selain surat keputusan pemberhentian, Sultan Najamuddin juga menerima lampiran surat kontrak.

- 1) Sultan Akhmad Najamuddin, walaupun tidak menjadi Sultan Palembang, masih berhak memakai gelar Sultan Muda Palembang.
- 2) Sultan Muda Akhmad Najamuddin mendapat bantuan keuangan sebesar f. 1.000,- tiap bulan yang dibayar dari Kas Negara.
- 3) Sultan Muda Akhmad Najamuddin memperoleh 100-200 koyang beras dan 10 koyang garam tiap tahun.
- 4) Sultan Muda Akhmad Najamuddin berhak memerintah di beberapa bagian daerah Kesultanan Palembang.

Perlu dijelaskan, bahwa pada malam hari 21 - 22 Juni 1818, putera ke II Sultan Badaruddin, menantu, dan dua orang pangeran telah menyerahkan 10 peti berisi uang yang disegel kepada Muntinghe, dan sementara disimpan di Kas Negara. Uang tersebut dimaksudkan untuk Sultan Muda Akhmad Najamuddin. Jadi kenyataannya, bantuan untuk Sultan Muda diambil dari khazanah keuangan Kesultanan sendiri, bukan dari kas Belanda.

Sultan Najamuddin minta waktu, tetapi Muntinghe berkeras tidak mau ditunda. Malahan mengancam bahwa meriam-meriam kapal perang "Eendracht" yang berlabuh di sungai Musi akan menghancurkan keraton. Kemudian terpaksa Sultan Najamuddin menyerah, setelah melihat banyak pengikutnya meninggalkan beliau. Kontrak itu ditanda-tangai pada dini hari tanggal 24 Juni 1818. Menurut Van der Kemp, Sultan Najamuddin pribadi tidak menaruh segel dan tanda tangan, melainkan dilakukan oleh Pangeran Adipati. Sesudah itu Sultan Makhmud Badaruddin segera pindah ke keraton, sedangkan Sultan Muda Najamuddin dengan hati marah pindah ke keraton muda.

Maka secara resminya, menurut catatan A. Hallema, di Palembang memerintah dua orang Sultan yaitu: Sultan Makhmud Badaruddin II, dan Sultan Muda Akhmad Najamuddin, dari tanggal 23 Juni 1818 samapi 15 November 1818 (kurang dari 5 bulan).

Pada hakekatnya perselisihan antara kedua Sultan masih berlangsung. Najamuddin mengeluh, karena daerah kekuasaannya lebih kecil dan tidak subur, dan pembagian pegawai tidak adil, dan tentang siapa yang harus dido'akan sebagai

raja Palembang oleh Penghulu Kepala pada tiap sembahyang Jum'at (17. p. 43). Jadi suasana di Palembang, antara bulan Juni-November 1818, belum mantap.

Di depan sudah disebutkan, bahwa Najamuddin mengirimkan surat kepada Raffles di Bengkulu. Setelah menerima surat itu Raffles segera mengirim ekspedisi dengan surat instruksi tertanggal Marlborough 20 Juni 1818, dipimpin oleh Kapten Salmon dan dibantu oleh Letnan Haslam (seorang Idian), dengan 200-250 tentara. Tugasnya, membuat perjanjian dengan Sultan Muda Najamuddin. Raffles memberikan pertimbangan hukum dan moral terhadap ekspedisinya itu sebagai berikut: "It was in consequence of this appeal to the justice, humanity and support of our government, that Captain Salmond was sent overland from Bencoolen". Ekspedisi ini bersifat rahasia, tetapi diketahui oleh pegawai Belanda di Lampung, bernama A. Roos, dan segera lapor kepada Residen Banten.

Pada malam hari tanggal 3-4 Juli 1818, pasukan Salmond tiba di Palembang. Dengan sembunyi-sembunyi 25 orang masuk ke istana Sultan Muda Najamuddin dan segera membuat perjanjian. Tetapi pada tanggal 4 Juli 1818 juga Muntinghe sudah mengetahuinya, segera memerintahkan pengepungan dan pada jam 5 pagi Salmond menyerah, lalu dibawa ke Batavia.

Selanjutnya Sultan Muda Najamuddin menutup diri dalam keraton, hanya ditemani Pangeran Adipati, dan Ngabeli Carik (sekretaris). Penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang Najamuddin, antara lain yang menjemput Kapten Salmond mulai dilakukan.

10. Sejak tanggal 15 November 1818, Sultan Makhmud Badaruddin memerintah sendirian. Sungguhpun demikian Sultan Makhmud Badaruddin tetap berpendirian untuk membebaskan Palembang dari kekuasaan Belanda. Karena itu beliau menyerang benteng Belanda. Akibatnya didatangkanlah ekspedisi di bawah pimpinan admiral-muda Wolterbeek pada tahun 1819 (20, p. 322). Pertahanan Palembang di sungai Musi kuat sekali. Ranjau-ranjau bertebaran dan di sepanjang sungaididirikan benteng-benteng. Armada Wolterbeek tidak dapat menerobos. Sebuah kapal Belanda mengalami 120 tembakan meriam. Ekspedisi itu sama sekali gagal (10, p. 385). Di kota Palembang sendiri, rumah Komisaris Belanda Herman Muntinghe dimusnahkan, sedangkan Muntinghe sedang ke Batavia. Demikian pula segala obyek yang bersifat Belanda ikut dimusnahkan, misalnya loji Belanda di sungai Aur, rumah sakit Belanda dan lain-lain (49).

Pemerintah Belanda mengirim kembali suatu ekspedisi yang lebih besar, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Baron De Kock pada tahun 1821. Pasukan Belanda berniat menyerang Palembang dari daratan, tetapi batal, karena wilayahnya penuh hutan dan rawa. Lagi pula tentara Belanda banyak yang terserang kolera. Tidak ada jalan lain bagi Belanda, kecuali menerobos pertahanan Palembang melalui sungai. Maka terjadilah pertempuran yang seru di sungai Musi. Persenjataan pasukan Palembang cukup modern, kebanyakan berasal dari pabrik senjata Inggris. Pada tanggal 13 Juni 1821 pasukan Belanda berhasil menawan



Sultan Badaruddin. Beliau dibawa ke Batavia dan kemudian diasingkan ke Ternate, hingga wafatnya.

Setahun sebelum ekspedisi De Kock, Sultan Mahmud Badaruddin menobatkan puteranya menjadi Sultan, dengan gelar Sultan Akhmad Najamuddin Pangeran Ratu. Beliau ikut dibuang ke Menado.

11. Pada tahun 1821 juga Belanda mengangkat putera Sultan Muda Akhmad Najamuddin menjadi Sultan, dengan gelar Sultan Akhmad Najamuddin Prabu Anom. Sedangkan ayahnya, diperbolehkan menggunakan gelar Susuhunan. (20, p. 322). Jadi yang memerintah antara 28 April 1821 sampai 18 Agustus 1823 bukanlah Sultan Akhmad Najamuddin Pangeran Ratu, melainkan Sultan Akhmad Najamuddin Prabu Anom.

Pada waktu itu Komisaris Belanda ialah Van Sevenhoven.

Pada tahun 1823 Pemerintah Belanda mendesak Sultan untuk menandatangani perjanjian baru yang merugikan Palembang, antara lain: (1) Sultan diberi gaji oleh Pemerintah Belanda; (2) pemerintah dan kehakiman sebagian besar dipegang langsung oleh Belanda.

Akibatnya, pada dinihari 22 November 1824 Sultan dan Susuhunan menyerang benteng Belanda. Serangan itu gagal dan Susuhunan Akhmad Najamuddin dapat ditawan Belanda, kemudian dibawa ke Batavia. Sultan Akhmad Najamuddin yang juga disebut Sultan Husin Diauddin, atau Ratu Hoestin Dlie Oedin, wafat di Batavia pada tanggal 21 Pebruari 1825 (7, p. 15). Menurut R.M. Husin wafatnya tanggal 24 Januari 1825.

Sedangkan Sultan Akhmad Najamuddin Prabu Anom terus melawan Belanda di daerah pegunungan. Barulah pada tanggal 15 Oktober 1825, Sultan dapat ditawan dan dibawa ke Batavia, kemudian diasingkan ke Banda, kemudian pindah ke Ambon, sehingga wafat pada 1844. (49). Tetapi menurut Lekkerkerker, Sultan Akhmad Najamuddin Prabu Anom dibawa ke Bangka (20, p. 323). Mungkin dari Bangka, terus dibawa ke Batavia.

Maka sejak tahun 1825, kesultanan Palembang dihapus dan wilayahnya langsung diperintah oleh seorang Residen Belanda dengan didampingi oleh suatu Dewan, yang diketuai oleh Pangetan Adiwijaya.

Pada tahun 1828, Pangeran Adiwijaya berselisih dengan Belanda. Beliau diturunkan dan diangkatlah Raden Abdul Azim sebagai Pangeran Perdana Menteri Kramajaya. (49). Sistem pemerintahan Perdana Mantri (Perdana Menteri) berakhir pada tahun 1849, karena mulai ada lagi kegiatan melawan Belanda (10, p. 385).

Pada 24 Agustus 1851, Pangeran Kramajaya ditahan dan diasingkan ke Purbolinggo (Banumas) karena melawan Belanda. Beliau wafat di sana pada tanggal 5 Mei 1862 dan jenazahnya dikuburkan di Palembang (49).

Di Palembang masih ada perlawanan, dan Letnan Kolonel De Brauw baru dapat memadamkannya pada tahun 1864. Belanda baru dapat menguasai keadaan

1864 -- 1866 (20. p. 323). Pada tahun 1880. terjadi lagi huru-hara, sehingga Belanda mengasingkan 41 orang priyayi (tokoh) Palembang ke daerah Banda, Ambon. Flores dan Ternate (49).

## **N. Sumatera Selatan dibawah Pemerintahan Hindia Belanda**

### **I. Pemerintahan**

Di zaman Hindia Belanda wilayah Sumatera Selatan merupakan satu keresidenan dibawah seorang Residen yang berkedudukan di Palembang. Keresidenan dibagi atas beberapa afdeling yang dikepalai Asisten Residen, dan yang terakhir ini dibagi lagi atas beberapa onderafdeling yang dikepalai kontrolir.

a. Daerah Palembang dan tanah datar di sekitarnya dikepalai oleh seorang Asisten Residen, dan dibagi atas: 1) Palembang (kota); 2) Banyuasin (Talangbetutu); 3) Komering Ilir (Kayuagung); 4) Ogan Ilir (Tanjungraya); 5) Musi Ilir (Sekayu); dan 6) Rawas (Surulangun).

b. Daerah Pegunungan Palembang, dikepalai Asisten Residen yang berkedudukan di Lahat dan dibagi menjadi: 1) Lematang Ilir (Muara Enim); 2) Lematang Hulu (Lahat); 3) Tanah Pasemah (Pagaralam); 4) Tebing tinggi (Tebingtinggi) dan 5) Musi Ulu (Muara Bliti).

c. Ogan dan Komering Ulu, dibawah seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Baturaja yang dibagi menjadi: 1) Komering Ulu (Martapura); 2) Ogan Ulu (Lubuk Batang); dan 3) Muara Dua (Muara Dua) (20, p. 341).

Baik Residen, maupun Asisten Residen dan Kontrolir semuanya bangsa Belanda.

Pemerintahan Belanda di Palembang merupakan sistem "Direct rule", yaitu suatu pemerintahan jajahan yang langsung dirasakan sampai ke daerah yang jauh dari Palembang kota. Sudah tentu terdapat perbedaan gradasi dan nuansa intensitas penjajahan itu. Pada abad 19 agak kurang terasa dari pada abad 20; dan di daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, agak kurang dari pada di pusatnya sendiri.

Kedaaan masyarakat di daerah-daerah dapat diketahui dari laporan perjalanan para pejabat pemerintahan. Pada abad 19 sebagian besar transportasi dilakukan lewat sungai dengan perahu pencalang atau bidar. Pencalang terbuat dari sebuah batang pohon, dan bidar terbuat dari 3 papan besar dari kayu klutong. Panjangnya 60 kaki dan lebarnya 7 kaki. Perjalanan inspeksi pada abad 19 sampai satu bulan lamanya, karena banyaknya desa di sepanjang sungai Musi, Rawas, Rupit, Lematang, dan lain-lain. Pelayaran dari Palembang sampai Tebingtinggi memakan waktu 18 hari.

Di sini ditulis beberapa uraian untuk memberi gambaran tentang keadaan kehidupan masyarakat di wilayah yang jauh dari ibukota dalam abad ke 19. Daerah Ogan dengan ibukota Baturaja terdiri dari 28 distrik atau marga.

Tiap marga dikepalai oleh seorang pasirah, dengan berbagai pangkat seperti : pangeran, jenang atau dipati. Marga terdiri atas banyak dusun. Dusun dikepalai oleh lurah.

Pada tahun 1842, Ogan dikepalai oleh Krango Sura Nandita Kling. Penduduknya 60.000 jiwa dari 10.000 somah. Tiap tahun daerah Ogan menghasilkan pajak bumi sebesar f. 60.000 (gulden). Di dusun Muara Peningbong terdapat pabrik Indigo.

Penempatan pabrik indigo, dalam rangka "Cultuurstelsel" di dusun Muara Peningbong gagal. Pabrik Indigo didirikan juga di dusun Sakatiga dan Tanjung Saga. Dusun Tanjung Balai adalah tempat kedudukan pasirah marga Pegagan. Marga Pegagan terdiri dari 14 dusun dengan 10.000 penduduk (1500 somah) dan membayar pajak bumi sebesar f. 15.500 setahun. Penduduknya menanam kapas dan buah-buahan serta membuat gula aren untuk pasaran Palembang. Pada tahun 1843 ada 5 pabrik indigo yang sedang dibangun. Pasirah Tanjung Balai ialah Jenang Wirajaya. Rupanya Jenang Wirajaya termasuk orang yang berpikiran maju dan modern pada zamannya, karena ia memelopori penyuntikan cacar dan menghapuskan uang jujur. Tindakan pasirah tersebut meningkatkan jumlah pernikahan, sehingga melipatgandakan jumlah penduduk. Tanjung Balai kelihatan teratur dan bersih. Rumah-rumah terbuat dari papan, di antaranya beratap genting.

Pada tahun 1842 Baturaja masih sebuah desa. Pada kesempatan yang besar, seperti kunjungan Tuan Besar (Residen) dari Palembang, maka diadakan pertemuan dan jamuan makan dengan pesirah-pesirah daerah Ogan, dan tukar-menukar hadiah, biasanya berupa : sarung, kebaya (baju), dan kupiah yang disulam benang emas. Di Baturaja terdapat tungku pembakaran kapur, dengan 80 pekerja setiap hari dan hasilnya dikirim ke Palembang. Sarang burung yang tiap tahun menghasilkan 20 kati merupakan milik Pesirah.

Pabrik indigo ada 9 buah, menunjukkan bahwa di Sumatera Selatan, rakyat juga dilibatkan dalam Cultuurstelsel seperti halnya di Jawa. Di daerah Baturaja juga ada bukti-bukti kebudayaan Hindu, dan bekas-bekasnya pada abad 19 sudah pula menarik perhatian orang (46. p. 1 24).

## **2. Keagamaan dan pendidikan**

Sebagian besar masyarakat Sumatera Selatan beragama Islam. Di sekitar tahun 1911 jumlah sekolah agama (pesantren) ada 82 buah dengan 1215 murid (20, p. 167).

Sejak tahun 1900 di Palembang, telah ada keinginan penduduk untuk memajukan pendidikan. Pada tahun 1912 sudah terdapat 74 sekolah swasta yang mendapat subsidi dan 14 yang tidak diberi subsidi. Jumlah muridnya 7800 (20, p. 181).

"Missionary Society of the Methodist Episcopal Church" (U.S.A.) juga mendirikan sekolah di Palembang dengan jumlah murid 150 anak pada tahun 1913 (20, p. 172). Penduduk Eropa yang makin banyak, menyebabkan didirikannya *Eropeesche Lagere School* (E.L.S.) untuk anak-anak Belanda. Untuk penduduk Cina didirikan pula "*Hollandsch-Chineesche School*" (20, p. 176, 177).

Sudah tentu organisasi-organisasi Islam juga mendirikan banyak sekolah, seperti Sekolah Muhammadiyah di Palembang. Jumlah Sekolah Dasar kelas II pada tahun 1916 ada 30 buah, dengan 4000 murid. H.I.S. juga ada di Palembang. Pada tahun 1911 didirikan kursus-kursus Guru Bantu. Untuk memajukan pendidikan pertanian di Muara Enim pada permulaan abad ke 20, ditempatkan *landbouwleeraar* dan *landbouw adviseur* (20, p. 187). Di Lahat di tempatkan dokter hewan, yang bertugas menyulahi bidang kehewanian.

### 3. Kehidupan ekonomi

Adanya pabrik-pabrik indigo menunjukkan Sumatera Selatan terlibat juga dalam "*Cultuurstelsel*" pada pertengahan pertama abad 19. Pada tahun 1910, diadakan penelitian tentang irigasi guna memenuhi kebutuhan beras. Tahun 1913 Palembang mendapat seorang insinyur untuk menggarap irigasi lebih lanjut (20, p. 228). Pada tahun 1913 juga Palembang sudah mempunyai Bank Rakyat dengan filial di desa-desa (20, p. 233). Kegiatan ekonomi diarahkan pada pertanian. Modal swasta asing juga ikut membuka perkebunan.

Daerah Rimau, sebuah pulau sungai di delta Musi, sudah menjadi daerah "*erfpacht*" bagi perkebunan kelapa, rotan dan karet. Pada tahun 1913 Palembang menghasilkan 217.290 kg gambir, dan 514.000 kg lada (20, p. 234, 238, 239).

Sejak dahulu penduduk sudah menanam kapas untuk keperluan sendiri. Sejak 1907, sudah ada usaha meningkatkan kultur kapas di kalangan penduduk, dengan percobaan tanaman kapas asli dan dari luar. Yang dari luar ternyata kurang sukses, yang asli boleh juga. Lagi pula ada hasil sampingan tanah yang menjadi subur karena dipupuk dan hasil padi di sela-sela kapas meningkat.

Di sekitar tahun 1912 penanaman kapas di Muara Enim digiatkan lagi. "*Nederlandsche Handelsmaatschappij*" pada tahun 1911-1912 banyak membantu pemerintah dalam penelitian kultur kapas. Dahulu para pedagang kapas di Palembang dipegang oleh saudagar Arab dan Cina, dan diekspor ke Singapura. Ekspor tahun 1913 8000.000 kg dengan harga f. 600.000 gulden. Benih-benih kapas yang terpilih juga dikirimkan ke luar Palembang (20, p. 240 - 241).

Daerah pegunungan Sumatera Selatan menghasilkan kopi, sedangkan tembakau banyak ditanam di Sumatera Selatan bagian selatan, dan terkenal dengan nama tembakau Ranau yang berat dan harum (20, p. 242 - 243).

Sumatera Selatan mengenal "*erfpacht percelen*". Pada tahun 1914 tercatat 40 buah banyaknya perkebunan kopi di Pagaram, dan kelapa di pulau Rimau (20, p. 247).

Sejak dahulu penduduk mencari getah dari hutan-hutan. Ketika pada permulaan abad ke 20 harga *kauçuk* meningkat, maka timbul pula demam mencari getah di kalangan penduduk. Pada tahun 1907, pemerintah sudah pula memperkenalkan cara-cara penanaman "ficus" dan "hevea". Banyak penduduk yang mula-mula menjadi pekerja perkebunan karet, seperti di Malaka, mendapat pengetahuan tentang kultur karet. Pada tahun 1913, penduduk menanam dua juta pohon (20, p. 263).

Sebagian besar tanah di perbatasan Sumatera Selatan disediakan khusus untuk pertambangan pemerintah (20, p. 273). Tambang yang terpenting ialah minyak bumi. "Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch Indie" yang didirikan pada tahun 1890, memperoleh konsesi. Pada tahun 1902 "Koninklijke" ini mengadakan persetujuan kerjasama dengan "Petroleum maatschappij Sumatra-Palembang" (istilah bursanya : Sumpal), yang sudah terlebih dahulu beroperasi di Bayung Lincir di daerah Kubu. Pada 1903 maskapai Rusia, "Societe Caspienne" menggabungkan diri sehingga merupakan organisasi besar, bernama "The Asiatic Petroleum Co. Ltd.", dan berkedudukan di London.

Pada tahun 1904 "Petroleum Maatschappij Muara Enim" bergabung pada "Koninklijke" dan beroperasi di Muara Plaju. Demikian pula "Petroleum Maatschappij Musi Ilir", yang beroperasi di Bagus Kuning. Sejak 1907 Plaju menjadi pusat pengilangan minyak.

Kemudian pada tahun 1907, dua raksasa perusahaan yang saling bersaing, yaitu "Koninklijke" dan "Nederlandsch-Indische Industrie-en Handels-maatschappij" di Amsterdam (yang merupakan cabang dari Shell Transport and Trading Company, Ltd. Di London), bergabung dan untuk di Hindia Belanda, mereka mendirikan 2 maatschappij bernama: (1) "Bataafsche Petroleum Maatschappij (B.P.M.)" di S'Gravenhage, dan (2) "Anglo-Saxon Petroleum Company Ltd." di London. Sejak itu yang beroperasi di Sumatera ialah B.P.M. (20 p. 276 - 277). Jadi "maatschappij-maatschappij" kecil seperti Muara Enim (didirikan tahun 1897), Sumatra-Palembang (1897), Musi Ilir (1901), "Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij" (1912), bekerja untuk B.P.M. Pada tahun 1913, Palembang menghasilkan 256.823 ton minyak kasar. Bandingkanlah dengan Aceh : 184.000 ton (20, p. 279).

Daerah Sumatera Selatan sejak dulu juga kaya dengan hasil hutan. Hingga tahun 1899, pemerintah dalam skala kecil sudah mengekspor kayu besi (20, p. 288). Sejak 1903 pemerintah mulai menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kehutanan. Pada tahun 1908, mulai didirikan Inspeksi kehutanan di Lahat, dan 4 tahun kemudian diangkatlah ahli-ahli kehutanan di Palembang dan Lahat.

Dunia per kayu mengalami kemajuan di sekitar tahun 1915. Banyak kayu diekspor ke Jawa untuk bantalan kereta api. Apalagi sesudah ada rencana

pembangunan jalan kereta api di Sumatera Selatan maka kayu Palembang makin laku (20, p. 289).

Lalu lintas di Sumatera Selatan pada permulaan abad ke 19 masih banyak menggunakan sungai. Kapal-kapal K.P.M. mengunjungi tempat-tempat yang terpencil seperti Muara Klingi di sungai Musi dan Muara Enim di sungai Lematang (20, p. 192).

Pada tahun 1912 jaringan kereta api mulai dibangun di Sumatera Selatan dan Lampung, yaitu dari Kertapati sampai Prabumulih (78 km), dan Kertapati-Panjang (463 km). Pada masa itu ditaksir akan menelan biaya 37,6 juta gulden atau ± f. 81.600,- per km. (20, p. 306).

Pada permulaan Nopember 1915 lin Palembang-Prabumulih mulai dipakai. Lin kereta api ini tidak didirikan sepanjang Ogan atau Lematang, karena pada musim hujan akan kebanjiran (20, p. 307).

Dinas kendaraan bermotor mulai dibuka pada tahun 1907 untuk keperluan mengangkut pos, penumpang, barang dan uang (20, p. 308).

Sementara itu pada tahun 1915, penduduk Sumatera Selatan berjumlah 739.150 jiwa, dengan perincian: Indonesia (asli) 725.000, Cina 10.000, Arab 2.500, Eropa 1.100 dan Asing Timur 550. Karena luasnya wilayah ada 84.629 km<sup>2</sup>, maka tiap km<sup>2</sup> didiami oleh 8,5 jiwa (20, p. 339). Di kota Palembang sendiri tercatat penduduknya sebanyak 60.000 jiwa, dan sudah mempunyai Dewan Kota (20, p. 342).

## **O. Pergerakan Nasional**

Permulaan abad ke XX merupakan abad baru bagi bangsa-bangsa Asia, karena pada masa itu lahirlah apa yang dinamakan "nasionalisme" (32, p. 73-79). Tentang istilah nasionalisme ini, Prof. Dr. Jan Romein berkata bahwa bagi bangsa Indonesia istilah itu bukanlah "pengertian baru" dan bahkan bagi seluruh Asia modern kata itu telah "menjadi air mandi" (32, p. 73). Selanjutnya dikatakan bahwa, selama lebih dari setengah abad gerakan kebangsaan itu menjadi impian dan tujuan beribu-ribu bangsa Indonesia.

Nasionalisme yang telah berakar dan mulai tumbuh pada awal abad XX itu telah merupakan suatu konsepsi ideologis (42, p. 35). Dilihat dari sudut sejarah, periode yang kemudian kita kenal dengan "Periode Pergerakan Nasional" (6, p. 1-3), merupakan ujud dari pada nasionalisme yang sebagai fenomena historis timbul sebagai jawaban terhadap kondisi-kondisi politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, yang terdapat di dalam masyarakat kolonial.

Dalam tingkat-tingkat pertama dalam pertumbuhannya, nasionalisme Indonesia dikenal sebagai nasionalisme yang sempit, bersifat lokal atau kedaerahan untuk kemudian tumbuh dan berkembang konsep yang lebih luas seperti yang dicetuskan dalam Sumpah Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober

1928. Nasionalisme Indonesia inilah yang dalam periode Pergerakan Nasional merupakan dasar yang mempersatukan semua bentuk perjuangan untuk mencapai kemerdekaan nasional.

Dalam menelaah pertumbuhan sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, pertama-tama kita harus mempelajari keadaan peri kehidupan sosial-ekonomi dan politik pada masa gerakan itu berlangsung. Tetapi pada umumnya, usaha memperoleh data tentang pertumbuhan gerakan nasional di Indonesia, kita mengalami kesulitan, karena banyak bahan yang lenyap selama Perang Dunia II dan revolusi fisik (38, p. 347 -- 348).

Maka dalam usaha kita mendapatkan bahan sekitar sejarah pergerakan di Propinsi Sumatera Selatan, pun dihadapkan pada kurangnya sumber-sumber.

### **1. Pertumbuhan kepertaian di daerah Sumatera Selatan**

Saat lahir organisasi pertama dalam bentuk modern pada tanggal 20 Mei 1908, yaitu Budi Utomo dapat dipandang sebagai "ibu pergerakan nasional" di Indonesia, karena, dalam tubuhnya telah ada "kecambah nasional yang pertama".

Gelora kebangunan rakyat Indonesia yang pada hakekatnya menentang pengaruh pejahahan baik di lapangan politik, ekonomi maupun sosial itu berpengaruh pula di dalam jiwa rakyat di daerah Sumatera Selatan. Tetapi, karena "statuten" Budi Utomo yang menyebutkan "kemajuan harmonis untuk nusa dan bangsa Jawa dan Madura" (36, p. 12), maka Budi Utomo tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan subur di daerah ini.

### **2. Serikat Islam**

Baru setelah Serikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Serikat Islam didirikan pada tahun 1912, maka dengan spontan rakyat Sumatera Selatan yang memegang teguh ajaran Islam ini menerima dan mengikuti garis-garis perjuangan Serikat Islam (16, p. 31). Ternyata, dalam waktu antara 1912-1916, berkat keuletan dan kegigihan para penganjurnya, maka Serikat Islam dapat menjalar ke kampung-kampung. Demikianlah, Serikat Islam yang merupakan suatu organisasi yang telah lama diinginkan oleh rakyat umum ini, maju dengan pesatnya (28, p. 4). Bahkan memiliki surat kabar "Teraju" yang diterbitkan pada 1919 dan dipimpin oleh T. Bratanata. (40) Tapi sayang, pada tahun 1920 surat kabar "Teraju" ini tidak dapat lagi melanjutkan aktivitasnya.

### **3. Partai Nasional Indonesia (P.N.I.)**

Organisasi kedua yang mendapat tempat di hati rakyat Sumatera Selatan adalah Partai Nasional Indonesia, yang mula-mula bernama Perserikatan Nasional Indonesia, dan didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung.

Berkat keuletan para pemimpinnya serta didasari oleh tujuan tercapainya "kemerdekaan Indonesia", maka dalam waktu yang relatif singkat P.N.I. menjadi partai yang pengaruhnya lebih besar dari organisasi-organisasi lain selama 1908 sampai 1942 (28, p. 58).

P.N.I. yang berpusat di Jawa itu, kemudian diperkenalkan oleh A.J. Patty ke daerah Sumatera Selatan sehingga pada tahun 1927 berdirilah cabangnya di kota Palembang, di bawah pimpinan Samidin.

Ternyata pertumbuhan P.N.I. di daerah inipun maju pesat. Hal ini menyebabkan pihak penjajah Belanda semakin cemas.

Pemimpin-pemimpin P.N.I. di daerah ini antara lain ialah A.J. Patty, Nungcik Ar., Samidin, M. Yahya, Udin Saleh, M. Yusuf Yasin, dan Topa. Mereka juga dibantu pula oleh Mr. A.A. Maramis dan Mr. Ali Budiarto.

Adapun pusat kegiatan partai ini ialah sebuah rumah agak tua di sebuah lorong bagian Ilir barat kota Palembang. Semboyan mereka yang cukup menggetarkan hati penjajah Belanda ialah "Basmi orang Eropa di Indonesia" (18, p. 181). Akibatnya lorong ini, dinamakan *Lorong Boedi*, singkatan dari "Basmi Orang Eropa di Indonesia".

Setelah pemimpin-pemimpin P.N.I. dipenjarakan, maka pemimpin partai dipegang oleh Mr. Sartono. Menurut anggapannya, ada kemungkinan P.N.I. akan dilarang oleh pemerintah. Karena itu para pengikutnya akan selalu terancam. Atas dasar pemikiran tersebut, maka pengurus besar P.N.I. membubarkan diri pada April 1931 (36, p. 62). Walaupun demikian P.N.I. tetap melanjutkan perjuangannya dengan nama yang lain, yaitu *Partai Indonesia* (Partindo) pada tahun 1931.

Adapun mereka yang tidak menyetujui pembubaran ini mendirikan partai yang lain, yaitu *Partai Nasional Indonesia* yang kemudian lebih dikenal dengan singkatan *P.N.I. Baru* atau *P.N.I. Pendidikan*. Pemimpinnya ialah Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir.

Perpecahan P.N.I. di Jawa mempengaruhi P.N.I. di Sumatera Selatan sehingga pemimpin-pemimpinnya terbagi dua. Pada tahun 1931, beberapa pemimpin P.N.I. seperti Nung Cik Ar., M. Yahya, Udin Saleh, Tohir, dan Hamid Kemang mendirikan Partindo cabang Sumatera Selatan, untuk meneruskan usaha-usaha yang telah digalang P.N.I.

Pemimpin-pemimpin Partindo mengadakan hubungan ke daerah-daerah, dan akhirnya meliputi sejumlah cabang, antara lain cabang Talang Balai (Ogan Ilir), Kayu Agung (Komerling Ilir), Jagalaño, Sungai Pinang, Sirah Pulau Padang, Baturaja, Bengkulu, Tanjung Karang, Belambangan Umpu, dan Simpang Gisting, dengan jumlah anggota kurang lebih 2500 orang.

Adapun perkembangan P.N.I. Pendidikan di Sumatera Selatan tidak banyak kita ketahui. Partai ini lebih banyak bergerak secara diam-diam dan terutama bergerak di lapangan pendidikan. Tokohnya adalah Samidin dan Hanung.



#### 4. P.S.I.I. (Partai Sarikat Islam Indonesia)

Partai Sarekat Islam Indonesia (P.S.I.I.) juga mempunyai pengaruh besar di Sumatera Selatan. Penggeraknya di daerah ini antara lain ialah M. Yahya dan Topa (bekas pemimpin P.N.I. dan karena sesuatu hal yang prinsipial, kemudian aktif bergerak dalam P.S.I.I.). Di samping itu terdapat beberapa tenaga lagi yang turut aktif memajukan partai, antara lain R. Bratanata, Ya'cub P.T.T. dan R. Hasan.

Di sekitar tahun 1913 P.S.I.I. memutuskan untuk menggerakkan kembali Central Committee Al-Islam yang semenjak tahun 1927 tidak menunjukkan kegiatannya. Akibatnya, P.S.I.I. lebih aktif kembali dalam percaturan politik. Kemudian sebagai realisasinya, P.S.I.I. sering mengadakan aksi massa, rapat propaganda, dan konggres. Antara lain : (1) Konggres pada akhir tahun 1913 yang antara lain membicarakan usaha-usaha untuk memajukan kesejahteraan kaum tani.

Kegiatan-kegiatan ini menyebabkan P.S.I.I. mendapat dukungan rakyat. Pada tahun 1933 jumlah anggotanya kurang lebih 30.000 orang.

Demikian pula halnya dengan keadaan di daerah Sumatera Selatan. Dalam waktu yang singkat, P.S.I.I. di daerah ini termasuk Jambi, mempunyai 500 orang. Ini menunjukkan bahwa kegiatan P.S.I.I. di luar Jawa, terutama sekali di Sumatera, hebat sekali, sehingga terjadi peristiwa-peristiwa seperti : "Peristiwa Rantau Alas" (tahun 1923), "Peristiwa Seminung Muara Dua" dan "Peristiwa Air Itam Musi Ilir".

Dalam lapangan pendidikan, P.S.I.I. lebih mengutamakan pendidikan agama dan pengetahuan umum. Sedangkan hasil perjuangan di lapangan ekonomi, antara lain mendirikan "Koperasi Karet" yang berpusat di Palembang, "Darul-mashrif" (sejenis bank), dan „Maizanatullah" (sejenis fonds) demi untuk kepentingan para anggotanya. Adapun dalam lapangan politik, P.S.I.I. mengadakan kongresnya yang ke 25 pada bulan Januari 1940 di Palembang (28, p. 121), dan merupakan konggres yang pertama kali diadakan di luar Jawa.

#### 5. Partai Indonesia Raya (Parindra)

Partai Indonesia Raya atau Parindra adalah penggabungan Budi Utomo dengan P.B.I. (Persatuan Bangsa Indonesia), yang terjadi pada tanggal 25 Desember 1935. Tujuan Parindra ialah "mencapai Indonesia mulia dan sempurna", atau dengan kata lain "mencapai Indonesia Raya" (6, p. 65). Ketua umumnya ialah Dr. Sutomo. Dalam perkembangannya, beberapa partai yang bersifat lokal meleburkan diri ke dalam Parindra, yaitu : Sarekat Selebes, Serikat Sumatra, Serikat Ambon, Perkumpulan Kaum Betawi dan Tirtayasa.

Taktik perjuangan Parindra ialah *kooperasi insidentil*. Artinya berkooperasi dengan pemerintah apabila dianggap menguntungkan, dan non-kooperasi apabila dianggap tidak menguntungkan pergerakan rakyat.

Berita tentang berdirinya Parindra, sampai pula di Sumatera Selatan. Maka pada tahun 1936 atas usaha Dr. Ma'as, Salam Astrakusumo, M.J. Su'ud, Basuni dan Saropi didirikanlah Parindra Cabang Sumatera Selatan. Dalam perkembangannya Parindra di daerah ini mempunyai kurang lebih 10 cabang dengan jumlah anggota di sekitar 2.100 orang. Yang paling besar ialah di Palembang dengan dipimpin oleh Dr. M. Isa, dengan jumlah anggota kurang lebih 300 orang.

## 6. Pertumbuhan pers pada zaman Pergerakan Nasional

Sebagaimana di daerah-daerah lain terutama di Jawa, persurat-kabaran dikenal pula di Sumatera Selatan. Tetapi corak, sifat dan tujuan persurat-kabaran pada masa itu belum dapat dikatakan sebagai membawa pendapat umum, pendorong masyarakat untuk berpikir kritis, ataupun sebagai bahan pendidikan (18, p. 169). Pemberitaan-pemberitaan politik belum dikenal.

Berita-berita pers pada masa itu, khususnya di Sumatera Selatan, umumnya hanya memuat berita-berita pasar, pencurian, pembunuhan, kecelakaan, perkelahian dan lain-lain yang merupakan kejadian sehari-hari, kritik-kritik, dan humor di dalam masyarakat. Akibatnya sering terjadi "polemik" antara surat-surat kabar.

Tetapi pada saat menghangatnya Pergerakan Nasional, maka surat kabar mulai berfungsi sebagai pendorong masyarakat untuk berpikir kritis, pembawa pendapat umum, dan bahan pendidikan.

Sebagai contoh, kami muatkan sebagian artikel yang berjudul "Berapa lama lagi Indonesia bisa merdeka" dalam suatu surat kabar.

"Begitu juga penduduknya atau yang kita maksudkan Indonesiers, suka kiranya menunjang sesuatu gerakan yang berhaluan nasional, supaya tanah Indonesia lekas lepasnya dari iketannya. Unjukkanlah sesuatu gerakan dengan buktinya jangan main meminta-minta saja, kalau kita meminta-minta saja, dengan tidak memberi buktinya, apakah Pemerintahan tadi bisa memberi kelonggaran kepada kita, dan disangkanya bahwa kita belum lagi matang" (47).

(Oleh: Kampret)

Pada masa Pergerakan Nasional, persurat-kabaran di Sumatera Selatan bermunculan. Di antaranya delapan buah dikemukakan di bawah ini.

a. *Harian Perca Selatan*, diterbitkan oleh Percetakan Meru (tahun 1926-1941), yang berturut-turut dipimpin oleh Mas Arga, Bratanata, Nungcik Ar. dan K.G.S. Mas'ud.

b. *Bintang Sumatra*, terbit tiap Senin dan Kamis oleh Percetakan Bintang Sumatra, Palembang, tahun 1927, di bawah pimpinan Tan Boen Kim. Surat Kabar ini berhaluan *membela kebenaran*.

c. *Boemi Melayu*, Penerbit Perusahaan Melayu di Palembang, tahun 1927. Direktornya Kemas Achmad; Hoofdredacteur: Aminoeddin Loebis dan Mas Arga. Tujuan surat kabar ini adalah membantu kemajuan umum penduduknya, terutama sekali mencari perhubungan rapat antara kita sama kita, serta mencoba menanam bibit patriotisme dan nasionalisme dengan tidak memandang partai atau agama.

d. *Berita* (Mingguan), Palembang, tahun 1, 1928.

e. *Terajoe* (Mingguan), Palembang, Vereeniging Serikat Islam Palembang, tahun 1 - 2, 1919-1920.

f. *Pelita*, di bawah pimpinan R. Achmad Azhari.

g. *Suluh Marga*, dipimpin oleh Arga.

h. *Suluh Pelajar*, kemudian berganti nama "Suluh Masyarakat", dipimpin oleh Tjik Wan Ar., dan K.M. Ze'n Mukti. Ini merupakan majalah yang khusus untuk murid-murid.



## B A B VI

### ZAMAN JEPANG DAN REVOLUSI FISIK

#### A. Zaman Jepang

##### 1. Pendahuluan

Menjelang tahun 1941 suasana politik di Asia Tenggara sudah bersuhu tinggi. Sewaktu-waktu Jepang diduga akan benar-benar mengangkat senjatanya.

Pada tanggal 8 Desember 1941 secara mendadak pasukan Jepang menyerang Pearl Harbour di Hawaii dan pecahlah perang di Pasifik. (9, p. 231) Hindia Belanda terseret dalam perang dan memihak Sekutu. Dalam waktu kurang lebih 3 bulan Jepang sudah berhasil merebut Malaya dan Birma dari tangan Inggris, mendesak Amerika Serikat keluar dari Filipina dan menduduki Indonesia.

Tentara Jepang juga menyerbu Sumatera Selatan. Lapangan minyak di Palembang jatuh tanpa pertempuran. Kota Palembang diduduki Jepang pada tanggal 14 Pebruari 1942 (6, p. 32).

##### 2. Pendudukan Jepang di Sumatera Selatan

Dengan datangnya Jepang di Indonesia, maka semua mass media dan partai politik dibubarkan, karena bertentangan dengan sistem Fasis Jepang. Sebagai gantinya mereka membentuk gerakan Tiga A yang disponsori oleh Jepang, yaitu Nippon cahaya Asia, pemimpin Asia dan pelindung Asia. Pada mulanya gerakan ini mendapat sambutan hangat tetapi ternyata kemudian mengecewakan rakyat Indonesia (4, p. 132).

Indonesia dibagi dalam tiga daerah kekuasaan pemerintahan militer.

- a. Sumatera, Malaya dan Kalimantan dikuasai angkatan laut dengan pusat "Shoonan" (Singapura).
- b. Jawa dan Madura dikuasai angkatan darat dengan pusat Jakarta.
- c. Indonesia Timur dikuasai angkatan laut dengan pusat Makasar (Ujung Pandang).

Sumatera diperintah oleh satu pimpinan militer, yang berpusat di Bukittinggi. Panglima Angkatan Darat Jepang merangkap pula sebagai kepala pemerintahan sipil disebut "Saiko Shikikan" yang tunduk kepada atasannya di Shoonan"

(Singapura). (4, p. 198). Palembang dijadikan pusat kekuatan militer di Sumatera Selatan (6, p. 160).

Jepang tidak merubah sistim pemerintahan, tetapi mengganti istilah pemerintahan. Palembang dijadikan satu keresidenan atau "Syu", dan residennya disebut "Syu-Co-Kan". Kabupaten atau "Bun-syu" dikepalai oleh "Gun-CO".

Perubahan lain ialah pemisahan kekuasaan kepolisian dengan pamongpraja. Kepala polisi keresidenan dinamai "Kei-Mu-Bu-Co", dan Kepala Polisi Kabupaten "Kei-Sat-Su-Co", dipegang oleh Jepang. Di samping itu diadakan polisi bersenjata yang dinamakan "To-Ku-Bet-Su".

Jepang juga menyederhanakan lembaga peradilan yang beraneka ragam di zaman Hindia Belanda dulu (4, p. 199).

Dalam bidang politik sesudah Gerakan Tiga A mengalami kegagalan, maka Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) di bawah empat serangkai Sukarno-Hatta-Dewantara-Mas Mansur. Di samping pemimpin yang bekerja sama dengan Jepang, ada pula yang tidak mau bekerja sama, yang bergerak di bawah tanah di bawah pimpinan Amir Syarifuddin dan Syahrir. Pada hakekatnya kedua golongan tersebut mempunyai satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka.

Untuk memperkuat kedudukannya, Jepang membentuk pasukan-pasukan pembantu yang terdiri dari bangsa Indonesia, yaitu "Heiho" (pembantu perajurit), "Keibodan" (penjaga keamanan kampung/desa), "Seinendan" (barisan pemuda), Peta (Pembela Tanah Air) dan "Romusha" (pekerja suka rela) (4, p. 132).

Gerakan di bawah tanah di Palembang sering mengadakan perlawanan rahasia kepada Jepang, bahkan di daerah Air Hitam (Sekayu) timbul perlawanan terbuka, serdadu-serdadu Jepang dalam perahu ditembak oleh rakyat. Tetapi peluru-peluru rakyat itu tidak mengenai sasarannya, dan mengakibatkan Najamuddin (kemudian menjadi Bupati Palembang) terkena tembakan.

Akibat peristiwa ini Jepang bertindak kejam. Para pemimpin walaupun yang bekerja sama sekalipun mulai ditangkap. Dr. A.K. Gani ditangkap dan disiksa oleh Jepang. Inspektur Polisi R.M. Mutoro dibunuh. Pemimpin-pemimpin P.S.I.I. (A.S. Matcik dan Hamzah) dan para pemimpin lainnya di daerah Sekayu dipenjarakan, dan di antaranya ada yang meninggal di penjara. Pemimpin-pemimpin lain seperti Abdulrozak, Dr. Safaat, dan Basir mengalami nasib yang sama. Dalam pada itu kecurigaan Jepang tentang adanya kegiatan Sekutu mulai timbul. Sebanyak lebih kurang 70 orang Ambon dibunuh secara kejam. (6, p. 32).

Di samping itu tenaga "romusha" yang menurut teorinya adalah pekerja sukarela, tetapi dalam prakteknya adalah pekerja paksa. Jumlah mereka makin ditingkatkan, dan banyak yang meninggal. Tindakan Jepang di Palembang ini sangat kejam dibandingkan dengan di Bengkulu dan Lampung, karena kedudukannya sebagai penghasil minyak bumi, dan barang-barang tambang lain yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup Jepang di Indonesia. Sebagian besar tenta-

ra Jepang di Sumatera Selatan yang berjumlah ± 15.000 orang, ditempat di kere-sidenan Palembang.

### 3. Saat-saat terakhir pendudukan Jepang

Kekalahan Jepang di perairan Australia timur-laut pada akhir tahun 1942 merupakan titik balik dalam perang Pasifik (9, p. 240). Taktik loncat kodok dari pulau-ke pulau, yang dilancarkan oleh pihak Sekutu di bawah pimpinan Jenderal Mc Arthur semakin memukul mundur Jepang. Jepang tidak meragukan lagi akan kekalahannya. "Move" yang ditempuh oleh Jepang melalui Paus di Roma untuk berdamai pada 1944 ditolak oleh pihak Sekutu.

Di Indonesia Jepang makin bertindak kejam. Semua organisasi yang mereka bentuk dicurigai lebih-lebih sesudah pemberontakan PETA di Blitar pada tahun 1944 di bawah pimpinan opsir PETA Supriyadi. Para pemimpin Indonesia yang mereka curigai, telah dimasukkan ke dalam daftar hitam untuk ditangkap, kemudian diasingkan dan akan dibunuh seperti di Kalimantan. Begitupun para pemimpin di Palembang yang dicurigai. Sementara itu Jepang mengharapkan pemuda-pemuda yang telah dididik mereka akan membantu mempertahankan Indonesia dari serangan Sekutu. Mereka menggunakan tipu muslihat melalui pamong-praja dan pamong-marga untuk menggerakkan semangat rakyat melawan Sekutu. Barisan "Heiho" dan "Gyu Gun" dikerahkan untuk maksud itu, dengan janji akan diberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari (6, p. 32).

Kemudian dibentuk semacam "Hokokai" di daerah Palembang, setelah ada persetujuan dengan pihak Jepang. Assari dan Nungcik Ar. disertai untuk menyusun nya. Pada akhir kekuasaannya di Sumatera, Jepang membentuk suatu badan Perwakilan Rakyat Sumatera, atau "Sumatra-Cuo-Sangi-In" yang berkedudukan di Bukittinggi, dengan anggota-anggota yang mewakili tiap keresidenan, dan diketuai oleh Moh. Syafei. Dewan ini pernah bersidang satu kali (4, p. 132).

Di samping Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (P.P.K.I.) yang disetujui Jepang pembentukannya di Jakarta, di Palembang juga dibentuk P.P.K.I. daerah. Pada tanggal 7 Agustus 1945 P.P.K.I. Palembang mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Dr. A.K. Gani dan H. Cikwan dari "Tyuo Sangi Kai", Dr. M. Isa, Nungcik A.R., Abdul Rozak dan Ir. Ibrahim dari dewan harian "Syu Sangi Kai". Pada tanggal 8 Agustus 1945 di Palembang, Jepang mengumumkan bahwa soal kemerdekaan terakhir akan diserahkan kepada P.P.K.I. Pusat untuk membentuk persiapan menyambut Indonesia merdeka (6, p. 32).

Pada tanggal 8 Agustus 1945 Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, dan pada tanggal itu juga Rusia memaklumkan perang kepada Jepang. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Secara formil berakhirilah kekuasaan Jepang di Indonesia. Tetapi mereka masih terikat untuk menjaga keamanan di Indonesia sampai tentara Sekutu menginjakkan kakinya di Indonesia.

## **B. Revolusi fisik**

### **1. Pendahuluan**

Hanya sedikit pemimpin-pemimpin kita yang benar-benar mengetahui kekosongan kekuasaan di Indonesia antara tanggal 15 Agustus dan 17 Agustus 1945 yaitu tanggal menyerahnya Jepang dan terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia. Sementara itu pemimpin-pemimpin di Palembang terus mengikuti kejadian perang Pasifik, penyerbuan Uni Soviet ke Jepang, pendaratan tentara Sekutu pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Sekutu, dan penyerahan Jepang kepada Sekutu (6, p. 34).

Setelah semua persiapan matang, maka para pemimpin Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berita itu tidak tersebar luas karena Jepang menghalang-halangi penyebar-luasannya. Tetapi melalui saluran tidak resmi, berita itu sampai juga ke daerah-daerah di Indonesia, walaupun terlambat. Di Palembang berita proklamasi baru diketahui setelah pemuda Maelan tiba dari Jakarta, meskipun persoalannya belum begitu jelas.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 Jepang mengundang pemimpin-pemimpin di Palembang, dalam mana dinyatakan bahwa "Tenno Heika" telah memerintahkan supaya perang dihentikan. Soal kemerdekaan tidak disinggung-singgung oleh Jepang, dan mereka meminta kepada para pemimpin yang hadir (Abdul Rozak, Nungcik A.R., Raden Hanan, Assari, Ir. Ibrahim, Bay Salim, H. Cikwan, Salam Paiman, Parmono, dan Yap Tiang Ho) untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab tentang keamanan. Kemudian diadakan pertemuan tersendiri antara para pemimpin dengan Jepang yang diketuai oleh Nungcik A.R., dan dalam pertemuan itu dibuatlah pernyataan-pernyataan.

a. Soal keamanan fisik kita ikut bertanggung jawab sepenuhnya; diminta jaminan kepada Jepang untuk keselamatan pemimpin, dan rakyat tidak boleh bertindak sendiri.

b. Soal merdeka harus menjadi soal kita sendiri dan Jepang tak boleh menghalangi.

Selesai pertemuan diumumkan kepada rakyat tentang penyerahan Jepang itu. Malamnya diadakan pertemuan di rumah Dr. A.K. Gani, dan dalam pertemuan itu diputuskan untuk mengoper kekuasaan dalam pemerintahan.

Tanggal 23 Agustus pagi, atas inisiatif Dr. A.K. Gani diadakan pertemuan untuk membentuk pemerintahan Indonesia. Dalam pertemuan itu direncanakan untuk menunjuk Dr. A.K. Gani dan Abdul Rozak sebagai Kepala dan Wakil Kepala pemerintahan Indonesia di keresidenan Palembang; Kepolisian kepada Assari dan Mursodo; Kemakmuran kepada Ir. Ibrahim; Penerangan kepada Nungcik A.R.; Minyak dan Pertambangan kepada Dr. M. Isa; Pemerintahan Umum kepada R.Z. Fanani dan H. Cikwan; Perhubungan, Pos dan Telegraf kepada R.M. Utoyo; Wali Kota Palembang kepada Raden Hanan. (6, p. 36).

Kemudian datanglah wakil P.P.K.I. dari Sumatera, yaitu Dr. Amir, Mr. Teuku Hasan, dan Mr. Abbas ke Palembang. Mereka mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Sumatera Selatan (Dr. A.K. Gani, Dr. M. Isa Assari, Ir. Ibrahim, Mursodo, R.Z. Fanani, Abdul Rozak dan Nungcik A.R.). Dalam pertemuan itu tokoh-tokoh P.P.K.I. tersebut menerangkan bahwa Proklamasi Indonesia tak ada sangkut-paut dengan Jepang. Sesudah pertemuan itu para pemimpin di Palembang melakukan pengumuman tentang proklamasi, Undang-Undang Dasar, dan rencana Komite Nasional. Di samping itu Jepang sibuk membakar surat-surat penting, dan membagikan makanan kepada rakyat.

Berbagai kesulitan berhasil diatasi oleh pemerintah Indonesia, sehingga rakyat mendapatkan pedoman yang tepat. Pada tanggal 3 September 1945 ditetapkan pendirian "Komite Nasional Indonesia" daerah Palembang dengan anggota sebanyak 40 orang. Ketua Dr. M. Isa dan Wakilnya A.S. Mattjik dengan anggota Nungcik A.R., Hamid Husin dan Agus Rahman dan lain-lain.

Komite Nasional Indonesia seperti halnya di Jakarta (Pusat) berfungsi sebagai D.P.R. sebelum terbentuknya D.P.R. hasil pemilihan rakyat.

Kemudian pada tanggal 5 September 1945 diterima telegram dari pemerintah pusat yang menetapkan semua pegawai pemerintah ditetapkan menjadi pegawai pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 6 September seluruh pegawai mengadakan apel dalam suatu upacara dan dimaklumkanlah keresidenan Palembang dibawah pimpinan Dr. A.K. Gani.

Pada tanggal 13 September 1945 diterima telegram resmi dari pemerintah pusat mengenai susunan dewan menteri dan para gubernur. Mr. Teuku Hasan diangkat sebagai Gubernur Sumatera. Kemudian pada tanggal 25 September 1945 diterima lagi telegram dari Presiden yang menetapkan Dr. A.K. Gani sebagai Residen R.I. yang pertama untuk Keresidenan Palembang (6, p. 40).

## **2. Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (T.K.R.)**

Dalam bulan-bulan pertama proklamasi kemerdekaan, pemerintah R.I. mendasarkan kekuatannya pada bidang diplomasi, tidak pada bidang fisik militer. Itulah sebabnya maka tidak segera dibentuk tentara sebagai tulang punggung negara yang baru diproklamasikan kemerdekaannya itu. Yang disusun ialah Badan Keamanan Rakyat (B.K.R.) sebagai bahagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (B.P.K.K.P.). B.K.R. merupakan wadah yang menampung bekas anggota Peta, Gyu Gun dan Heiho yang dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945. (9, p. 242).

Kemudian atas pendapat beberapa golongan dan tokoh-tokoh terkemuka, di antaranya bekas Mayor K.N.I.L. Oerip Soemohardjo, maka pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan dekrit pemerintah R.I., B.K.R. diubah namanya menjadi "Tentara Keamanan Rakyat" (T.K.R.). T.K.R. inilah sebagai angkatan perang Re-



publik Indonesia yang kemudian menghadapi tentara Jepang yang digunakan oleh Sekutu, dan kemudian tentara N.I.C.A.

Keadaan di daerah-daerah umumnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Begitupun di keresidenan Palembang, atas inisiatif Hasan Kasim, Bambang Utojo, M. Dani dan M. Arif dibentuk P.K.R. (Penjaga Keamanan Rakyat) dengan menghimpun tenaga-tenaga Gyu-Gun dan Heiho, dan mereka ini berusaha mencari senjata.

Selain dari pada itu pada tanggal 4 September 1945 diresmikanlah berdirinya "Badan Penjaga Keamanan Rakyat" (B.P.K.R.), mulai dari keresidenan, kabupaten dan kawedanaan. Sebagai pemimpin juga ditunjuk Hasan Kasim (bekas opsir Gyu-Gun).

Di samping P.K.R., B.P.K.R., berdiri pula barisan-barisan pemuda dan laskar-laskar rakyat serta badan-badan perjuangan lainnya. untuk berjuang menegakkan negara Republik Indonesia.

Setelah dekrit pemerintah R.I. 5 Oktober 1945, P.K.R. dan B.P.K.R. diroboh namanya menjadi T.K.R. keresidenan Palembang. Pada bulan Oktober itu P.K.R. Palembang telah mulai secara terorganisir merebut senjata dari Jepang. Pertempuran terjadi di mana-mana antara lain di Pendopo, Sekayu, Mangunjaya dan di kota Palembang sendiri.

Pada tanggal 9 Oktober 1945 terjadi pertempuran hebat antara T.K.R. dan Jepang. Banyak senjata Jepang yang dapat direbut. Sebagian serdadu Jepang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia.

Pada tanggal 12 Oktober Residen Palembang mengumumkan kepada rakyat dan pemuda untuk mendaftarkan diri menjadi Tentara Keamanan Rakyat (T.K.R.).

Tentara Jepang mulai bersiap-siap menyerahkan kekuasaannya kepada tentara Sekutu, dan mereka secara resmi mengembalikan Heiho dan Gyu-Gun ke daerahnya masing-masing, walaupun sebagian besar dari mereka ini telah masuk menjadi T.K.R. Begitupun Jepang membebaskan romusa, sedangkan tawanan-tawanan kulit putih telah dipersiapkan untuk dikembalikan kepada Sekutu.

### **3. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan**

Setelah aparat pemerintah terbentuk di keresidenan Palembang, maka pada tanggal 4 Oktober 1945 di kantor residen Palembang, Dr. A.K. Gani mengangakat sumpah sebagai residen R.I. pertama dan berjanji akan memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dengan segala pengorbanan. Kantor residen yang sebelumnya masih dikuasai oleh Jepang, pada tanggal 8 Oktober 1945 dengan resmi diserahkan kepada residen R.I.

Sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah dapat mengambil tindakan yang dipandang perlu tanpa menunggu instruksi dari pusat. Di Palembang para pemimpin telah sepakat untuk sedapat-

dapatnya menghindarkan pertempuran secara besar-besaran. Karena negara dan pemerintah R.I. baru berdiri, maka koordinasi belum dapat dibentuk secara sempurna.

Walaupun T.K.R. telah resmi berdiri, tetapi terdapat juga badan-badan perjuangan lainnya, yang dalam perjuangan bahu-membahu dengan T.K.R. Atas inisiatif Nungcik A.R., Maelan dan kawan-kawan dibentuklah Barisan Pemuda Republik Indonesia (.B.P.R.I.). Badan ini kemudian merembes ke daerah pedalaman Palembang, Bengkulu dan Jambi.

Di samping itu berdiri pula badan perjuangan lainnya seperti "Burung Hantu" dibawah Cik Ani dan Ismail, Sarekat Buruh Harian Indonesia (S.B.H.I.) dipimpin oleh Mangun, Hizbullah dipimpin oleh Kunciir cs., Mujahidin Indonesia di bawah Husni Muin, dan K.H. Zeni Ali.

Pada tanggal 12 Oktober 1945 tentara Sekutu mendarat di Palembang di bawah pimpinan Letnan Kolonel Carmichel. Atas idzin residen Palembang tentara Sekutu ditampung di Talang Semut.

Tanggal 19 Nopember 1945 T.K.R. diakui sah oleh pucuk pimpinan tentara Sekutu sebagai tentara pemerintahan R.I. Kemudian pada tanggal 13 Maret 1946 serombongan tentara Sekutu mendarat lagi di Palembang, sehingga besarnya menjadi dua batalion di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Hutkhinson. Antara Sekutu dan pemerintah R.I. kemudian dicapai kata sepakat tentang garis demarkasi.

Di samping itu pada tanggal 5 Januari 1946 T.K.R. dilebur menjadi Tentara Republik Indonesia (.R.I.) di bawah pimpinan Kolonel Hasan Kasim. Lasykar lasykar masih tetap berdiri di daerah Palembang, dan mereka tetap membantu T.R.I. dalam perjuangan. Jumlah mereka ± 12.000 orang (6, p. 40):

Dalam perkembangan selanjutnya insiden dengan pihak Sekutu tidak dapat dihindarkan, karena Sekutu sering melanggar garis demarkasi. Kemudian terjadi pertempuran tiga hari (29 Maret - 31 Maret 1946) di kota Palembang. Pertempuran ini segera dapat dihentikan, dengan korban di kedua belah pihak. Tanggal 2 April 1946 diadakan perundingan antara residen Palembang dengan Brigjen Hutkhinson.

Pada tanggal 29 Oktober 1946 datang rombongan tentara Sekutu yang terdiri dari tentara Belanda yang berjumlah 1.300 orang. Semenjak kedatangan tentara Belanda ini keadaan kota Palembang semakin genting. Pada 14 November 1946 Belanda dari kapal perangnya mengadakan tembakan. Kemudian dilanjutkan dengan pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang (30 Desember 1946 sampai 3 Januari 1947).

Dalam pertempuran ini berjatuhlah korban di kedua belah pihak. Pada tanggal 3 Januari 1947 dan 8 Maret 1947 diadakan perundingan antara Residen Palembang dan pihak Belanda, dan pada 8 Maret R.I. diwakili oleh Letkol Bambang Utoyo, Mayor A.L.R.I. Soringsong dan Kapten Nusyirwan dari tentara

Penghubung. Belanda diwakili oleh Letkol. Van Woel, Letkol. Van Bock dan Letnan Ter Zee K.L. Dane.

Dengan adanya perjanjian ini keadaan kembali menjadi aman, dan bersamaan dengan itu perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Januari 1947. Keadaan aman ini tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 26 Juni 1947 pihak Belanda merampas kapal R.I., dan tentaranya banyak dikirim ke front. Pada tanggal 11 Juli 1947 tentara Belanda melewati garis demarkasi dan mulai mengadakan tembakan kepada pihak R.I. Pihak R.I. segera mengadakan pembalasan, dan tentara kita segera dikirim ke front, dan kota Palembang menjadi sepi, dan Belanda mulai mempersiapkan diri di garis demarkasi. Pada tanggal 27 Juli 1947 Belanda melancarkan Agresi I terhadap Indonesia, begitupun di daerah Palembang tentara Belanda mendapat perlawanan hebat dari T.N.I.

Pertempuran hebat terjadi di Simpang dan Muara Batur. Front Muara Batur ini dipimpin oleh Kapten Robani dan front Simpang dipimpin oleh Mayor Dani dan Mayor Iskandar. Dalam pertempuran ini Mayor Iskandar gugur di dusun Kamal Indralaya.

T.N.I. kemudian mengadakan serangan hebat ke Muara Enim, sehingga enam orang Belanda tewas. Pada tanggal 29 Juli 1947 di Muara Lawai (dekat Muara Enim) dibentuk Barisan Pemberontak Rakyat (B.P.R.) yang tugas utamanya memutuskan hubungan lalu lintas dan barisan ini bekerja sama dengan T.N.I. Dalam Agresi I, Baturaja dan Martapura berhasil diduduki oleh Belanda. Hampir 2/3 daerah keresidenan Palembang diduduki oleh Belanda. Pusat komando Sumatera Selatan dipindahkan dari Lahat ke Lubuk Linggau.

Serangan Belanda yang terkenal dengan Agresi I, mendapat tantangan dari dunia internasional. Atas permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (P.B.B.) maka segera diadakan "cease fire". (8, p. 158).

Daerah R.I. makin lama makin sempit dan dalam suasana gencatan senjata dibentuk panitia dari T.N.I. yang diketuai oleh Kolonel Dr. Ibnu Soetowo, untuk menyelenggarakan peleburan lasykar-lasykar. Peleburan ini bertujuan untuk menyempurnakan T.N.I. baik personil maupun struktural.

Di samping itu daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda terus mendapat serangan dari gerilya kita, dan dalam penyerangan ke Sirah Pulau Padang, sejumlah 21 orang Belanda tewas dan begitupun penyerangan ke Kayuangung (6, p. 48).

#### **4. Perkembangan politik dan pemerintahan**

Di samping perjuangan fisik militer menghadapi tentara Jepang-Sekutu dan Belanda, Republik Indonesia ke dalam menghadapi pula persoalan politik dan pemerintahan. Persoalan politik di daerah-daerah dipengaruhi oleh situasi politik di pusat pemerintahan, dan kadang-kadang juga faktor daerah masing-masing.

Keresidenan Palembang sebagai pusat Sumatera Selatan mempunyai persoalan yang berbeda dengan Bengkulu dan Lampung. Tentara Sekutu lebih mementingkan daerah Palembang, karena selain sebagai pusat Sumatera Selatan juga mempunyai arti militer dan ekonomi yang penting.

Walaupun telah ada T.K.R., organisasi pemuda di Palembang juga memegang peranan. Misalnya pada tanggal 15 Oktober 1948 gudang senjata polisi mereka serbu, beratus-ratus senjata diambil dan dibagi-bagikan. Opsir Sekutu Mayor Ferdice minta jaminan kepada Residen Palembang. Dengan datangnya bantuan dari Jawa semangat para pemuda makin berkobar-kobar, sehingga suasana kota makin panas. Suasana panas ini makin meningkat dengan mulai meluasnya pengaruh Pangeran Emil Moh. Noor dari Lampung ke Palembang. Untuk menenangkan suasana maka Dr. A.K. Gani diangkat menjadi koordinator T.R.I. seluruh Sumatera oleh pemerintah pusat (6, p. 48). Dan sebagai pimpinan T.R.I. diangkat Jenderal Mayor Suharjo Harjowardojo. Di Sumatera Selatan terdapat 2 divisi, masing-masing berpusat di Palembang dan di Lahat, di bawah pimpinan Kolonel Bambang Utoyo dan Kolonel Simbolon. Daerahnya juga meliputi Jambi. Dr. A.K. Gani kemudian diangkat menjadi Gubernur Muda Sumatera Selatan dan Koordinator T.R.I. Sumatera. Sebagai Residen baru diangkat Dr. Isa pada Mei 1946 (3, p. 51).

Di bawah pimpinan residen Dr. M. Isa kota Palembang semakin panas, dan pada tanggal 1 Januari 1947 seorang pimpinan T.R.I. ditembak oleh Belanda di muka rumah sakit Caritas. Pertempuran kembali berkobar, dan kemudian atas permintaan Kapten Mollinger, Dr. M. Isa dan Bambang Utoyo berhasil menghentikan pertempuran. Kemudian pada tanggal 6 Januari 1947 Dr. A.K. Gani datang ke Palembang.

K.N.I. Palembang kemudian menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (D.P.R.). Atas inisiatif Dr. M. Isa dan Nungcik A.R., badan ini menyelenggarakan kongres rakyat Palembang, dan terbentuklah D.P.R. Palembang dengan 60 orang anggota. Pada bulan Januari 1946 diadakan sidang pertama di bawah pimpinan Dr. A.K. Gani. Pada tanggal 12 April 1946 dibentuk D.P.R. Propinsi Sumatera yang anggotanya mewakili 10 Keresidenan di Sumatera. Palembang mempunyai 15 orang wakil.

Sesudah persetujuan Renville, daerah R.I. di Sumatera Selatan tinggal kawedanan Pagar Alam, kabupaten Musi Ulu Rawas, kawedanan Musi Ilir, sebagian daerah Komering Hulu dan kawedanan Muara Dua (6, p. 65).

Kemudian Belanda membentuk Negara Sumatera Selatan dengan A. Malik sebagai Wali Negeranya. Di samping itu daerah R.I. tetap berdiri. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 10 tahun 1948 (April) dibentuklah Propinsi Sumatera Selatan dengan Dr. M. Isa sebagai Gubernur yang berkedudukan di Curug (Juni 1948). Gubernur pertama ini dilantik oleh Presiden pada tanggal 7 Juni 1948, kemudian pada 20 Oktober 1948 D.P.R. Sumatera Selatan juga dilantik.

Badan-badan perjuangan di Sumatera Selatan mulai berdiri pada saat-saat permulaan proklamasi kemerdekaan. Dalam perkembangan selanjutnya lasy-

kar-lasykar ini dipengaruhi oleh aliran-aliran politik, dan malahan sebagian menjadi alat partai politik.

Pemuda-pemuda yang tergabung dalam A.P.I. dan B.P.R.I. menjelma menjelma menjadi Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) dengan tokohnya Maelan, Amir, Zailan, Uteh Yahya, Azhari dan Junus Syamsudin. Kemudian berdiri Napindo dengan tokoh-tokohnya Mancik Rasyad, Abikasan dan Ibrahim Kasim. Mereka ini kemudian bergabung dengan P.N.I. Sebahagian dari pemuka A.P.I. kemudian mendirikan Hizbullah, dan mereka berhasil menyusun kekuatan sebanyak 1 divisi dengan Hamzah Kuncit sebagai komandannya. Sabilillah menyusun pula laskarnya, dan untuk Sumatera Selatan di bawah pimpinan H. Murzal Aziz, A. Mancik Rozak dan Abu Haryin.

Di samping itu partai-partai politik juga mengembangkan sayapnya, dan mendapat sokongan dari lasykar-lasykar. Tokoh-tokoh P.N.I. Sumatera Selatan antara lain adalah Dr. A.K. Gani, Dr. M. Isa, R.M. Utoyo, R. Sugiharto dan Yosodipuro. Tokoh-tokoh P.S.I. antaranya adalah H. Cikwan, R.Z. Fanani, K. Masykur Azhari.

Kalangan turunan Arab juga aktif dalam lapangan politik. Tokohnya adalah Abdullah Gathmyr yang kemudian menjadi tokoh N.U. Masyumi juga berdiri, bahkan pada tahun 1946 mengadakan konperensi I dengan dihadiri wakil-wakil dari Palembang dan daerah-daerah lain sebagai peninjau. Pada tahun 1947 berdiri P.K.I. dengan pimpinan Hutagalung dan R. Achmad. Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.) juga berdiri dengan pimpinan Basir, A.S. Sumadi dan Mansyur Junus.

Tetapi untunglah pertentangan politik yang terjadi di pusat tidak sampai merembes ke Sumatera Selatan, dan waktu pusat pemerintahan dipindahkan ke pedalaman, unsur-unsur lasykar beserta pimpinan partai politiknya juga ikut pindah dan Muara Enim dijadikan sebagai pusatnya (6, p. 48).

Selama revolusi fisik ini peranan mass media (pers) sangat besar dalam perjuangan dan ikut membantu memberi penerangan kepada rakyat tentang perjuangan. Pada tanggal 5 September 1945 "Palembang Shimbun" dijadikan "Sumatra Baru" sebagai suara Republik Indonesia merdeka dengan Nungcik A.R. sebagai pemimpin. Pada tanggal 1 Juni 1946 Sumatra Baru diganti namanya menjadi "Obor Rakyat". Pertengahan tahun 1946 terbit surat kabar baru dengan nama "Fikiran Rakyat" dipimpin oleh Samidin. Kedua surat kabar itu merupakan alat perjuangan, di samping kantor berita Antara cabang Palembang yang dipimpin oleh Maelan.

Dalam pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, harian "Fikiran Rakyat" rusak dan tidak dapat terbit, sedang harian "Obor Rakyat" dengan susah payah dapat terbit kembali di bawah pimpinan M.Y. Syamsuddin. Di daerah pedalaman terbit pula berkala "Darah Rakyat".

Kantor berita Antara juga ikut dipindahkan ke Lahat dengan alat-alatnya. Harian "Obor Rakyat" beserta pimpinannya di Palembang diambil alih, pimpinannya ditangkap, kemudian diizinkan kembali dengan nama "Harian Umum", dan kemudian dirubah lagi menjadi "Suara Rakyat" (6, p. 54).

Kemudian harian "Fikiran Rakyat" terbit lagi dengan pimpinan R.A. Hakky, Syamsuddin dan Rahman Thalib.

Oleh golongan pendukung "Negara Sumatera Selatan" diterbitkan harian "Perca Selatan" yang dipimpin oleh R. Usman, Azhari dan Ki Agus Mas'ud (6, p. 55).

## 5. Agresi Belanda yang kedua

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan Agresi II. Mereka berhasil menduduki kota-kota di Indonesia, termasuk ibukota R.I. Yogyakarta, serta menawan Presiden dan Wakil Presiden dan beberapa Menteri. Walaupun begitu kendali pemerintahan tetap dilanjutkan di Sumatera oleh Menteri Kemakmuran, atas mandat yang diberikan oleh pemerintah R.I. di Yogyakarta.

Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara membentuk "Pemerintah Darurat Republik Indonesia" (P.D.R.I.) yang berpusat di Payakumbuh, Sumatera Barat. Di Jawa berdiri pula Komisariat P.D.R.I. dengan anggota antara lain Mr. Susanto Tirtoprojo (3, p. 55).

Daerah Sumatera Selatan dinyatakan sebagai daerah Militer Istimewa. Kekuasaan Sipil dan Militer dipusatkan kepada Gubernur Militer Dr. A.K. Gani dengan ketetapan Panglima T.T. Sumatera. Pengangkatan ini disyahkan oleh P.D.R.I. dan berlaku sampai pemulihan/pengakuan kedaulatan.

Untuk melancarkan tugas ke bawah, maka diangkat pula Bupati Militer, Wedana Militer dan Camat Militer sebagai wali negeri perang. Keputusan ini dikeluarkan untuk efisiensi, supaya perintah-perintah dapat dilaksanakan dengan cepat.

Gubernur M. Isa dan Panglima T.T. Sumatera Selatan Kolonel Simbolon tetap menjalankan tugasnya membantu Gubernur Militer. Mereka pindah ke pedalaman dan berkumpul di Tandai (6, p. 60).

Kemudian Staff T.T. Sumatera Selatan dipindahkan ke Muara Aman. Pada tanggal 7 Januari 1949 Belanda menduduki Curug, dan kemudian Kepahyang. Pada tanggal 30 Januari 1949 menduduki Muara Dua, yang dikelung dari 3 jurusan, yaitu: (1) dari Martapura melalui Sumpang, front ini dipimpin oleh Mayor Dani dan Kapten Riyacudu; (2) dari Baturaja ke Mahangin, front ini dipimpin oleh Patih Nawawi; dan (3) dari Baturaja ke Ogan Hulu.

Sebelum pasukan kita mundur, Muara Dua berhasil dibumi-hanguskan. Setelah Muara Dua diduduki Belanda selama 1 minggu maka T.N.I. mengadakan serangan besar-besaran, dan banyak tentara Belanda yang gugur. Seminggu

kemudian diadakan lagi serangan kedua kalinya yang dipimpin oleh Mayor Dani.

Di samping operasi fisik, Belanda juga menjalankan taktik pecah belah. Belanda mendirikan negara Sumatera Selatan dengan Abdul Malik sebagai Wali Negara. Negara itu meliputi sebagian keresidenan Palembang, daerah Jambi, Bengkulu dan Lampung dijadikan daerah berdiri sendiri dalam negara Sumatera Selatan. Belanda tidak berhasil membujuk rakyat untuk bergabung dengan mereka walaupun dijanjikan kesenangan dan kemewahan. Sementara itu pemerintah R.I. tetap berdiri, dan memerintahkan untuk menembak mati orang-orang yang memihak Belanda, baik warga negara asli, Cina maupun Arab (6, p. 60).

Pada tanggal 15 April 1949 Muara Aman diduduki oleh Belanda, dan Staf T.T. Sumatera Selatan pindah ke dusun Tabamarga dan akhirnya ke Lobong Tandai. Pada tanggal 20 April 1949 tambang emas Lobong Tandai dibom oleh pesawat Belanda, yang sebelumnya telah dibumi-hanguskan oleh pihak Republik. Tempat ini diserang oleh Belanda karena di sinilah markas besar Gubernur Militer R.I. Tambang ini mengalami kerusakan berat.

Di Jawa pertempuran juga berlangsung sengit, bahkan pada tanggal 1 Maret 1949, pasukan kita di bawah Letnan Kolonel Soeharto (sekarang Presiden R.I.) berhasil menduduki ibukota R.I. Yogyakarta selama 6 jam. Dunia terkejut melihat kemampuan tentara kita walaupun dengan persenjataan kurang. Peristiwa ini menaikkan nama Indonesia di luar negeri.

Kemudian berdasarkan resolusi Dewan Keamanan P.B.B. tanggal 28 Januari 1949 Belanda mengadakan perundingan pendahuluan pada tanggal 7 Mei 1949 (Roem-Royen Statement). Pemerintah R.I. dikembalikan ke Yogyakarta. Dan pada tanggal 13 Juli 1949 P.D.R.I. menyerahkan mandat dalam sidang pleno Kabinet R.I. (10, p. 39).

Di daerah-daerah kontak tidak segera dapat diadakan dengan Belanda, karena kurangnya komunikasi. Di Sumatera Selatan perundingan pertama antara Gubernur Militer R.I. Dr. A.K. Gani dengan Belanda baru diadakan pada tanggal 15 Agustus 1949 di Muara Aman (6, p. 270).

Sebagai tindak lanjut dari "Roem-Royen Statement", maka pada tanggal 27 Desember 1949 diadakanlah Konperensi Meja Bundar (K.M.B.) di Den Haag, Negeri Belanda. Dalam perundingan itu Indonesia dipimpin oleh Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri Drs. Moh. Hatta.

Setelah K.M.B. tentara kita kembali lagi ke kota-kota. Sesudah pemulihan/pengakuan kedaulatan Dr. M. Isa memangku jabatan Gubernur kembali di Sumatera Selatan (17 Februari 1950). Kemudian terjadi timbang terima antara Wali Negara Sumatera Selatan, Abdul Malik, kepada Gubernur Sumatera Selatan Dr. M. Isa (18 Maret 1950) dan sejak itu pusat propinsi Sumatera Selatan dipindahkan ke Palembang (6, p. 74).

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BAB IV.

1. Amerta, *Warna Warta Kepurbakalaan No. 3*, Dinas Purbakala R.I., 1955.
2. Burger, D.H., *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Jilid I*, disadur dan disesuaikan dengan pandangan nasional oleh Mr. Prajudi, P.N. Pradnyaparamita, Jakarta, 1962.
3. Bleber, Ales, *Pantulan zaman bahari Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1963.
4. Batergurg, *Hindoe Oudheden in de Pasemah Hoogvlakte, Palembang, Batu Gajah en Beelden naar opname van Controleur Baterburg. Ie Jaargang*, Jawa, No. 1, 1921, Driemaandelijksche Tijdschrift Orgaan van het Java instituut.
5. Casparis, J.G., de, *Perkembangan Pengetahuan Sejarah Indonesia Lama*, Penerbit IKIP, Malang, 1967.
6. Groeneveldt, W.P., *Historical Notes on Indonesia and Malaya compiled from Chinese Sources*, Bhartara, 1960.
7. Hoop, A.N.J. Th. van der, *Megalithic Remains in South Sumatra*, 1932.
8. Krom, N.J., *De Hindoe Javaansche Tijd*, terjemahan Arif Effendi, P.T. Pembangunan, Jakarta, 1956.
9. Krom, N.J., *De Naam Sumatra*, B.K.I. 100, 1941
10. Heekeren, H.R. van, *The Bronze Iron Age of Indonesia*, B.K.I. XXII.
11. Heekeren, H.R. van, *Penghidupan dalam Zaman Prasejarah di Indonesia*, terjemahan Moh. Amir Sutaarga, Lembaga Penerbitan IKIP Malang, 1969.
12. Heekeren, H.O. van, *Indonesië*, Tweemaandelijks Tijdschrift Gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied November 1951, Vijfde Jaargang Nr. 3.
13. Kempers, A.J. Bernet, *The Bronzes of Nalanda and Hindu-Javanese Art*, Penerbit IKIP Malang.
14. Leur, J.C. van, *Indonesian Trade and Society*, Sumur Bandung, Bandung, 1960.
15. Made Sutaba, *Kebudayaan tingkat Epi Palaeolitik di Indonesia*, P.B.S., 1972.
16. Made Sutayasa, *Neolitik Indonesia*, P.B.S., 1972.
17. Moens, J.L., *Criwijaya, Java en Kataha*, T.B.G. 77, 1937.



18. Mees, Ny. Fruin, *Babad Tanah Jawi, Jilid I*, terjemahan R.M.Ng. Poerbatjaraka, B.P., 1921.
19. Nilakanta Sastri, K.A., *Criwijaya, Chandrabhanu and Vira-Pandya*, T.B.G. 77, 1937.
20. Pitono, *Sejarah Indonesia Lama*, Penerbitan IKIP Malang, 1961.
21. Pitono, *Pararaton*, Bharatara, Jakarta, 1965.
22. Pitono, *Adityawarman, sebuah studi tentang Tokoh Nasional dari abad XIV*, Bharatara, Jakarta, 1965.
23. Poerbatjaraka, *Riwayat Indonesia I*, Jakarta, 1952.
24. Rawlinson, H.G., *India, A Short Cultural History*, terjemahan Ismaoen, Universitas Pejajaran, Bandung, 1959.
25. Soejono, R.P., *The Distribution of Types of Bronze Axes in Indonesia*, Prasaran pada Seminar The '28 th Internasional Congress of Orientalis, Cambera, Australia.
26. Soekmono, *Tentang lokalisasi Sriwijaya*, Konggres Ilmu Pengetahuan Nasional I, 1958.
27. Soekmono, *Sejarah Kebudayaan Indonesia, Jilid I*, Penerbit Nasional Trikarya, Jakarta, 1958.
28. Soekmono, *Prasaran dalam Seminar Sejarah Nasional I*, Yogyakarta, 1957.
29. Schnitger, F.M., *Oudheidkundige Vondsten in Palembang*, Bijlage C met 13 platen en schetsen, Leiden, E.J. Brill, 1936.
30. Slamet Moeljono, *Menuju Puncak Kemegahan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1865.
31. Stutterheim, W.F., *Studies In Indonesian Archeology*, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 1956.
32. Tasrif, S., *Merina*, Balai Buku Media, Jakarta, 1966.
33. Vlekke, B.H.M., *Nusantara, A History of the East Indian Archipelago*, Harvard University Press, Cambridge.
34. Wirjosoeparto, Soetjipto, *Bunga rampai Sejarah Budaya Indonesia*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1964.
35. Yamin, Muhammad, *Tatanegara Majapahit*, I, II, Jakarta.
36. Yamin, Muhammad, *Sejarah Asia Tenggara*, P.T.P.G. Bandung.
37. Yayasan Basis, *Guide Book Kota Palembang*, Yayasan Basis, Palembang.
38. ———, *Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indië*, K.B.G., 1938.
39. ———, *Oudheidkundige Dienst In Nederlandsch-Indië*, K.B.G., 1939.

## BAB V.

1. Budenani dan Djavid, *Tambo Kerajaan Sriwijaya, sampai berakhirnya Kesultanan Palembang*, Cetakan II, Penerbit Terate, Bandung, 1961.
2. Cense, A.A., *Eenige aanteekeningen over Makassaars-Boeginese geschiedschrijving*, Bijdrage Taal, Land en Volk, deel 107, Aflevering 1, 1951.
3. Court, M.H., *Exposition of the relations of the British Government with the Sultan and State of Palembang*, 1821.

4. Crawford, *Indische Archipel*, deel II.
5. Crawford, *Indische Archipel*, deel III.
6. Dekker, Drs. I. Nyoman, *Sejarah Indonesia Baru, 1900 – 1945. (Pergerakan Nasional)*, Penerbitan IKIP Malang, 1969.
7. Dooren, J.B.J. van, *Twee episodes uit de geschiedenis van Palembangs hoofdstad of de wreedaardigheid van de Sultan Makhmud Badr Oedin*, s'Gravenhage, 1853.
8. Eysinga, Roorda van, *Excerpt*, Tijdschrift van Nederlandsch-Indië, Jaargang VI, deel III.
9. Faille, P. de Roo de la, *Uit de Palembangschen sultanstijd*, Feestbundel Koninklijke Bataviaasch Genootschap, deel II, 1929.
10. Graaf, Dr. H.J. de, *Geschiedenis van Indonesië*, N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, s'Gravenhage-Bandung, 1949.
11. Haak, Drs. A, *Daendels*.
12. Hallema, A., *Aanvullingen en verbeteringen bij mijn opstel van Palembang en de Compagnie*, De Indische Gids, Jaargang 58, deel II, Aflevering VII–XII, 1936.
13. Horsfield, Thomas, *Verslag aangaande het eiland Bangka* (lanjutan). Tijdschrift van Nederlandsch-Indië, Jaargang 1850, deel I, Aflevering 1–6, 1850.
14. Huysers, *Oost-Indische etablissementen*.
15. Kampen, van, *Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa*, deel III.
16. Kansil S.H. Drs. CST dan Julianto SA, Drs., *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1969.
17. Kemp. P.H. van der, *Palembang en Bangka in 1816–1820*, Hoofdstuk IV Commissaris R. Coop a Goen: Juni 1817 – April 1818 en het bestuurhoofd Mr. A.P. Smissaert.
18. Kempen, *Propinsi Sumatera Selatan*. Kempen R.I., Jakarta, 1953.
19. Kielstra, *Ondergang van het Palembangse Rijk*, Gids, deel II, 1892.
20. Lekkerkerker, G., *Land en Volk van Sumatra*, N.V. Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill, Leiden, 1916.
21. Mackay, D.J., *De handhaving van het Europeesch gezag en de hervorming van het Regtswezen*.
22. Mansur, Achmad, *Benarkah 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional*, Seminar Sejarah Nasional II, 26–29 Agustus 1970, Yogyakarta.
23. Marsden, *History of Sumatra*.
24. Muljono, Prof. Dr. Slamet, *Menuju Puncak Kemegahan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1965.
25. Pane, Sanusi, *Sejarah Indonesia II*, Balai Pustaka, Jakarta, 1956.
26. Pegeaud, Dr. Th., *Alexander, Sakender en Senapati*, Djawa, deel 7.
27. Polak, Drs. J.B.A.F. Mayor, *Serba-serbi Masa Daendels (1808–1811)*, Penelitian Sejarah, No. 1, Tahun III, Maret 1962.
28. Pringgodigdo, SH, A.K., *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Penerbit Dian Rakyat, cetakan VII, Jakarta, 1970.

29. Probonegoro, K.R.T.A.A., *Lampung, Tanah lan Tiyangipun*, Balai Pustaka, Batavia C., 1940.
30. Radermacher, *Beschrijving van het eiland Sumatra*, Verhandelingen van het Bataviaasche Genootschap, deel III.
31. Raffles, Thomas Stamford, *History of Java*, Edition III.
32. Romein, Prof. Dr. Jan, *Aera Eropa, Peradaban Eropa sebagai penyimpangan dari pola umum*, terjemahan Noer Tugiman, Penerbit Ganaco N.V., Bandung-Amasterdam, 1956.
33. Sevenhoven, J.L. van, *Lukisan tentang ibikota Palembang*, terjemahan Prof. Sugarda Purbakawatja, Bharatara, Jakarta, 1971.
34. Soekanto, Dr., *Sekitar Yogyakarta 1755-1825, Perjanjian Gijanti - Perang Dipanegara*, Jakarta, Amsterdam.
35. Sturler, W.L. De, *Bijdrage tot de kennis en rigtige beoordeling van de zedelijken, Maatschappelijken en Staatkundigen toestand van het Palembangschen gebied*, 1853.
36. Tirtoprodjo SH, Drs. Soesanto, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, P.T. Pembangunan, cetakan IV, Jakarta, 1970.
37. Valentijn, *Beschrijving van Sumatra*.
38. Vlekke, B.H.M., *Nusantara a History of Indonesia*, Wholly Revised Edition, Les Edition A Manteau S.A., Bruxelles, Fifth Impression, 1961.
39. Widjajakoesoema, Dr. R.D. Asikin sareng Saleh, R. Mohammad. *Rutjatan Sedjarah Sumedang*, cetakan II, Penerbit Firma Dana Guru, 1960.
40. -----, *Bintang Sumatra*, Kamis, 13, Oktober 1927, No. 2, Tahun I.
41. -----, *Bintang Sumatra*, Selasa, 25 Oktober 1927, No. 5, Tahun I.
42. -----, *Buku Induk Kebudayaan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1972.
43. -----, *Dagboek van der Capellen*, Tijdschrift van Naderlandsch-Indië, Jaargang XVII, deel II, 1855.
44. -----, *Gids*, deel II, 1849.
45. -----, *Guide Book Kota Palembang*, Penerbit Yayasan Basis, Palembang, 1971.
46. -----, *Herinneringen aan een reisje in de residentie Palembang*, Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, Jaargang V, deel II, 1843.
47. -----, *Heynis' rapport, dd 18 Desember 1816*, Tijdschrift van Nederlandsh-Indië, 1816.
48. -----, *Indonesië*, Jaargang VI, No. 5, Maret 1953, s'Gravenhage.
49. -----, *Keterangan dari R.M. Husin bin R.D.M. Hasir*, 28 Ilir Jalan Pabian 258, Palembang, 2 Oktober 1972.
50. -----, *Keterangan dari R. Sam M. Diah*, Asuransi Ramayana Sumatra Selatan, Palembang, 29 September 1972.
51. -----, *Korte schets van het eiland Bangka*, Tijdschrift van Nederlandsch-Indië, Jaargang VIII, deel 4.
52. -----, *Legenden van Djambi*, Tijdschrift van Nederlandsch-Indië, Jaargang VIII, deel 4.

53. -----, *Schetsen van Palembang*, Tijdschrift van Nederlandsch-Indië, deel III, Jaargang 8, 1846.
54. -----, *Sejarah Melayu*, Terbitan Singapura.
55. -----, Tijdschrift van Nederlandsch-Indië, deel VIII.
56. -----, Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, deel 63.
57. -----, Tijdschrift van Nederlandsch-Indië, Jaargang III. deel III, 1846.
58. -----, *Tjaraka* (Mingguan), No. 218, Jakarta.

## BAB VI.

1. Abdul Gani, Roeslan, *Penggunaan Ilmu Sejarah*, Badan Penerbit Prapanca, Jakarta.
2. Abdul Gani, Roeslan, *Asia Tenggara dalam sinar apinya Hari Pahlawan Indonesia*, P.N. Penerbit Pradnyaparamita, Jakarta, 1964.
3. -----, *Almanak Umum Nasional 1955*, Penerbit Endang, Jakarta.
4. -----, *Almanak Sumatra 1969*, Pantra '69, Komando Antar Daerah Sumatra, Medan.
5. Kahin, Mc. Turnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, New York.
6. Kementerian Penerangan, *Propinsi Sumatra Selatan*, Siliwangi, Jakarta.
7. Kemeaterian Penerangan, *Sedikit mengungkap tirai perjanjian perdamaian Jepang*.
8. Kusuma Sumantri, Iwa, *Sejarah Revolusi Indonesia*, Masa Revolusi Bersenjata, Grafika, Jakarta.
9. Mansoer M.D. cs., *Sejarah Minangkabau*, Bharatara, Jakarta, 1970.
10. Mardanas cs., *Sejarah Tugu Peringatan Proklamasi*, Pemerintah D.K.I., Jakarta, 1972.
11. Pringgodigdo, A.K., *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakyat, Jakarta.

**BAGIAN KETIGA**

**ASPEK ANTROPOLOGI**

## B A B VII

### PEMERINTAHAN DAN SUSUNAN MASYARAKAT

Daerah Sumatera Selatan dahulu jauh lebih luas dari Propinsi Sumatera Selatan sekarang, karena seperti yang terlihat dalam "Adatrechtbundels" Sumatera Selatan meliputi propinsi-propinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Jambi.

Dengan demikian tidaklah mengherankan adanya titik-titik persamaan adat-istiadat penduduk pada keempat propinsi tersebut.

#### A. Undang-Undang Simbur Cahaya

*Undang-Undang Simbur Cahaya* adalah sebuah undang-undang adat asli yang tertulis dan sudah terpakai sejak abad ke tujuh belas di daerah yang dahulu disebut Kerajaan Palembang Darussalam (4, p. 3). Dalam mengadili dan menyelesaikan persengketaan adat, *Undang-Undang Simbur Cahaya* ini sering dipergunakan sebagai sumber atau pedoman.

Undang-Undang Simbur Cahaya yang asli ditulis dengan aksara Arab Kuno (Arab gundul) pada zaman *Ratu Senuhun* yang sering pula disebut *Ratu Senuhun Seding* yang memerintah kerajaan Palembang bersama suaminya *Seding Kenayan* atau *Pangeran Seding Kenayan* (1630-1642) (4, p. 3; 2, p. 57).

Pada zaman pemerintahan Sultan Abdurrahman (1651-1696), karena wilayah kerajaan Palembang meluas ke pulau Bangka, Belitung dan lain-lain, maka Undang-Undang Simbur Cahaya mengalami perubahan dan perluasan pula. Selain hukum Islam, ditambahkan pula undang-undang wilayah yang disebut *Undang-Undang Sindang Marlaka* (4, p. 3).

Baik daerah Palembang maupun daerah Bengkulu masing-masing mempunyai *Undang-Undang Simbur Cahayanya* sendiri yang disebut *Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang* dan *Undang-Undang Simbur Cahaya Bengkulu*. Intisari kedua Undang-undang Simbur Cahaya ini banyak yang sama atau hampir sama.

Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang mengalami perubahan terakhir pada pertemuan kepala-kepala negeri atau marga di Palembang dari tanggal 2 sampai 6 September 1927.

Sampai sekarang para Pamong dusun dan marga, para *Kerio*, *Proatin*, *Pesirah* atau *Depati* di sekitar Palembang dan di daerah pedalaman Palembang ma-

sih mempergunakannya. Sejak zaman revolusi banyak juga yang tidak begitu mematumhinya lagi, karena menurut anggapan mereka banyak isinya yang tidak sesuai lagi dengan keadaan alam merdeka. Namun di sana-sini hukum adat ini masih ada juga manfaat serta kemurniaannya, terutama bagi orang tua-tua yang masih berpegang teguh pada adatnya.

## B. Sistim pemerintahan

Sebelum menguraikan sistim pemerintahan, perlu kiranya disinggung bahwa di daerah Sumatera Selatan terdapat banyak suku dan tiap suku terbagi pula atas beberapa marga dan marga-marga itu sering pula memakai nama suku. Antara lain ialah: Marga Buay Pemaca, Marga Ranau, Marga Kenali, Marga Bunga Mayang Marga Kiti, Marga Lengkayap, Marga Buay Rawan, Marga Jejawi, Marga Sirah ' Pulau, Marga Musi Banyuasin, Marga Keman, Marga Ranjung Sejaro, Marga Madang Suku II, Marga Sumbai Besar Suku Alam Dua, Marga Sumbai Mangku Anom Suku Muara Siban, Marga Semidang Suku Plang Kenidai, dan Marga Sumbai Besar Suku Lubuk Buntak (4, p. 3).

Tiap-tiap marga itu mempunyai adat-istiadat, tata hukum adat, dan cara hidup yang pada umumnya memang sama atau hampir sama. Uraian mendetail untuk setiap marga tentu tidak mungkin. Namun untuk memberi gambaran yang jelas, sesuatu marga akan diambil sebagai contoh.

Yang dimaksud dengan sistim pemerintahan di sini, ialah *sistim pemerintahan tradisional* dalam lingkungan kecamatan. Di Sumatera Selatan pada umumnya dikenal sistim pemerintahan *Kepasirahan* atau *Pemerintahan Marga*.

Pemerintahan di daerah pedalaman mulai diatur waktu perdagangan di kerajaan Palembang melalui sungai mulai ramai. Kota-kota dan dusun-dusun yang ramai terletak di tepi sungai itu.

Sungai Musi merupakan sebuah sungai yang besar dan panjang dengan delapan cabang-cabangnya seperti Ogan, Komering, dan Keramasan. Mungkin inilah sebabnya daerah yang berbandarkan Palembang itu sering disebut *Batang Hari Sembilan*. Sampai sekarangpun masih dikenal sajak yang mengingatkan kita pada persatuan daerah kesembilan *aliran banyu*, yang berbunyi :

"Bulak sembilan suak sungai  
Palembang jua cucuran banyu",

yang berarti :

"Walau sembilan cabang sungai  
Airnya mengalir melalui Palembang juga"

Di dalam *Aturan Marga*, antara lain ditetapkan, bahwa dalam suatu marga ditetapkan seorang Pasirah yang bertanggung jawab atas segala hal marganya dan Pasirah itu dipilih oleh rakyat dan diangkat serta digelar oleh pemerintah. (4, p. 15, 16). Pada marga lain, Pasirah disebut Depati.

Pada zaman kerajaan Palembang, *Depati* atau *Pasirah* yang berjasa dianugerahi pangkat atau gelar *Pangeran* oleh Sultan. Gelar Pangeran biasanya hanya diberikan kepada putera mahkota Sultan Palembang. Dengan demikian maka pada waktu itu ada dua macam gelar Pangeran, yakni: putera Mahkota Sultan Palembang, dan Pasirah atau Depati yang berjasa.

Jika Pasirah berhalangan, maka tugasnya dilaksanakan oleh *Pembarap* atau Penggawa Marga Selain dari pada itu di tempat kedudukan Pasirah diadakan *Kemit Marga* yang terdiri dari enam sampai dua puluh orang. Tugasnya ialah menunggu gardu, mengantar pos, memandu perahu-perahu pemerintahan, menjadi pesuruh Pasirah, memanggil Proatin dan pegawai-pegawainya, dan memelihara balairung, pangkalan paseban dan gardu. Kemit Marga bergiliran setiap lima hari, dan boleh diganti dengan uang asal telah disetujui oleh pemerintah.

Dalam "*Aturan Kaum*", antara lain dinyatakan bahwa di tempat kedudukan Pasirah ditetapkan seorang Penghulu yang menguasai seluk-beluk hukum Islam. Beliau menguasai kaum dalam marganya dan dibantu oleh seorang atau dua *Khatib* atau *Mudin*. Anggota kaum yang lain ialah Bilal dan Marbut atau Merbut. (4, p. 29, 30).

Adapun tugas kaum yang dikepalai Panghulu itu, ialah memberi laporan tahunan tentang perkawinan, perceraian, kelahiran, dan kematian kepada Pasirah.

Selanjutnya kaum juga bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat dan fitrah, mengurus mayat dan penguburannya, memelihara mesjid dan yatim piatu.

Setiap marga yang dikepalai oleh Pasirah itu terdiri dari beberapa *dusun*.

Dalam *Aturan Dusun dan berladang* antara lain ditetapkan bahwa setiap dusun dikepalai oleh seorang *Proatin* atau *Kerio*. Dan di bawah Proatin itu ditetapkan beberapa Penggawa sesuai dengan besar dusun (4, p. 21).

Kepala dusun dan penggawanya hendaklah memakai kopiah penjalin yang terbuat dari rotan halus dengan warna emas perada. Proatin sama dengan Lurah di Jawa.

Dusun yang kebetulan merupakan tempat kedudukan Pasirah dikepalai oleh Proatin yang dalam hal ini disebut *Pembarap* dengan tugas sebagaimana tersebut di depan.

Di tiap-tiap dusun diadakan *Kemit Dusun* yang terdiri dari dua sampai delapan orang. Tugasnya ialah menjaga dusun, menunggu gardu dan balairung, berkeliling menjaga api dan pencuri, serta memelihara gardu dan balairung. Yang tidak mematuhi tugasnya (putus gawe), dikenakan hukuman di muka rapat marga.

Adapun dusun yang dikepalai oleh Proatin itu terdiri dari beberapa *kampung*. Setiap kampung dikepalai oleh seorang *Penggawa*.

Proatin juga dibantu oleh kaum, yang terdiri dari *Khatib*, Bilal, dan Merbut.



Penghulu dan Khatib dibebaskan dari Gawe Raja, Gawe Marga, dan Gawe Dusun.

Beberapa marga dikepalai oleh seorang *Rangga* atau *Tumenggung* yang biasanya keluarga Sultan Palembang sendiri. Dahulu Tumenggung menguasai beberapa suku. Suku-suku itu biasanya dikepalai oleh seorang *pyang* yang terkenal sakti dan gagah-perkasa. Sampai sekarangpun masih ada suku-suku yang dikepalai oleh seorang *pyang*. Misalnya *pyang Bekal* mengepalai suku Pegagan dan *pyang Rambang* mengepalai suku Rambang (4, p. 4).

Di daerah pedalaman Palembang terdapat banyak suku, misalnya suku Semendawai, Gumai dan Bermani. Tiap-tiap suku itu biasanya terbagi pula atas beberapa marga, sedang marga-marga sering juga memakai nama suku.

### 1. Cara memilih pamong

Memang sejak dahulu, semua pamong seperti Punggawa, Proatin atau Kerio, dan Pasirah ditetapkan melalui pemilihan.

a. Rakyat atau warga atau *matagawe* sebuah kampung memilih kepalanya yaitu Punggawa di bawah pengawasan seorang Pasirah.

Pasirah tiada boleh mengangkat atau memberhentikan Punggawa, Proatin dan pegawainya. Jika akan diganti karena meninggal atau lain-lain hal, maka orang banyak menunjuk seseorang yang patut akan jadi gantinya dan Pasirah membawa orang itu kepada yang berkuasa supaya dipilih dan diangkat (4, p. 15).

b. Rakyat atau warga sebuah dusun memilih kepalanya yang disebut Kerio atau Proatin dan Khatib. Pemilihan ini dilakukan di bawah pengawasan seorang Pasirah (4, p. 15).

Pada zaman kerajaan Palembang, Pasirah atau Depati melaporkan hasil pemilihan Punggawa, Proatin, dan Khatib kepada Rangga atau Temenggung, lalu menetapkannya.

c. Dahulu rakyat di sebuah marga memilih seorang dari keluarga *pyang* untuk dijadikan kepala marga, yang diawasi oleh Temenggung. Kemudian Temenggung melaporkannya kepada Raja. Bagindalah menetapkan kepala marga itu dengan sebuah piagam, dengan pangkat yang disebut Pasirah atau Depati.

Pada mulanya jabatan Pasirah bersifat turun-temurun, Akan tetapi dewasa ini syarat mutlak ialah harus yang tidak pernah putus hubungannya dengan marganya yang akan dipimpinya. Tentu saja dari mereka diharapkan kepandaian dan kecakapan.

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda cara pemilihan itu masih tetap dipertahankan, piagamnya diganti dengan sebuah Surat Keputusan dari Residen Palembang.

Setelah menerima penetapannya, maka Pasirah mulai memimpin marga. Marga itu bersifat otonom. Marga itu merupakan kerajaan kecil, sedang seorang Pasirah atau Depati merupakan seorang Raja kecil di daerah kekuasaannya. Kepala dan pamong-pamong marga tidak menerima gaji tetap dari Pemerintah. Namun menurut adat, panghasilan seorang Pasirah cukup menjamin hidup keluarganya. Sumber penghasilan adat seorang Pasirah itupun terdiri dari dua macam :

- 1) Pungutan dalam bentuk tenaga, melalui kemit marga dan kemit dusun.
- 2) Pungutan dalam bentuk uang atau barang, antara lain:
  - a) denda atau *uang walesan*,
  - b) pungutan dari hasil hutan,
  - c) pungutan pada penyerahan atau penjualan tanah pekarangan, rumah, sawah ladang atau kebun, dan ternak,
  - d) pungutan pada pernikahan, perceraian, rujuk, pelanggaran adat seperti melarikan gadis, dan pembunuhan.
  - e) pungutan dari sewa tanah atau bumi, hutan, sungai, dan lebak.

## 2. Contoh pemerintahan marga

*Sistim pemerintahan tradisionil* di bawah Kecamatan yang lazim juga dikenal sebagai *pemerintahan marga* masih tetap berlaku di Sumatera Selatan. Sebagai contoh dikemukakan pemerintahan marga di Kecamatan Pagar Alam, Kabupaten Lahat.

Kecamatan Pagar Alam terdiri dari empat marga, yakni:

**Marga Sumbai Besar Suku Alun Dua** dengan ibukota Alun Dua.

**Marga Sumbai Mangku Anom Suku Muara Siban** dengan ibukota Bumi Agung,

**Marga Semidang Suku Plang Kenidai** dengan ibukota Plang Kenidai, dan

**Marga Sumbai Besar Suku Lubuk Buntak** dengan ibukota Lubuk Buntak.

Biasanya kecamatan meliputi dua sampai empat marga, kecuali kecamatan Semendo di kabupaten Muara Enim yang terdiri dari hanya sebuah marga, yakni Marga Semendo.

Kepala sebuah marga disebut *Pasirah*. Di dalam soal agama Pasirah dibantu oleh seorang *Penghulu*. Di bawah seorang Pasirah ada pejabat yang disebut *Kerio*, yang mengepalai sebuah dusun. Sebuah marga biasanya terdiri dari beberapa dusun. Dalam Marga Sumbai Besar Suku Alun Dua ada 26, Marga Sumbai Mangku Anom Suku Muara Siban ada 19, Marga Semidang Suku Plang Kenidai ada sembilan dan Marga Sumbai Suku Lubuk Buntak ada 15 orang Kerio.

Kerio di ibukota Marga biasanya disebut *Pembarap*. Kalau Pasirah berhalangan Pembarap mewakilinya. Dahulu kedudukan Pembarap hampir sama dan masih satu keturunan dengan Pasirah.

Di bawah Kerio ada lagi jabatan yang disebut *Penggawa*, yang terdiri dari seorang atau beberapa orang. Kalau di bidang keagamaan, Pasirah dibantu oleh seorang Penghulu, maka kerio dibantu oleh seorang *Khatib*. Pencatatan nikah, talak, dan rujuk dilakukan oleh mereka juga.

Tempat kedudukan Pasirah ditetapkan oleh Dewan Marga, kemudian disahkan oleh Gubernur. Sebuah ibukota marga dapat saja dipindahkan jika memang diputuskan oleh Dewan Marga. Biasanya kepindahan ibukota marga itu atas pertimbangan: kurang strategis dari segi pembangunan, kurang aman, dan sering terjadi malapetaka (epidemi, banjir, dan kebakaran).

Akhir-akhir ini sering terjadi seorang Pasirah berkantor dirumahnya sendiri. Untuk menertibkan hal ini Gubernur telah mengharuskan kantor-kantor Pasirah berada di ibukota marga.

### 3. Gelar

Seorang Pasirah dan Kerio pada waktu diangkat boleh memilih gelar, dan dicantumkan dalam Surat Keputusannya. Tetapi gelar itu tidak dipopulerkan. Demikian misalnya di Kecamatan Pagar Alam. Tetapi di daerah Kayu Agung, Kabupaten O.K.I. (Ogan Komering Ilir), setelah nikah, orang mendapat gelar, seperti *Mangku Alam*, *Singadikane*, dan *Singadilaga*.

Pada zaman pemerintah Hindia Belanda, seorang Pasirah yang berjasa dan lama menjabat sebagai Pasirah diberi gelar *Pangeran* ya: g lazimnya disertai atribut berupa tongkat (biasanya dari pada emas), payung, dan pakaian adat.

### 4. Pelu Rakan

Dahulu, seorang Pasirah atau Depati, selama menyangkut intern marganya, tidak perlu dicampuri oleh Pasirah lain. Ia berkuasa penuh di dalam marganya. Terutama dalam bidang ketertiban dan keamanan, pelaksanaan hukum adat, dan pengadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran adat (pencurian, perkawinan, perceraian, pembagian waris, melarikan gadis, memutuskan pertunangan dan sebagainya).

Tetapi bila terjadi pertikaian antara marga dan tidak dapat diselesaikan secara baik, maka biasanya perkara itu diajukan dan disidangkan dalam *Rapat Besar* yang dihadiri oleh Pasirah yang marganya terlibat dan beberapa Pasirah yang lain. Masing-masing Pasirah disertai oleh stafnya. Dulu, beberapa marga (tiga sampai empat) mengadakan semacam persekutuan. Merekalah yang ikut hadir dalam Rapat Besar yang diadakan di Balai Pertemuan itu.

Jika keputusan Rapat Besar tidak ditaati oleh salah satu marga yang bersengta, maka marga-marga lainnya akan memaksa.

Seterusnya, jika tidak ditaati oleh seseorang dan dibantu pula orang sekampung dan sedusunnya, maka bukan saja marga-marga lain, tetapi juga marganya

sendiri akan mengambil tindakan. Tindakan terakhir bisa berupa penyerbuan ke kampung dan dusun yang terhukum.

Keseluruhan rangkaian "law enforcement" tersebut disebut *pelurakan*. Tetapi tindakan terakhir tersebut jarang terjadi, karena akibatnya sangat berat bagi yang terhukum itu (1, p. 321-322).

### 5. Berbagai macam rapat

Di daerah Sumatera Selatan ada berbagai macam rapat untuk menyidangkan perkara-perkara pelanggaran adat, yakni: *rapat dusun* atau *rapat kampung*, *rapat marga*, *rapat kecil*, dan *rapat besar*.

a. *Rapat dusun* atau *rapat kampung* merupakan rapat yang terendah kedudukannya, dan biasanya diketuai oleh Proatin atau Kerio.

b. *Rapat Marga* dipimpin oleh Pasirah atau Depati. Rapat marga ini dihadiri oleh kepala-kepala dusun atau wakilnya yang sah dalam lingkungan marga itu. Di dalam rapat marga ini disidangkan segala perkara yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat dusun. Jikalau ada orang atau pihak yang tidak puas terhadap keputusan rapat marga itu, maka ia dapat mengajukan naik banding kepada rapat kecil atau rapat besar.

c. *Rapat kecil* dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Setempat yang pada zaman Pemerintah Hindia Belanda disebut Kontelir. Jikalau keputusan rapat kecil tidak memuaskan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan naik banding kepada rapat besar.

d. *Rapat besar* merupakan rapat yang terbesar dan tertinggi kedudukannya. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda rapat besar ini biasanya dihadiri oleh semua kepala marga yang ada di suatu daerah yang disebut afdeling atau kira-kira kabupaten sekarang. Pasirah itu biasanya dibantu oleh beberapa orang satafnya, dan jikalau berhalangan maka pembarap dapat mewakilinya. Rapat besar ini menyidangkan dan memutuskan segala perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh rapat-rapat yang lebih rendah.

Rapat ini biasanya mengadakan dan memperbincangkan perkara-perkara besar yang dapat mengundang dan menimbulkan keributan besar seperti perkara pembunuhan atau *bangun*.

### C. Susunan masyarakat di Sumatera Selatan

Untuk membicarakan susunan masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang dan sekitarnya, maka latar belakang sejarahnya perlu diketahui.

Bertolak dari zaman Kesultanan Palembang, maka kita harus membaginya dalam dua wilayah, yaitu *kota Palembang dan daerah sekitarnya*, yang dulu pengaruh kekuasaan Sultan Palembang serta kehidupan istananya sangat

besar, dan *daerah pedalaman*, di mana seorang Pasirah atau Depati merupakan raja-raja kecil yang berkuasa penuh di dalam marganya.

### 1. Susunan masyarakat di kota Palembang dan daerah sekitarnya

a. Paling di atas sekali adalah Raja atau Sultan. Sebagai contoh, lihat Aspek Sejarah.

b. Kemudian Penduduk Palembang dan daerah sekitarnya yang dapat dibagi atas golongan pryai, dan golongan rakyat (6, p. 25).

#### 1) Golongan pryai

Yang termasuk golongan ini ialah para keturunan Raja dan pejabat-pejabat. Kedudukan ini dapat diperoleh karena kelahiran, atau atas perkenan Raja. Golongan pryai terdiri atas : golongan Pangeran, golongan Raden, dan golongan Masagus.

a) Golongan Pangeran adalah putera Raja atau Sultan. Tetapi gelar Pangeran dapat juga diberikan oleh Sultan kepada pejabat-pejabat seperti Pasirah yang telah berjasa.

b) Golongan Raden adalah putera yang lahir dari perkawinan antara putera Pangeran dan puteri Pangeran.

c) Golongan Masagus adalah putera yang lahir dari perkawinan antara seorang putera Pangeran atau putera Raden dengan wanita golongan rakyat.

Peraturan tersebut di atas itu berlaku pada waktu Susuhunan atau *Sultan Cindo Belang* menduduki takhta kerajaan Palembang. Tetapi pada waktu *Sultan Limabang* memerintah, peraturan ini berbeda sedikit, yakni putera yang lahir dari perkawinan seorang putera Pangeran atau Raden dengan seorang wanita golongan rakyat harus disebut Raden (6, p. 26).

Isteri-isteri golongan Pryai mempunyai gelar tersendiri pula. Isteri Sultan yang sebenarnya bergelar Ratu, isteri dan anak-anak perempuan seorang Pangeran dan Raden bergelar Raden Ayu, dan isteri dan anak-anak perempuan seorang Masagus memakai gelar Mas Ayu.

#### 2) Golongan rakyat

Golongan rakyat terbagi atas tiga golongan, yakni : golongan Kyaimas atau Kimas, golongan Kyaiagus atau Kiagus, dan golongan rakyat jelata.

a) Golongan Kyaimas adalah anak laki-laki yang lahir dari perkawinan seorang Masayu dengan seorang pria golongan rakyat.

b) Golongan Kyaiagus adalah anak laki-laki yang lahir dari perkawinan seorang putera mantri dan turunan Raden yang terendah dengan seorang wanita golongan rakyat jelata. Golongan ini biasanya diwajibkan ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan yang ringan dan halus, akan tetapi tidak untuk mendayung perahu Sultan atau pekerjaan-pekerjaan yang kasar.

c) Rakyat jelata terdiri atas beberapa tingkat, yakni : golongan orang-orang miji, golongan orang-orang senan atau snouw, golongan orang-orang yang menggadaikan diri atau berhutang, dan golongan orang-orang budak.

(1) Orang-orang Miji :

Golongan orang-orang miji yang tinggal diibukota (Palembang) sama kedudukannya dengan *mata gawe* di daerah pedalaman. Hanya *mata gawe* wajib membayar pajak, sedang *orang-orang miji* bebas. Orang-orang miji sering dipakai oleh Raja, Pangeran, dan Raden antara lain untuk berperang, mengerjakan pekerjaan tangan atau karya-karya seni. Namun mereka adalah orang-orang merdeka dan jika kurang senang mereka bebas pindah dan bekerja pada Pangeran atau Raden yang lain. Seorang miji biasanya mempunyai beberapa *orang galingan* untuk membantu pekerjaannya, dan keperluannya dipenuhi.

(2) Orang-orang Senan atau Snouw

Golongan ini dianggap lebih rendah kedudukannya dari golongan miji. Tenaga mereka dipergunakan oleh Raja untuk membuat dan memperbaiki perahu serta rumah kepunyaan Raja, dan mendayung perahu baginda. Orang-orang senan inipun mempunyai seorang atau beberapa orang pembantu yang disebut *alingan*.

Mungkin yang dimaksud dengan senan atau snouw di sini ialah dari kata Jawa sinau yang berarti belajar. Dalam bahasa Kawi berarti bisa atau dapat, pandai atau pintar. Dan kata sinau berangkali kemudian ditulis salah menjadi senau dan entah karena apa diubah menjadi senan yang oleh Muntinghe dijadikan orang senang. De Sturler dalam *Bijdrage tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde van Ned. Indië* 1855 hlm. 81 menyebut *orang snau* yaitu mantri-mantri yang karena pelanggaran-pelanggaran ringan mendapat murka Raja dan kemudian diwajibkan mengerjakan pekerjaan tangan yang kemudian dilanjutkan oleh turunannya. Pernah mereka dipergunakan oleh Raja sebagai pendayung perahu-perahu Raja (3, p. 44).

(3) Orang-orang yang menggadaikan diri atau berhutang

Orang-orang golongan ini biasanya bekerja untuk orang-orang yang meminjamkan uang kepada mereka. Sebagian mereka dapat menebus atau membeli kembali kemerdekaannya setelah ia melunasi hutangnya dalam bentuk uang atau tenaga dengan bekerja pada orang yang meminjamkan uang padanya dalam jangka waktu yang sudah disepakati pada waktu orang itu meminjam atau berhutang.

Sebagian lagi adalah orang-orang yang mengusahakan perkebunan atau sebagainya dengan berjanji atau syarat bahwa keuntungan hasil usaha itu dibagi dua dengan orang tempat ia berhutang sampai ia *melunasi* jumlah uang atau hutang yang dipinjamnya.

(4) Golongan budak

Golongan orang-orang ini bekerja pada orang-orang yang telah membe-nya. Mereka merupakan golongan yang paling celaka dan paling menyedihkan hidupnya.

Pada ulama atau petugas keagamaan tidak dimasukkan ke dalam golo-  
ngan yang kami uraikan di atas, karena mereka dapat berasal dandipilih da-  
ri semua golongan penduduk. Mereka dapat digolongkan ke dalam pegawai  
kerajaan, dan disebut Penghulu atau Pangeran, serta dibantu oleh khatib,  
Mudin atau Modin dan lain-lain.

Perlu pula disinggung sedikit tentang *Raban* atau *Jenang*, yakni orang  
yang oleh Raja dianugerahi beberapa marga, atau dusun. Mereka mungkin  
keluarga dekat Raja, tetapi dapat juga seorang mantri yang karena sesuatu  
hal yang luar biasa memperoleh kemurahan hati Sri Baginda. Mereka seakan-  
akan *wakil Raja* di marga-marga atau dusun-dusun. Ia memungut hasil dari  
marga-marga atau dusun-dusun itu. Semua urusan dan peristiwa yang terjadi  
di dalam marga-marga atau dusun-dusun harus dilaporkan dulu kepada Raban.  
Apabila perlu Raban itulah yang melaporkannya kepada Raja. Sebaliknya segala  
perintah dan titah Raja tidak disampaikan langsung kepada kepala marga atau  
dusun, tetapi melalui Raban atau Jenang.

## 2. Susunan masyarakat di daerah pedalaman

Di pedalaman, marga-marga merupakan kerajaan-kerajaan kecil dengan  
Pasirah atau Depati sebagai kepalanya. Pasirah atau Depati beserta pembantu-  
pembangunya seperti Proatin atau Kerio, Penggawa, Penghulu dan Khatib,  
merupakan golongan tersendiri dengan tempat serta kedudukan yang sudah  
diatur pula oleh adat, sebagaimana telah diuraikan di depan.

Penduduk atau rakyat biasa di daerah pedalaman Sumatera Selatan dapat  
dibagi atas: golongan matagawe, dan golongan alingan (1, p. 311).

### a. Golongan Matagawe

Mereka adalah kepala-kepala rumah-tangga dan kepala rumpun keluarga  
dan bertanggung jawab atas segala penghasilan dan gawe (pekerjaan) dusun  
atau marganya. Merekalah yang diwajibkan *membayar pajak* dan menanggung  
segala beban atau pekerjaan. Tetapi pekerjaan-pekerjaan seperti rodi kerap  
mereka suruhkan kepada orang alingannya. Golongan matagawe ini selalu diikut-  
sertakan dalam hal-hal yang penting. Di kalangan merekalah terdapat orang-  
orang yang berada, yang memiliki rumah dan pekarangan, kebun, ladang, dan  
tambak. Merekalah wakil rakyat atau masyarakatnya pada waktu pemilihan  
kepala marga atau dusun, dan sering diminta dan didengar pendapatnya dalam  
soal-soal yang penting

Dahulu rakyat di desa-desa menganggap Raja sebagai pemilik tanah.  
Mereka hanya memakai tanah dan menikmati hasilnya atas perkenan Raja.  
Hak pemakaian tanah yang dilakukan oleh marga-marga itu ditetapkan atas

dasar suatu jumlah kesatuan tertentu (mata) orang-orang yang *wajib dinas*, yang disebut "*mata-gawe-raja*", dan orang-orang yang wajib membayar pajak tanah yang disebut *mata-pajak*.

Di dalam marga semua penduduk yang dapat bekerja dan sudah kawin serta mempunyai rumah sendiri harus mematuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Raja. Kewajiban itu pada pokoknya ialah "*wajib dinas*" atau *wajib pajak*. Oleh karena itu maka *mata gawe* berhak ikut bicara mengenai pemakaian tanah, hutan dan air (sungai, danau, laur dan sebagainya) di dalam batas wilayah marganya (3, p. 42). Selain alingannya, biasa pula matagawe menyuruh anggota keluarganya atau orang asing yang tidak mempunyai usaha sendiri dan bertempat tinggal di bawah perlindungan matagawe itu membantu melakukan kewajiban yang menjadi tanggung jawab matagawe tersebut. Orang asing atau pendatang yang tinggal di dalam suatu marga dianggap orang luar, sehingga mereka tidak mempunyai hak bicara mengenai pemakaian tanah, hutan dan air di dalam lingkungan marga itu. Jumlah matagawe dapat dikatakan tidak melebihi 10% dari jumlah seluruh penduduk. Jumlah mereka biasanya tetap. Apabila seorang matagawe meninggal, akan diganti dan biasanya oleh anak laki-lakinya, yang tertua (1, p. 318). Jika tidak mempunyai keturunan laki-laki, maka kepala marga atau dusun memilih salah seorang dalam marga atau dusunnya untuk menggantikannya. Biasanya diambilkan dari orang alingan matagawe yang meninggal itu.

#### **b. Golongan alingan**

Orang-orang alingan ialah penduduk atau rakyat yang bukan matagawe. Mereka bekerja dan sering dimasukkan ke dalam keluarga *matagawe* yang diikutinya. Jadi mereka dilindungi atau *di-alingi* oleh matagawe.

Orang alingan ini melakukan bermacam-macam pekerjaan seperti rodi, dan membantu di kebun dan ladang kepunyaan matagawe. Sebagai imbalan, alingan ini dilindungi dan dipenuhi keperluannya.

#### **3. Hak atas tanah**

Di depan tadi telah kami uraikan bahwa hak pemakaian tanah ada pada marga-marga dan tiap warga marga yang disebut matagawe berhak ikut bicara mengenai pemakaian tanah, hutan dan air (sungai, danau atau telaga, laut dan sebagainya) di dalam batas wilayah marganya.

Dengan membuka sebidang tanah, warga marga dapat dikatakan memperoleh hak milik atas tanah yang digarapnya itu. Ia boleh memindahtangankan hak milik *gadaikan* atau menyewakan kepada orang semarganya, tidak kepada orang luar marganya (1, p. 47). Jika meninggal hak itu jatuh kepada anak-anaknya.

Jikalau seorang warga marga memilih sebidang tanah, setelah mendapat izin kepala marga, ia tidak perlu segera membukanya, tetapi segera memberi tanda. Tanah itu biasanya sudah digarap dalam jangka waktu satu sampai dua



tahu. Selain dari pada tanah yang digarap atau diolahnya itu ia juga sesungguhnya berhak atas tanah seluas 40 depa junjang (satu depa junjang kira-kira sama dengan dua meter) di sekitar tanah tersebut. Hal ini sesungguhnya sering tidak dilaksanakan akan tetapi ada hubungannya dengan adat tanggung-menanggung yang menyatakan bahwa : "Jikalau kerbau luka atau mati ditikam dalam batas 40 junjang dari yang empunya ladang, dan tiada nyata yang menikamnya atau membunuhnya, orang pedusunan kena ganti harganya sampai tujuh atau lima belas rial (5, p. 264). Banyak yang kita jumpai ladang atau kebun yang berbatasan pagarnya.

Jikalau sesudah memungut hasil, lalu ditinggalkan sampai beberapa tahun yang lazimnya tidak lebih dari lima tahun, tetapi ada juga yang mengatakan lebih dari satu tahun, maka tanah itu kembali lagi kepada marga (1. p. 48).

Orang luar yang bukan warga marga dapat juga memperoleh hak membuka atau mengusahakan tanah dengan seizin kepala marga, atau orang itu harus membayar *sewa muni*. Tetapi Pasirah atau Depati dapat juga menolak permohonan seperti itu.

Mula-mula uang sewa bumi masuk ke kas marga. Tetapi kemudian dibagi dua, yaitu untuk kepala marga dan kepala dusun yang bersangkutan, dan sebagian lagi masuk ke dalam kas marga.

Orang luar yang menyewa tanah tidak dapat memindah-tangankan, menggadaikan atau menyewakan lagi tanah itu dan apabila meninggal, maka anak-anaknya hanya boleh meng-haki tanah itu selama jangka waktu yang sesuai dengan sewa bumi yang sudah dibayar.

Selain dari pada hak tanah ada pula hak mengumpulkan *hasil-hasil hutan*. Mula-mula tanpa idzin kepala marga, apalagi jika hasil hutan itu untuk keperluan sendiri. Kemudian demi pengawasan yang baik semua orang yang hendak mengumpulkan hasil-hasil hutan di sebuah marga, harus mendapat idzin dahulu dari kepala marga yang bersangkutan. Tidak jarang pula terjadi ada seorang anggota atau warga marga mengaku bahwa hasil hutan itu untuk keperluan sendiri, akan tetapi nyatanya dijual. Untuk mencegah hal seperti itu, maka bagi siapa yang mengumpulkan hasil hutan sebagai mata pencaharian, diwajibkan membayar apa yang disebut *bunga kayu* sebanyak 10 % dari harga hasil hutan itu kepada kas marga. Untuk ini diperlukan idzin tertulis dari kepala marga. Tanda lunas bayar bunga kayu itu biasanya diberikan oleh Pasirah atau Depati, yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu ada pemeriksaan. Yang melanggar dikenakan hukuman denda dan hasil hutan yang sudah terkumpul disita, dan dimasukkan kas marga.

Di samping kayu, damar, dan rotan banyak pula dikumpulkan orang. Pohon buah-buahan tetap menjadi hak orang yang menanamnya, sungguh-pula orang itu sudah lama tidak menengoknya lagi. Pengusaha-pengusaha perkebunan sering repot menghadapi pemilik pohon buah-buahan ini. Ia harus mengeluarkan uang ganti rugi.

Setiap anggota atau warga marga boleh menangkap ikan di sungai-sungai, danau atau telaga dan di laut yang termasuk daerah marganya. Hal ini tidak berlaku bagi ikan yang dengan sengaja dipelihara di tambak-tambak atau tebat per-orangan.

Demikianlah susunan masyarakat di daerah Sumatera Selatan, baik di ibukota Palembang dan sekitarnya, maupun di daerah-daerah pedalaman. Pada zaman Kesultanan Palembang penggolongan penduduk sangat jelas. Sekarang inipun sedikit banyak masih ada juga pengaruh dan sisa-sisanya.

## B A B VIII

### DAUR HIDUP

Umumnya setiap orang di dalam hidupnya mengalami peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian. Peristiwa-peristiwa yang amat penting ini sering ditandai berbagai upacara sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku. Ada suku yang mengutamakan *peristiwa kelahiran*, ada suku yang mengutamakan *peristiwa perkawinan*, dan ada juga suku yang mengutamakan *peristiwa kematian*. Di samping ketiga peristiwa tersebut masih banyak lagi peristiwa yang dialami oleh setiap orang, yang juga ditandai oleh berbagai upacara adat. Upacara-upacara itu sudah dimulai sejak orang masih dalam kandungan.

Di Sumatera Selatan peristiwa-peristiwa tersebut di atas, kecuali perkawinan dan yang ada hubungannya dengan perkawinan itu tidak begitu diperhatikan lagi.

#### A. Kelahiran

Pada waktu kandungan tiga bulan, wanita yang mengandung biasanya diperiksa oleh *dukun bayi*. Pada waktu kandungan tujuh bulan, terutama bagi anak pertama, maka wanita yang mengandung itu *berlimau*.

Sungguhpun adat-kebiasaan tersebut di atas berlaku di daerah Komeriing Ulu, di sekitar tahun 1925, namun dapatlah dikatakan bahwa hampir sama saja keadaannya di daerah-daerah lain di Sumatera Selatan.

Pada waktu berlimau, sang dukun bayi mengaduk perasan limau nipis dengan air biasa, kemudian dijampi, lalu dipercikkan kepada wanita yang mengandung itu, dan akhirnya dimandikan.

Kemudian dukun itu memberikan beberapa petunjuk tentang apa-apa yang boleh dan sebaiknya dilakukan dan apa-apa yang dipantangkan, baik mengenai perbuatan maupun makanan. Sering pula dukun itu memberikan jimad untuk menjauhkan wanita dan bayi yang dikandungnya dari gangguan setan atau roh-roh jahat. Untuk maksud yang sama, sering pula ditanam *jerangau*, yakni sejenis tumbuhan yang akarnya dibuat obat di bawah tangga rumah dan di keempat tiang sudut rumah wanita yang hamil itu.

Sebagai penutup, maka diadakanlah selamatan atau sedekah makan *nasi kunyit panggang ayam*, yakni nasi ketan yang dimasak dengan santan dan seekot ayam panggang utuh.

Menurut adat kelaziman di Marga Jejawi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada waktu isteri mengandung, maka kedua suami-isteri harus menjalankan beberapa pantangan.

## 1. Pantangan

### a. Bagi sang ayah

1) Dilarang memukul, menyiksa, dan membunuh binatang yang bernyawa, seperti ular, cecak, ayam dan bebek. Sebab dikhawatirkan anak itu nanti akan menyerupai khewan atau bagian-bagian khewan itu.

2) Dilarang menertawai atau mengata-ngatai orang, terutama yang cacat, seperti orang sumbing, tuli, buta, dan pengkor atau timpang kakinya, karena dikhawatirkan anaknya yang akan lahir akan menyerupai orang cacat itu.

3) Dilarang bepergian jauh, sehingga suami selalu dekat dengan isterinya. Terutama ketika saat kelahiran hampir tiba.

### b. Bagi sang ibu

1) Dilarang duduk di pintu, supaya tidak mengalami kesukaran yang dapat mengancam jiwa waktu melahirkan.

2) Dilarang mandi pada malam hari, karena takut akan gangguan setan atau makhluk-makhluk halus yang jahat.

3) Dengan alasan yang sama, dipantangkan pula keluar rumah pada waktu magrib dan malam hari.

4) Dilarang bekerja berat dan bepergian jauh karena dapat terganggu kesehatan calon ibu.

5) Dilarang membiarkan rambut kusut. Wanita hamil harus menyanggul rambutnya dengan paku sebagai tusuk konde, sehingga ia tidak akan diganggu oleh Kuntilanak, yakni semacam hantu perempuan yang suka mengganggu orang hamil atau baru melahirkan.

6) Perempuan hamil sering pula disuruh memakai jarum pada sarung atau bajunya, membawa benda tajam pada waktu keluar rumah.

Sungguhpun dewasa ini orang sudah maju dan modern cara hidup serta cara berpikrnya, ditambah pula dengan menebalnya ajaran agama, pantangan-pantangan itu masih sering dipatuhi.

Menurut kelaziman Marga Jejawi di daerah atau Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan dan Komering Ilir pada waktu kandungan tiga bulan diadakan upacara selamat yang disebut *memupuk kandungan*. Maksudnya agar kandungan itu baik pertumbuhannya.

Pada waktu sembilan bulan diadakan selamat yang disebut *bulan luncur* atau *blulus*. Maksudnya agar supaya wanita itu nanti dapat melahirkan dengan selamat dan cepat (5, p. 5).

## 2. Kelahiran

Pada saat melahirkan, maka di sekitar rumah dan terutama di bawah tempat wanita yang mau melahirkan itu disebarkan beling dengan maksud mencegah kuntilanak mendekati wanita itu (2, p. 509). Untuk maksud yang sama diadakan pula penjagaan oleh empat orang bersenjata.

Menurut kepercayaan orang, kuntilanak ialah roh wanita yang meninggal pada waktu melahirkan. Kuntilanak sering berkeliaran dan gemar akan darah wanita yang sedang melahirkan. Sementara itu suami segera memanggil dukun bayi yang memang sudah merawat isterinya. Kemudian, tikar dibentangkan untuk tamu-tamu, menyediakan tampah yang dilapisi daun pisang untuk meletakkan bayi begitu lahir, dan tempurung kelapa untuk menaruh tembuni.

Setelah lahir, maka seorang di antara hadirin memukul-mukul tiang rumah, sambil bertanya dengan suara yang nyaring: "apakah anak yang lahir itu laki-laki atau perempuan?" Jika anak perempuan, maka dijawablah: "laki-laki". Maksudnya, untuk memperdayakan setan atau roh jahat yang mungkin mau mengganggu bayi itu.

Begini dukun bayi muncul, maka orang-orang segera bertanya "sedang apa orang-orang di dalam itu?" Dukun itu pun menjawab: "mereka sedang mengaji". Dengan ini diharapkan agar bayi itu kelak menjadi alim dan seorang haji. Jika dukun menjawab "orang-orang pada menulis surat", maka diharapkan agar bayi itu menjadi seorang juru tulis, seorang pegawai atau priyai (1, p. 510).

Kemudian mengeluarkan *tembuni* atau *ari-ari* dari perut ibu itu, lalu dimasukkan ke dalam tempurung kelapa yang telah disediakan. Setelah itu barulah dukun membersihkan bayi dengan air yang sudah dicelupi puntung api. Kemudian tali pusarnya dipotong, lalu dibawa ketempat orang banyak yang datang untuk *diazankan*. Bagi bayi laki-laki, dan diikatkan bagi bayi perempuan. Sesudah itu barulah tembuni bayi yang ditaruh di dalam tempurung ditanam. Tempat menanam itu macam-macam. Jika di bawah tangga rumah, maka anak itu akan betah tinggal di rumah. Jika ditanam di bawah pohon yang rindang, maka anak itu akan selalu tenang dan sabar, dan bila di bawah pohon mangga yang manis, maka anak itu akan disenangi orang.

Kemudian sang ayah memotong ayam, untuk dipanggang bersama ketan dan nasi gunuk yaitu nasi dimasak dengan santan kelapa disuguhkan kepada dukun bersama satu setel pakaian, kelapa, beras, minyak goreng, sabun, uang emas dan lain-lain menurut niat suami-isteri yang bersangkutan (5, p. 7).

Beberapa hari kemudian sang ibu dimandikan, yang disebut *membasuh tangan*. Setelah tujuh hari rambut bayi dicukur. Camang atau rambut yang dibawa lahir dianggap berbahaya. Pada waktu bayi untuk pertama kali dibawa ke luar rumah untuk dimandikan, maka diadakanlah sedekah makan sekedar-nya dan sering dengan memotong beberapa ekor ayam atau seekor kambing. Bayi itu harus berbaikan dengan jin yang empunya rumah.

Variasi lain berkenaan dengan kelahiran ini berlaku di Bangka Selatan.

Pada saat akan melahirkan, maka diatas wanita itu digantungkan seutas tali dari kayu terap, sejenis pohon yang kulitnya dapat dibuat cawat dan tali yang disebut *tali tuntun*, untuk dipergunakan sebagai pegangan, jika wanita itu hendak duduk dari pembaringannya (6, p. 11).

Pada waktu bayi mulai keluar, rambut wanita yang akan melahirkan itu dimasukkan ke dalam mulutnya sendiri, supaya timbul rasa mau muntah, sehingga *kakak bayi* atau tembuni itu segera keluar. Pada saat-saat itulah dukun memakai jampi-jampi yang disebut *telusah*.

Setelah selesai melahirkan, maka ibu itu *dikambuhkan*, yakni seluruh badannya diurut agar merasa segar kembali. Lalu dimandikan dengan air panas yang dicampur dengan daun kecapa dan lengkuas kering. Setelah melahirkan wanita itu masih harus mentaati beberapa pantangan, antara lain : tidak boleh makan telur bebek, makan terasi, makanan yang mengandung minyak, dan tidak boleh tidur pada siang hari. Di samping itu selama kurang lebih empat puluh hari ia harus minum air rebusan ramuan akar-akar tumbuh tertentu, dan tubuhnya dilumuri dengan bedak param.

Setelah empat puluh hari, bayi dan ibu selalu di bawah pengawasan dukun. Sering pula dipasang *penangkal*, misalnya jaring benang atau kayu berduri di atas pintu depan dan pintu belakang rumah, sehingga jin yang disebut *bale* jangan sampai masuk ke dalam rumah. Menurut kepercayaan penduduk, *bale* ini suka menghisap darah wanita yang bersalin.

Di samping bayi sering pula diletakkan benda tajam seperti paku, pisau, dan gunting. Di dalam baskom tempat mandi bayi sering pula diletakkan benda logam. Pada malam hari dahi bayi sering dipolesi tanda silang dengan arang atau angusan belanga, sehingga bayi terhindar dari gangguan sebangsa jin yang di sebut *pitara*. *Jin pitara* ini takut pula kepada benda-benda logam.

Setelah lewat empat puluh hari, pantangan-pantangan tersebut di atas tidak berlaku lagi.

### 3. Memotong rambut

Di Sumatera Selatan terdapat beberapa variasi upacara memotong rambut. Berikut ini kami uraikan upacara di Komerling Ulu (2, p. 510).

Mula-mula upacara ini dimaksudkan sebagai *semah*, yakni sesajian berupa sebagian dari raga anak yang terpenting, yaitu *rambut*. Dengan demikian rokh-rokh halus tidak akan menggangukannya.

Semua rambut dicukur habis, kecuali sedikit di bagian depan, atau di bagian belakang kepala. Rambut yang dipotong itu dibungkus dengan sehelai daun keladi dan kemudian dihanyutkan ke sungai.

Biasa pula rambut itu dipendam di bawah *pohon dingin*, seperti pohon

pisang, agar anak itu selalu sabar dan terhindar dari segala macam bahaya dalam perjalanan hidupnya.

Variasi lain kita jumpai pada Marga Jejawi (5, p.7, 8). Setelah bayi mencapai empat puluh hari, maka diadakanlah upacara memotong rambut. Meriah dan tidaknya upacara itu tergantung dari kemampuan keluarga yang bersangkutan. Sebelum upacara dimulai, bayi diletakkan di atas sebuah bantal atau kasur kecil, atau dibaringkan pada tempat yang sudah dilapisi kain yang di bawahnya ditaburi beras secanting. Menurut kepercayaan orang, jika beras bertambah berarti anak itu akan memperoleh rezeki. Sebaliknya, jika berkurang berarti anak itu tidak memperoleh rezeki.

Pada waktu acara dimulai, anak digendong, biasanya oleh kakeknya, berkeliling diiringi oleh *marhaban*. Datuk itu didampingi oleh seorang lagi yang membawa gunting dan minyak wangi atau bunga-bunga di atas sebuah talam. Dengan iringan *marhaban* para hadirin bergiliran menggunting atau memotong rambut anak itu. Wangi-wangian ditaburkan kepada tamu-tamu. Pada waktu itu juga sering anak itu diberi nama. Kemudian, para tamu dipersilahkan duduk tersantap.

Sebagai variasi berikutnya, disajikan upacara mencukur bayi yang dilazimkan di *Bangka Selatan* (6, p. 13).

Upacara potong rambut dilakukan ketika bayi berusia enam atau tujuh bulan. Para keluarga dan tetangga diundang. Seorang di antara hadirin ditunjuk untuk memimpin *marhaba* atau *marhaban*, yakni semacam nyanyian yang diambil dari kitab berzanji, berupa riwayat kelahiran Rasulullah, nabi Muhammad s.a.w. Selama *marhaba*, bayi digendong dan dibawa berkeliling. Ada pula seorang yang membawa talam berisi sebutir kelapa muda yang telah dipotong bagian atasnya dan diukir, dan di sampingnya diletakkan sebuah gunting serta ber-puluh-puluh butir telur ayam yang diberi warna merah dan ditusuki lidi yang berhiaskan bunga-bunga dari kertas. Di talam itu di taruh pula beberapa bungkus bunga rampai. Kemudian para tamu berganti-ganti menggunting atau memotong rambut bayi, seraya membaca doa dan memberikan hadiah biasanya berupa uang. Rambut bayi yang dipotong dimasukkan ke dalam kelapa yang sudah tersedia tadi. Pengiring bayi yang membawa tilam itu memercikkan minyak wangi dan memberikan telur ayam serta bunga rampai yang dibawanya kepada para tamu.

#### 4. Turun tanah dan keluar rumah

Sebelum bayi boleh dibawa keluar rumah dan bepergian ke mana-mana, terlebih dahulu dilazimkan mengadakan upacara *menurunkan bayi ke tanah*. Biasanya dilakukan datuk atau kakeknya sendiri. Penurunan bayi ke tanah diiringi pembacaan doa selamat semoga bayi itu panjang umurnya, murah rezekinya, selalu mendapat perlindungan, taufik dan hidayat Tuhan Yang Maha

Esa. Lalu dengan perlahan-lahan kaki bayi itu dijejakkan ke tanah, kemudian dibimbing berjalan ke arah empat penjuru mata angin, yaitu Utara, Selatan, Timur dan Barat. Tiap penjuru kira-kira sejauh sepuluh langkah. Maksudnya sama dengan di atas.

Selain dari pada *upacara turun tanah* itu ada pula *upacara memandikan bayi ke sungai* (6, p. 13). Upacara ini biasanya dilakukan pada waktu bayi mencapai usia tiga bulan. Yang memimpin upacara biasanya datuk juga. Dengan didahului oleh datuk yang menggendong cucunya, keluarga dan para tetangga beramai-ramai menuju ke sungai. Mula-mula bayi itu diletakkan di dalam tangguk, sejenis keranjang dari rotan, lalu dimandikan dengan air yang sudah dicampur dengan air limau. Mandi itu lazimnya disertai pembacaan doa.

Pada Marga Jejawi adat bayi keluar rumah itu agak berbeda (5, p. 8). Bayi baru boleh dibawa keluar rumah, setelah empat puluh hari.

Yang menggendong pertama kali keluar rumah ialah ibunya sendiri. Sementara berjalan bayi itu dipayungi oleh ibunya. Sunting atau paku yang ditusukkan pada bawang dibawa juga sebagai penangkal.

Perjalanan pertama itu biasanya menuju ke rumah neneknya. Kemudian barulah dibawa kerumah keluarga yang lain dan para tetangga. Jika sampai bermalam di rumah neneknya, maka menurut adat nenek memberikan hadiah kepada cucunya.

## 5. Sunat atau khitan

Upacara khitanan atau sunat Rasul ini tidak sama dan cara melakukannya. Ada yang melakukannya pada waktu anak itu masih sangat kecil, tetapi ada juga sesudah berusia 4 - 10 tahun. Untuk melaksanakan upacara khitanan ini biasanya dipilih hari, yang baik. Biasanya sesudah hari raya lebaran, pada bulan Ruwah atau Sya'ban, atau pada waktu anak itu libur sekolah.

Upacara khitanan ini ada sederhana, dan ada pula secara besar-besaran.

Jikalau orang tua anak itu orang berada, maka segenap keluarga dan tetangga diundang. Anak yang akan dikhitankan diberi berpakaian yang seindah-indahnya, kadang-kadang seperti seorang haji atau berpakaian adat. Anak ini diarak beramai-ramai berkeliling kampung dengan diringi rebana dan musik terbang. Pada malam harinya diadakan pertunjukan pencak silat, *dul muluk* semalam suntuk. Anak itu biasanya turut menonton.

Pada waktu akan dikhitankan anak itu disuruh berendam beberapa lamanya di sungai, untuk mengurangi rasa sakit dan tidak terlalu banyak mengeluarkan darah. Pengkhitanan dilakukan pada waktu subuh. Ia didudukkan pada sebuah bangku yang rendah. Di bawah anak itu disediakan tempurung kelapa yang berisi abu dapur, untuk menampung darah. Kemudian anak itu dibaringkan di tengah rumah, sehingga para tamu dapat menjenguk, dan setiap tamu biasa-



nya memberi hadiah berupa uang. Setelah disunat anak itu dilarang berjalan terutama di tanah. Anak itu diharuskan pula membawa penangkal, atau sapu kecil untuk membersihkan kotoran.

## **6. Potong gigi**

Adat atau kebiasaan memotong gigi ini tidak banyak diperhatikan lagi oleh generasi sekarang, karena adat kebiasaan ini biasanya mengganggu dan merugikan kesehatan gigi. Dahulu ada beberapa macam cara memotong gigi, yaitu : sampai semua takhalan rata, memotong gigi itu lancip-lancip, mengorok penampang gigi, dan membuat alur yang membujur pada bagian luar gigi seri yang di atas (2, p. 50). Yang banyak dilakukan ialah memotong gigi sehingga semuanya kelihatan rata.

Waktu upacara memotong gigi tidak tentu. Adakalanya pada waktu khitanan, tetapi adakalanya pada waktu sebelum nikah. Peristiwa memotong gigi ini disertai selamatan.

## **B. Perkawinan**

Jikalau di Tanah Toraja dan Bali orang mengutamakan peristiwa kematian, maka di Sumatera Selatan orang rupanya lebih mengutamakan peristiwa perkawinan.

### **1. Perkawinan di luar Palembang**

Pada umumnya di Sumatera Selatan di luar kota Palembang ada tiga macam perkawinan, yaitu : perkawinan jujur, perkawinan ambil anak dan perkawinan menurut adat rasan sama suka.

#### **a. Kawin jujur**

Di zaman Pemerintahan Hindia Belanda dulu, uang jujur yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan biasanya f. 1000 sampai f. 8000, tergantung pada kedudukan orang tua si gadis.

Uang jujur itu cukup tinggi, ternyata dari harga-harga barang pada waktu itu (7, lampiran, A).

Kerbau besar seekor f. 26,--

Kerbau kecil seekor f. 22,--

Kambing besar seekor f. 11,--

Kambing kecil seekor f. 6,--

Domba besar seekor f. 17,--

Domba kecil seekor f. 8,--

Ayam seekor f. 0,50

Beras tiga gantang f. 1, (1 gantang  $\cong$  5 kati), sedang 1 kati = kira-kira 617,5 gram. Jadi 1 gantang = lebih dari 3 kg).

Mahalnya uang jujur tersebut menyebabkan adanya bujang lapuk, perawan tua, dan kawin lari.

Pada adat perkawinan jujur pihak laki-laki seolah-olah *membeli* isteri. Segala milik suami adalah hak suami itu sendiri. Bahkan isterinya itu dianggap harta miliknya pula, berikut anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak perempuan seolah-olah dianggap harta benda pula yang dikawinkannya kelak dengan menerima uang jujur. Isteri dapat dikatakan tidak mempunyai hak waris.

Jika suaminya meninggal dunia, maka janda itu ditanggung oleh keluarga terdekat suaminya, bahkan sering pula diperisterikan oleh saudara almarhum suaminya. Perkawinan ipar ini disebut *nyemalang* atau *anggau*.

Di daerah yang masih melazimkan *adat nyemalang* atau *adat anggau* ini seolah-olah wanita itu dipaksa kawin lagi dengan seorang iparnya. Adat ini memang ada hubungannya dengan uang jujur. Jika'au anak-anak perempuan janda itu kawin, maka uang juurnya jatuh ke tangan keluarga suami.

Seandainya janda itu kawin dengan laki-laki lain, maka uang jujur dari suami kedua ini jatuh kepada keluarga almarhum suaminya.

#### **b. Kawin ambil anak**

Bentuk perkawinan *ambil anak* ini biasanya dilakukan apabila keluarga orang mempunyai kedudukan terhormat tidak mempunyai keturunan laki-laki, tetapi mempunyai anak perempuan. Anak perempuan ini biasanya yang tertua, dikawinkan dengan cara *ambil* anak. Pihak laki-laki tidak diwajibkan membayar, bahkan tidak usah mengeluarkan biayanya sama sekali. Semuanya akan ditanggung oleh pihak perempuan. Tetapi suami ini harus tinggal dan menetap di rumah orang tua atau keluarga isterinya, dan tidak mempunyai hak apa-apa.

Anak-anak yang lahir jatuh ke pihak keluarga isterinya. Perkawinan ambil anak ini sering pula terjadi apabila orang yang mempunyai kedudukan terhormat tersebut sudah lanjut usianya, mempunyai seorang anak perempuan sulung yang sudah mencapai usia kawin dan anaknya yang laki-laki masih kecil atau karena suatu sebab belum atau tidak dapat dikawinkan.

Perkawinan ambil anak punya segi-segi kejanggalan, yaitu jika isteri masih mempunyai saudara laki-laki, suami harus turut membantu keluarga isterinya untuk memenuhi uang jujur waktu iparnya itu kawin.

Perkawinan ambil anak tidak begitu menarik bagi pemuda-pemuda yang mempunyai harga diri yang tinggi, sungguhpun ia tidak perlu memikirkan uang jujur.

Jadi baik perkawinan jujur yang terlampau berat maupun perkawinan ambil anak yang merugikan dan mengurangi harga diri pemuda, menjadi penghalang utama perkawinan;

### c. Kawin suka sama suka

Kawin suka sama suka atau *perkawinan menurut adat rasan sama suka* lebih disenangi karena hak dan kedudukan suami-isteri sama.

Di daerah dimana perkawinan suka sama suka dilazimkan, jumlah pemuda dan gadis yang terlambat kawin jauh lebih sedikit dari pada di daerah dimana adat kawin jujur diutamakan.

## 2. Pelaksanaan perkawinan

### a. Pihak laki-laki melamar

Jika seorang pemuda ingin mengawini seorang gadis pilihannya, maka pemuda itu menyatakan keinginannya kepada orang tuanya. Maka berundinglah keluarga, terutama ibu dan ayah pemuda itu. Jikalau setuju, merekapun mengutus seorang yang mahir serta pandai bersilat lidah. kepada keluarga atau langsung orang tua gadis. Biasanya berkat keahlian bersiasat dan pandainya utusan itu memilih kata-kata yang tepat, maka ia memperoleh jawaban yang diinginkan.

Kemudian orang tua dan keluarga pihak laki-laki dengan berpakaian yang sebaik-baiknya menuju rumah pihak perempuan dengan membawa dua mukun dodol (mukun = bokor yang bertutup), dua mukun wajik, dan uang sebanyak f. 10 sampai f. 100.

Barang-barang yang dibawa itu, dipersembahkan dengan diiringi kata-kata berbunga. Persembahan itu diterima dengan kata-kata berbunga pula dan biasanya diakhiri dengan kata-kata : "pengharapan tuan akan dipelihara". Artinya pihak laki-laki akan dipertimbangkan. Keputusan belum diambil.

Kira-kira sebulan sampai enam bulan kemudian, per kunjungan itu diulangi oleh pihak laki-laki. Kali inipun mereka membawa antaran sebanyak dua kali lipat dari antaran pertama kali.

Maka terjadilah lagi pembicaraan dengan kata-kata berbunga. Kemudian pihak perempuan menjawab "pengharapan tuan sudah tumbuh". Kali inipun belum ada jawaban yang pasti.

Tidak lama kemudian dilakukanlah per kunjungan yang ketiga kalinya. Kali ini jumlah rombongan tidak begitu banyak lagi, dan tidak pula membawa antaran.

Setelah ada persetujuan, maka ditentukanlah hari pernikahan, dan besarnya uang jujur.

Kemudian pihak laki-laki mengundang orang-orang sedusun untuk diberi tahu tentang pernikahan itu. Setelah selamat dipukul gong beberapa kali, dan tuan rumah mengucapkan terima kasih, serta mohon bantuan mereka. Hadirinpun memberikan sumbangan sukarela yang disebut *mumpung*.

Menjelang perkawinan, keluarga pihak laki-laki membawa juadah yang terdiri dari sepinggan dodol atau gula tebu, yang akan dibawa ke rumah pihak

perempuan pada hari pernikahan. Jumlah pinggan itu biasanya sampai dua ratus buah.

Pagi-pagi pada hari pernikahan itu diaturlah sebuah arak-arakan menuju rumah pihak perempuan. Pengantin laki-laki berpakaian pengantin resmi, dengan keris di pinggang. Setelah tiba, dengan suatu upacara, diserahkanlah maskawin yang disebut *pengangkan* kepada wakil orang tua pengantin perempuan.

Setelah semuanya masuk ke dalam rumah, maka dilangsungkan upacara akad nikah menurut cara Islam. Pengantin laki-laki menyerahkan maskawin kira-kira f. 5,625 kepada pihak perempuan.

Setelah upacara akad nikah selesai, maka semua orang menuju ke rumah orang tua pengantin laki-laki. Setibanya di depan rumah dilakukanlah *upacara menimbang* pada timbangan besar yang telah disediakan. Daun neraca yang sebelah diganti dengan kursi pengantin, dan pada daun neraca yang sebelah lagi diletakkan maskawin dan buah-buahan. Para hadirin menaruhkan sumbangan uang, biasanya dengan mengucapkan: "saya menimbang lima rupiah". Biasanya sumbangan itu satu sampai dua puluh lima rupiah. Nama dan jumlah sumbangan tiap-tiap orang dicatat, dan daftar sumbangan itu diserahkan kepada pengantin untuk disimpan. Kelak, jika orang-orang yang tersebut namanya dalam daftar itu mengawinkan anaknya, ia harus menyumbang paling sedikit sama dengan sumbangan yang diterimanya.

Sesudah itu para hadirin masuk ke dalam rumah untuk bersantap. Pada malam harinya kedua orang pengantin itu dibawa ke rumah keluarga ibu pengantin laki-laki. Di sini diadakan pesta semalam suntuk. Para *anak milur* (biasanya pelawak wanita yang sudah bersuami) menghibur para hadirin. Setelah hari siang kedua orang pengantin dan para pengiringnya kembali ke rumah orang tua pengantin laki-laki. Pada malam harinya diadakan lagi pesta. Pada malam harinya diadakan lagi pesta. Pada malam hari berikutnya seluruh keluarga pihak pengantin perempuan diundang. Pada saat inilah tali kekeluargaan antara kedua belah pihak dijalin.

#### b. Kawin lari

Jikalau seorang pemuda atau bujang secara diam-diam sudah sepakat dengan gadis pilihannya untuk melakukan kawin lari yang sering juga disebut *kawin bergubalan*, maka ditetapkanlah waktu gadis itu akan meninggalkan rumahnya. Pemuda itu menyembunyikan gadis pilihannya di hutan atau di rumah salah seorang keluarganya atau sahabat karibnya. Kemudian pemuda itu pun memberitahunya kepada orang tuanya sendiri. Maka ayah pemuda memberitahunya kepada kepala dusunnya. Pada waktu itu juga ayah si bujang itu menyampaikan *tekan-tekan* sebanyak delapan talem beras dan *uang pelayan* sebesar enam ringgit.

Uang pelayan itu dibagi sebagai berikut: dua ringgit untuk Pasirah atau Depati, dua ringgit untuk Proatin atau Kerio, dan tiap penggawa masing-masing satu ringgit.

Jika gadis dan bujang tinggal di marga yang berlainan, maka uang pelayan itu dibagi dua dan sama banyak antara kedua marga itu untuk dibagi-bagikan lagi kepada para kepala dan pamong kedua marga itu masing-masing.

Setelah diberitahukan tentang peristiwa gadis dilarikan itu, maka Proatin atau Kerio dusun memberitahukan dan memerintahkan Penggawa kampung tempat tinggal gadis itu untuk menyampaikan peristiwa tersebut kepada orang tua gadis yang dilarikan itu. Pada saat itu juga oleh orang tua si bujang dikirimlah seorang utusan kerumah orang tua gadis itu untuk mengadakan penajakan dan mendengar tentang keinginan orang tua gadis itu. Utusan itu biasanya membawa uang, misalnya lima puluh rupiah sebagai uang jujur. Jika tidak diterima, berarti jumlahnya kurang memadai. Maka utusan itu terpaksa kembali untuk mengambil tambahan uang. Sering terjadi utusan itu bolak-balik sampai empat atau lima kali barulah uang jujur itu diterima. Penolakan itu bukanlah sekedar asal menolak saja. Kawin lari ini ialah salah satu jalan keluar untuk menghindari uang jujur yang terlalu tinggi, sehingga di dalam peristiwa ini tidak mungkin orang tua gadis yang dilarikan itu menuntut uang jujur yang terlampau tinggi. Di dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa orang tua gadis itu memiliki kedudukan yang lemah. Akan tetapi di balik itu ia juga harus menjaga gengsi dan martabatnya.

Sebenarnya jumlah uang jujur pada kawin lari seperti ini sudah dapat diperkirakan, biasanya menurut keadaan dan kedudukan orang tua gadis itu. Salah satu hal yang juga penting dan sering diperhitungkan orang ialah uang jujur yang diterima oleh ibu gadis itu pada waktu ia kawin dahulu.

Jikalau persoalan ini sudah dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, maka barulah bujang dan gadis itu dinikahkan secara Islam. Pesta dan upacara perkawinannya tidaklah begitu besar (2, p. 500).

### **3. Beberapa contoh khusus**

#### **A. Perkawinan pada Marga Buay Pemaca**

##### **1) Perkawinan menetap**

Pada adat perkawinan menetap ini, suami menetap di rumah orang tua atau keluarga isterinya sampai akhir hayatnya dan segala keperluannya sudah menjadi tanggung pihak isterinya.

##### **2) Perkawinan jujur**

Pada adat perkawinan jujur ini pihak suami membayar uang jujur. Jumlahnya menurut permufakatan antara kedua belah pihak. Setelah perkawinan, istri ikut menetap pada keluarga suami.

### 3) Perkawinan Semendo Cumber Singkat

Menurut adat perkawinan ini, si bujang atau pemuda mengikuti keluarga isterinya, akan tetapi dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam sebuah surat perjanjian yang dibuat di hadapan Pemerintah setempat. Di dalam surat perjanjian itu biasanya dicantumkan misalnya: Apabila adik si gadis itu sudah kawin, atau apabila orang tua isterinya itu meninggal dunia dan sebagainya, barulah kedua orang suami-isteri itu dapat, jika mereka menghendaknya, meninggalkan keluarga gadis itu untuk mencari tempat tinggal lain.

### 4) Perkawinan Semendo Cancang Jurai

Pada adat perkawinan Semendo Cancang Jurai ini suami diambil dan dijadikan anak kandung sendiri oleh pihak orang tua isterinya, sehingga segala harta waris yang ada pada pihak isteri diserahkan sepenuhnya kepada suami itu. Biasanya adat perkawinan semacam ini terjadi apabila orang tua pihak laki-laki bukan orang yang mampu atau berada, sehingga tidak berkeberatan melepaskan anak laki-laknya kepada besannya sendiri (3, p. 24).

### 5) Perkawinan Semendo Raja-raja

Pada adat perkawinan ini kedua pengantin itu mempunyai dua pilihan tempat tinggal, yaitu keluarga suami, atau keluarga pihak isteri.

#### b. Perkawinan pada Marga Jejawi

Pada Marga Jejawi dikenal bentuk perkawinan yang disebut: rasan tua, rasan muda, dan tindih gadih (5, p. 11-15).

##### 1) Rasan tua

Jikalau seorang bujang dan seorang gadis sudah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, maka sebaiknya bujang dan gadis itu meminta persetujuan dan memohon doa restu orang tua masing-masing. Kemudian hal ini menjadi persoalan orang tua kedua belah pihak dan melalui tahap demi tahap, akhirnya memuncak pada upacara akad nikah. Bentuk perkawinan ini disebut rasan tua.

##### 2) Rasan Muda

Selain rasan tua dikenal pula bentuk perkawinan yang disebut rasan muda atau *gubahan* atau *berlarian*, yaitu kawin lari. Rasan muda ini biasanya dilakukan jika si pemuda dan pemudi khawatir hubungan mereka tidak disetujui oleh kedua pihak keluarga, atau hanya disetujui oleh satu pihak saja. Adakalanya juga dilakukan untuk menghindari kebiasaan orang tua yang sering ingin mengawainkan anaknya dengan pilihannya sendiri, tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Jikalau seorang bujang dan pacarnya sudah mufakat untuk kawin lari, maka mereka pergi ke rumah pamong (Pasirah, Penghulu, Kerio, Penggawa atau

Khatib) setempat, atau ke rumah pamong daerah lain. Kemudian pamong itu menanyakan kepada kedua orang muda-mudi itu, terutama kepada si gadis apakah perbuatannya itu karena dipaksa oleh si pemuda atautkah suka sama suka.

Setelah memperoleh ketegasan dari kedua orang muda-mudi itu, maka pamong itu memanggil orang tua kedua pihak dan memberitahukan bahwa anak mereka telah *bergubalan*.

Biasanya orang tua si gadis berusaha menggagalkan baik dengan sungguh-sungguh maupun hanya berpura-pura saja dengan maksud menjaga gengsi. Jika tidak digagalkan lagi, maka orang tua kedua belah pihak mengadakan perundingan tentang rencana dan pelaksanaan perkawinan anak mereka, dengan disaksikan oleh pamong.

Bentuk perkawinan ini jarang sekali, karena dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pembunuhan.

### 3) Tindih gadih.

Sifat dan latar belakang bentuk perkawinan yang disebut tindih gadih ini hampir sama dengan rasan muda. Bedanya, di sini gadis tidak turut lari, tetapi si bujang membawa sesuatu benda atau barang yang diberikan oleh gadis, dan menyerahkannya kepada pamong dengan mengatakan ia tindih gadih dengan seseorang gadis. Barang yang diserahkan gadis kepada pemuda pilihannya itu disaksikan oleh seorang laki-laki atau wanita.

Kemudian pamong memanggil orang tua gadis, dan menanyakan apakah barang-barang itu kepunyaan anak gadisnya. Dahulu pemberitahuan adanya tindih gadih dilakukan dengan memukul kenong atau gong, dan orang sekampung berdatangan.

Kalau barang tersebut benar kepunyaan anaknya, maka adat mengharuskan dia untuk mengawinkan anak gadisnya dengan bujang yang membawa barang-barang tersebut, walaupun dia atau keluarganya tidak setuju. Oleh karena itu bujang-bujang di sini lebih senang mengadakan tindih gadih dari pada rasan muda karena risikonya tidak terlalu berat.

## 4) Adat perkawinan di kota Palembang dan sekitarnya

### a. Jalannya upacara

Sebagai contoh terakhir upacara adat perkawinan adalah yang dilazimkan di kota Palembang dan sekitarnya. Di depan telah diuraikan bahwa susunan masyarakat di daerah pedalaman Sumatera Selatan. Pengaruh feodalisme di kota itu sedikit banyak masih terasa sebagai warisan zaman kesultanan Palembang, termasuk adat perkawinannya

Demi menjaga martabatnya, orang tua gadis yang merasa dirinya orang yang berkedudukan terhormat dalam masyarakat, tidaklah sembarangan menerima

pinang terhadap anak perawannya. Sementara itu mereka takut puterinya menjadi perawan tua. Di sinilah letak kesukaran suatu keluarga terhormat, yang susunan masyarakatnya seperti diterangkan di atas. Pun suatu keluarga yang mempunyai anak bujang bukan tidak mengalami kesukaran pula, karena juga seorang pemuda yang terlalu lama melajang dianggap membawa aib kepada keluarga itu. Mereka takut dikatakan seolah-olah anak laki-laki mereka tiada laku.

Jika suatu keluarga mempunyai anak laki-laki yang sudah menanjak dewasa, maka keluarga itu mulai mencari-cari siapakah gerangan yang patut menjadi isteri anaknya itu. Jikalau sudah tercapai kata sepakat, maka dimulailah dengan tahap yang disebut *madik*, yakni mengadakan semacam penelitian terhadap gadis dan keluarganya.

Biasanya, *madik* dilakukan oleh seorang perempuan tua yang sudah biasa dalam pekerjaan itu. Wanita itu biasanya pandai menyusup ke dalam rumah keluarga gadis yang dikehendaki itu. Caranya bermacam-macam. Adakalanya menyamar sebagai orang yang menjual kue-kue atau barang-barang lainnya. Penyelidikan itu biasanya mengenai tingkah laku, kecekatan dan kepandaianya bekerja, kecantikannya, cacat-celanya, kemungkinan diterima atau tidaknya penangan mereka nanti, atau apakah gadis itu ibarat bunga sudah ada yang empunya, dan sebagainya.

Cara melakukan *madik* ini haruslah berhati-hati. Demikian pula sangatlah aib jika misalnya ibu gadis itu pada tahap ini sudah menampakkan keinginannya hendak mengawinkan anak gadisnya. Sebaliknya, andaikata pun ia tidak menghendaki pemuda itu, ia tidak boleh pula langsung, apalagi secara kasar menolaknya.

Untuk memberi gambaran betapa hati-hatinya kedua belah pihak contoh dialog dikemukakan dibawah ini.

"Besarnya remajalah sudah tampaknya anak gadis encik. Disertai pula dengan kecantikan yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berbahagialah pemuda yang dapat mempersunting bunga yang demikian indah dan semerbak baunya. Di mana bunga sedang kembang ke situ tentu kumbang terbang. Bagaimana pendapat encik jika ada kumbang datang menyeri bunga?"

Maka ibu gadis itu akan menjawab kira-kira sebagai berikut: "Ah, janganlah terlalu disanjung dan diangkat benar, takut awak jatuh merangkak. Anak kami buruk rupa dan belum tahu apa-apa, umur baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang. Mana kumbang datang menyeri dan walaupun ada, baik juga disebut dari arah mana datangnya kumbang?"

Jika ada gambaran diterima, maka gambaran itu disampaikanlah oleh telangkai itu kepada orang tua si pemuda.

Adakalanya pula sebelum orang tua laki-laki meningkat ke tahap kedua, pihak orang tua gadis juga dengan sangat berhati-hati melakukan penelitian terhadap pemuda yang akan menjadi calon menantunya. Penelitian ini diang-



gap perlu karena orang tua gadis itu harus berhati-hati menerima pinangan orang, apalagi jika orang itu tidak begitu dikenalnya. Perkawinan itu sangat menentukan nasib anak gadis kemudian.

”Bangsal diulu kerapatan  
Sayang durilah gugur bunganya  
Sesal dahulu pendapatan  
Sesal kemudian apa gunanya”

Dengan demikian maka mereka lebih bersiap-siap menghadapi tahap berikutnya yang disebut *berasan*.

Pada tahap *berasan* pihak keluarga laki-laki mengirimkan perutusan untuk melamar. Maka berlangsunglah ajuk-mengajuk, dan bersilat lidah antara kedua pihak. Masing-masing menyediakan jagoan bersilat lidahnya. Soal *maskawin* dan *enjukan* yakni permintaan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai syarat untuk diterima lamarannya dirundingkan pula.

Selanjutnya menyusul tahap *memutus kato*, yang diadakan di rumah keluarga pihak perempuan. Rombongan pihak laki-laki yang biasanya terdiri dari orang laki-laki yang tua-tua datang dengan membawa *antaran* berupa kue-kue, dan tenong-tenong (bakul yang bentuknya bundar bentuknya dan bertutup) yang lazimnya berisi gula pasir, terigu, telur dan lain-lainnya. Sementara itu di rumah pihak perempuan sudah siap keluarga dan para tetangga yang diundang untuk menghadiri upacara *memutus kato* itu. Dalam upacara ini diadakan acara makan minum dan diumumkanlah bahwa lamaran sudah diterima dengan baik. Hari dan bulan pernikahan ditentukan pula, berikut pengumuman banyaknya *maskawin* dan *enjukan*, yang sesungguhnya sudah dirundingkan pada upacara *berasan*. *Enjukan* ini dapat disamakan dengan uang jujur di daerah pedalaman, dan besarnya merupakan kunci yang dapat menghambat berlangsungnya sesuatu perkawinan.

Jikalau pihak perempuan menyetujui lamaran pihak laki-laki dan bersimpati padanya, maka *enjukan* itu tidak terlalu memberatkan pihak laki-laki. Akan tetapi jikalau pihak perempuan tidak begitu setuju maka untuk menggagalkan lamaran, pihak perempuan sering mengajukan permintaan yang berat-berat. Jadi *maskawin* dan terutama *enjukan* dapat dipergunakan oleh pihak perempuan untuk menolak lamaran seorang laki-laki yang tidak disetujuinya. *Maskawin* adalah persyaratan dari hukum Islam, sebagai tanda pengesahan dan peneguh pernikahan. Sedangkan *enjukan*, seperti juga uang jujur di daerah pedalaman adalah pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dilazimkan oleh adat.

Sebagaimana uang jujur di pedalaman yang bertingkat-tingkat taripnya sesuai dengan kedudukan keluarga si gadis, maka demikian pulalah di kota Palembang dan sekitarnya. Apalagi pengaruh kesultanan Palembang masih cukup terasa dan susunan masyarakatnya lebih bertingkat-tingkat serta cukup tajam.

Masalah *enjukan* ini disebut *adat berangkat*, yang terbagi atas: adat berangkat tiga turunan, adat berangkat duo penyeneng, dan adat berangkat adat mudo.

Yang terberat ialah *adat berangkat tiga turunan*. Pengantin laki-laki harus memberikan barang-barang persembahan yang terdiri dari serba tiga, antara lain: tiga kain dan tiga baju songket yang mahal-mahal dengan pengiring-pengiringnya berupa perabot atau alat-alat rumah-tangga, pakaian, perhiasan dan makanan. Karena beratnya, maka adat ini boleh dikatakan tidak begitu banyak dipergunakan orang lagi.

Lebih ringan daripada adat ini, ialah *adat berangkat duo penyenang*, yakni pemberian pihak laki-laki berupa barang-barang yang terdiri dari serba dua, antara lain: dua kain dan baju kebaya songket dan pengiringnya seperti tersebut di atas.

Yang paling ringan ialah *adat berangkat adat mudo*, yakni pemberian atau hadiah perkawinan yang terdiri dari serba satu saja.

Selain dari pada ketiga macam adat berangkat tersebut di daerah ini orang masih mengenal bermacam-macam enjukan yang sering disebut: *adat tebas*, *adat tebus*, dan *adat buntel kadut*.

Yang dimaksud dengan adat tebas ialah pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan itu diibaratkan sebuah parang yang dapat menebas atau membat rumput-rumput ilalang yang mungkin dapat menjadi penghalang perkawinan itu. Sedang adat tebus ialah hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki untuk menebus hutangnya agar dapat melaksanakan perkawinan yang dikehendaknya itu dengan sebaik-baiknya.

Enjukan yang paling ringan ialah yang lazim disebut *adat buntel kadut*. Pada adat ini terserah pihak laki-laki untuk memberikan apa saja kepada pihak perempuan, namun paling sedikit ia harus memberikan antara lain: maskawin, pengiring maskawin berupa manggis kertas satu lusin berisi uang kecil, baham makanan dalam dulang satu lusin, kain dodot, pakaian sehari, piring mangkok sebagai *gegawan*, uang kontan sekian ribu (8. p. 57).

Karena upacara perkawinan itu biasanya diadakan di rumah pihak perempuan, maka segala biaya peralatan, sedekah dan lain-lainnya ditanggung oleh pihak perempuan. Jadi pihak laki-laki hanya mengeluarkan biaya untuk maskawin dan enjukan saja. Tetapi adakalanya juga dilazimkan untuk mengadakan perundingan seandainya pihak perempuan tidak sanggup membiayai, terutama upacara *munggah*. Bantuan pihak laki-laki ini sering disebut *uang hangus* atau *barang hangus*.

Tahap selanjutnya ialah upacara *akad nikah* yang biasanya dilakukan menurut adat atau cara Islam, di rumah pihak laki-laki, beberapa hari sebelum pengantin laki-laki itu diarak ke rumah pengantin perempuan pada upacara *munggah*. akan tetapi sebelum pengantin laki-laki itu diarak. Orang tua perempuan diundang oleh besannya. Hal ini disebut *ngulemi besan* atau *mengundang besan*.

Sebaliknya jikalau upacara dilakukan di rumah orang tua pengantin perempuan, seperti misalnya pada upacara munggah, maka keluarga pihak laki-laki diundang oleh oleh orang tua pihak perempuan. Demikian pula pada upacara *nyemputi* nanti. Mengundang ini dianggap penting, demi untuk saling harga-menghargai. Sungguhpun orang tua kedua belah pihak sudah tahu betul tentang upacara-upacara yang akan diadakan dalam rangkaian perkawinan anak mereka itu, namun *ngulemi besan* itu haruslah dilakukan secara formil seolah-olah mereka belum tahu tentang jadwal dan waktu upacara-upacara dalam rangkaian perkawinan itu. Jikalau besan tidak sampai diulemi, maka sering mereka tidak mau datang. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi para, hadirin yang mengerti tentang adat-istiadat di negeri ini dan mungkin dapat menimbulkan hal-hal yang tidak enak.

Meriah atau tidaknya upacara akad nikah tergantung kepada mampu tidaknya keluarga pihak pengantin laki-laki.

Pada upacara akad nikah ini biasanya diadakan kenduri. Pengantin laki-laki biasanya berpakaian haji, Jikalau antara upacara akad nikah dan upacara munggah ada berselang beberapa hari, maka sebelum upacara munggah, terlebih dahulu harus dilakukan beberapa hal seperti *mengantar keris* dan *'ngocek bawang*.

Setelah upacara akad nikah, sungguhpun secara resmi dan menurut hukum, kedua pengantin sudah menjadi suami isteri yang sah, namun menurut adat yang dilazimkan, pengantin laki-laki itu masih harus berada di rumahnya sendiri sebelum upacara munggah dilaksanakan. Maka sebagai pengganti pihak pengantin laki-laki mengirim sebilah keris dengan suatu perutusan yang resmi, yang terdiri dari orang-orang perempuan yang mahir berkata-kata.

Selanjutnya dua hari sebelum upacara munggah, berlangsung pula kegiatan kegiatan di rumah pengantin perempuan, yaitu *ngocek bawang kecil* sedang sehari sebelum upacara puncak itu kegiatan-kegiatan itu disebut *ngocek bawang besar*. Istilah ini berarti mengupasi bawang. Istilah ini menggambarkan kegiatan-kegiatan atau masak-memasak yang akan dihidangkan dalam upacara munggah. Sanak saudara, keluarga yang jauh dan dekat serta para tetangga biasanya datang membantu. Pada hari *ngocek bawang besar* itulah biasanya sapi atau kambing serta ayam disembelih. Masak-memasak ini biasanya dipimpin oleh seorang atau dua orang ahli yang disebut *panggung*.

Dalam upacara munggah pengantin laki-laki berpakaian adat kebesaran yang disebut *panganggon* diarak dengan diiringi oleh pemain-pemain rebana dan penyanyi menuju ke rumah pengantin perempuan. Arak-arakan ini dimulai pada jam 12.00. Musik rebana itu lazimnya diiringi dengan lagu dan nyanyian yang berbahasa Arab. Pemain-pemain rebana biasanya berpakaian jas, kopian dan kain tajung atau kain pelekat. Pengantin laki-laki dituntun dan dipayungi, sedang sebagian pemain rebana dengan rombongan penyanyinya berjalan mundur karena mereka menghadap ke arah pengantin laki-laki yang berjalan mengikuti irama dan lagu rebana itu.

Setibanya dirumah pengantin perempuan, para pemain musik rebana dan rombongannya berhenti berjalan dan tetap tinggal di luar seraya menghabiskan sisa lagunya, sedang pengantin laki-laki dibimbing masuk setelah lebih dahulu pengiringnya menyerahkan *bunga langsih*. Ia disambut oleh seorang tua perempuan, lalu didudukkan di atas pelaminan bersanding dengan pengantin perempuan yang sudah sejak pagi duduk dengan berpakaian adat pula. Barulah para tamu diaturlah ngeningkup atau dipersilahkan merapat dan bersantap.

Setelah kedua pengantin duduk bersanding, maka kepada pengantin laki-laki diberikan kapur sirih sekinangan. Kemudian dengan perantaraan seorang perempuan yang disebut *penunggu jero* kapur sirih kinangan itu diserahkan kepada pengantin perempuan. Persembahan sirih itu disebut *sirih penjapo*, yang berarti untuk berkenalan.

Pada waktu itu diadakan pula upacara yang disebut *menimbang penganten*. Timbangan penganten ini terbuat dari kayu, dicat dan diukir dengan indah. Pada daun neraca sebelah kiri diisi dengan uang yang dilapisi sehelai kain batik, kain songket dan bunga tujuh warna dalam sebuah mukun atau bokor bertutup. Pada talam yang lainnya lagi diletakkan tangan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Pada waktu menimbang itulah biasanya dibacakan doa selamat. Upacara ini biasanya mendapat perhatian yang besar sekali.

Selain ini ada pula upacara *pengantin makan*. Mula-mula pengantin laki-laki *mendulangi* atau menyuapi penganten perempuan nasi kunyit panggang ayam, sebanyak dua atau tiga kali. Kemudian mereka makan bersama di dalam kamar.

Selain mengatur segala upacara dan bertanggung jawab atas segala perhiasan yang dipakai upacara, tugas *tunggu jero* juga memperkenalkan dan mengakrabkan kedua pengantin. Bahkan sejak hari pertama sampai selesainya upacara tunggu jero tidur di kamar pengantin.

Karena pada waktu pengantin laki-laki meninggalkan rumahnya ia tidak membawa pakaian apa-apa selain dari pada *penganggong* yang dipakainya, maka pada malam harinya serombongan pemuda dari pihak keluarga pengantin laki-laki datang membawakan tas pakaian pengantin laki-laki itu. Pengantaran pakaian ini disebut *upacara ngaterke bangking*. Pada upacara ini di rumah pengantin perempuan diadakan keramaian yang sering disertai musik gambus. Upacara ini lazimnya dihadiri oleh para bujang dan gadis. Orang-orang tua biasanya tidak ikut.

Upacara ini kemudian disusul oleh upacara perkunjungan antara keluarga kedua belah pihak, dan disebut *nyanyoi pengantin*.

Setelah pengantin laki-laki satu atau dua malam bermalam di rumah pengantin perempuan maka kedua pengantin diajak bermalam di rumah keluarga laki-laki. Ajakan keluarga pihak pengantin laki-laki ini disebut *nyumputi pengantin*, dan tidurnya disebut *nglaeturon* yang artinya pindah tidur. Biasanya

rombongan berangkat sesudah asar. Di rumah pengantin laki-laki diadakan selamatan, diikuti oleh keramaian pada malamnya.

Setelah kira-kira dua hari kedua mempelai kembali lagi ke rumah pengantin perempuan, dengan diiringi oleh suatu rombongan pula. Iring-iringan ini membawa barang-barang yang disebut *gegawan*, terutama terdiri dari pecah-belah, pakaian dan makanan. Di rumah pengantin perempuan keramaian diadakan lagi.

Pada waktu kembali inilah diadakan upacara *mandi simburan*. Kedua pengantin itu dimandikan dengan air wangi-wangian dengan bermacam-macam ramuan oleh beberapa orang keluarga kedua belah pihak. Setelah selesai terjadilah saling siram-menyiram air di antara para hadirin.

Sehari setelah upacara mandi simburan itu maka datanglah lagi keluarga pihak pengantin laki-laki membawa ketan kunyit panggang ayam serta bedak keramas *kembang setahun* dan juadah. Kedua pengantin *ditepung tawari* dan keramas dengan air bunga tujuh rupa. Sesudah itu kedua pengantin diberi berpakaian biasa. Maksud upacara itu ialah keselamatan bagi kedua pengantin mulai saat itu kedua pengantin itu tidak perlu lagi diatur dan diawasi. Mereka sudah bebas sebagai suami isteri.

Menurut adat yang dilazimkan di daerah ini, pengantin laki-laki sejak perkawinannya ikut ke rumah orang tua atau keluarga pihak perempuan, bahkan sering untuk selama-lamanya, kecuali apabila kedua orang pengantin baru itu pindah ke rumah mereka sendiri, atau jika ada permintaan dari keluarga pihak laki-laki untuk tinggal di rumah mereka.

#### b. Pakaian dan perhiasan pengantin

Di ibukota Palembang dan sekitarnya ada tiga macam pakaian dan perhiasan pengantin, yang lazimnya disebut *aesan penganten* atau *penganggon*, yakni : *aesan haji*, *aesan Gede*, dan *aesan Sala-Manteri*.

##### 1) Aesan Haji

Penganten laki-laki berpakaian jubah peradan (pakaian perada emas), berbaju songket pendek, selendang atau selempang songket, celana panjang berbenang emas, kancing baju intan, cincin permata, kopiah haji yang bersulam emas (oleh karena itu disebut aesan haji), tedeng atau penutup yang berbenang emas, dan terompah.

Pengantin perempuan bersanggul malang, *pak sangkong* atau ikat kening, baju kurung songket, kalung dan badong yakni pelat tipis biasanya dari pada emas, dan terompah.

##### 2) Aesan Gede

Penganten laki-laki dan penganten perempuan tidak memakai baju. Badannya dibedaki. Perhiasannya terdiri dari gelang besar, kalung, cincin permata, perhiasan telinga berbentuk sayap, selendang songket, kuluk yakni kopiah kebesaran yang dipakai raja, badong emas, keris bersarung emas, dan celana

panjang berbenang emas, sedang pengantin perempuan memakai dodot dan berkain songket.

### 3) Aesan Sala-Manteri

Pengantin laki-laki berpakaian seperti pada aesan Gede, hanya tidak memakai sumping (hiasan telinga) dan kuluk. Pengantin perempuan memakai *gandik* yakni perhiasan pada dahi, bersumping (hiasan telinga), berbaju kurung peradan dan kain songket.

## C. Kematian

Tidak seperti halnya pada suku Bali dan suku Toraja di Sulawesi yang mementingkan dan mengutamakan peristiwa kematian serta membesar-besarkan upacara kematiannya, maka di Sumatera Selatan upacara kematian itu berlangsung menurut adat kebiasaan yang dianjurkan oleh Islam dan biasanya berjalan sangat sederhana. Jangan sampai seperti kata pepatah : *Sudah jatuh ditimpa tangga* atau *antara patah lesung hilang* yang sering pula dikatakan *bajak patah banting terambau* (banting = sapi) yang maksudnya seorang yang ditimpa kemalangan berturut-turut dan di dalam hal ini sudah kematian salah seorang keluarganya harus pula mengeluarkan biaya yang sering tidak sedikit jumlahnya.

Pada waktu mendengar ada orang yang meninggal dunia, maka para tetangga, keluarga baik dekat maupun jauh, para handai taulan dan semua kenalan datang menyatakan bela sungkawa. Ada yang membawa teh, gula, kopi, beras, uang dan sebagainya, dengan maksud sekedar meringankan beban dan turut membantu keluarga yang tertimpa kesusahan itu. Sungguhpun hampir sama, ada juga perbedaan-perbedaan kecil dan hanya dilazimkan dalam lingkungan yang sangat terbatas. Sebagai contoh diuraikan secara singkat adat kematian di Marga Jejaw.

Jikalau ada keluarga yang tertimpa kemalangan kematian salah seorang anggota keluarganya, maka berita kemalangan itu disampaikan terutama kepada segenap anggota keluarga dan para tetangga. Kemudian disampaikan juga secara resmi kepada Khatib atau kepala dusun. Kemudian Khatib atau kepala dusun itu menyuruh salah seorang penduduk untuk memukul bedug sebagai tanda atau pemberitahuan kepada seluruh penduduk. Kalau yang meninggal itu seorang anak-anak, biasanya bedug tidak dipukul. Setelah penduduk mengetahui siapa yang tertimpa kemalangan ini, mereka datang dan turut membantu menyiapkan segala keperluan dalam melaksanakan pemakaman. Ada yang memotong dan mengemang papan, mengambil air, menyiapkan batang-batang pisang untuk memandikan jenazahnya, menyiapkan lubang kuburan, dan sebagainya. Orang-orang perempuan juga pada datang. Mereka biasanya membawa beras, kelapa, gula, teh dan kopi, dan ada juga uang.

Setelah keluarga, tetangga, serta kenalan datang, maka diadakanlah upacara memandikan jenazah. Adat kebiasaan memandikan jenazah dilakukan secara

Islam dan caranya tidaklah banyak berbeda dengan cara memandikan jenazah di daerah-daerah lain di Indonesia. Memandikan jenazah itu lazimnya dilakukan oleh keluarga terdekat almarhum atau almarhumah dan biasanya dipimpin oleh Khatib setempat yang dianggap orang yang terkemuka dalam soal-soal keagamaan. Sebelum memandikan jenazah, maka terlebih dahulu harus disiapkan segala keperluan untuk itu, antara lain : air sebanyak sembilan macam yang dicampur dengan bunga tujuh macam, kapas yang ditusuk (pada) lidi untuk memberishkan rongga-rongga pada tubuh orang yang meninggal, dan rongga rongga untuk membawa jenazah ke kuburan.

Pada waktu jenazah dimandikan, maka sudah harus disiapkan segala yang diperlukan untuk membungkus jenazah itu, antara lain : kain kafan berupa kain putih, kapas, kayu cendana, dan minyak wangi.

Sebelum dibungkus kepada keluarga terdekat diberi kesempatan untuk melihat almarhum atau almarhumah. Setelah dibungkus, lalu dimasukkan ke dalam rengga-rengga untuk disembahyangkan. Kalau hari itu kebetulan hari Jum'at, maka jenazah itu biasanya disembahyangkan di mesjid.

Pada waktu jenazah diangkat dari rumah untuk dibawa ke kubur diadakan pembacaan doa dan alfatihah, lalu jenazah diusung dan dibawa bersama-sama ke kubur. Setibanya di kubur keluarga terdekat almarhum atau almarhumah sudah berdiri dalam liang kubur dan menyambut jenazah itu. Tali pengikat jenazah dilepaskan, lalu mayat diletakkan dengan hati-hati kemudian seseorang "bang" atau "azan". Setelah itu, barulah liang kubur itu ditimbun beramai-ramai. Sebagai tanda biasanya dipancangkan *maesan*. Setelah selesai maka diadakan pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh Khatib. Akhirnya seseorang wakil dari keluarga yang ditimpa kemalangan itu mengadakan pidato singkat menyatakan terima kasih atas perhatian dan bantuan semua pihak dan pada waktu itu pula biasanya diharapkan para hadirin datang ke rumah almarhum atau almarhumah untuk mengadakan malam tahlil.

Pada malam, harinya berturut-turut diadakan *tahlilan*. Malam pertama disebut *turun tanah* atau *malam nyatu*. Pada malam ini diadakan pengajian dan pembacaan al-Qur'an. Para hadirin yang datang biasanya hanya disuguhi minuman serta penganan ala kadarnya. Maksud kedatangan para tetangga dan keluarga pada malam pertama sampai ketiga itu selain dari pada mengaji atau membaca ayat-ayat al-Qur'an juga untuk sekedar menghibur keluarga yang ditimpa kesusahan itu.

Malam kedua tidak berbeda dengan malam pertama. Tetapi pada malam ketiga, *meniga hari* sering disertai dengan selamatan. Kemudian sering dirusul dengan selamatan pada malam ketujuh, keempat-puluh, keseratus dan ada kalanya juga keseribu.

## B A B IX

### ADAT BUJANG GADIS DI DAERAH PALEMBANG

Di daerah Sumatera Selatan para pemuda dan pemudi merupakan golongan tersendiri yang memainkan peranan penting dalam masyarakat. Para pemuda disebut *meranay* sedang pemudinya disebut *muli*. Mereka diatur sendiri di dalam sebuah lembaga adat yang disebut *adat bujang gadis*, dan mempunyai pemimpinnya sendiri yang berada di bawah kepala marga, kepala dusun atau kepala kampung.

#### A. Gelar dan tugas

Di dusun Pasirah para pemuda-pemudi dikepalai oleh seorang *Pasirah Bujang* dan seorang *Pasirah Gadis*. Jadi Pasirah Bujang dan Pasirah Gadis merupakan pemimpin para bujang dan gadis di dalam marganya.

Di bawah Pasirah Bujang di tiap-tiap dusun ada seorang *Tuha Bujang Dusun* atau *Tua Bujang Dusun* yang disertai tugas memimpin dan mengepalai para bujang dan gadis di dusunnya. Jikalau Pasirah Bujang berhalangan, maka ia dapat diwakili oleh Tuha Bujang Dusun di tempat kedudukan Pasirah.

Di bawah Pasirah Gadis ada pula *Tuha Gadis Dusun* yang tugasnya sama dengan Tuha Bujang Dusun. Di bawah Tuha Bujang Dusun adalagi *Tuha Bujang Kampung* yang memimpin para pemuda-pemudi atau bujang gadis di tiap-tiap kampung. Hubungan antara para bujang dan gadis itu terutama pada upacara-upacara resmi atau pesta-pesta ada diatur di dalam sebuah rapat yang disebut *Rapat Bujang Gadis* atau *Rapat nulirik meranay* (1, p. 466).

Para pemimpin bujang dan gadis itu mempunyai pula nama atau sebutan-sebutan yang lain. Pasirah Bujang disebut juga Tuha Bujang, Tuha Meranay, Sindang Bulawan atau Periyay. Tuha Bujang Dusun sering juga disebut Tuha Meranay Dusun, Bujang Periksa, Bora Kopi atau Mahtata. Tuha Bujang Dusun di dusun tempat tinggal Pasirah disebut juga Radin Sindang.

Pasirah Gadis sering juga disebut Tuha Nuli dan boleh memakai gelar *Puteri*, Mutar Alam atau Agung Mutu. Jikalau Pasirah Gadis itu kebetulan anak kepala marga, maka ia digelari pula *Mignon*. Gelar ini biasanya panggilan anak perempuan tertua kepala marga. Tuha Gadis Dusun sering juga disebut Tuha Muli Dusun, Intan Mutar atau Masayu. Tuha Bujang Kampung biasa juga disebut Tuha Meranay Kampung dan sering memakai gelar seperti Panglaku, *Masagus*, *Kemas*, dan *Jamban-Liyut*.



Pasirah Bujang dibebaskan dari segala macam gawe, akan tetapi diwajibkan bersama Pasirah Gadis mengurus soal penerangan *balai* atau *sesat*, memperhatikan dan mengawasi kebersihan gedung pertemuan itu dan sekitarnya. Dalam mengatur segala macam hal, lazimnya pada upacara atau pesta-pesta dan pertemuan adat yang diselenggarakan di balai, maka bujang dan gadis memegang peranan penting.

Jikalau ada seorang bujang atau gadis yang melanggar peraturan, maka yang bersalah itu akan diadili di dalam *Rapat Bujang Gadis* yang dipimpin atau diketuai oleh Pasirah Bujang. Di balai pertemuan itu biasanya empat orang Pariuga atau Panglaku yang menjalankan perintah, yakni dua orang atas nama *Pasirah Bujang* dan dua orang atas nama *Pasirah Gadis*. Sebelum Pasirah Bujang dan Pasirah Gadis tiba di balai, mereka masing-masing sudah mengangkat dua orang Pariuga yang memerintah dan bertindak atas nama mereka. Para Pariuga ini bertanggung jawab dan menjaga agar semuanya berjalan dengan teratur, tertib dan aman. Mereka juga disertai menjaga dan mengawasi segala perhiasan dan barang-barang berharga yang dibawa orang ke balai, mereka juga mengingatkan para peserta pada apa yang disebut *Cempala rua belas*.

Pariuga berhak pula membunuh siapa saja yang kelihatan menyelinap di bawah balai, setelah orang yang mungkin bermaksud jahat itu dipanggil sampai tiga kali, tetapi tidak mengindahkannya.

Orang yang menonton tarian atau upacara dari luar balai tanpa masuk, dipersalahkan melanggar aturan yang disebut *malang melindung*. Orang itu dikenakan hukuman denda dari satu sampai enam ringgit. Peraturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar supaya orang-orang, terutama gadis-gadis di dalam balai tidak mudah menjadi sasaran dan korban perbuatan yang disebut *tonjok* yakni menusuk dengan senjata tajam (tombak, pedang atau sebagainya) dari bawah penembus lantai. Oleh karena itu orang mengendap-endap di bawah balai itu setelah dipanggil sampai tiga kali, akan tetapi tidak menghiraukan panggilan itu boleh saja dibunuh. (1, p. 470).

Jikalau Pasirah Bujang mendapat perintah dari kepala marga untuk mengumpulkan para bujang dan gadis, maka semua Tuha Bujang Kampung dengan seluruh bujang gadis yang dipimpinnya menuju ke tempat pertemuan yang disebut balai. Jika perintah ini tidak dipatuhi, maka bujang atau gadis yang bersangkutan dikenakan hukuman denda 100 *bongkol* atau *lepat* yakni penganan dari beras atau ketan yang dibungkus dengan daun pisang atau daun kelapa kemudian dimasak, biasanya berbentuk bulat panjang kira-kira 15 – 20 em, atau orang itu membayar denda berupa uang sebesar satu rupiah.

Jika denda yang sudah diputuskan dalam Rapat Bujang Gadis itu dalam waktu yang sudah ditentukan tidak dipenuhi atau dibayar, maka bujang atau gadis itu diajukan dan diadili di depan Rapat Marga. Rapat marga ini menyidangkan dan memutuskan hukuman yang harus dijatuhkan kepada bujang atau gadis tersebut. Namun tidak pernah hal ini sampai terjadi, karena hukuman

yang dijatuhkan oleh rapat marga itu biasanya jauh lebih berat, yakni dari satu atau dua setengah rupiah dahulu sampai enam ringgit.

Biasanya batas waktu denda 100 bongkol itu berakhir pada tanggal 14 (bulan kamariah) berikutnya. Biasanya pada tanggal 14 itu bulan hampir purnama dan malamnya diadakan pertemuan di balai oleh para bujang dan gadis. Pertemuan ini biasa juga disebut *canggot bara*. Denda berupa 100 bongkol atau lepat itulah biasanya dipergunakan untuk konsumsi pertemuan bujang gadis itu.

Jikalau denda itu dibayar dalam bentuk uang, maka uang itu diberikan kepada *Pengetua* bujang gadis itu. Uang itu dipergunakan untuk membeli minyak tanah, lampu, tikar dan sebagainya. Pada waktu ada pesta, kenduri atau sedekah, biasanya pada malam harinya diadakan pertemuan bujang dan gadis di rumah orang yang mengadakan pesta itu. Pertemuan ini disebut *ningkuk*, *bumiah* atau *cupu-cupuan*. Bujang dan gadis duduk berhadapan dalam jarak kurang lebih dua setengah meter. Kemudian dimulailah *aluk-aluk*, *pisdan* atau *nyumbah*, yakni bergiliran menyanyi berbalas-balasan. Pada waktu ningkuk itu seorang pemuda boleh meminjam cincin, selendang atau barang-barang lainnya seperti itu pada seorang gadis. Demikian pula sebaliknya.

Pada tiap tanggal 14 bulan Komariah pada malam harinya di Balai diadakan *canggot bara*. Canggot bara ini dapat pula diadakan padawaktu orang mengadakan suatu pesta besar seperti pesta perkawinan dan sunatan. Biasanya semalam suntuk diadakan nyanyian bersama dan berbalas-balasan. Sebelum mengadakan canggot bara orang yang berkepentingan minta izin dahulu kepada kepala marga atau kepala dusunnya. Sesudah itu barulah orang itu meminta bantuan Pasirah Bujang dan Pasirah Gadis atau kepada Tuha Bujang Dusun dan Tuha Gadis Dusun untuk mengurus pertemuan bujang gadis itu dan menjaga tata tertib serta keamanan pertemuan itu. Setelah para bujang dan gadis berkumpul semuanya, barulah para Tuha Bujang Kampung dan para Tuha Gadis Kampung bersama pergi menjemput Pasirah Bujang dan Pasirah Gadis.

## B. Peraturan Bujang Gadis

Dalam pertemuan resmi, seorang gadis tidak boleh disapa dengan *Mas*. Yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan hukuman denda satu ringgit. Ada yang mengatakan bahwa sebutan *Mas* ialah sebutan untuk isteri kepala marga, tetapi ada juga yang mengatakan sebagai sebutan kepada wanita yang sudah bersuami, sedang isteri kepala marga disebut *Niay*. Jadi sebutan *Mas* kepada seorang anak gadis dapat dianggap menyinggung kehormatan gadis itu atau menyinggung kehormatan kepala marga.

Jikalau orang memanggil seorang gadis dengan *Nyawa*, maka orang itu dikenakan hukuman denda sebesar satu ringgit. *Nyawa* (= jiwa, roh, semangat, atau hidup) di sini berarti: suamiku atau isteriku. Perbuatan ini dianggap juga menyinggung kehormatan gadis yang belum bersuami itu.

Seorang bujang tidak boleh dipanggil *batin*. Orang yang melanggar ketentuan ini dikenakan hukuman denda sebesar satu ringgit. *Batin* adalah pangilan untuk seorang Pasirah yang mendapat gelar Pangeran.

Dalam pertemuan yang resmi di balai orang tidak boleh memakai baju atau jas. Hanya anak-anak Pasirah atau Depati yang boleh datang berpakaian lengkap. Yang melanggar peraturan ini dikenakan hukuman denda satu rupiah dan dikeluarkan dari balai.

Para pemuda atau bujang harus memakai *karuru* atau *dodot*, yakni semacam kain panjang, celana panjang dan sebuah destar atau ikat kepala.

Para gadis memakai sarung, selendang dan *sabidang lunak* yakni kain selendang yang dililitkan di badan sampai di bawah ketiak dan sebuah *sandang* yakni kain selendang yang dipakai untuk memabawa sesuatu yang biasanya disandangkan di bahu atau dipersilangkan di dada.

Pada pertemuan itu balai dibagi dua dengan merentangkan seutas tali setinggi bahu di tengah balai. Bagian yang terpisah itu disebut *pada*.

Seorang pemuda yang hendak menari tidak boleh melilitkan *karuru* atau *dodotnya* di badan. Ia boleh menyelendangkan *karuru* atau *dodotnya* itu jikalau ia berada di luar *pada*. Orang yang melanggar peraturan ini disebut *nyerang pada*, dan dikenakan hukuman denda satu ringgit.

Orang yang menari dan meletakkan lenso atau sapatungannya di bahu atau menutupi begitu saja hulu kerisnya yang disebut *nyampir*, dikenakan hukuman denda satu ringgit. Meletakkan sapatungan dianggap seolah-olah mengenakan baju atau jas. Menurut adat, jika kita berada di balai, maka hulu dan sarung keris harus dibungkus dan diikat rapi dengan kain putih. Jikalau orang hanya *menyampirkan* begitu saja sehelai sapatungan pada hulu kerisnya dianggap seolah-olah mengeluarkan suatu tantangan terhadap para hadirin.

Seorang bujang atau pemuda yang mau menari tidak boleh memakai senjata yang disebut *tumbak lada*. Yang melanggar peraturan ini dikenakan hukuman denda satu ringgit.

Pada upacara atau perayaan resmi keris dianggap sebagai pelengkap pakaian adat dan cara memakainya juga harus menurut peraturan tertentu. Jadi tidak dianggap sebagai senjata untuk menyerang. Akan tetapi jikalau orang memakai senjata tajam yanglainnya atau senjata yang disebut *tumbak lada*, maka hal itu dianggap sebagai tidak menurut adat dan ada bahkan besar kemungkinan orang itu hendak mengundang dan menimbulkan keributan.

Orang dilarang bersandar dengan sikunya pada *pada*. Pelanggaran ini disebut *matah kopi*, dan orang yang melakukannya dikenakan hukuman denda satu ringgit.

Orang yang menonton tarian atau upacara dari luar balai, melakukan perbuatan yang disebut *malang melindung*. Orang yang bersalah ini dikenakan hukuman denda dari satu ringgit sampai enam ringgit.

Orang yang tanpa duduk atau mengambil tempat berjalan terus memanjang balai, melakukan pelanggaran yang disebut *membelah galar*, yang artinya membelah papan-papan lantai itu. Orang ini dikenakan hukuman denda sebesar satu ringgit. Lantai balai itu dibuat dari papan kayu.

Orang yang masuk atau meninggalkan balai tanpa melalui tangga dianggap melakukan pelanggaran yang disebut *kijang malumpak popah* atau *terjun di pulan*. Orang itu dikenakan hukuman denda satu ringgit.

Kijang malumpak popah artinya kijang melompati pagar, sedang terjun di pulau artinya terjun ke dalam hutan.

Tempat yang disediakan untuk para Pangatua tidak boleh diduduki orang lain tanpa idzin. Orang yang melanggar peraturan ini dikenakan hukuman denda satu ringgit. Jadi pada masa itu kita sudah mengenal protokol seperti juga halnya sekarang yang dijalankan orang dalam upacara-upacara resmi.

Seorang bujang yang turut menari harus memakai destar atau ikat kepala dan tidak boleh perhiasan kepala dari pada emas. Yang melanggar peraturan ini dikenakan hukuman denda satu ringgit.

Bujang yang menari itu harus memakai kerisnya dipinggang sebelah kanan. Jikalau tidak, ia dianggap bersalah melanggar peraturan dan dikenakan hukuman denda satu ringgit.

Pada tiap tanggal 14 (penanggalan Islam) tiap pemuda dan gadis, kecuali para Pangatua diwajibkan membersihkan halaman balai. Yang tidak datang tanpa pemberitahuan dikenakan hukuman denda seratus *bongkol* atau *lepat*, yakni penganan yang dibuat dari pada beras atau ketan dibungkus dengan nyiur atau denda uang sebesar satu rupiah.

Seorang bujang atau gadis, jikalau ia berada di dusun dan tidak menghadiri pertemuan di balai tanpa alasan yang sah, maka dikenakan hukuman denda 100 bongkol, atau uang sebesar satu ringgit.

Jikalau sedang berada di balai para pemuda tidak boleh memakai kemul atau selimut. Pemuda itu boleh melipat atau menyampirkan selimutnya di *lapang lelincap* atau *lapang lelincak*, yakni tempat untuk menaruh alat-alat musik. Orang yang melanggar dikenakan denda sebesar satu ringgit.

Orang yang turut menari dan berhenti atau perti duduk sebelum sebuah tarian selesai, dipersalahkan melanggar peraturan yang disebut *meninggalkan aturan*. Orang itu dikenakan denda sebesar satu ringgit.

Orang yang menari di tempat yang disediakan bagi orang-orang yang lebih tinggi pangkatnya dikenakan hukuman denda sebesar satu ringgit. Di balai itu memang sudah disediakan tempat-tempat yang khusus untuk orang-orang tertentu menurut tingkat orang itu.

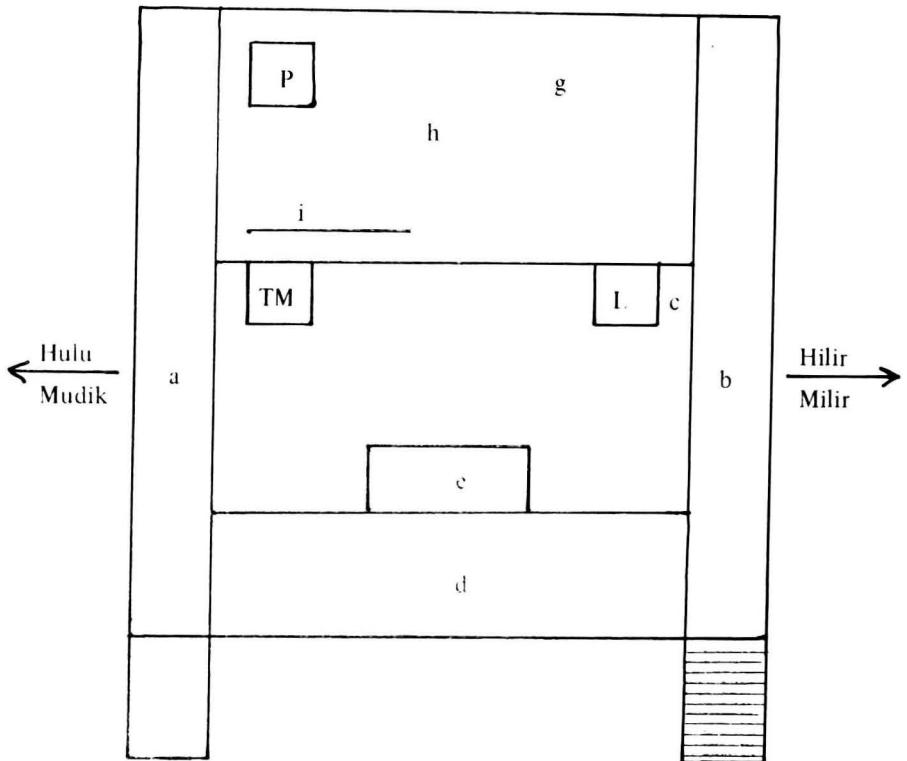
Orang yang menari sendiri tanpa pasangan dikenakan hukuman denda sebesar satu ringgit.

Seorang pemuda yang menyeberang dari tempat untuk para bujang ke tempat yang diperuntukkan bagi para gadis, atau sebaliknya seorang gadis yang menyeberang dari tempat untuk para gadis ke tempat yang diperuntukkan bagi para bujang, dipersalahkan melakukan perbuatan yang disebut *menyerang garis* dan dikenakan hukuman denda sebesar satu tinggit.

Orang yang *melo.gkah belabar* dikenakan denda sebesar satu tinggit. Peraturan ini terkenal terutama di dalam marga Semendaway dan marga Madang. Belabar ialah balok lantai di tengah-tengah balai yang dipasang memanjang balai. Balok ini tidak boleh dilanggar atau dilangkahi.

Siapa yang tidak mau minggir atau memberi ruangan untuk melakukan *tigel*, yakni tarian yang diperuntukkan bagi para pamong atau kepala-kepala adat dikenakan hukuman denda sebesar satu ringgit.

Denah sebuah balai atau *Sesat* (p. 471-472)



## KETERANGAN :

- a. *Lapang lelincap* atau *lapang lelincak*, yakni tempat untuk menaruh *gamelan* atau lat-alat musik.
- b. Tempat untuk menaruh atau menyimpan makanan dan minuman (konsumsi).
- c. *Pada luah* yakni garis antara tiang-tiang. Di luar *pada luah* itulah rakyat atau orang banyak duduk.
- d. *Pada dilom* sama dengan c. di belakang duduk para pemuda.
- e. Tempat para orang-orang berpangkat duduk.
- f. Tempat para orang-orang berpangkat menari.
- g. Tempat duduk para gadis atau para *muli*. Di hadapannya dengan membelakangi orang banyak duduk para pemuda atau *meranay*.
- h. Tempat anak-anak gadis orang-orang berpangkat menari. Selain dari pada itu orang pada menari antara e dan f.
- i. Sebuah kantong atau kocek berisi tombak, klewang dan perisai.
- P. tempat *pepadon*.
- L. *Lampi* yakni di mana ada sebuah peti dengan *alat tari* (tanda-tanda kehormatan) para orang *berpangkat*, dijaga oleh seorang *Pariuga*.
- T.M. Tempat untuk *Tuha Meranay* atau *Pasirah Bujang*.

Dengan ini jelaslah sudah bahwa sudah sejak zaman dahulu bangsa Indonesia sangat memperhatikan soal dan keadaan serta menyadari besarnya potensi para pemuda dan pemudinya, sehingga mereka mengusahakan suatu lembaga pemuda dan pemudi atau bujang dan gadis yang mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kegiatan-kegiatan utama masyarakatnya.

Mereka mempunyai pamong atau pemimpin-pemimpinnya sendiri, mereka mempunyai kegiatan dan peraturan-peraturannya sendiri, dan sebagainya yang dikaitkan dan disangkut-pautkan dengan adat-istiadat. Dengan ini dapat pula kita lihat, bahwa sesungguhnya idee mengadakan "youth-centres" seperti di Bulungan Jakarta dan mungkin di tempat-tempat lain, untuk menyalurkan dan memberi arah kepada kegiatan pemuda-pemudi kita, untuk mencegah kenakalan muda-mudi kita dan membahayakan hari depan bangsa kita, bukanlah idee yang baru, akan tetapi jikalau diteliti sebenarnya sudah lama ada dan sesuai dengan dengan adat-istiadat serta jalan pikiran bangsa kita sejak dahulu.

Landasan pemikiran "youth-centre" atau *Pusat (Kegiatan) Pemuda* sudah ada bahkan berakar di dalam masyarakat kita. Tinggal melanjutkan, menambah, mengganti dan menyempurnakannya sesuai dengan cita-cita pembangunan masya-

rakat kita, seperti juga yang dikatakan oleh pepatah adat kita: *Usang dibarui, lapuk dikajangi* (dikajangi artinya diberi beratap kajang, yakni dari pada anyaman bambu atau daun mengkuang sejenis Pandanus) atau *Usang-usang dibarui, lapuk-lapuk diganti* yang maksudnya aturan yang hampir dilupakan diuar-uar kembali, agar supaya adat atau kebiasaan lama yang jarang dipakai disempurnakan kembali. Hal ini sejalan pula dengan jalan pikiran yang sesuai dengan pepatah adat yang berbunyi sebagai berikut: *Semak-semak disiangi, rimbun-rimbun ditutuh*. Kalau ladang sudah bersemak disiangi, kalau sudah sangat rimbun ditutuh. Maksudnya ialah barang sesuatu hendaklah dijaga dan dipelihara, agar supaya selalu baik keadaannya. Jikalau hal ini dikenakan kepada adat atau peraturan agar yang sudah diabaikan dan sudah dilupakan akan tetapi masih baik dan sesuai dengan keadaan seta kemajuan zaman, dihidupkan dan dikeraskan kembali. Adalah suatu aib dan malu besar bagi kita bangsa Indonesia jikalau predikat atau sebutan *tidak tahu adat* atau *kurang adat* (= kurang ajar) sampai dialamatkan kepada kita.

Demikianlah kata *ADAT* banyak dipergunakan di dalam bahasa Indonesia dan menunjukkan bahwa adat dan/atau adat-istiadat itu suatu hal yang amat penting artinya di dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Beberapa contoh, misalnya :

1. *Mengisi adat* berarti menjalankan adat kebiasaan atau memenuhi kewajiban.
2. *Tahu adat* artinya sopan, tahu bahasa.

Jadi jelas bahwa orang yang tahu atau mengerti adat selalu dianggap orang yang bai, luhur dan mulia, akan tetapi sebaliknya orang yang tidak tahu adat selalu dianggap orang yang tidak baik, kasar, bahkan jahat.

Selain dari pada itu, seperti yang kami sudah katakan di depan tadi untuk mencegah urbanisasi atau pelarian ke kota-kota besar dan untuk menggairahkan hidup di desa-desa yang menjadi tulang punggung masyarakat Indonesia dan membuat orang betah tinggal di desa-desa, maka desa-desa perlu diberi daya tarik yang kuat. Dan di dalam adat-istiadat kita pun masih cukup banyak terpendam mutiara-mutiara hibup yang jikalau digali dan digosok kembali dengan baik, masih dapat mencemerlangkan kehidupan masyarakat dan bangsa kita.

Maka di sini kiranya pepatah adat: *Usang-usang dibarui, lapuk-lapuk diganti* dan *Semak-semak disiangi, rimbun-rimbun ditutuh* atau *Usang dibarui, lapuk dikajangi* bukanlah tidak pada tempatnya untuk dikemukakan dan dianjurkan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BAB VII

1. *Adatrechtbundels*, XXXII, Zuid Sumatra, s'Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1930.
2. Boedenani dan Djavid, *Tambo Kerajaan Sriwijaya*, Cetakan kedua, Penerbit Terate, Bandung, 1961.
3. De Roo de Faille, P., *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, Penerbit Bhratara, Jakarta, 1971.
4. Jawatan Kebudayaan Dep. P. dan K., *Undang-Undang Simbur Cahaya*, Jawatan Kebudayaan Dep. P. dan K., Jakarta.
5. Van den Berg, L.W.C., *Rechtsbronnen van Zuid Sumatra*.
6. Van Sevenhoven, J.L., *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, Bhratara, Jakarta, 1971.

### BAB VIII

1. *Adatrechtbundels*, XXVII, Zuid Sumatra, No. 67, s'Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1928.
2. *Adatrechtbundels*, XXXII, Zuid Sumatra, s'Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1930.
3. Bhruddin Z.A., *Adat-istiadat Marga Buay Pemaca Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan dan Komering Ulu*, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Palembang, 1970.
4. Boedenani dan Djavid, *Tambo Kerajaan Sriwijaya*, Cetakan kedua, Penerbit Terate, Bandung, 1961.
5. Ishak Burhanuddin, *Sistim Kekerabatan Marga Djedjawi Ketjamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan dan Komering Ilir*, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Palembang, 1971/1972.
6. Mansjar Manaf, M., *Adat-istiadat Penduduk Bangka Selatan*, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, 1968/1971.
7. Van Sevenhoven, J.L., *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, Bhratara, Jakarta, 1971.
8. Yayasan Basis, *Guide Book Kota Palembang*, Yayasan Basis, Palembang,

### BAB IX

1. *Adatrechtbundels*, XXXII, Zuid Sumatra, s'Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1930.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

2. *Adatrechtbundels X* (gemengd). Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indie, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff 1915. Zuid Sumatra No. 14.
3. *Adatrechtbundels serie I Zuid Sumatra No. 24*, Adat inkomsten der Marga en Zelfstandige pasar hoofden in het gewest Bengkoelen (1909).
4. *Adatrechtbundels XVIII* gemengd Serie I Zuid Sumatra No. 32.
5. *Adatrechtbundels XXXII* Zuid Sumatra, 's Gravenhage Martinus Nijhoff, 1930.
6. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indie*, uit gegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indie. Vijfde Volgreeks Negende deel (deel XLIII der geheele reeks), 's Gravenhage, Martinus Nijhoff 1894, Oendang-oendang Simboer Tjahaja van Bengkoelen.
7. Boedenani dan Djavid, *Tambo Keradjaan Sriwidjaja*, cetakan kedua, Penerbit Terate, Bandung, 1961.
8. De Roo De Fille, P., *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, Bhatarata, 1971, Jakarta.
9. Pamoentjak, K. St., *Peribahasa*, cetakan kedua, Balai Pustaka 1946.
10. Purwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1952.
11. *Undang-undang Simbur Tjahaja* yang terpakai di pedalaman Palembang. Diterbitkan oleh Bagian Bahasa Djawatan Kebudayaan, Kementerian P.P. dan K. Djakarta.
12. *Undang-undang Adat Lembaga Oenderafdeeling Manna* yang ditetapkan dengan permufakatan antar segala kepala-kepala disana pada tgl. 9 Mei 1910, 21 Mei 1910, 29 Djuli 1911, dan 7 Djuli 1913 disahkan dengan Besluit Resident Bengkulu tertanggal 18 Nopember 1911 No. 456 dan 12 Desember 1913, No. 577.

Perpustakaan  
Jenderal Ker...

959.8  
SUM